

ISBN 978-602-50161-1-0

PROSIDING

SEMINAR NASIONAL IAPA RIAU KEPRI 2019

***COLLABORATIVE GOVERNANCE DAN INOVASI
KEBIJAKAN DALAM PEMBANGUNAN DAERAH***

PEKANBARU, 21-22 OKTOBER 2019



PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK FISIP UNIVERSITAS RIAU
IAPA WILAYAH RIAU KEPRI

PROSIDING

SEMINAR NASIONAL IAPA RIAU KEPRI 2019

Collaborative Governance dan Inovasi Kebijakan
dalam Pembangunan Daerah

Pekanbaru, 21-22 Oktober 2019

Penerbit
Program Studi Administrasi Publik FISIP Universitas Riau
Bekerjasama IAPA Wilayah Riau Kepri

Prosiding
SEMINAR NASIONAL IAPA RIAU KEPRI 2019
“Collaborative Governance dan
Inovasi Kebijakan dalam Pembangunan Daerah”

Organizing Commite:

Ketua : Dr. H. Zaili Rusli SD, M.Si
Wakil Ketua : Dr. Febri Yuliani, M.Si
Sekretaris : Abdul Sadad, S.Sos, M.Si
Wakil Sekretaris : Dr. Hasim As'ari, S.Sos, M.Si
Bendahara : Mayarni, S.Sos, M.Si
Wakil Bendahara : Mimin Sundari, S.Sos, M.Si
Seksi Kesekretariatan : Syofian, S.Sos, M.Si
Risky Arya Putri, S.Sos, M.Si
Seksi Acara : Geovani Meiwanda, S.Sos, MPA
Seksi Humas : Zulkarnaini, S.Sos, M.Si
Seksi Perlengkapan : Khairul Amri, S.Sos M.Si
Bamba Indaris. SP
Handhika Yudha, SP
Seksi Transportasi : Dr. Harapan Tua RFS M.Si
Seksi Konsumsi : Dr. Ernawati, M.Si
Alfi Darwiyanti, Amd

Reviewer

Prof. Dr. H. Sujianto, M.Si
Dr. Adianto, S.Sos, M.Si
Dr. Hasim As'ari, S.Sos, M.Si

Editor

Zulkarnaini, S.Sos, M.Si
Mimin Sundari Nasution, S.Sos, M.Si
Dedi Kusuma Habibie, S.IP, MPA
Khairul Amri, S.Sos M.Si
Risky Arya Putri, S.Sos, M.Si

Layout :

arnain_99

Desain cover:

Syamsul Witra

Penerbit:

Program Studi Administrasi Publik FISIP Universitas Riau
Bekerjasama IAPA Wilayah Riau Kepri

Alamat Penerbit:

Kampus Binawidaya Simpang Baru, Pekanbaru 28293
Telp (0761) 63267; Fax (0761) 65804
E-mail: admpublik@unri.ac.id

Cetakan I, Desember 2019

All rights reserved

Do not reproduce this paper in the form and
In any way without the written permission of the publisher

ISBN: 978-602 -50161-1-0

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah_Nya prosiding ini dapat diterbitkan pada waktu yang sudah ditentukan. Prosiding ini berasal dari Seminar Nasional dan Workshop Konten Mata Kuliah *Indonesian Assosiation For Public Administration* (IAPA) Wilayah Riau Kepri bekerjasama dengan Program Studi Administrasi Publik. Kegiatan seminar ini diadakan pada hari Senin dan Selasa, 21 – 22 Oktober 2019 yang bertempat di Grand Suka Hotel Pekanbaru.

Indonesian Assosiation for Public Administration (IAPA) Wilayah Riau Kepri berinisiatif mengulas perubahan paradigma pembangunan daerah *from government to governance*. Oleh karenanya salah satu wadah untuk mengkaji secara mendalam perubahan tersebut, melalui kegiatan Seminar Nasional dan Workshop Konten Mata Kuliah *Indonesian Assosiation For Public Administration* (IAPA) Wilayah Riau Kepri bekerjasama dengan Program Studi Administrasi Publik. Tema yang digagas untuk kegiatan ini adalah “***Collaborative Governance dan Inovasi Kebijakan dalam Pembangunan Daerah***”.

Tema ini didasari oleh kebutuhan Pemerintah Daerah dalam mengembangkan kerjasama dengan seluruh *stakeholders* dalam membangun wilayahnya dan berinovasi dalam setiap penyusunan kebijakan guna menjawab setiap permasalahan masyarakat di daerah. Ilmuan administrasi publik memiliki peranan dalam memberikan sumbangan pemikiran penerapan *collaborative governance* dan pengembangan inovasi kebijakan dalam pembangunan daerah yang sesuai dengan kebutuhan publik. Untuk itu, kegiatan ini membuka peluang kepada setiap ilmuan adminitrasi publik dalam memberikan ide dan gagasannya dalam implementasi pembangunan daerah sesuai dengan tema yang ditetapkan.

Terima kasih diucapkan kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya kegiatan dimaksud sampai dengan terbitnya prosiding ini ke tangan pembaca sekalian.

Pekanbaru, Desember 2019

Editor

DAFTAR ISI

PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	iv
MAKALAH UTAMA	
Collaborative Governance For Poverty Alleviation: A Study about Systematic Mapping Study <i>Muh. Azis Muslim, Eko Prasajo, Lina Miftahul Jannah</i>	1
MAKALAH PESERTA	
Inovasi Kebijakan <i>E-Office</i> Pemerintah Provinsi Riau dalam Mewujudkan Pembangunan Daerah Berkelanjutan <i>Rissa Oktaviana, Khairunsyah Purba, dan Arif Budi Setiawan</i>	17
Dinamika Adopsi Inovasi Lokal di Kawasan Minapolitan Kabupaten Kampar <i>Adianto</i>	24
Konflik Perebutan Pulau Berhala antara Provinsi Jambi dan Provinsi Kepulauan Riau <i>Mahmuzar, Candra Jon Asmara, Rusdi, dan Afrinaldy Rustam</i>	34
Partisipasi dan Aksi Kaum Millennial untuk Melawan Informasi Hoaks pada Pesta Demokrasi Pemilu Presiden 2019 <i>Made Devi Wedayanti</i>	42
Inovasi Pelayanan Publik Berbasis <i>E-Government</i> Melalui Aplikasi Sistem Pelayanan Terpadu (SIPADU) di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru <i>Akhilakul Karimah dan Disya Anggreni M</i>	51
Dependensi Komunitarian Nelayan Wilayah Pesisir Tapal Batas; Studi Komunitas Nelayan Rupert Utara <i>Geovani Meiwanda, Nur Laila Meilani, dan Resa Vio Vani</i>	58
Analisis Faktor Kelembagaan, Kualitas SDM, Modal dan Strategi Pemasaran terhadap Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif <i>Achmad Sjafi'i, Zaenal Fanani, dan Anggraeny Puspaningtyas</i>	64
Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Program Desa Maju Inhil Jaya pada Kawasan Tertinggal Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir <i>Muammar Alkadafi dan Desma Elita</i>	73
Implementasi Kebijakan Tata Kelola Sampah di Kota Pekanbaru <i>Hasim As'ari</i>	84

Analisis Strategi Bersaing Kelompok Usaha Bersama (KUB) Menghadapi Persaingan di Era Revolusi Industri 4.0 <i>Helen Susra, Essy Desmita, dan Rini Angraini</i>	93
Efektivitas Sistem <i>E-Procurement</i> dalam Pelelangan Umum Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau <i>Grestary Dwi Wanti, Vina Museliza, dan Ijalnoer</i>	102
Pengembangan Masyarakat di Kabupaten Pelalawan Melalui Program <i>Corporate Social Responsibility</i> oleh PT. Riau Andalan Pulp and Paper <i>Made Devi Wedayanti</i>	110
Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Riau dengan Pendekatan Kemiskinan Multi Dimensi <i>Hasan Warso</i>	122
Partisipasi Masyarakat dalam Pengolahan Lahan Tanpa Bakar di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis <i>Febri Yuliani dan Rosnita</i>	134
Si Maskot yang Tersingkir: Efek Kebijakan Pengembangan Destinasi Pariwisata Kota Solok <i>Era Sonita</i>	144
Dinamika Kebijakan Pembangunan Pariwisata di Pulau Rupat Kabupaten Bengkalis <i>Meyzi Heriyanto, Adianto, dan Hasim As'ari</i>	150
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Catrans (Calon Transmigrasi) di UPT Padang Tarok Sp-1 Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat <i>Weli Eraywana, Yesi Nazila, dan Indri Islamiati</i>	165
Pemetaan Masalah Sosial-Pembangunan di Provinsi Riau <i>Rodi Wahyudi dan Puja Afwanda Mayako</i>	173
Optimalisasi Pengelolaan Pembangunan Kawasan Tertinggal dan Kawasan Perbatasan di Provinsi Riau <i>Rafiah Putri</i>	182
Pelayanan Administrasi Kependudukan bagi Suku Talang Mamak Pasca Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 di Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu <i>Wifa Dika Kartini dan Muhammad Yazid Fauzi</i>	189

Inovasi Mal Pelayanan Publik dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan Prima Kota Pekanbaru <i>Evi Zubaidah dan Ema Fitri Lubis</i>	197
Governansi Digital dan Hoax <i>Rino Ardhian N, Teguh Budi S, Daffa Rifqi U, dan Apneta Vionuke D</i>	203
Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Teknologi Aplikasi Siskeudes untuk Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa <i>Amalia Rahmadani Ilham dan Adinda Qori</i>	208

Collaborative Governance For Poverty Alleviation: A Study about Systematic Mapping Study

Muh. Azis Muslim, Eko Prasajo, Lina Miftahul Jannah

FIA Universitas Indonesia

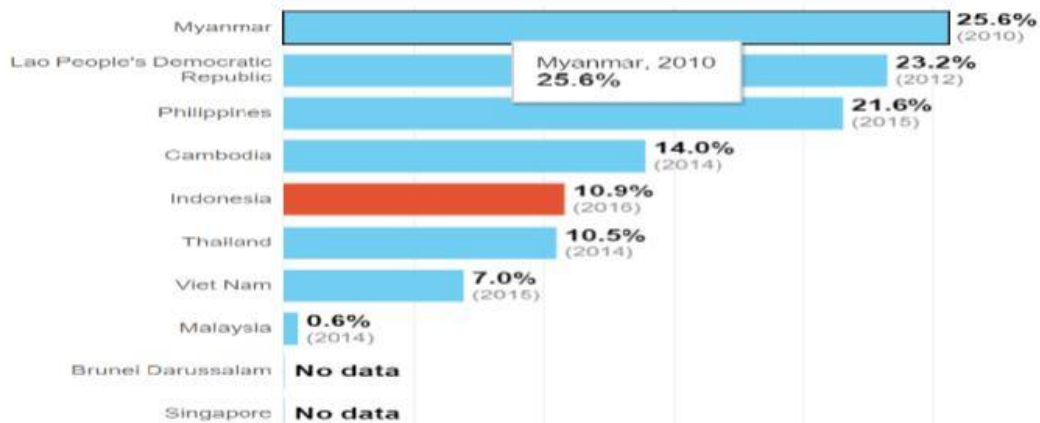
Abstract

This study aims to map the development of Collaborative Governance studies through the Systematic Mapping Study and relate it to the mitigation of poverty in order to obtain the current research position. The result of the study shows that research on Collaborative Governance for Poverty Reduction falls into the focus of Community Social Problems and it has the lowest research percentage. In other words, the number of studies on this matter is still limited. The research method that is widely used for the topic of Collaborative Governance is qualitative and publication trends show very significant developments, especially between 2014 to 2018. Since the concept is relatively new, the opportunity to produce a variety of renewal is very large.

Keywords: Collaborative Governance, Poverty, Systematic Mapping Study

INTRODUCTION

The motivation behind this research arises from the global problem faced by all countries in the world, namely poverty. The problem of poverty is complex and multi-dimensional, so the solution would also require a multidimensional, integrated and sustainable approach. Starting from this point, the concept of Collaborative Governance is an important element that will be discussed in this study. The problem of poverty in particular also occurs in Southeast Asian countries and even in Indonesia. The data released by the Asian Development Bank (ADB) shows that Indonesia ranks fifth with the highest number of poor people (the percentage of the poor compared to the total population of the country). The poverty data from ADB can be seen in Figure 1 below.

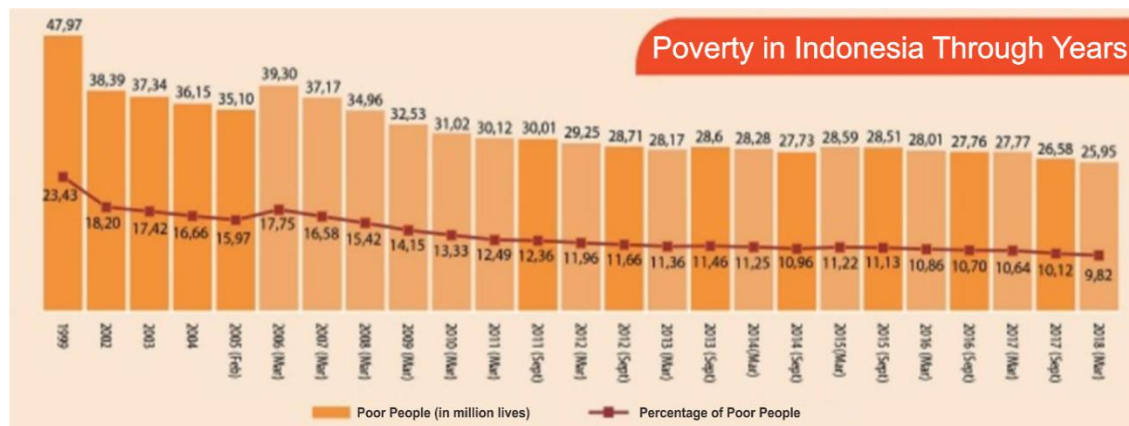


Picture 1. The Population of the Poor in Southeast Asia

Source: www.adb.org

In the context of poverty in Indonesia, the concept of poverty is defined as the ability of a person or household to obtain primary needs that include clothing, food, and shelter. This understanding is also known as the basic need approach. Through this approach, the number of poor people in Indonesia—according to the survey from the Central Statistics Agency in 2018—is 25.95 million people or 9.82% of the total Indonesian population. Although this number still stood at tens of millions of people, the track record of the development of poverty mitigation in Indonesia shows a

significant achievement. This is shown in the statistics on the development of poverty in Indonesia by the Central Bureau of Statistics which can be seen in Figure 2. below:



Referring to the data published by BPS on *bps.go.id*, it can be seen that in September 2017 there were 26.58 million people (10.12 percent) who fell into the category of poor (people who spend per capita per month are below the poverty line) decreased by 1.19 million when compared to March 2017 at 27.77 million (10.64 percent). The composition of poverty in urban areas and rural areas showed that in March 2017 the percentage of urban poor at 7.72 percent fell to 7.26 percent in September 2017, while for rural areas in the same period it was 13.93 percent and a decrease of 13.47 percent in September 2017.

Looking at the mitigation of national poverty, statistical data has shown that compared to poverty levels in the 1970s, the current poverty rate has experienced a significant decline. However, there was a period when the decline in poverty had slowed down in the past decade. At the beginning of 2015, there was an increase according to the Central Statistics Agency (BPS) data. In March 2015 the poverty rate reached 28.59 million people (11.22 percent). The data shows a higher poverty rate compared to the data in September 2014, which reached 27.73 million people or at 10.96 percent. Poverty level that is still relatively high indicates that there are problems with the government policies in poverty reduction.

In the practice of handling various problems faced by the regions, governance dynamics will influence the process. The same thing also happens in dealing with the existing poverty issues. The abundant policies and programs prepared and the involvement of many institutions become meaningless when they are not assisted by good governance. Collaboration involving many parties to achieve the same goals can be understood as collaboration. Practically, Mattessich et al. (2001) describe collaboration as an effort to unite several organizations that are previously unrelated to merge into a new structure with a commitment to cooperation in an effort to achieve the same goal. This dynamic is interesting to study and its application as a trend and phenomenon needs a further review.

Collaborative Governance has been utilized to deal with various complex problems such as handling the environment, security, corruption and various problems involving many parties. The differences are namely the focus of the problem, structure, process, purpose and impact. Since there are many differences in conducting studies on collaborative governance practices, this has become an attraction for conducting further studies on different issues. The practice of collaboration can be applied at different

levels of analysis and it can cover international, regional, national or sub-national scale or at a certain regional level. Each level certainly has different characteristics, dynamics and patterns referring to the parties and stakeholders involved in the process. The existing differences have become the bases and the main attraction for further studies. The researcher was interested in conducting a systematic mapping of the practice of collaborative governance in relation to handling the problem of poverty. In this study, five sources were used as references. The five sources are Scopus, Oxford Academic, ProQuest, Sage, JSTOR. These sources were chosen as the basis for looking at the problem of Collaborative Governance in answering the problem of poverty holistically. More specifically, they are used to answer the following three research questions:

1. How is the spread of focus on the topic of Collaborative Governance? What is the position of research on poverty as one of the focuses of the Collaborative Governance?
2. What are the methods and types of research from the mapping that has been done?
3. What are the trends of the publication of Collaborative Governance research from time to time (2013-2019)?

The concept used in this study is Collaborative Governance, and the concept of poverty. The two concepts are interrelated. Collaborative Governance is trusted by experts as a solution to chronic social problems that were previously difficult to solve through various pragmatic efforts. One of these problems is poverty.

Collaborative Governance

The first concept to be explained is Collaborative Governance. The understanding of the concept of Collaborative Governance can be viewed from several aspects. Firstly, from the etymology side. Collaborative Governance consists of two entities, namely the "Collaborative" entity and the "Governance" entity. "Governance" as the main pillar with its complement called "Collaborative". The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific notes "Governance" as a process of making decisions by which the decision is implemented. Emerson, Tina and Stephen (2011) noted "Governance" as an activity "to govern" or govern / rule / manage. "Collaborative" in the context of public administration is a condition when every stakeholder cooperates with the government to develop a public policy to solve public problems (Purdy, 2012). The two entities then merged into the concept of "Collaborative Governance" described by Purdy (2012) as: "a process that seeks to share power in decision making with stakeholders in order to develop shared recommendations for effective, lasting solutions to public problems".

The concept of Collaborative Governance is seen by Purdy (2012) as a collaborative process of power from several stakeholders to develop effective and sustainable solutions. Emerson, Tina and Stephen (2011) define Collaborative Governance as: *"the processes and structures of public policy decision making and management that engage people constructively across the boundaries of public agencies, levels of government, and/or the public, private and civic spheres in order to carry out a public purpose that could not otherwise be accomplished"*.

The points that can be drawn from the definition by Emerson, Tina and Stephen (2011) are that Collaborative Governance is a process that occurs across borders (across the boundaries); involving several executors from various sectors and strive to achieve a vision that cannot be achieved without collaboration between them. Cross-border means

that the activities of achieving mission and the preparation of solutions are not only done in a fragmented manner separated by lines of separation of authority. The problems faced by public are not faced by individuals but instead together as a group. These cross-border points are related to the next point, namely the actors involved in Collaborative Governance. Emerson, Tina and Stephen (2011) explained that there are three parties involved, namely public sector and government, private sector and civic spheres. Authority, power, and resources are merged in collaboration to achieve solution. This is what is meant by the third point in the definition of Collaborative Governance by Emerson, Tina and Stephen (2011) that there is a goal that can only be achieved when there is performance collaboration between actors / authorities / stakeholders. Therefore, etymologically, Collaborative Governance is a decision-making process that involves the stakeholders from the public sector, the private sector, the non-private sector, and the community to solve public problems.

McDougall (2013) asserted that the parties or the sectors project have three distinct characteristics, which are: 1) consciously and explicitly base decision making in social learning and critical reflection, 2) emphasize inclusion and equity in governance and 3) strive for balanced and strategic relations with other aktors or groups, including seeking to effectively manage conflict.

Emerson and Nabatchi (2012) explained further about Collaborative Governance through illustrations of interrelated component boxes. The components in the Collaborative Governance framework are three main boxes. The outer box is called the system context, the box in the middle is the Collaborative Governance regime, and the inner box or core box is the dynamics of collaboration. System context is an environment where public problems occur or can be understood as the context in which the collaboration process is carried out. The context of this system includes social conditions that occur at a particular place and time. These conditions include political aspects, applicable regulations or legalities, socioeconomic conditions of the community, geographical conditions, and other environmental factors. The context of this system gives influences in two forms, which are opportunities and constraint. The two forms of influence directly affect two boxes within the Collaborative Governance framework, namely the collaboration regime and the dynamics of collaboration. The two influences metamorphose into the drivers that provide input and determine the direction of the dynamic process of collaboration that occurs. Drivers that appear can be public problems or shared problems, uncertainty, interdependence, and so on.

The second box is the Collaborative Governance regime. Drivers that emerge from the outermost box (context) are then adapted by the existing regime to be further processed in the box of collaboration dynamics. The regime referred to is "*sets of implicit and explicit principles, rules, norms, and decision-making procedures around which actors*" (Krasner in Emerson, Tina and Stephen, 2011). The principles, rules, norms and procedures adopted by a particular regime in a particular region at certain times directly influence the process of collaboration dynamics that occurs in the next box in the Collaborative Governance framework.

The third box or core box of the Collaborative Governance framework is a box of collaboration dynamics. There are three components that interact with each other in this dynamic box, namely principled engagement, shared motivation, and capacity for joint action. The first component is the principle relationship, which is a basis that becomes the foundation of the binding collaboration between the actors involved. This component consists of several things, namely discovery, definition, deliberation and

determination. Discovery is when the actors find a problem. Definition is a defining process of a problem that is found. Deliberation is an in-depth discussion between actors to consider collaborative activities. Determination is the intention / determination between actors to be involved in a collaborative problem solving. The second component is collective motivation which is held firmly with commitment. The things covered in this second component are mutual trust, mutual understanding, internal legitimacy, and shared commitment. Illustration of the form of a Collaborative Governance framework can be seen in Figure 3. below.

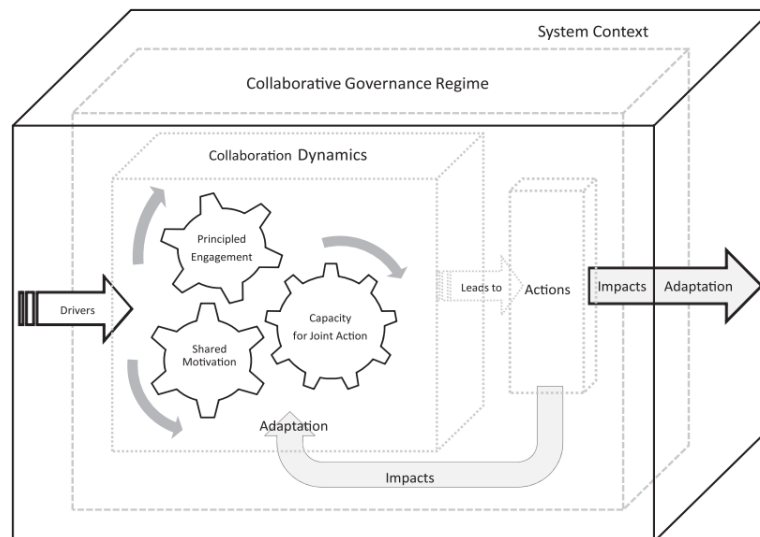
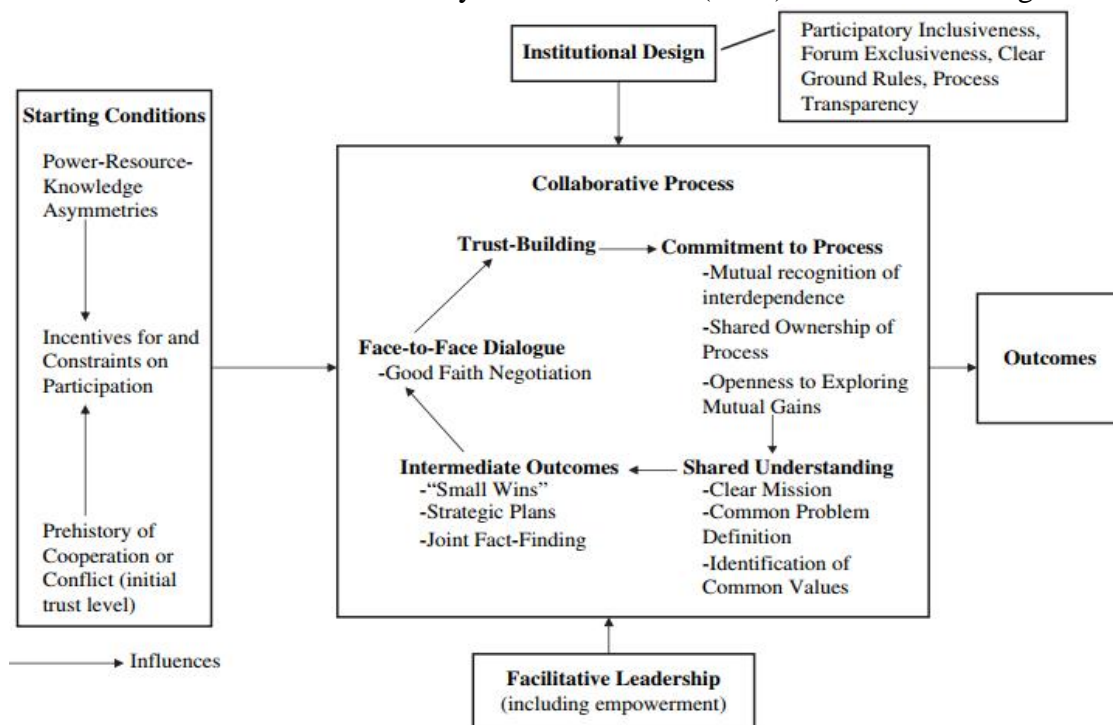


Figure 3. Collaborative Governance sebagai Kerangka Kerja

Source: Emerson and Nabatchi, 2012

Ansell and Gash (2007) have previously developed a Collaborative Governance model. The visible characteristics also dwell on a process from input to output. The input component described by Ansell and Gash (2007) is called the "Starting Conditions". This initial condition is formed from two main factors, namely the existence of asymmetry of power, resources, and knowledge; and the history of cooperation and also conflicts that have occurred. Ansell and Gash (2007) refer to the factors as "Incentives for and Constrains on Participation". This condition is a bargaining power that encourages or inhibits the intention between actors to initiate collaboration. The existing input components become influences or materials which then enter into the process component. The process component is called "Collaborative Process" and it consists of five stages. First, the stage of interface dialogue or direct dialogue between collaborating actors. Second, developing trust between actors. Third, the stage of implementing commitment to the collaborative process consists of three things, namely the awareness of mutual dependence between actors, the sense of belonging of the process (shared ownership of process), and mutual openness. Fourth, the stages of achieving mutual understanding. The fourth stage consists of three things, namely the existence of a clear mission, the existence of a clear problem definition, and the existence of mutually agreed values. Fifth, short-term output stages of production. Long-term products from "Collaborative Process" are long-term output or outcomes. "Collaboration Process" is influenced by the institutional design of the actors involved. The point that distinguishes the opinion of Ansell and Gash (2007) with Emerson (2011)

and Biddle (2014) is the "Facilitative Leadership" component that influences, empowers, and develops the process stage of the "Collaboration Process". The description of the Collaborative Governance model by Ansell and Gash (2007) is illustrated in Figure 4.



Picture 4. Model of Collaborative Governance According to Ansell and Gash
Source: Ansell and Gash, 2007

Poverty

The next concept in this research is the concept of poverty. The definition of poverty has different meanings depending on the culture and level of economic development of a region (Gupta, 1987: 5). The definition of poverty is a minimum standard of quality of life. The context of minimum here is the lack of meeting an individual's needs compared to the standard of needs that are common in the area or in the community where the person is living. The impact of the lack of quality of life for individuals who experience it is health disorder, morals, and feelings towards the level of self-esteem that is branded as poor (Suparlan, 1984: 12). Furthermore, Suparlan (2003: 64) defines poverty as a state of shortage of valuable assets and objects suffered by a person or group of people living in a poor environment, so that various fulfillment of needs as human beings becomes completely limited or inadequate. In line with the previous view, Gilarso (2004: 412) states that poverty is a condition where the population cannot fulfill basic needs because there is no income to obtain them. The World Bank (WB) (in Chamsyah, 2006: 16) explains: "*Poverty is a concern with absolute standards of living of the poor in the equality of standards across the whole society.*" To put it simply, the World Bank in the year 2000 sees poverty as a deficiency, which is often measured by the level of welfare (Saparudin, 2014: 3).

Marianti and Munawar (in Saparudin, 2014: 3) argue that poverty is a multidimensional phenomenon, defined, and measured in many ways. In many cases, poverty has been measured by welfare terminology related to the economy, such as income and consumption. A person is said to be poor if he what makes is below the

minimum level of welfare that has been agreed upon. It is true that poverty is a problem arises from low income, but it is not the only source of poverty, which is a complex problem. By incorporating more comprehensive considerations such as health and education, the United Nations defines poverty as a condition where individuals have no choice and opportunity to develop their life capabilities. In other words, poverty is a pronounced deprivation in well-being condition or a continuous decline in quality of life (Stamboel, 2012: 16).

According to World Bank (2000) in Tostensen and Kessy (2008: 1), poverty has three dimensions, which are deprivation where the condition of poverty can indicate that someone is deprived of basic needs such as food, shelter, education, or health. Second, vulnerability where the poor are vulnerable to the ever-changing situations, such as economic fluctuations, natural disasters, or war. Third, powerlessness is a condition characterized by a lack of skills, so that the person is struggling to get out of the poverty line.

Normatively, poverty can be divided into two categories (Chamsyah, 2006: 16). First is absolute poverty that is if the level of income is lower than the defined poverty line, or in other words the amount of income is insufficient to meet the minimum living needs reflected in the absolute poverty line. The lowest income level or commonly known as the minimum wage is the dividing point between two conditions, namely poor conditions and non-poor conditions. This point is also known as the poverty line (Esmara, 1986: 14). Second, relative poverty is a state of comparison between income groups in society, namely groups that may not be poor because they have higher income than the poverty line, and relatively richer community groups. The point is when an individual is above the poverty line but when compared to the general ability of the community where the individual lives is still lower, it can be said that the individual can still be categorized as poor (Esmara, 1986: 15). Another view explains poverty can be divided into three categories (Chalid, 2006: 6.3-6.4). First, natural poverty is poverty caused by natural causes. For example, geographical conditions that do not support basic fulfillment or slow technological development. Second, structural poverty, namely poverty caused by the inability of a group or community to form an institution capable of mastering production factors or economic facilities. Third is cultural poverty, namely poverty related to tradition or the mentality of a lazy population. Another category of poverty is the level of vulnerability of poverty, where poverty is divided into chronic poverty or structural poverty and temporary poverty (Sumodiningrat, 2009: 5). Structural poverty or also called chronic poverty generally takes place in a sustainable manner. Temporary poverty usually takes place in a shorter period of time and is caused by sudden economic changes or an economic crisis (Chamsyah, 2006: 20-21). Third is cultural poverty, namely poverty related to tradition or the mentality of a lazy population. Another category of poverty is the level of vulnerability of poverty, where poverty is divided into chronic poverty or structural poverty and temporary poverty (Sumodiningrat, 2009: 5). Structural poverty or also called chronic poverty generally takes place in a sustainable manner. Temporary poverty usually takes place in a shorter period of time and is caused by sudden economic changes or an economic crisis (Chamsyah, 2006: 20-21).

RESEARCH METHOD

Understanding the research position (State of the Art) is important in conducting a study. Based on this, researchers can find out whether the research carried out really has

novelty or something new in its findings. Thus, in order to find a research position on the topic of Leadership in Collaborative Governance for Poverty Reduction, researchers conducted a Systematic Mapping Study. Researchers use electronic databases to find articles that discuss Collaborative Governance (CG).

The tools of analysis used in this study are the Systematic Mapping Study. According to Kitchenham (2004) the Systematic Mapping Study (SMS) is a secondary study rooted in Study Literature Review (SLR), which was initially introduced to medical research. The implementation of SLR is to identify, evaluate, and interpret all available and relevant literature related to research questions or domains of interest (Kitchenham. B, 2004, 2007; Petersen et al., 2008). Kitchenham (2004) states that the main reasons for conducting SLR are: first, summarize the available evidence on the topic; second, to identify gaps in current research and provide suggestions for future investigations; and third, to provide a background for positioning new research activities.

Research Questions

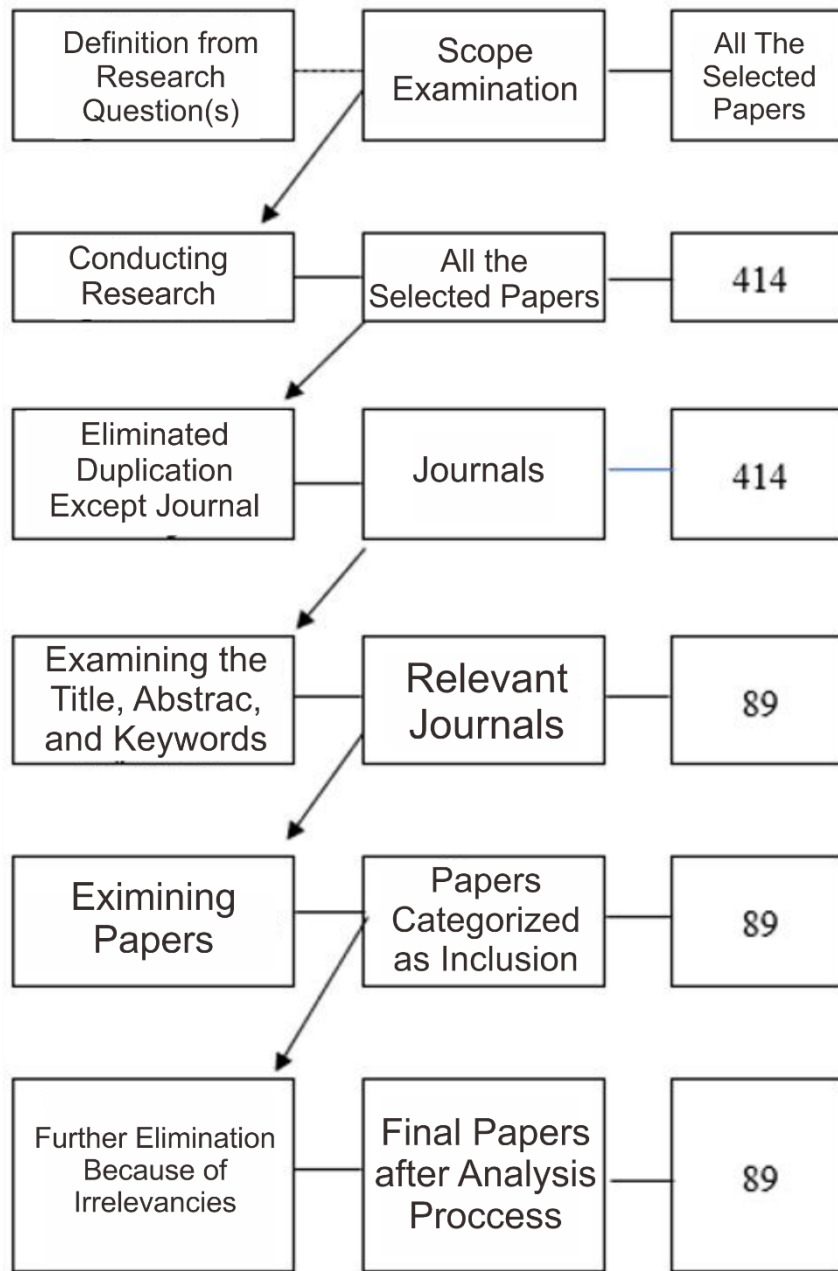
The research question in this paper is to concentrate on categorizing research with the topic of Collaborative Governance and the position of poverty research as one of the focuses in Collaborative Governance research. Below is Table 1 that shows the overall research questions:

Questions	Descriptions
How is the spread of research focus on the topic of Collaborative Governance? What is the position of research on poverty as one of the focuses of Collaborative Governance?	The result provides a general description of the distribution of the focus of Collaborative Governance research. In addition to that, the results also show how the position of poverty research is one of the focuses in Collaborative Governance research.
What are the methods and types of research from mapping that have been done?	Investigation of methods and types of research. The results of the investigation can show the research gap from previous research.
What is the trend of the publication of Collaborative Governance research from time to time (2013 to 2019)?	This question shows trends from the publication of Collaborative Governance research from time to time (2013 to 2019)

(Source: Modified by the researcher according to Banaeianjahroni & Smolander, 2016).

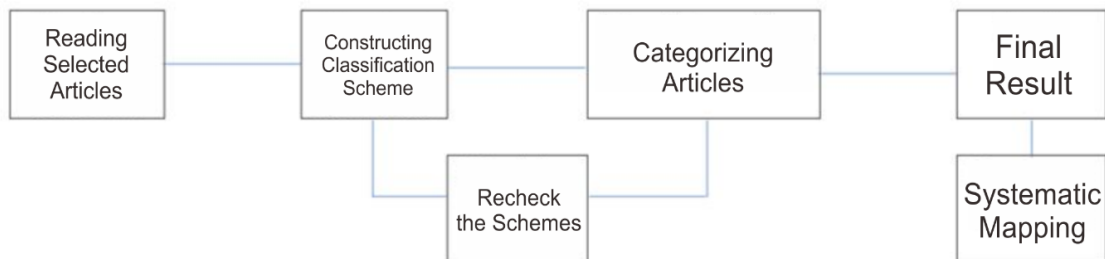
Steps of Findings

The SMS study in this research adopted an investigation process from Petersen et al. (2008). In this SMS process, every step that is taken has results and systematic maps. In Figure 5, the researcher illustrates the complete SMS process used in research, referring to research conducted and according to instructions by Kitchenham (2004) and Petersen et al (2008).



Picture 5. SMS Inclusion Process

Source: (Kitchenham, 2004; Petersen et al, 2008)



Picture 6. Classification Process

Source: (Petersen et al., 2008)

Source of Data

Researchers conduct searches online on electronic databases with the following description:

Source Name	All CG Journals	Journals	Relevant Journals
Scopus	331	331	37
Oxford Academic	14	14	11
ProQuest	29	29	18
Sage	20	20	12
JSTOR	20	20	11
Total	414	414	89

In the research of the Systemic Mapping Study, the researcher collected 89 articles, which were then analyzed to find the focus of the research, the scope of the research and the trends of publication from year to year.

Classification Scheme

In this study, the researcher developed a classification scheme. This scheme later became the basis for conducting analysis and classification of articles from Petersen et al. (2008). The table provided below (table 3) describes the process of article classification.

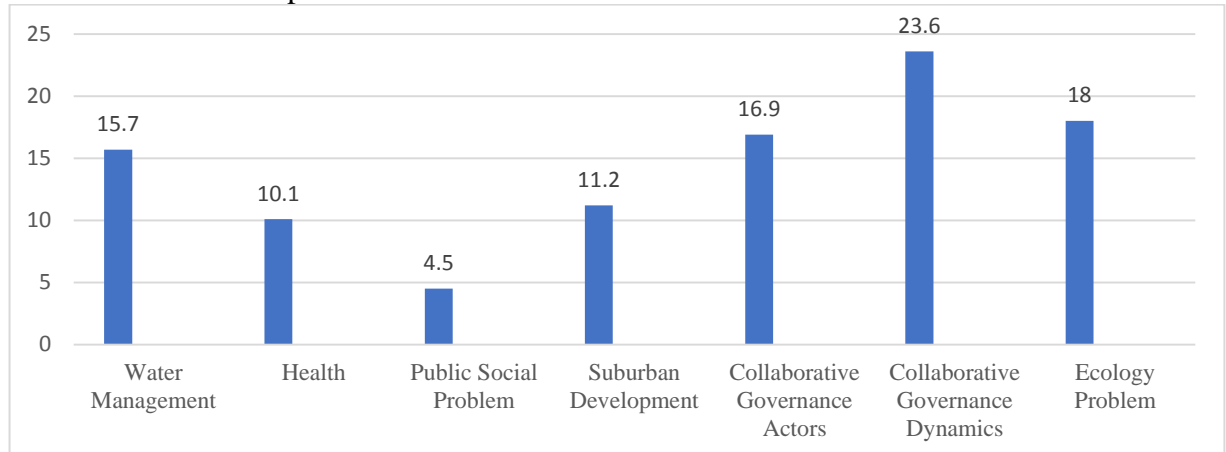
Jenis Penelitian	Penjelasan
Validation Research	New investigation methods and have not been applied in practice. (experiment / observation)
Evaluation Research	The investigation method is implemented in practice and is presented in the evaluation method
Solution Proposal	The solution to the problem is proposed, the proposed solution can be a new or applicable approach and the existing approach.
Philosophical Paper	This research introduces a new perspective on something that exists using taxonomy or conceptual framework.
Experience Paper	This research is based on the author's personal experience of what and how something has been done in practice.
Methods	Explanation
Qualitative Method	Qualitative methods are presented Rapid Assessment Process, journals and language analysis.
Quantitative Method	Quantitative methods are presented with sample designs, hypotheses and tests, all of which are statistical formulations.

Source: (Musianto, 2002; Wieringa et al., 2005; Petersen et al., 2008)

RESULT AND DISCUSSION

Focus Spread on Collaborative Governance

This section describes the focus of research. The researcher classified 89 articles in the research topic area with categories: Water Management, Health, Community Social Problems (Poverty, food security etc.), Regional Planning and Development, Collaborative Governance Actors, Collaborative Governance Dynamics, and Ecological or Natural Resources problems.



Picture 7. The Percentage of Research Focuses

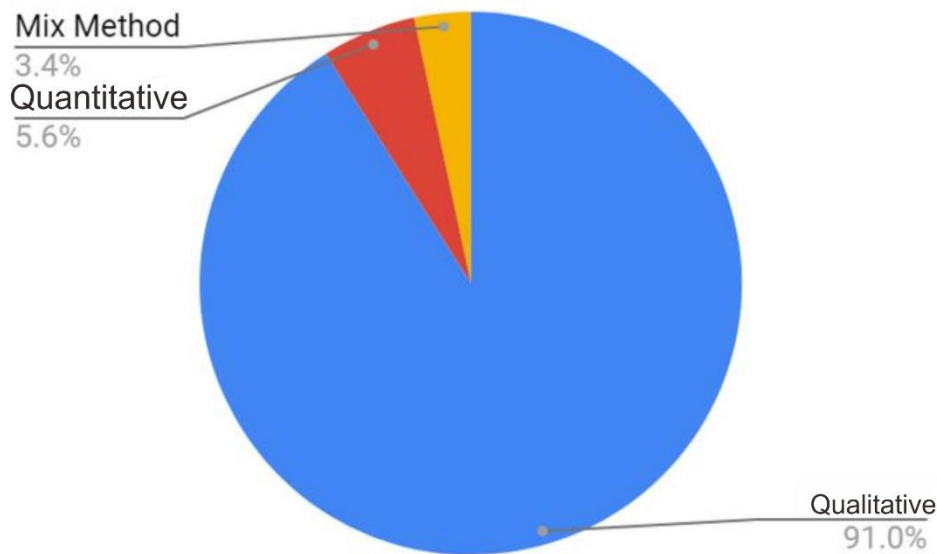
Source: The Result of *Systematic Mapping Study*, 2019.

Figure 7 is an illustration of the distribution rate of research focus on the topic of Collaborative Governance. The most studied research focus is Collaborative Governance Dynamics as many as 21 (23.6%) articles, Ecology or Natural Resources Problems as many as 16 (18%) articles, Collaborative Governance Actors as many as 15 (16.9%), Water Management as many as 14 (15.7%) articles, Regional Planning and Development as many as 10 (11.2%) articles, Health as many as 9 (10.1%) articles, and finally Community Social Problems as many as 4 (4.5%) articles. Further elaboration in the form of a table of research focus can be seen in Table 2.1 below.

Table 4. The Spread of Research Focus		
Fokus Penelitian	Amount	Percentage
Water Management	14	15,7
Health	9	10,1
Social Issue of the Public	4	4,5
Regional Development	10	11,2
CG actor	15	16,9
CG dynamics	21	23,6
Ecology/Natural Resources Issue	16	18
Total	89	100

If one were to see the existing classification scheme, it can be understood that the position of research on poverty in the topic of Collaborative Governance is included in the focus of research on the public's social issues. Based on search results, the focus on it has the lowest percentage of only 4.5%.

Methods and Types of Research in Collaborative Governance Research

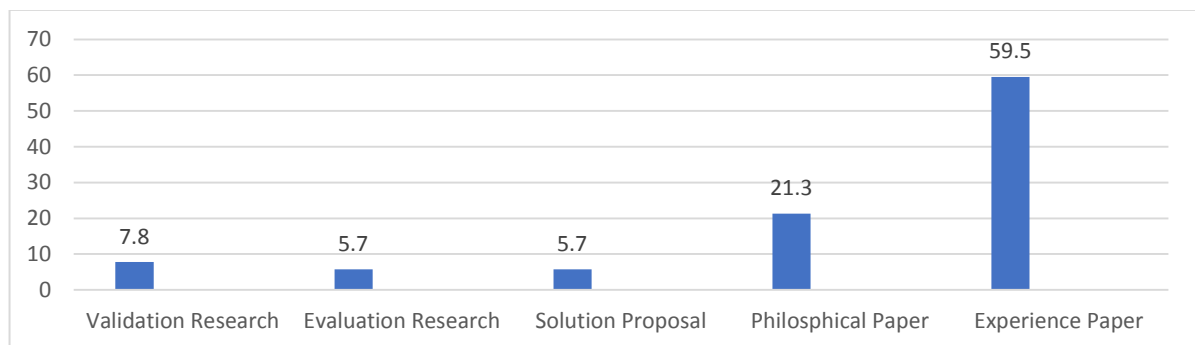


Picture 8. The Spread of Research Based on Research Method

Source: The Result of *Systematic Mapping Study*, 2019.

Based on data from the Systematic Mapping Study, it was revealed that the majority of research on Collaborative Governance was carried out using qualitative methods. The number of studies using qualitative methods reached 81 studies or 91% of the total research mapped. The other two methods, namely quantitative methods and mixed methods occupy a small portion. A total of 5 researches or 5.6% were carried out using quantitative methods and a total of 3 studies or 3.4% were carried out by the mixed method.

Further discussion was carried out by mapping the types of research from mapped researches. There are five types of research from Collaborative Governance research, namely 1.) Validation Research; 2.) Evaluation Research; 3.) Proposal Solution; 4.) Philosophical Paper; 5.) Experience Paper. Figure 5 below illustrates the distribution of research mapped based on the type of research.



Picture 9. The Spread of Research Method

Source: The Result of *Systematic Mapping Study*, 2019

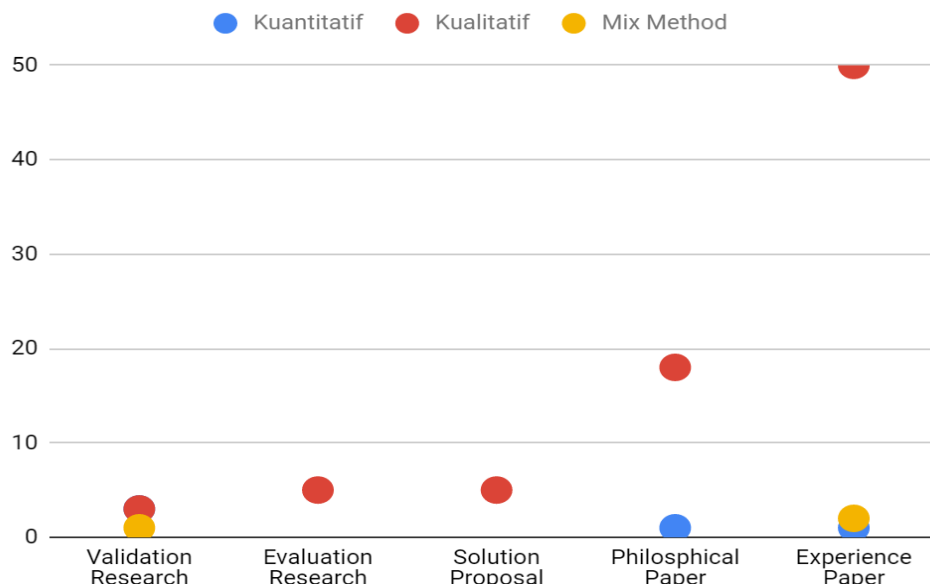
The research type that is most often done is Experience Paper, which is as much as 59.5% or 53 studies. The second largest type of research on the research mapped was Philosophical Paper which was 21.3% of the total research or as many as 19 studies.

Three other types of research occupy a small portion of merely 5.7% or 5 studies for the type of research Evaluation Research and Solution Proposal, while Validation Research only amounted to 7 studies or 7.8% of the total mapped.

The description of further mapping is done by a combination of research type mapping and research methods. The Systematic Mapping Study revealed that:

1. Collaborative Governance Research that uses qualitative research methods with the type of Experience Paper research is the most widely conducted research (50 research).
2. The second most widely carried out research is research with the Philosophical Paper type of research using Qualitative research methods (18 research).
3. Furthermore, the type of Evaluation Research and Solution Proposal research using qualitative methods each amounted to (5 research).
4. On the other hand, Validation Research that uses quantitative research methods and Validation Research that uses qualitative research methods each amounted to (3 research).
5. Next is research with the type of Experience Paper research that uses mixed methods with a total of (2 research).
6. The amount of research that only amounts to (1 research) is Philosophical paper type research with quantitative methods, Experience Paper with quantitative methods, and Validation Research with mixed methods.
7. Research that has never been done is Evaluation Research with quantitative method, Solution Proposal with quantitative method, Evaluation Research with mixed method, Solution Proposal with mixed method, and mixed method Philosophical Paper.

Figure 10 and Table 5 below illustrate the distribution of research maps seen through the type of research and research methods.



Picture 10. The Spread of Method Types dan Research Methods

Source: The Result of *Systematic Mapping Study*, 2019.

Research Type	Quantitative	Qualitative	Mix Method
Validation Research	3	3	1
Evaluation Research	-	5	-
Solution Proposal	-	5	-
Philosophical Paper	1	18	-
Experience Paper	1	50	2

Source: The Result of *Systematic Mapping Study*, 2019.
Publication Trends of Collaborative Governance (2013-2019)



Picture 11. The Spread of Research Focus

Source: The Result of *Systematic Mapping Study*, 2019.

Figure 5 illustrates the research trends published in electronic media: Scopus, Oxford Academic, ProQuest, SAGE Publisher, and Jstor in 2013 to 2019. Based on the search, the publication of Collaborative Governance research decreased from 2013 to 2014 and shows an upward trend from 2014 to 2018. Meanwhile, the publication in 2019 still cannot be concluded since it is still on-going. Based on these graphs, we can see the highest publication was in 2018, which were 21 publications. Further explanation can be seen in table 6 below.

Year	Research Amount
2013	13
2014	7
2015	14
2016	15
2017	15
2018	21
2019	4
Total	89

CONCLUSION

According to the discussion results above, the conclusion points are: 1.) The focus of the most studied research is the Collaborative Governance Dynamics at 23.6% and the least research is done for Community Social Problems (4.5%); 2.) The theme of the research titled Collaborative Governance for Poverty Reduction is included in the focus of research on Community Social Problems. The focus of research on Community Social Problems in research has the lowest percentage of 4.5%; 3.) The most widely used method is the qualitative method of 91% and the least used method is the mixed method at 3.4%; 4.) Next type of research that is most widely used is Experience Paper at 59.5% and the least is the Evaluation Research and Solution Proposal at 5.7%; 5.) Analysis based on methods and types of research shows that Collaborative Governance Research that uses qualitative research methods with the type of Experience Paper research is the most widely conducted research (50 research). Research that has never been done is research with a type of quantitative method Evaluation Research, Quantitative Method Solution Proposal, Mixed Method Evaluation Research, Mixed Method Solution Proposal, and Mixed Method Philosophical Paper. 6.) In general, the number of publications on Collaborative Governance shows an increasing trend from year to year. Based on the points of the above conclusions, it can be understood that Collaborative Governance research with a focus on Community Social Issues still shows a research gap. So that research on Collaborative Governance for Poverty Reduction has a novelty and is worthy of being proposed as a study.

REFERENCES

- Ansell, Christopher. (2014). *Pragmatist Democracy: Evolutionary Learning as Public Philosophy*. New York: Oxford University Press, Inc.
- Banaeianjahromi, N., & Smolander, K. (2016). What do we know about the role of enterprise architecture in enterprise integration? A systematic mapping study. *Journal of Enterprise Information Management*, 29(1), 140-164.
- Emerson, Kirk., Tina Nabatchi & Stephen Balogh. (2012). An Integrative Framework for Collaborative Governance. *Journal of Administration Research and Theory*. Vol. 22 no. 1, hal. 1-29.
- Esmara, Hendra. (1986). *Perencanaan dan Pembangunan di Indonesia*. Jakarta : Gramedia.
- Grindle, M. (2007). Good Enough Governance. *Development Policy Review*. 25(5), 553-574.
- Garnida, Dadang, et. al. (2011). *Peran Kepemimpinan Kepala Daerah dalam Mewujudkan Sistem Ketahanan Nasional*. Jurnal Manajemen & Agribisnis. Vol 8 No. 1 Maret 2011.
- Girija Kaimal, Einat Metzl & Eri Millrod. (2017). Facilitative Leadership: A Framework for The Creative Arts Therapies. *Art Therapy*. 34:3, 146-151, DOI:10.1080/07421656.
- Kitchenham, B. A., Dyba, T. & Jorgensen, M. (2004). Evidence-based software engineering. *IEEE Computer Society*. pp. 273-281.
- Kitchenham, B. A., Mendes, E. & Travassos, G. H. (2007). Cross versus within-company cost estimation studies: A systematic review. *IEEE Trans. Software Eng.* 33(5), 316-329.
- Kitchenham, B. & Charters, S. (2007). Guidelines for performing systematic literature reviews in software engineering. *Technical Report EBSE-2007-01*. School of Compu

- ter Science and Mathematics, Keele University.
- Musianto, L (2002). Perbedaan pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif dalam metode penelitian. *Jurnal Manajemen & Kewirausahaan*. Vol. 4. 2.
- Petersen, K, et al. (2008). Systematic mapping studies in software engineering. *12th International Conference on Evaluation and Assessment in Software Engineering*. Vol. 17.
- Stamboel, Kemal A.. 2012. *Panggilan Keberpihakan Strategi Mengakhiri Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta : PT Gramedia.
- Suparlan, Parsudi. (1984). *Kemiskinan di Perkotaan*. Jakarta : Sinar Harapan dan Yayasan Obor Indonesia.
- Wanna, John. (2008). *Collaborative Governance: A new era of public policy in Australia*. Canberra: Australian National University Press.
- Wieringa, R., Maiden, N., Mead, N., & Rolland, C. (2006). Requirements engineering paper classification and evaluation criteria: A proposal and a discussion. *Requirements Engineering*, 11(1), 102-107.
- Whitman, Sylvia. (2008). *Global Issues: World Poverty*. New York: Facts on File.

Inovasi Kebijakan *E-Office* Pemerintah Provinsi Riau dalam Mewujudkan Pembangunan Daerah Berkelanjutan

Rissa Oktaviana¹, Khairunsyah Purba², dan Arif Budi Setiawan³

¹Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau
rissaoktaviana2@gmail.com

²Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, UIN Suska Riau

³Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Abstrak

e_Office merupakan salah satu aplikasi *e_Government* yang bertujuan untuk Time Saving dan Cost Saving dalam tata kelola birokrasi (Hendra & Juaririah, 2017). Pemerintah Provinsi Riau telah berupaya menerapkan Aplikasi *e_Office* dalam tata kelola birokrasinya dengan mengeluarkan Surat Edaran Gubernur Riau Nomor 555/Diskominf0&PDE/90.21 tentang Pelaksanaan *e_Government* di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau pada bulan November 2014 diperkuat dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Aplikasi Perkantoran secara Elektronik (*e_Office*) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Namun demikian terdapat kendala dalam pelaksanaan *e_Office*, beberapa instansi masih menggunakan administrasi perkantoran manual seperti penggunaan media kertas untuk disposisi dan surat menyurat. Penelitian ini dilaksanakan di instansi Pemerintah Provinsi Riau. Ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian terhadap masalah ini adalah untuk mengetahui bagaimana Penerapan Inovasi Kebijakan *e_Office* di Pemerintah Provinsi Riau Dalam Mewujudkan Pembangunan Daerah Berkelanjutan dan apa faktor yang menghambat pelaksanaan *e_Office* di Pemerintah Provinsi Riau. Penelitian ini diukur melalui Teori Edward III dengan 4 indikator keberhasilan (Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi). Metode penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dimana peneliti mengumpulkan data melalui observasi dan deep interview melalui key informan yang terpilih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan *e_Office* di instansi Pemerintah Provinsi Riau belum terlaksana secara optimal dikarenakan terdapat beberapa factor yang menghambat yaitu faktor kepemimpinan, dimana beberapa pimpinan instansi tidak menggunakan wewenang yang dimilikinya untuk mendukung proses penerapan kebijakan *e_Office*, tidak adanya sanksi penegasan dari pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan yang mengakibatkan kebijakan *e_Office* dianggap hanya kebijakan biasa, yang jika tidak dilaksanakan tidak ada dampak negatif terhadap instansi tersebut, kemudian pelatihan yang diberikan oleh Diskominfotik tidak memberikan informasi yang jelas terhadap pegawai instansi terkait tentang bagaimana pengelolaan *e_Office*. Peneliti menyarankan pemerintah daerah dapat menerapkan *e_Office* guna mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, *e_Government*, *e_Office*

Abstract

e_Office is an *e_Government* application that aims at Time Saving and Cost Saving in bureaucratic governance (Hendra & Juaririah, 2017). The Riau Provincial Government has sought to implement the *e_Office* Application in its bureaucratic governance by issuing the Riau Governor Circular Number 555 / Diskominf0 & PDE / 90.21 regarding the Implementation of *e_Government* in the Riau Province Government Environment in November 2014 reinforced by Riau Governor Regulation Number 56 of 2016 concerning Guidelines for Management of Office Applications Electronically (*e_Office*) in the Riau Provincial Government Environment. However, there are obstacles in the implementation of *e_Office*, some agencies still use manual office administration such as the use of paper media for disposition and correspondence. This research was conducted at the Riau Provincial Government agencies. The interest of researchers to conduct research on this issue is to find out how the Application of *e_Office* Policy Innovation in the Riau Provincial Government in Achieving Sustainable Regional Development and what are the factors that hinder the implementation of *e_Office* in the Riau Provincial Government. This research was measured through Edward III Theory with 4 indicators of success (Communication, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure). This research method is carried out with a qualitative approach, where researchers collect data through observation and deep interviews through key informants selected. The results showed that the implementation of the *e_Office* policy in the Riau Provincial Government agencies had not been carried out optimally because there were several inhibiting

factors, namely the leadership factor, where some agency leaders did not use their authority to support the *e-Office* policy implementation process, there was no sanction from the government in issuing policies that result in *e-Office* policies are considered only ordinary policies, which if not implemented there is no negative impact on the agency, then the training provided by Diskominfo does not provide clear information to employees of the relevant agencies on how to manage *e-Office*. The researcher suggests that the local government can implement *e-Office* to realize sustainable regional development.

Keywords: Public Policy, *e-Government*, *e-Office*

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong peran strategis perluasan jaringan akses informasi dalam lingkup global sehingga lalu lintas informasi menjadi tanpa batas. Perkembangan kemajuan tersebut secara mendasar mampu mengubah kebiasaan cara melakukan berbagai kegiatan termasuk dalam penyelenggaraan negara. Kemampuan pemerintah dalam mengembangkan penerapan teknologi tersebut diawali dengan munculnya isu “*Elektronik Government* disingkat dengan *e-Government*” yaitu pemerintahan yang berbasis internet.

Salah satu implementasi *e-Government* adalah aplikasi elektronik perkantoran (*e-Office*). *Elektronik Office (e-Office)* adalah suatu sistem yang berhubungan dengan administrasi, secara maya memusatkan komponen-komponen sebuah organisasi dimana data, informasi dan komunikasi dibuat melalui media telekomunikasi. *e-Office* adalah suatu aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan naskah secara elektronik yang dibangun dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi bersifat legal dan berbasis web. (dalam PERGUB Riau Nomor 56 Tahun 2016)

Electronic dalam *e-Office* dapat berarti bahwa semua pekerjaan yang berhubungan dengan administrasi perkantoran dikerjakan secara elektronik dan menggunakan bantuan alat komunikasi dan sistem informasi *E-Office* mengganti proses administrasi berbasis manual (Paper-Based) ke proses berbasis elektronik (paperless) dengan memanfaatkan fasilitas jaringan local (LAN), maupun jaringan internet (Online). Aplikasi *e-Office* menghimpun informasi secara terkonsolidasi sehingga menjadi alat utama dalam pengambilan keputusan yang menghindarkan pejabat dari keterbatasan sumber informasi. Keberadaan *e-Office* memperkecil kesenjangan antar generasi aparatur dan memelihara semua dokumen dapat terekam dengan rapi sehingga dapat dipelajari kemudian. Tuntutan keterbukaan informasi public mengarah pada optimasi fungsi *e-Office* dalam menyajikan informasi publik, begitu juga pelayanan yang cepat.

Penerapan aplikasi *e-Office* tentu membawa positif terhadap kinerja instansi publik terkait. Melalui aplikasi ini, instansi publik akan lebih mudah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam administrasi perkantoran, yaitu: (1) Melalui *e-Office*, semua surat yang dibuat, dikirimkan ataupun diterima terekam dengan baik dalam jaringan internet sehingga akan lebih mudah untuk mencari surat yang diinginkan dalam waktu-waktu tertentu. (2) *e-Office* juga menghemat pengguna sumber daya, seperti waktu dan biaya karena semua surat yang ada disimpan dan dibuat secara elektronik. (3) Melalui *e-Office*, instansi publik juga akan menghemat waktu dan biaya dalam penyampaian surat menyurat antar stakeholders.

Dengan menggunakan *e-Office* diharapkan dapat meningkatkan efisiensi waktu kinerja dan efektifitas manajemen penyelenggara negara terhadap pengelolaan administrasi (surat-menyurat) di lingkungan pemerintah daerah, termasuk dalam mengelola data dan informasi serta mampu meningkatkan efisiensi penggunaan alat tulis kantor. Penggunaan serta penerapan teknologi informasi di lingkungan pemerintah mendukung percepatan dan ketepatan pengambilan keputusan bagi pimpinan di

lingkungan pemerintah daerah pada tataran birokrasi yang merupakan salah satu faktor keberhasilan pengembangan pemerintah daerah menuju era digital.

Pemerintahan Provinsi Riau Melalui Surat Edaran Gubernur Nomor 555/Diskominfo&PDE/90.21 tentang Pelaksanaan *E-Government* di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau pada bulan November 2014, mengintruksikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintah Provinsi Riau untuk menerapkan aplikasi e-Office sebagai system pendistribusian surat menyurat perkantoran yang sudah diberi pelatihan pada tanggal 29-30 Oktober 2014. Penerapan e-Office ini diperkuat dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 56 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Aplikasi Perkantoran secara Elektronik (*e-Office*) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, bisa dilihat pada pasal 2 ayat 1 yang berbunyi “seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau harus menggunakan aplikasi perkantoran secara elektronik (*e-Office*) dalam penyelenggaraan administrasi perkantoran”.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Riau yang telah mengikuti pelatihan pengelolaan *e-Office* dan diintruksikan untuk mengimplementasi *e-Office*. Namun hanya beberapa OPD yang mengimplementasikan *e-Office* dalam mendistribusikan surat menyurat, termasuk diantaranya beberapa OPD yang mengikuti pelatihan dan belum mengimplementasikan *e-Office* secara keseluruhan ialah Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau.

Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau telah mengutus perwakilan untuk mengikuti sosialisasi dan pelatihan pengelolaan *e-Office*. Selain itu, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau diwakili Tenaga IT yang ditugaskan sudah melakukan sosialisasi dan pelatihan khusus pegawai yang ada di Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau. Hingga saat ini, Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau hanya menggunakan *e-Office* untuk surat masuk saja. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Administrasi Perkantoran pada Badan Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Riau

No	Administrasi Perkantoran	Secara Manual	Secara Elektronik (<i>E_Office</i>)
1.	Keputusan Kepala SKPD	✓	-
2.	Surat Edaran	✓	-
3.	Surat Biasa	✓	-
4.	Surat Keterangan	✓	-
5.	Surat Perintah	✓	-
6.	Surat Izin	✓	-
7.	Surat Perjanjian	✓	-
8.	Surat Perintah Tugas (SPT)	✓	-
9.	Surat Perintah Perjalanan Dinas(SPPD)	✓	-
10.	Surat Undangan	✓	-
11.	Nota Dinas	✓	-
12.	Telaah Staf	✓	-
13.	Pengumuman	✓	-
14.	Berita Acara	✓	-
15.	Surat Masuk	✓	✓
16.	Surat Keluar	✓	-

Sumber: Badan Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Riau, 2018.

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau sebagian besar menggunakan Sistem Administrasi Perkantoran Manual dan hanya Surat Masuk yang menggunakan Sistem Elektronik Perkantoran (*e-Office*). Berdasarkan fenomena yang peneliti temukan dilapangan surat yang masuk melalui *e-Office* akan di disposisikan secara manual dengan menggunakan kertas sesuai dengan perintah atasan, surat keluar dikirimkan ke penerimaan surat melalui proses manual dengan menggunakan jasa kurir surat dan ada beberapa pegawai yang belum mengerti dalam menggunakan *e-Office*.

Pembangunan daerah berkelanjutan dapat diawali dengan mengurangi penggunaan kertas melalui inovasi kebijakan *e-Office*. Dengan konsumsi kertas yang kecil, akan berdampak pada eksplorasi hutan-hutan sebagai bahan dasar dari pembuatan kertas. Hutan sebagai oksigen dan paru-paru duniua akan tetap terjaga karena tidak ditebang secara besar-besaran untuk memenuhi bahan baku pembuatan kertas. Pelaksanaan *e-Office* memerlukan kesiapan dari semua SDM yang terlibat terutama merubah pola yang sudah terbiasa dengan membaca surat dan mendisposisi surat di kertas, menjadi di layar computer, laptop atau telepon genggam. Pola yang juga harus drubah adalah apabila dimeja tidak ada tumpukan kertas, berarti tidak terdapat surat yang harus ditindaklanjuti. Dengan digitalisasi doumen, pegawai harus sering berhadapat dengan layar monitornya, tidak ada kertas di meja bukan berarti tidak ada surat masuk, namun semua sudah digialisasi dengan sisem *e-Office*. Dari fenomena yang ada maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui inovasi kebijakan *e-Office* pemerintah Provinsi Riau dalam mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini berusaha menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan. Sedangkan metode yang digunakan peneliti adalah kualitatif. Data kualitatif menurut Sugiyono (2016: 14) adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar. Penelitian ini dilaksanakan dilingkungan instansi Pemerintah Provinsi Riau yaitu pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau dan Dinas Komunikasi dan Informatika. Untuk memperoleh data, keterangan, informasi yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian ini, maka data yang diperoleh bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Data sekunder diperoleh dari hasil dokumentasi dan studi kepustakaan yang dijadikan sebagai data pendukung hasil observasi dan wawancara tersebut.

3. Hasil dan Pembahasan

Sesuai dengan Peraturan Gubernur (PERGUB) Riau Nomor 56 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan aplikasi perkantoran secara elektronik (*e-Office*) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Dalam peraturan gubernur tersebut dijelaskan pada pasal 2 ayat 1 bahwa “ seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau harus menggunakan aplikasi perkantoran secara elektronik (*e-Office*) dalam penyelenggaraan administrasi perkantoran”. Adapun administrasi perkantoran yang dapat diakses melalui *e-Office* diantaranya e- Surat, e- SPT, e- Cuti, e-SPJ, e-Absen, e-Izin dan e- Agenda. Pelaksanaan *e-Office* ini telah terintegrasi dengan SKP Online. Pelaksanaan inovasi kebijakan dalam penelitian ini, menggunakan Model Implementasi kebijakan dengan 4 faktor yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Komunikasi merupakan salah satu variabel yang sangat penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Proses penyaluran komunikasi Didalam pelaksanaan *e-Office* di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau sudah berjalan baik, akan tetapi komunikasi belum dipahami dan dimengerti oleh pelaksana *e-Office* (staf/pegawai) dikarenakan komunikasi yang belum jelas dan konsisten.

Sumber Daya (Resources) merupakan faktor yang sangat penting dalam implementasi kebijakan, bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan, serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan mengenai *e-Office*. Jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang kompeten, maka pengimplementasian aplikasi *e-Office* tidak akan terlaksana dengan efektif. Sumber daya yang dimiliki oleh pelaksana *e-Office* di Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau diantaranya: Staf/Sumber daya manusia yang sudah siap menjadi pelaksana *e-Office* hal ini dibuktikan dengan pendidikan terakhir yang dimiliki para pegawai mayoritas sarjana Strata 1 (SI) bahkan ada yang berpendidikan strata 3 (S3), tinggal lagi kesadaran staf akan pengimplementasian *e-Office*. Informasi mengenai pengelolaan *e-Office* belum diterima dengan baik oleh pegawai, hal ini dikarenakan tenaga IT yang di utus oleh Diskominfo Provinsi Riau tidak melakukan pelatihan secara bertahap agar semua staf/pegawai yang ada di Balitbang mengerti dan paham akan pengelolaan *e-Office*, serta pimpinan Balitbang yang tidak menjalankan fungsinya sebagai pemilik wewenang dalam proses pengimplementasian *e-Office*. Namun dari segi fasilitas yang dibutuhkan dalam mengimplementasikan *e-Office* di Balitbang sudah dapat dikatakan memadai untuk pelaksanaan *e-Office* tinggal lagi bagaimana Kepala Badan selaku atasan membuat inisiatif penegasan dan kebijakan dalam mendukung implementasi *e-Office*.

Disposisi kecenderungan-kecenderungan sikap yang menjadi pengaruh dalam pelaksanaan ada 2 yaitu pengangkatan birokrasi dan intensif. Dimana tidak adanya tindakan yang tegas dari pihak pelaksana kebijakan dalam melaksanakan *e-Office*. Apalagi pihak pimpinan Balitbang yang tidak memiliki inisiatif untuk menugaskan kepada para bawahannya untuk melaksanakan *e-Office*. Selain itu tidak adanya pemberian reward atau penghargaan dari pemerintah maupun dari Balitbang sendiri kepada pihak atau pegawai yang telah menggunakan *e-Office*.

Struktur birokrasi selain komunikasi, sumber daya, dan disposisi ada faktor lain yang juga mempengaruhi suatu implementasi kebijakan yakni Struktur Birokrasi, dimana ada 2 bagian yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Fragmentasi. SOP dalam implementasi *e-Office* mudah untuk dilaksanakan, serta waktu yang digunakan dalam proses surat menyurat dengan menggunakan *e-Office* tidak terlalu lama dan juga di Balitbang dalam pelaksanaan *e-Office* terdapat adanya kerjasama yang dilakukan antara Balitbang dengan Diskominfo. Dimana Balitbang dalam pelaksanaan *e-Office* dibantu oleh tenaga IT yang dikirim oleh Diskominfo.

Dari beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan inovasi kebijakan *e-Office* pemerintah provinsi Riau meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi yang telah diuraikan diatas dapat dilihat bahwa factor yang paling mengaruhi yaitu sumber daya dalam hal ini pada sub wewenang. Dimana pimpinan instansi selaku pejabat struktural tidak mempergunakan wewenangnya dalam terlaksananya *e-office* secara menyeluruh. Jika pimpinan dari 45 instansi yang telah mengutus perwakilannya dalam mengikuti pelatihan *e-Office* memberikan ketegasan dalam pelaksanaan *e-Office*

seperti memberikan sanksi bagi pegawai atau staf yang tidak menggunakan *e-Office* dalam administrasi perkantoran. Selanjutnya Gubernur Riau selaku kepala daerah hendaknya juga memberikan ketegasan kepada instansi yang tidak menerapkan *e-Office* didalam proses administrasi perkantoran. Jika itu terlaksana dengan baik maka proses administrasi perkantoran secara *e-Office* akan terwujud secara menyeluruh.

Inovasi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau melalui aplikasi elektronik perkantoran (*e-Office*) sangat baik dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dengan menghemat penggunaan kertas. Electronic dalam *e-Office* dapat berarti bahwa semua pekerjaan yang berhubungan dengan administrasi perkantoran dikerjakan secara elektronik dan menggunakan bantuan alat komunikasi dan sistem informasi *e-Office* mengganti proses administrasi berbasis manual (Paper-Based) ke proses berbasis elektronik (paperless) dengan memanfaatkan fasilitas jaringan local (LAN), maupun jaringan internet (Online). Aplikasi *e-Office* menghimpun informasi secara terkonsolidasi sehingga menjadi alat utama dalam pengambilan keputusan yang menghindarkan pejabat dari keterbatasan sumber informasi. Keberadaan *e-Office* memperkecil kesenjangan antar generasi aparatur dan memelihara semua dokumen dapat terekam dengan rapi sehingga dapat dipelajari kemudian. Tuntutan keterbukaan informasi public mengarah pada optimasi fungsi *e-Office* dalam menyajikan informasi publik, begitu juga pelayanan yang cepat.

Inovasi kebijakan *e-Office* juga memiliki manfaat terhadap pembangunan daerah yang berkelanjutan, baik segi manusia maupun lingkungan. Kebijakan *e-Office* tidak dapat meniadakan pemakaian kertas sama sekali, namun dapat mengurangi penggunaan kertas di perkantoran. Karena hampir tidak mungkin bagi sebuah kantor untuk tidak menggunakan kertas dalam menjalankan tugas administrasi perkantorannya. Manfaat pengurangan penggunaan kertas bagi lingkungan dapat menjaga kelestarian hutan, menjaga hewan di dalam hutan agar tidak punah, mencegah terjadinya degradasi hutan dan deforestsasi hutan, jika semakin sedikit pohon yang ditebang maka semakin mencegah global warming. Sedangkan bagi manusia manfaat mengurangi pemakaian kertas mampu mengefisiensikan waktu dan tenaga dalam distribusi maupun pencarian dokumen, mengurangi sampah kertas, menjamin keamanan dokumen karena dokumen hanya dapat diakses oleh pihak-pihak tertentu dalam suatu instansi.

4. Kesimpulan dan Saran

Pelaksanaan kebijakan *e-Office* di instansi Pemerintah Provinsi Riau belum terlaksana secara optimal dikarenakan terdapat beberapa faktor yang menghambat yaitu factor kepemimpinan, dimana beberapa pimpinan instansi tidak menggunakan wewenang yang dimilikinya untuk mendukung proses penerapan kebijakan *e-Office*, tidak adanya sanksi penegasan dari pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan yang mengakibatkan kebijakan *e-Office* dianggap hanya kebijakan biasa, yang jika tidak dilaksanakan tidak ada dampak negatif terhadap instansi tersebut, kemudian pelatihan yang diberikan oleh Diskominfotik tidak memberikan informasi yang jelas terhadap pegawai instansi terkait tentang bagaimana pengelolaan *e-Office*.

Perubahan sistem administrasi perkantoran manual ke *system e-Office* dapat terlaksana jika ada aturan yang mewajibkan pengguna untuk menjalankannya. Untuk peran pimpinan dalam merumuskan kebijakan dalam pelaksanaannya menjadi sangat penting. Inovasi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau melalui aplikasi elektronik perkantoran (*e-Office*) mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan dengan menghemat penggunaan kertas. Inovasi ini mengganti proses

administrasi berbasis manual (Paper-Based) ke proses berbasis elektronik (paperless) dengan memanfaatkan fasilitas jaringan local (LAN), maupun jaringan internet (Online).

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. (2006). Dasar- Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Aditya Oktavya,Ayu. (2015). Penerapan (Elektronik Government) e-Government Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dalam Pemberian Pelayanan Di Kota Bontang, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Oktober, hal 1433-1477.
- Indiahono, Dwiyanto. (2009). Perbandingan Administrasi Publik. Yogyakarta: Gava Media.
- Indrajit, Richardus, Eko. (2002). E-Government Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital. Yogyakarta : Andi Offset.
- Isnindaputra, Rizky. (2014). Implementasi Aplikasi E-Office untuk Mendukung Penerapan E-Government di Kantor Pemerintah Daerah. Volume I.
- Kencana Syafii, Inu.(2008). Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia(SANRI). Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Pasolong, Hasbani. (2016). Teori Administrasi Public. Bandung: Alfabet.
- Sugiyono.(2016). Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta.
- Sunggono,Bambang. (1994). Hukum dan Kebijaksanaan Publik. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutabri, Tata.(2016). Sistem Informasi Manajemen. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- United Nation.(2016). E-Government Survey 2016(E-Government In Support Of Sustainable Development). New York: United Nation.
- W. Creswell, Jhon.(2014). Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Widodo, Joko. (2017). Analisis Kebijakan Publik:Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: MNC.
- Winarno, Budi. (2014). Teori dan Proses kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dinamika Adopsi Inovasi Lokal di Kawasan Minapolitan Kabupaten Kampar

Adianto

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau
Email: adianto@lecturer.unri.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis secara komprehensif tentang dinamika adopsi inovasi lokal yang berlangsung pada Kawasan Minapolitan di Kabupaten Kampar yang berdampak pada pengembangan ekonomi masyarakat. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bersifat deskriptif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggunakan cara memaparkan data yang diperoleh dari pengamatan kepustakaan dan pengamatan lapangan, kemudian dianalisa dan diinterpretasikan dengan memberikan kesimpulan. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kampar yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Minapolitan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi penelitian. Setelah data terkumpul dari setiap informan penelitian, kemudian akan digunakan metode triangulasi dengan cek and cross cek terhadap hasil tanggapan yang diberikan informan penelitian. Hasil penelitian menemukan bahwa dinamika adopsi inovasi lokal yang berlangsung di Kawasan Minapolitan Desa Koto Mesjid mengandung nilai-nilai lokal yaitu nilai kekeluargaan nilai kebersamaan dan nilai senasip sepenanggungan. Keberadaan nilai-nilai lokal yang telah diwariskan oleh para leluhur ternyata mampu menjadi jembatan penghubung bagi masyarakat untuk dibimbing dan diarahkan dalam proses budidaya komoditas ikan patin. Faktor pendukung dalam adopsi inovasi adalah keterbukaan informasi dan janji keuntungan. Faktor Penghambat dalam adopsi inovasi adalah topografis yang mengakibatkan kebutuhan modal yang besa dalam berbudidaya.

Kata Kunci: Inovasi, Adopsi Inovasi dan Kawasan Minapolitan

Abstract

The purpose of this study is to comprehensively analyze the dynamics of the adoption of local innovations that take place in the Minapolitan Area in Kampar Regency which have an impact on the economic development of the community. The type of research chosen is qualitative research with a descriptive case study approach, namely the problem solving procedure that is examined by using the method of describing data obtained from library observations and field observations, then analyzed and interpreted by giving conclusions. This research was conducted in Kampar Regency which has been designated as the Minapolitan Area. Data collection techniques are done through interviews and research observations. After the data is collected from each research information, then the triangulation method will be used by check and cross check on the results of responses given by research informants. The results of the study found that the dynamics of local innovation adoption that took place in the Minapolitan Area of the Koto Mesjid Village contained local values, namely the family value of the togetherness value and the value of the same thought. The existence of local values that have been passed down by the melting turned out to be able to be a bridge for the community to be guided and directed in the process of catfish commodity cultivation. Supporting factors in the adoption of innovations are information disclosure and profit promises. The inhibiting factor in the adoption of innovation is the topography that results in large capital requirements in cultivation.

Keywords: Innovation, Adoption of Innovation and the Minapolitan Region

1. Pendahuluan

Kawasan minapolitan merupakan suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya. Minapolitan dilakukan berdasarkan asas: 1). Demokratisasi ekonomi kelautan dan perikanan pro rakyat. 2). Keberpihakan pemerintah pada rakyat kecil melalui pemberdayaan masyarakat. 3).

Penguatan peranan ekonomi daerah dengan prinsip daerah kuat maka bangsa dan Negara kuat. (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2010 tentang Minapolitan).

Penetapan Kawasan Minapolitan bertujuan untuk : Pertama, meningkatkan produksi, produktivitas, dan kualitas produk kelautan dan perikanan. Kedua, meningkatkan pendapatan nelayan, pembudidaya ikan, dan pengolah ikan yang adil dan merata. Ketiga, mengembangkan kawasan minapolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di daerah. Sedangkan sasaran pelaksanaan Kawasan Minapolitan, yaitu:

1. Meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan skala mikro dan kecil, antara lain berupa:
 - a) Penghapusan dan/atau pengurangan beban biaya produksi, pengeluaran rumah tangga, dan pungutan liar.
 - b) Pengembangan sistem produksi kelautan dan perikanan efisien untuk usaha mikro dan kecil.
 - c) Penyediaan dan distribusi sarana produksi tepat guna dan murah bagi masyarakat.
 - d) Pemberian bantuan teknis dan permodalan.
 - e) Pembangunan prasarana untuk mendukung sistem produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran produk kelautan dan perikanan.
2. Meningkatkan jumlah dan kualitas usaha kelautan dan perikanan skala menengah ke atas sehingga berdaya saing tinggi, antara lain berupa:
 - a) Deregulasi usaha kelautan dan perikanan.
 - b) Pemberian jaminan keamanan dan keberlanjutan usaha dan investasi.
 - c) Penyelesaian hambatan usaha dan perdagangan (tarif dan non-tarif barriers).
 - d) Pengembangan prasarana untuk mendukung sistem produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran.
 - e) Pengembangan sistem insentif dan disinsentif ekspor-impor produk kelautan dan perikanan.
3. Meningkatkan sektor kelautan dan perikanan menjadi penggerak ekonomi regional dan nasional, antara lain berupa:
 - a) Pengembangan sistem ekonomi kelautan dan perikanan berbasis wilayah.
 - b) Pengembangan kawasan ekonomi kelautan dan perikanan di daerah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
 - c) Revitalisasi sentra produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran sebagai penggerak ekonomi masyarakat.
 - d) Pemberdayaan kelompok usaha kelautan dan perikanan di sentra produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran. (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2010 tentang Minapolitan)

Pengembangan Kawasan Minapolitan di Indonesia ditetapkan sebanyak 197 Kabupaten/Kota yang terdapat di 33 Provinsi berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : Kep.32/Men/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 35/Kepmen-KP/2013 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan. Salah satu provinsi di Indonesia yang kabupaten/kotanya dikembangkan sebagai Kawasan Minapolitan adalah Provinsi Riau. Penetapan kawasan minapolitan di Provinsi Riau terdapat di Kabupaten Kuantan Singingi Kecamatan Benai, Kabupaten Indragiri Hilir Kecamatan Reteh, Kabupaten Kampar Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten

Indragiri Hulu Kecamatan Pasir Penyu, Kota Dumai Kecamatan Sungai Sembilan dan Kabupaten Kepulauan Meranti Kecamatan Rangsang.

Kawasan Minapolitan yang terdapat di Provinsi Riau salah satunya terdapat di Kabupaten Kampar, penetapan ini tentunya diiringi dengan harapan pengembangan ekonomi masyarakat di wilayah tersebut. Sebab keberadaan Kawasan Minapolitan akan memberikan dampak kepada munculnya inovasi lokal yang dikembangkan untuk melakukan pengelolaan di bidang perikanan. Pengembangan inovasi lokal yang dilakukan bertujuan untuk merangsang tumbuhnya ekonomi lokal masyarakat yang melakukan pengelolaan di bidang perikanan pada Kawasan Minapolitan. Apalagi ketetapan tentang Kawasan Minapolitan yang dilakukan bagi Kabupaten Kampar sudah berlangsung cukup lama dan tentunya telah memiliki dinamika adopsi inovasi yang memberikan efek pengembangan ekonomi lokal bagi masyarakat yang ada di wilayah sekitarnya. Oleh karenanya permasalahan yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana dinamika adopsi inovasi lokal yang berkembang terhadap pengembangan ekonomi masyarakat pada Kawasan Minapolitan di Kabupaten Kampar.

Inovasi memiliki pengertian yang sangat beragam serta banyak perspektif yang mencoba memaknainya. Salah satu pengertian menyebutkan bahwa inovasi adalah kegiatan yang meliputi seluruh proses menciptakan dan menawarkan jasa atau barang baik yang sifatnya baru, lebih baik atau lebih murah dibandingkan dengan yang tersedia sebelumnya. Pengertian ini menekankan pemahaman inovasi sebagai sebuah kegiatan (proses) penemuan (invention). Sebuah inovasi dapat berupa produk atau jasa yang baru, teknologi proses produksi yang baru, sistem struktur dan administrasi baru atau rencana baru bagi anggota organisasi. Menurut Rogers (2003), salah satu penulis buku inovasi terkemuka, menjelaskan bahwa: “an innovation is an idea, practice, or object that is perceived as new by individual or other unit of adopter”. Jadi inovasi adalah sebuah ide, praktek, atau objek yang dianggap baru oleh individu satu unit adopsi lainnya. Inovasi dapat merupakan sesuatu yang berwujud (tangible) maupun sesuatu yang tidak berwujud (intangible). Memaknai inovasi sebagai sesuai yang hanya identik dengan teknologi saja akan jadi menyempitkan konteks inovasi yang sebenarnya.

Penulis lain yaitu Albury (2003) secara lebih sederhana mendefinisikan inovasi sebagai “new ideas that work”. Ini berarti bahwa inovasi adalah berhubungan erat dengan ide-ide baru yang bermanfaat. Inovasi dengan sifat kebaruannya harus mempunyai nilai manfaat. Sifat baru dari inovasi tidak akan berarti apa-apa apabila tidak diikuti dengan nilai kemanfaatan dari kehadirannya. Selanjutnya Albury secara rinci menjelaskan bahwa: “successful innovation is the creation and implementation of new processes, products, services, and methods of delivery which result in significant improvements in outcomes efficiency, effectiveness, or quality”. Ini menjelaskan bahwa ciri dari inovasi yang berhasil adalah adanya bentuk penciptaan dan pemanfaatan proses baru, produk baru, jasa baru dan metode penyampaian yang baru, yang menghasilkan perbaikan yang signifikan dalam hal efisiensi, efektivitas maupun kualitas.

Suatu inovasi yang diluncurkan kepada masyarakat membutuhkan waktu dan cara untuk diadopsi oleh masyarakat walaupun inovasi tersebut menguntungkan bagi masyarakat. Dibutuhkan adanya usaha untuk menyakinkan masyarakat agar dalam mengadopsi suatu inovasi, mereka tidak ragu-ragu. Oleh karena itu, perlu cara dan metode tertentu dalam difusi inovasi pada suatu kelompok masyarakat, baik dengan pendekatan perseorangan maupun dengan pendekatan kelompok. Rogers dan Shoemaker (1971) mengatakan adopsi inovasi merupakan suatu proses mental atau perubahan perilaku baik yang berupa pengetahuan (cognitive), sikap (affective),

maupun keterampilan (psychomotor) pada diri seseorang sejak ia mengenal inovasi sampai memutuskan untuk mengadopsinya setelah menerima inovasi. Hal senada disampaikan oleh Soekartawi (dalam Agustina Abdullah, 2008) yang menyatakan bahwa adopsi merupakan proses mental dalam diri seseorang melalui pertama kali mendengar tentang suatu inovasi sampai akhirnya mengadopsi.

Levis (1996) mengemukakan bahwa adopsi dapat diartikan sebagai penerapan atau penggunaan suatu ide atau alat teknologi baru yang disampaikan lewat pesan komunikasi pada umumnya adalah penyuluhan. Adopsi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap sesuatu inovasi sejak mengenal, menaruh minat, menilai sampai menerapkan inovasi yang diterima. Adopsi dalam proses penyuluhan menurut Mardikanto (2010) pada hakikatnya dapat diartikan sebagai proses perubahan perilaku baik yang berupa pengetahuan, sikap maupun keterampilan pada diri seseorang setelah menerima inovasi yang disampaikan oleh penyuluh kepada masyarakat sasarnya. Dengan demikian, inovasi tidak hanya diadopsi sebagai sesuatu yang baru, tetapi merupakan nilai baru yang dapat mendorong terjadinya pembaruan dalam masyarakat atau lokalitas tertentu.

Dari berbagai macam pemikiran pakar tentang pengertian adopsi inovasi, maka dapat disimpulkan bahwa adopsi inovasi tidak terlepas dari beberapa hal berikut ini.

1. Proses mental, proses mental merupakan suatu proses ketika suatu ide, gagasan, pengetahuan, teknologi, dan penemuan baru diterima oleh indra kemudian diolah oleh pikiran dan menghasilkan output ataupun respons. Diketahui bahwa output ataupun respons yang dihasilkan dapat dalam bentuk menerima atau menolak ide, gagasan, pengetahuan, teknologi, dan penemuan baru tersebut.
2. Proses perubahan perilaku, proses perubahan perilaku merupakan suatu proses ketika manusia akan berubah sesuai dengan apa yang mereka pelajari, baik dari keluarga, teman, orang lain ataupun belajar dari diri mereka sendiri. Proses pembelajaran diri inilah yang nantinya akan membentuk seseorang tersebut sesuai dengan kondisi dan kebutuhan orang tersebut, baik dalam kesehariannya ataupun dalam keadaan tertentu.

Kesimpulan tersebut menjelaskan bahwa adopsi inovasi merupakan proses mental dan proses perubahan perilaku yang terjadi pada setiap individu untuk menerima dan menolak ide, gagasan, pengetahuan, teknologi, dan penemuan baru. Proses mental dalam adopsi inovasi hadir karena adanya keinginan dari diri individu itu berdasarkan proses panca indera yang dimilikinya. Sementara itu, proses perubahan perilaku dalam adopsi inovasi hadir karena adanya keinginan individu untuk mempelajari sesuatu yang baru akibat dari kebutuhan individu tersebut. Oleh karenanya, adopsi inovasi dapat terjadi pada setiap individu akibat dari kedua proses tersebut sehingga nantinya dapat memberikan perubahan bagi diri individu tersebut dalam lingkungannya.

2. Metode

Jenis penelitian yang dipilih untuk menjawab permasalahan yang ditemukan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan informan sebagai sumber informasi untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian. Teknik yang digunakan dalam memperoleh informan penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*. Informan penelitian yang ditetapkan adalah: *Pertama*, informan kunci yaitu orang yang mengetahui permasalahan penelitian secara mendalam. Adapun yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah

masyarakat di Kawasan Minapolitan. *Kedua*, informan pelengkap yaitu orang yang dianggap mengetahui permasalahan penelitian, walaupun individu tersebut tidak terlibat secara langsung terhadap permasalahan penelitian tersebut. Adapun yang menjadi informan pelengkap dalam penelitian ini adalah Pengelola Kawasan Minapolitan dan Aparatur Desa.

Jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggunakan cara memaparkan data yang diperoleh dari pengamatan kepustakaan dan pengamatan lapangan, kemudian dianalisa dan diinterpretasikan dengan memberikan kesimpulan. Penelitian kualitatif proses penelitiannya berbentuk siklus, yang artinya kegiatan pengumpulan data dan analisa data langsung secara simultan. Untuk itu sangat diperlukan kepekaan teoritik dalam proses pengumpulan data dan analisa data di lapangan, karena itu peneliti sendirilah yang bertindak sebagai instrumen utama.

3. Hasil dan Pembahasan

Nilai-nilai lokal adalah suatu kebiasaan dan tradisi yang berkembang akibat dari adaptasi yang berlangsung dengan lingkungan tempat tinggalnya. Setiap kehidupan masyarakat pada suatu wilayah setidaknya memiliki nilai-nilai lokal yang dijunjung tinggi untuk dipatuhi. Oleh karenanya, keberadaan nilai-nilai lokal di dalam kehidupan bermasyarakat menjadi alat kontrol dalam pola interaksi yang dilakukan. Akibatnya, setiap anggota masyarakat tanpa menyadari harus berusaha mematuhi dan menghormati nilai-nilai lokal yang telah terpelihara secara turun-temurun oleh setiap generasi masyarakat yang ada. Nilai-nilai lokal yang berkembang dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat nantinya akan membentuk sebuah kearifan lokal yang dapat menjadi karakteristik tersendiri bagi masyarakat tersebut. Realitas tersebut menunjukkan bahwa hampir setiap kehidupan masyarakat pada suatu wilayah yang masih kental dengan kebiasaan dan tradisi sebagai wujud dari kearifan lokal akan terus memelihara nilai-nilai lokalitas yang telah diyakininya itu.

Desa Koto Mesjid yang secara struktur wilayah berada dekat dengan perbatasan Provinsi Riau dengan Provinsi Sumatera Barat memiliki karakteristik wilayah perbukitan dan jauh dari aliran sungai. Pada dasarnya daerah ini merupakan wilayah yang diperuntukkan bagi masyarakat program transmigrasi lokal yang wilayahnya digunakan oleh pemerintah untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Masyarakat di desa ini mayoritas masyarakat yang berasal dari Suku Melayu Daratan. Suku Melayu Daratan yang ada di Kabupaten Kampar pada umumnya merupakan keturunan dari Suku Minangkabau. Fakta itu berdasarkan pada hampir seluruh kebudayaan yang berkembang di Suku Melayu Daratan sama persis dengan budaya Suku Minangkabau. Di antara budaya itu adalah garis keturunan yang bersifat matrilineal, nilai adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, dan memiliki *nikik mamak*.

Nilai-nilai lokal yang dianut oleh masyarakat tidak sepenuhnya bersumber dari budaya Minangkabau yang menjadi leluhurnya. Akan tetapi, ada beberapa nilai-nilai budaya Minangkabau yang dijadikan dasar dalam berkembangnya nilai-nilai lokal yang tumbuh di dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai lokal yang dimiliki oleh masyarakat, seperti nilai kekeluargaan, nilai kebersamaan dan nilai senasip sepenangungan terdapat dalam nilai adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Ketiga nilai-nilai lokal yang berkembang dalam kehidupan masyarakat inilah yang menjadi pengikat kuat bagi keberlangsungan kegiatan dalam bidang budidaya perikanan komoditas ikan patin.

Nilai-nilai lokal yang dikembangkan menjadi sebuah kearifan lokal dan modal sosial bagi masyarakat untuk mengembangkan budidaya perikanan komoditas ikan patin sebagai landasan ekonomi masyarakat. Sambil menjunjung tinggi nilai-nilai lokal yang dimiliki, setiap masyarakat dengan tingkat inovatifnya memutuskan untuk mengadopsi budidaya komoditas ikan patin sebagai mata pencaharian baru dan kekuatan ekonomi baru dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

Keberadaan nilai-nilai lokal dalam kehidupan masyarakat menjadi dinamika tersendiri dalam proses adopsi inovasi yang terjadi. Adanya nilai-nilai lokal yang berkembang dalam kehidupan masyarakat ternyata telah menyakinkan sebagian besar masyarakat untuk mengadopsi inovasi budidaya komoditas ikan patin sebagai kontribusi perbaikan mata pencaharian. Selama ini mereka membutuhkan mata pencaharian baru untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi yang dihadapi.

Nilai-nilai lokal dalam kehidupan masyarakat telah ada dan terpelihara secara turun-temurun. Nilai-nilai lokal yang tumbuh merupakan warisan dari para leluhur dan nenek moyang mereka yang ditanamkan sejak dulu. Hal itu karena masyarakat desa berasal dari rumpun dan suku yang sama, yaitu Suku Minangkabau, yang secara turun-temurun memelihara nilai adat budaya yang tinggi. Walaupun tidak lagi tinggal di wilayah aslinya, nilai adat budaya Suku Minangkabau harus terus dilestarikan dan dijaga di manapun bumi dipijak. Prinsip penerapan nilai adat budaya bagi setiap keturunan Suku Minangkabau ini juga dipraktikkan oleh masyarakat di sini. Meskipun penerapan nilai adat budaya dari Suku Minangkabau tidak secara keseluruhan dapat dilakukan, beberapa nilai adat budaya yang penting masih dilaksanakan. Keberadaan nilai-nilai lokal yang ada pada masyarakat juga merupakan cerminan dari nilai adat budaya suku Minangkabau yang disebut dengan istilah *basandi syarak, syarak basandi kitabullah* (adat yang didasarkan/ditopang oleh syariat Islam berdasarkan pula pada Alquran dan hadis).

Masyarakat desa ini yang merupakan masyarakat keturunan Suku Minangkabau tentunya terus memelihara nilai adat budaya yang telah diwariskan. Nilai adat budaya yang dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat menjadi nilai-nilai lokal yang menjadi ciri khas masyarakat. Nilai-nilai lokal yang berkembang dalam kehidupan masyarakat itu adalah nilai kekeluargaan, nilai kebersamaan, dan nilai senasib sepenanggungan. Nilai-nilai itu berkembang dengan sendirinya di dalam kehidupan bermasyarakat berdasarkan perjalanan waktu dan menjadi ciri tersendiri dalam kehidupan masyarakat. Dalam praktik berbudidaya komoditas ikan patin yang dilakukan oleh masyarakat, nilai-nilai lokal yang ada pada masyarakat menjadi faktor penentu kelancaran proses adopsi yang dilakukan. Hal itu disebabkan oleh nilai-nilai lokal yang ada dijadikan sebagai modal sosial bagi masyarakat untuk memulai mencoba dan memutuskan untuk ikut berbudidaya komoditas ikan patin.

Nilai-nilai lokal yang dimiliki oleh masyarakat ternyata telah memberikan kemudahan akses bagi setiap anggota masyarakat yang membutuhkan informasi dan pembelajaran budidaya komoditas ikan patin. Kemudahan akses yang diberikan disebabkan oleh perasaan serumpun dan para pembudidaya komoditas ikan patin merasa semua masyarakat desa ini adalah saudara. Sesama saudara harus dapat saling tolong dan saling merasakan kesusahan yang dialami oleh saudaranya. Realitas inilah yang terjadi saat awal-awal inovasi teknologi bidang perikanan dalam berbudidaya komoditas ikan patin ditemukan dan berhasil dipraktikkan. Beberapa anggota masyarakat menyakini bahwa nilai-nilai lokal yang dimiliki dapat membantunya mendapatkan kemudahan akses dalam mencari informasi dan proses pembelajaran terhadap budidaya

komoditas ikan patin. Masyarakat yang berhasil membuktikan budidaya komoditas ikan patin dapat memberikan kontribusi perbaikan terhadap mata pencaharian baru yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan sukarela membuka diri untuk memberikan informasi dan pembelajaran berbudidaya kepada setiap masyarakat yang membutuhkannya. Keterbukaan yang dilakukan oleh pembudidaya awal atau inovator terhadap akses informasi dan pembelajaran berbudidaya tidak terlepas dari nilai-nilai lokal yang telah berkembang selama ini dalam kehidupan masyarakat.

Nilai-nilai lokal terbukti sangat berperan penting dalam upaya penyebaran informasi atas keberhasilan budidaya komoditas ikan patin yang dilakukan oleh inovator. Nilai-nilai lokal yang dimiliki, bahkan menjadi penggerak awal bagi setiap anggota masyarakat yang ingin melakukan budidaya. Melalui nilai kekeluargaan, masyarakat awal mencoba mencari informasi terkait keberhasilan budidaya yang dilakukan oleh inovator. Apalagi budidaya komoditas ikan patin yang dilakukan ternyata menjanjikan keuntungan yang besar apabila dapat dikelola dengan baik. Berdasarkan nilai kekeluargaan yang telah terpelihara, inovator juga tidak ragu-ragu memberikan informasi yang dibutuhkan oleh setiap anggota masyarakat yang ingin belajar berbudidaya komoditas ikan patin. Dikatakan bahwa masyarakat akan sangat berhati-hati mencari informasi tentang keberhasilan berbudidaya, sebab sebelumnya mereka pernah mengalami kegagalan dalam berbudidaya. Pengalaman kegagalan yang dialami masyarakat membuat mereka benar-benar mencari informasi yang lengkap tentang berbudidaya komoditas ikan patin. Hal itu dilakukan supaya mereka tidak lagi mengalami kegagalan yang sama apabila memutuskan untuk berbudidaya komoditas ikan patin. Dengan demikian, melalui nilai kekeluargaan yang dimiliki, masyarakat meminta inovator untuk benar-benar mengajarkan cara budidaya yang benar agar dapat memperoleh hasil yang memuaskan. Nilai kekeluargaan yang berkembang di antara masyarakat membuat inovator dengan senang hati mengajarkan cara budidaya komoditas ikan patin yang benar. Dengan demikian, nilai kekeluargaan yang ada menjadi jembatan bagi setiap masyarakat untuk dapat belajar dan dibimbing mempraktikkan budidaya komoditas ikan patin.

Selain nilai kekeluargaan yang tumbuh dalam praktik budidaya komoditas ikan patin, ada juga nilai-nilai lokal lainnya yang berkembang, seperti nilai kebersamaan dan nilai senasib sepenanggungan. Nilai-nilai lokal ini berfungsi di saat para pembudidaya dari kelompok yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan inovator melakukan adopsi. Dengan adanya nilai kebersamaan dan nilai senasib sepenanggungan, inovator tetap membukakan jalan dan akses kepada setiap masyarakat yang ingin berbudidaya komoditas ikan patin. Pembelajaran dan bimbingan yang dilakukan inovator kepada masyarakat pembudidaya yang tidak memiliki hubungan keluarga tidak terlepas dari rasa kebersamaan dan rasa senasib sepenanggungan yang dulunya pernah dialami bersama. Sebelum munculnya inovasi budidaya komoditas ikan patin, masyarakat hidup dalam keterpurukan ekonomi yang sama dan memiliki nasib yang sama. Mereka, bahkan berusaha mencari solusi untuk keluar dari keterpurukan ekonomi secara bersama dan dengan aktivitas yang sama. Kebersamaan masyarakat dalam keterpurukan ekonomi yang sama mengembangkan nilai kebersamaan dan nilai senasib sepenanggungan yang tinggi di antara sesama.

Nilai-nilai lokal yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat dan terpelihara dengan baik ternyata menjadi modal sosial dalam proses adopsi budidaya komoditas ikan patin. Nilai-nilai lokal yang ada memberikan peluang kepada masyarakat untuk percaya dan yakin terhadap masyarakat lainnya dalam memberikan pinjaman bibit dan

pakan untuk memulai budidaya komoditas ikan patin. Kepercayaan dan keyakinan yang dimiliki oleh pembudidaya yang mempunyai pembibitan dan pembuatan pakan untuk memudahkan masyarakat yang ingin mencoba berbudidaya dalam bentuk pinjaman. Hal itu tidak terlepas dari telah terbudayanya nilai-nilai lokal yang ada dalam masyarakat. Di saat masyarakat tidak memiliki modal awal dalam berbudidaya komoditas ikan patin, bahkan inovator juga tetap mencarikan solusi pinjaman modal kepada pihak ketiga dengan memberikan jaminan bahwa masyarakat dapat mengembalikan pinjaman modal yang dilakukan. Bentuk-bentuk kemudahan akses yang dilakukan oleh inovator kepada seluruh masyarakat yang mengadopsi budidaya komoditas ikan patin didasari oleh nilai kekeluargaan, kebersamaan, dan senasib sepenanggungan yang telah udah tumbuh secara turun temurun. Oleh karenanya, nilai-nilai lokal yang ada di dalam kehidupan masyarakat menjadi faktor penentu terhadap lancarnya proses adopsi inovasi yang dilakukan.

4. Kesimpulan dan Saran

Dinamika proses adopsi inovasi yang berlangsung di Kawasan Minapolitan Desa Koto Mesjid mengandung nilai-nilai lokal sebagai faktor penentunya. Keberadaan nilai-nilai lokal yang telah diwariskan oleh para leluhur ternyata mampu menjadi jembatan penghubung bagi masyarakat untuk dibimbing dan diarahkan dalam proses budidaya komoditas ikan patin. Nilai-nilai lokal yang berkembang dan terbudaya dengan baik dalam kehidupan masyarakat disebabkan oleh asal mereka yang dari rumpun etnik yang sama, yaitu Suku Melayu Daratan. Suku Melayu Daratan yang ada di Kabupaten Kampar pada dasarnya merupakan keturunan Suku Minangkabau yang berasal dari Sumatera Barat. Masyarakat Suku Minangkabau dalam kehidupan sosialnya sangat teguh menjalankan nilai adat budaya yang telah diwariskan para pendahulunya. Dalam masyarakat Suku Minangkabau, nilai adat budaya yang diwariskan dikenal dengan istilah *basandi syarak, syarak basandi kitabullah*, yaitu adat yang didasarkan/ditopang oleh syariat agama Islam yang berdasarkan pula pada Alquran dan hadis. Nilai adat *basandi syarak, syarak basandi kitabullah* dalam budaya Suku Minangkabau memiliki enam kategori nilai, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persaudaraan, kesatuan dan persatuan, musyawarah dan demokrasi, ahlak dan budi pekerti, serta nilai gotong royong/sosial kemasyarakatan. Keenam nilai ini harus dijunjung tinggi dan dipraktikkan bagi setiap anak keturunan suku Minangkabau di mana pun mereka berdomisili.

Masyarakat desa ini yang merupakan keturunan suku Minangkabau pada dasarnya juga mempraktikkan nilai adat budaya *basandi syarak, syarak basandi kitabullah* di dalam kehidupannya. Namun, praktik nilai adat budaya yang dikerjakan tidak mencakup keseluruhan nilai-nilai yang ada. Hal ini karena masyarakat tidak lagi berdomisili di wilayah suku Minangkabau, yaitu wilayah Sumatera Barat. Dengan demikian, dalam mempraktikkan nilai adat budaya yang diwariskan, mereka menyesuaikan dengan kondisi wilayah yang ditempati oleh masyarakat keturunan suku Minangkabau tersebut. Nilai adat budaya yang dipraktikkan akan menjadi nilai-nilai lokal yang berkembang, tumbuh, dan terbudaya dalam setiap sendi-sendi kehidupan masyarakat tersebut.

Nilai-nilai lokal yang tumbuh dan berkembang serta terbudaya dalam kehidupan masyarakat di Desa Koto Mesjid adalah sebagai berikut. Pertama, nilai kekeluargaan merupakan suatu nilai yang menekankan kepada setiap individu masyarakat tentang persaudaraan. Artinya bahwa masyarakat yang berasal dari rumpun etnik dan suku yang sama harus memiliki pandangan dan pemikiran bahwa mereka semua adalah saudara. Dengan adanya nilai kekeluargaan ini, setiap individu masyarakat harus mampu saling

tolong. Keterikatan nilai kekeluargaan yang dimiliki juga akan menciptakan hubungan silaturahmi yang harmonis antara masyarakat sehingga hubungan sosial yang dikembangkan menjadi lebih dinamis.

Kedua, nilai kebersamaan merupakan suatu nilai yang menekankan bahwa setiap individu masyarakat pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk memperoleh sesuatu yang ada di desa. Hal itu berarti masyarakat memiliki persamaan hak dan kewajiban untuk memberikan dan menerima informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat lainnya dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, nilai kebersamaan ini mengarahkan kepada setiap individu masyarakat untuk dapat bekerja sama dan bergotong royong antara sesama masyarakat dalam setiap menghadapi permasalahan sosial yang datang di desa tersebut. Rasa kebersamaan yang dimiliki masyarakat tentunya akan mengikat hubungan kekeluargaan yang erat di antara sesamanya guna mengatasi permasalahan kehidupan yang dihadapi masyarakat.

Ketiga, nilai senasib sepenanggungan merupakan suatu nilai yang menekankan sifat kepedulian dari setiap individu masyarakat dengan individu masyarakat lainnya dalam desa tersebut. Rasa kepedulian yang tinggi dalam diri masyarakat akan melahirkan sikap tolong di antara masyarakat. Bentuk kepedulian yang muncul dalam diri masyarakat dapat bersifat moral maupun materal untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Dengan tingginya sifat kepedulian yang muncul, masyarakat yang mengalami kesusahan dalam kehidupannya akan merasa diperhatikan oleh masyarakat lainnya yang peduli dengan kondisi sosial yang dialami. Nilai senasib sepenanggungan juga muncul karena seluruh masyarakat di desa tersebut pernah mengalami kesusahan ekonomi bersama. Peristiwa itu membuat setiap masyarakat memiliki rasa peduli yang tinggi dengan sesamanya, yang akhirnya berkembang menjadi nilai yang dijunjung tinggi untuk dilaksanakan.

Daftar Pustaka

- Albury David., (2003)., *Innovation in the Public Sector. Discussion paper.*, The Mall., London.
- Agustin Irdiani., (2012)., *Peran Knowledge Sharing Di Kalangan Karyawan (Studi Deskriptif Pada Pt. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Distribusi Jawa Timur).*, Jurnal Ilmu Informasi dan Perpustakaan., Fisip – Unair., Surabaya.
- Burhan Bungin., (2011)., *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya.*, Edisi Kedua., Kencana Prenada Media Group., Jakarta.
- Elok Mulyoutami, Endy Stefanus, Win Schalenbourg, Subekti Rahayu dan Laxman Joshi., (2005)., *Pengetahuan Lokal Petani Dan Inovasi Ekologi Dalam Konservasi Dan Pengolahan Tanah Pada Pertanian Berbasis Kopi Di Sumberjaya Lampung Barat.*, Word Agroforestry Center – ICRAF., Bogor.
- Emzir, Prof. Dr. M.Pd., (2012)., *Metodologi Penelitian Kualitatif : Analisis Data.*, Raja Grafindo Persada., Jakarta.
- Everett M. Rogers dan F. Floyd Shoemaker., (1981)., *Memasyarakatkan Ide-ide Baru.*, Penyusun Abdillah Hanafi., Penerbit Usaha Nasional., Surabaya.
- Halvorsen, Thomas, et al., (2005)., *On the Differences between Public and Private Sector Innovations.*, Publin Report., Oslo.
- Heti Resnawati., (2012)., *Inovasi Teknologi Pemanfaatan Bahan Pakan Lokal Mendukung Pengembangan Industri Ayam Kampung.*, Volume 5 Nomor 2., Jurnal Pengembangan Inovasi Pertanian., Bogor.

- Jhon W. Creswell., (2012)., *Research Design : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Mixed.*, Pustaka Pelajar., Yogyakarta.
- Kusuma Diwyanto., (2008)., *Pemanfaatan Sumber Daya Lokal Dan Inovasi Teknologi Dalam Mendukung Pengembangan Sapi Potong di Indonesia.*, Volume 1 Nomor 3., *Jurnal Pengembangan Inovasi Pertanian.*, Bogor.
- Mahdita Paramita., (2014)., *Dinamika Inovasi dalam Kebijakan Perumahan Pemerintah Daerah di Era Desentralisasi.*, Desertasi Studi Kebijakan., Sekolah Pascasarjana UGM.
- Nonaka Ikujiro and Hirotaka Tekauchi., (1995)., *The Knowledge Creating Company How Japanese Corporation Create The Dynamic of Innovation.*, Oxford University Press., New York.
- Rogers, E.M., (2003)., *Diffusion of Innovations 5th edition.*, Free Press. New York.
- Welli Yuliatmoko., (2011)., *Inovasi Teknologi Produk Pangan Lokal Untuk Percepatan Ketahanan Pangan.*, Universitas Terbuka., Jakarta.
- Yovita Anggita Dewi., (2012)., *Inovasi Spesifik Lokasi Untuk Inkubator Teknologi Mendukung Pengembangan Ekonomi Lokal.*, Volume 10 Nomor 4., *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*
- Yapeng Zhu., (2013)., *Policy Entrepreneurship, Institutional Constraints, and Local Policy Innovation in China.*, *China Review*, Vol. 13, No. 2, pp. 97-122., Chinese University Press

Konflik Perebutan Pulau Berhala antara Provinsi Jambi dan Provinsi Kepulauan Riau

Mahmuzar, Candra Jon Asmara, Rusdi, dan Afrinaldy Rustam

Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, UIN Suska Riau

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik perebutan Pulau Berhala antara Provinsi Jambi dan Provinsi Kepulauan Riau. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum empiris mempunyai dua pengertian yakni; *pertama*, meneliti hukum yang hidup dalam masyarakat, dan yang *kedua* meneliti efektifitas suatu peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku, termasuk vonis pengadilan dan keputusan tata usaha negara dalam masyarakat. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kasus sengketa batas daerah Jambi dan Kepri mekanisme penyelesaian sengketa yang digunakan melalui dua jalur, yakni: penyelesaian sengketa batas daerah secara non hukum, dan penyelesaian secara hukum. Secara non hukum disebut juga penyelesaian sengketa melalui administrasi pemerintahan, dalam hal ini dimediasi oleh Kemendagri dan Gubernur namun tidak berhasil. Sementara penyelesaian sengketa secara hukum ditempuh melalui *judicial review* dan gugatan yang diajukan oleh para pihak ke Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi, yang menetapkan Pulau Berhala Masuk Provinsi Kepri.

Kata Kunci: konflik perebutan, batas daerah, Pulau Berhala, administrasi pemerintahan

Abstract

This study aims to analyze conflicts over the Berhala Island between Jambi Province and Riau Islands Province. This research is an empirical legal research and normative legal research. Empirical legal research has two meanings namely; firstly, it examines the laws that live in society, and the second examines the effectiveness of an existing legislation, including court sentences and state administrative decisions in society. The results of the study concluded that the Jambi border dispute cases and the Riau Islands dispute resolution mechanism are used through two channels, namely: non-legal regional boundary dispute resolution, and legal settlement. Non-law is also called dispute resolution through government administration, in this case mediated by the Ministry of Home Affairs and the Governor but without success. While legal dispute resolution is pursued through judicial review and lawsuits filed by the parties to the Supreme Court or the Constitutional Court, which determines Berhala Island as a Province of the Riau Islands.

Keywords: seizure conflicts, regional boundaries, Berhala Island, government administration

1. Pendahuluan

Sengketa perebutan Pulau Berhala antara Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dengan Provinsi Jambi kembali menghangat, berawal dari keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor; 44/2011 tertanggal 27 September 2011 yang menetapkan Pulau Berhala masuk ke dalam wilayah administratif Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi setelah Kabupetan Tanjung Jabung dimekarkan menjadi tiga kabupaten yakni Kabupaten Tanjung Jabung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur.

Peristiwa itu menimbulkan kemarahan masyarakat Kepri. Mereka tidak menerima Keputusan Mendagri tersebut dan melarang Mendagri berkunjung ke Pulau Berhala, karena sebelumnya Pulau Berhala merupakan bagian dari wilayah administrasi Provinsi Riau yang secara otomatis ketika Kepri menjadi provinsi sendiri pada tahun 2002 sebagai hasil pemekaran dari Provinsi Riau, Pulau Berhala mestinya masuk ke dalam wilayah administratif Provinsi Kepri.

Untuk merebut kembali Pulau Berhala, Pemerintah Provinsi Kepri mengajukan *judicial review* terhadap Penjelasan Pasal 3 UU Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena Penjelasan Pasal 3 UU tersebutlah yang menjadi dasar Mendagri menetapkan Pulau Berhala masuk ke dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi.

Penjelasan Pasal 3 UU tersebut berbunyi; "Kabupaten Kepulauan Riau dalam undang-undang ini, tidak termasuk Pulau Berhala, karena Pulau Berhala termasuk di dalam wilayah administratif Provinsi Jambi sesuai dengan Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi.

Setelah melalui proses sidang yang cukup panjang, MK berdasarkan amar putusannya mengabulkan permohonan Pemda Provinsi Kepri tersebut dengan mengacu pada putusan uji materi yang dilakukan sebelumnya oleh Mahkamah Agung (MA) sebagaimana termuat dalam Putusannya Nomor; 49 P/HUM/2011 tertanggal 9 Februari 2011, yang menetapkan Pulau Berhala menjadi bagian dari wilayah administratif Kabupaten Lingga, Provinsi Kepri. MK dalam amar putusannya menyatakan; "Penjelasan Pasal 3 UU Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Namun, hingga saat ini kedua belah pihak masih berkonflik, masing-masing daerah masih mengoperasional kantor pemerintahan guna melayani kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga, Provinsi Kepri mempertahankan dan mengoperasionalkan kantor pemerintahan guna melayani kepentingan masyarakat setempat yang pro terhadap Provinsi Kepri karena MA dan MK menyatakan status Pulau Berhala merupakan bagian dari wilayah administratif Kabupaten Lingga, Provinsi Kepri. Sebaliknya, Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi juga mengoperasional kantor pemerintahannya untuk melayani kepentingan masyarakat yang pro terhadap Provinsi Jambi dengan alasan karena sedang mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan MA yang memasukkan Pulau Berhala ke dalam wilayah administratif Kabupaten Lingga, Provinsi Kepri.

Menurut penulis, persoalan konflik perebutan Pulau Berhala antara Provinsi Kepri dengan Provinsi Jambi ini harus segera diselesaikan, tidak boleh berlarut-larut karena dapat menimbulkan persoalan lebih rumit lagi di kemudian hari yakni konflik horizontal antar sesama anggota masyarakat, terutama bagi masyarakat yang pro dan yang kontra. Untuk itu penulis memandang persoalan ini sangat urgen untuk diteliti sehingga dapat dicarikan solusinya di kemudian hari.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum empiris mempunyai dua pengertian yakni; *pertama*, meneliti hukum yang hidup dalam masyarakat, dan yang *kedua* meneliti efektifitas suatu peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku, termasuk vonis pengadilan dan keputusan tata usaha negara dalam masyarakat. Sedangkan penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas dan falsafah (dogma dan doktrin) hukum, dan dalam hal penelitian ini sebagaimana diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Penelitian ini memerlukan bahan atau data berupa; (1), bahan hukum primer

yaitu bahan hukum yang diperoleh di lapangan berupa Putusan Mahkamah Agung, Putusan Mahkamah Konstitusi dan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang berkaitan dengan penyelesaian status Pulau Berhala yang terjadi antar Provinsi Jambi dan Provinsi Kepri dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemerintahan daerah serta pembentukan daerah otonom yang bersangkutan; (2), Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa penjelasan peraturan perundang-undangan, naskah akademik peraturan perundang-undangan, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini, kamus, ensiklopedia dan bahan lain di luar hukum yang menunjang penelitian ini.

Untuk memperoleh bahan atau data tersebut di atas, penulis terjun langsung ke lapangan untuk melihat efektifitas putusan pengadilan dan keputusan tata usaha negara mengenai penyelesaian konflik tapal batas antar daerah otonom. Data dikumpulkan memakai metode wawancara dengan key informan yakni Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang terdapat di daerah, Provinsi Jambi dan Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki persoalan penetapan status Pulau Berhala. Kemudian warga masyarakat yang berkompeten dengan masalah penelitian ini.

Dalam penelitian hukum empiris pengolahan data pada prinsipnya mengklasifikasi dan memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan memecahkan masalah penelitian. Sedangkan dalam penelitian hukum normatif, pengolahan data pada prinsipnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematika terhadap bahan-bahan hukum. Artinya membuat klasifikasi terhadap bahan hukum untuk memudahkan menganalisis dan mengkonstruksinya. Oleh karena itu, sesuai dengan jenis (data) bahan hukum (primer dan sekunder) yang didasarkan kepada data kepustakaan maka analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu; mengambil kesimpulan berdasarkan pemikiran logis, berdasarkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat untuk menyusun suatu konsep bagaimana sebaiknya menyelesaikan konflik tapal batas wilayah antar daerah otonom di masa yang akan datang. Untuk itu penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif, berangkat dari teori-teori yang bersifat umum, kemudian dihubungkan dengan kenyataan obyektif (lapangan), menggunakan pendekatan yuridis, politis dan filosofis.

3. Hasil dan Pembahasan

Asal Usul Nama Pulau Berhala

Pulau Berhala terletak di posisi 0° 51' 23' Lintang Selatan (LS) dan 104° 24' 35' Bujur Timur (BT), terdiri dari tiga gugus pulau kecil dengan luas kurang lebih 10 Km², dengan jumlah penduduk 51 Kepala Keluarga (KK). Air laut yang mengelilinginya berwarna biru dan jernih.

Nama Pulau ini berasal dari nama seorang Bangsawan Turki yakni Ahkmad Barus II yang dikenal oleh masyarakat Jambi dengan Paduka Berhalo. Akhmad Barus II adalah putra seorang raja Turki. Perjalanan Paduka Berhala ketika itu yakni hendak menyiarkan agama Islam, tetapi ia justru terdampar di pulau tersebut.

Akhmad Barus II menikahi seorang ratu kerajaan Melayu Jambi bernama Putri Salaro Pinang Masak. Keduanya memimpin kerajaan Melayu II hingga turun-temurun. Keturunan dari keduanya dikenal oleh masyarakat Jambi dengan gelar Orang Kayo Pingal, Orang Kayo Kadataran, Orang Kayo Hitam, dan Orang Kayo Gemuk. Keturunannya yang paling terkenal adalah Orang Kayo Hitam dengan keris Siginjei-nya yang menjadi raja Jambi pada generasi itu. Dan oleh karena itulah Pulau Berhala menurut masyarakat Jambi mempunyai kaitan erat dengan mereka terutama masyarakat

Tanjung Jabung, Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur.

Namun dalam kisah yang lain disebutkan oleh Prof. Dr. Aulia Tasman dari Universitas Jambi, Datuk Paduka Berhalo adalah keturunan dari keluarga kerajaan Majapahit yakni Adityawarman. Menurutnya, Adityawarman pergi ke tanah melayu meninggalkan Majapahit karena tidak berhasil menjadi Raja di Kerajaan Majapahit. Dia menikahi seorang putri bangsawan kerajaan melayu Jambi, dan kemudian diangkat menjadi raja pada tahun 1347 M dengan gelar Adityawarmadaya Pratara Parakra Marajendra Mauliwarmadewa.

Pada saat menjadi Raja beliau menyadari bahwa ada agama baru yakni Islam yang akan merasuki agama Budha yang waktu itu dia anut dan juga oleh masyarakat Jambi. Masyarakat yang beragama Budha khawatir, jika banyak penduduk yang beragama Islam maka kedudukan Prabu akan menjadi lemah. Karena itu wargapun mempunyai inisiatif menyembah patung arca Bhairawa yang dipandang sebagai lambang yang dapat melindungi Adityawarman dari penyebaran Islam. Namun Islam di Jambi terus berkembang sehingga Adityawarmanpun memindahkan kerajaan ke Pagaruyung dan menjadikannya sebagai kerajaan baru.

Menurut Aulia Tasman, Gelar Paduko Berhalo itu bukan diberikan oleh masyarakat pemeluk agama Budha, akan tetapi diberikan oleh penganut Islam karena dalam Islam patung yang disembah disebut berhala. Patung Adityawarman disebut berhala Adityawarman, Patung Datuk Paduko Berhalo Adityawarman.

Penyebab Konflik Perebutan Pulau Berhala antara Kepri dan Jambi

Sengketa tentang status Pulau Berhala sebenarnya sudah sangat lama yakni semenjak pada masa Orde Baru, tepatnya pada tahun 1984. Sengketa itu bermula ketika Pemerintah Provinsi Jambi mengakui secara sepihak bahwa Pulau Berhala menjadi bagian dari wilayah administrasinya. Klaim sepihak Pemerintah Provinsi Jambi ini diketahui oleh Camat Singkep waktu mengadakan kunjungan ke Pulau Berhala sebagai bagian dari Kelurahan Dabo, Kecamatan Singkep yang melihat adanya spanduk yang terbentang berbunyi: "Selamat Datang Bapak Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tanjung Jabung ke Pulau Berhala". Temuan klaim itu menyebabkan terjadinya pertikaian antara Pemerintahan Provinsi Riau (waktu itu Kepri masih menjadi bagian Provinsi Riau) dengan Pemerintah Provinsi Jambi. Pada hal sudah berabad-abad lamanya masyarakat Riau-Lingga secara turun-temurun, secara de facto dan de jure meyakini bahwa Pulau Berhala adalah milik dan bagian dari wilayah Kerajaan Melayu Riau-Lingga (sekarang Kabupaten Lingga).

Pertikaian itu semakin parah ketika disahkannya UU No. 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pasal 9 ayat 4 UU tersebut menyatakan, bahwa "Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai batas wilayah di sebelah Utara yakni dengan Laut Cina Selatan dan sebelah Timur dengan Laut Cina Selatan". Ketentuan itu menimbulkan kerancuan sekaligus keresahan dan memperpanjang kekisruhan di antara Riau (Kepri) dengan Jambi karena Pasal itu dapat memberi makna jauh lebih luas; bukan saja gugusan Pulau Berhala dekat dengan Selat Berhala, akan tetapi Kabupaten Lingga dan Kabupaten Natuna bahkan semua pulau-pulau yang berada dalam radius Laut Cina Selatan, secara otomatis bisa menjadi bagian wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Dan adalah suatu kemuskilan dan tidak dapat diterima oleh masyarakat yang berpikiran waras khususnya di Kepulauan Riau.

Kemudian ketika Provinsi Kepri terbentuk berdasarkan UU No. 25 Tahun 2002

tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, Pulau Berhala secara tegas di dalam Penjelasan Pasal 3 disebutkan tidak termasuk ke dalam wilayah administrasi Provinsi Riau karena Pulau Berhala berdasarkan batas wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana disebutkan di atas masuk ke dalam wilayah administrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Namun, masyarakat Kepri berpendapat, karena dulu Pulau Berhala merupakan bagian dari wilayah administrasi Provinsi Riau, dan ketika Kepri terbentuk sebagai Provinsi sendiri pembuat UU tidak memasukkan Pulau Berhala ke dalam Provinsi Kepri, maka Pulau Berhala berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang melandasinya tetap menjadi bagian dari Provinsi induk yaitu Provinsi Riau, bukan serta merta masuk ke Provinsi Jambi. Namun, seharusnya atau idealnya masuk ke dalam wilayah administrasi Provinsi Kepri.

Pendapat di atas sejalan dengan UU No. 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga, yang menetapkan batas wilayah Kabupaten Lingga sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) huruf (c) yang berbunyi; "Kabupaten Lingga mempunyai batas wilayah sebelah selatan berbatasan dengan Laut Bangka dan Selat Berhala".

Ketentuan tersebut memperjelas Status Pulau Berhala termasuk pulau-pulau di sekitarnya yang secara geografis berada di sebelah utara (bukan di selatan) Selat Berhala, sehingga secara *de jure* dan *de facto* tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah hukum dan administrasi pemerintahan Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. UU No. 31 Tahun 2003 menghapus ketentuan UU No. 54 tahun 1999, khususnya mengenai batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 4 sebagaimana disebut di atas, gugur atau batal demi hukum. Dengan demikian Pulau Berhala yang diklaim secara sepihak oleh Provinsi Jambi secara eksplisit dapat dianggap sudah berakhir.

Namun celakanya, pada tahun 2011, Mendagri Gamawan Fauzi melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor; 44/2011 tertanggal 27 September 2011 menetapkan Pulau Berhala masuk ke dalam wilayah administratif Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Hal inilah kemudian yang menyebabkan menghantatnya kembali perebutan Pulau Berhala antara Provinsi Kepri dengan Provinsi Jambi.

Penyelesaian Konflik Perebutan Pulau Berhala antara Kepri dan Jambi

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, penyelesaian konflik atau sengketa dapat dilakukan dengan dua cara yakni melalui pengadilan atau di luar pengadilan yakni mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Berdasarkan tata cara penyelesaian sengketa tersebut, penyelesaian konflik perebutan Pulau Berhala antara Pemerintah Provinsi Kepri dengan Provinsi Jambi dilakukan melalui mediasi, dan pengajuan gugatan ke pengadilan yakni MA dan MK yang selanjutnya akan dibahas sebagai berikut;

A. Mediasi

Dalam praktek ketatanegaraan, sebelum pemerintah berwenang mengambil keputusan, biasanya pihak-pihak yang bersengketa dipanggil untuk mencari titik temu (musyawarah) sehingga keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah yang berwenang adalah keputusan hasil musyawarah yang dimediasi oleh pemerintah yang berwenang. Dalam kasus perbutan Pulau Berhala, pemerintah yang berwenang menyelesaikan sengketa adalah Mendagri karena sengketa tersebut adalah sengketa wilayah antar

Provinsi. Hal itu diatur dalam UU tentang Pemerintah Daerah.

Pasal 198 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan: (1) Apabila terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, Gubernur menyelesaikan perselisihan dimaksud; ayat (2) Apabila terjadi perselisihan antar provinsi, antara provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya, serta antara provinsi dan kabupaten/kota di luar wilayahnya, Menteri dalam Negeri menyelesaikan perselisihan dimaksud; (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat final.

Dalam kasus perebutan Pulau Berhala antara Pemerintah Provinsi Kepri dan Jambi, Mendagri sudah memanggil kedua belah pihak untuk melakukan mediasi, namun tidak ada titik temu karena Provinsi Kepri berpendirian Pulau Berhala mesti masuk ke dalam wilayah administrasi Kepri karena dulu bagian dari wilayah Propinsi Riau, yakni Desa Dabo Kecamatan Singkep. Di pihak lain Provinsi Jambi berpegang pada UU tentang pembentukan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang menetapkan Batas Tanjung Jabung Timur di sebelah utara dan Selatan adalah Laut Cina Selatan. Di samping itu, mereka berpendapat orang pertama yang menghuni Pulau Berhala berasal dari Jambi yakni Datuk Paduko Berhalo dan keturunannya yang hingga saat ini menguasai 18 ha tanah di Pulau Berhala.

Karena mediasi tidak menghasilkan titik temu akhirnya Mendagri menetapkan Pulau Berhala masuk ke dalam wilayah administrasi Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi melalui Permendagri Nomor 44 tahun 2011 tertanggal 27 September 2011. Mendagri berpendirian bahwa status Pulau Berhala sudah terang dan jelas yakni masuk ke dalam wilayah administrasi Provinsi Jambi, baik berdasarkan UU Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur maupun berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2002 tentang Provinsi Kepri yang tidak memasukkan Pulau Berhala ke dalam wilayah administrasi Kepri.

Keputusan Mendagri di atas tidak dapat diterima oleh Pemerintah Provinsi Kepri, dalam rangka untuk mengembalikan Pulau Berhala ke Pangkuan Kepri mereka pengajuan gugatan ke pengadilan yakni ke MA dan MK.

B. Melalui Putusan Mahkamah Agung

Permendagri Nomor 44 tahun 2011 yang menetapkan Pulau Berhala masuk ke dalam wilayah administrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi digugat oleh Pemerintah Provinsi Kepri ke MA karena MA di pandang sebagai Pengadilan yang berwenang memutus perkara konflik atau pertentangan antara peraturan perundang-undangan yakni peraturan perundang undangan di bawah UU sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 24 UUD 1945 yang berbunyi; Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan yang derajatnya di bawah UU terhadap UU.

Dalam hirarki peraturan perundangan-undangan di Indonesia, derajat Permendagri berada di bawah UU, oleh karena itu langkah Pemerintah Provinsi Kepri menggugat Permendagri Nomor 44 Tahun 2011 ke MA merupakan langkah yang sudah tepat dan konstitusional walaupun menggugat kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat, atasan sekaligus. Permendagri No. 44 Tahun 2011 tersebut dipandang oleh Pemerintah Provinsi Kepri bertentangan dengan UU Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga, yang menetapkan batas wilayah Kabupaten Lingga sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) huruf (c), sebelah selatan berbatasan dengan Laut Bangka dan Selat Berhala." Artinya, menurut ketentuan ini, Pulau Berhala

masuk ke dalam wilayah administrasi Kabupaten Lingga.

Sebelum materi gugatan diperiksa oleh MA, MA memediasi kedua belah pihak dengan berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Agung tentang Mediasi perkara dengan menunjuk seorang hakim sebagai mediator. Namun, setelah mediasi berjalan dua kali, kesepakatan tidak dicapai, masing-masing pihak tetap pada pendiriannya sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya.

Karena mediasi di MA tidak tercapai, maka MA memeriksa pokok perkara serta bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam sidang di MA yakni yudicial review (uji materi) Permendagri Nomor 44 Tahun 2011 terhadap UU Nomor 31 Tahun 2003. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, akhirnya MA memutuskan, mengabulkan permohonan uji materi yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi Kepri dengan menyatakan Permendagri Nomor 44 Tahun 2011 bertentangan dengan UU Nomor 31 Tahun 2003 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Artinya Pulau Berhala menjadi bagian dari wilayah administrasi Kabupaten Lingga Berdasarkan Putusan No. 49 P/HUM/2011 tertanggal 9 Februari 2011.

C. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi

Walaupun MA sudah mengatakan Permendagri Nomor 44 Tahun 2011 bertentangan dengan UU Nomor 31 Tahun 2003 dan menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, namun UU Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepri masih berlaku, yang mana dalam ketentuan Penjelasan Pasal 3 undang-undang tersebut menyebutkan Pulau Berhala dikecualikan atau tidak termasuk ke dalam wilayah administrasi Provinsi Kepri.

Oleh karena itu, langkah selanjutnya yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Kepri yakni mengajukan yudicial review terhadap ketentuan Penjelasan Pasal 3 UU Nomor 25 Tahun 2002 ke Mahkamah Konstitusi karena di pandang bertentangan dengan UUD 1945.

Setelah melalui pemeriksaan yang cukup lama akhirnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pengujian Penjelasan Pasal 3 UU No. 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau terkait sengketa Pulau Berhala. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengacu kepada putusan uji materi Mahkamah Agung No. 49 P/HUM/2011 tertanggal 9 Februari 2011 yang telah menetapkan Pulau Berhala bagian dari wilayah Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau.

Keputusan Mahkamah Konstitusi yang sudah masuk dalam keputusan final, namun menimbulkan berbagai persoalan, seperti banyaknya fasilitas umum yang sudah dibangun oleh Pemerintah Provinsi Jambi. Hal ini diungkapkan oleh Kasubag Tata Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dimana adanya rumah layak huni yang dibangun oleh Pemprov Jambi. Sebanyak 20 unit (Wawancara Kamis 19 Oktober 2017).

4. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. *Pertama*, bahwa proses pemekaran daerah yang menghasilkan daerah otonom baru yakni Provinsi Kepulauan Riau yang menimbulkan konflik dalam penetapan Pulau Berhala dengan Provinsi Jambi. Konflik batas Pulau Berhala selama ini banyak dimotivasi oleh kepentingan politis dan ekonomis. terhadap kasus-kasus sengketa batas daerah Jambi dan Kepri, mekanisme penyelesaian sengketa yang digunakan melalui dua jalur, yakni: penyelesaian sengketa batas daerah secara non hukum, dan penyelesaian secara hukum. Secara non hukum disebut juga penyelesaian sengketa melalui

administrasi pemerintahan, dalam hal ini dimediasi oleh Kemendagri dan Gubernur namun tidak berhasil. Sementara penyelesaian sengketa secara hukum ditempuh melalui *judicial review* dan gugatan yang diajukan oleh para pihak ke Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi, yang menetapkan Pulau Berhala Masuk Provinsi Kepri.

Daftar Pustaka

- Mahmuzar dkk, (2014), *Penyelesaian Konflik Tapal Batas Wilayah di Era Otonomi Daerah; Studi Penyelesaian Konflik Tapal Batas Wilayah di Provinsi Riau*, Penelitian LPPM UIN Suska Riau
- Maria S. W. Sumardjono, (1997) *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, Sebuah Panduan Dasar*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Moore (1986). www.wilayah.perbatasan.com
- Nurnaningsi Amriani, (2012) *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta : PT. Rajawali Press
- Said Saile. (2009). *Pemekaran Wilayah Sebagai Buah Demokrasi di Indonesia*. Jakarta : Restu Agung.
- Soekanto, Soerjono. 2004. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Widjaja, HAW. 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet ke 3, UI Pres, Jakarta.

Partisipasi dan Aksi Kaum Millennial Untuk Melawan Informasi Hoaks pada Pesta Demokrasi Pemilu Presiden 2019

Made Devi Wedayanti

Universitas Islam Riau
Email: madedewiwedayanti@soc.uir.ac.id

Abstrak

Terselenggaranya pesta demokrasi di Negara Indonesia, merupakan hak dan kewajiban dalam memilih pemimpin negara serta menjadi perwakilan masyarakat yang nantinya akan mendapatkan mandat untuk memajukan dan mensejahterakan negaranya. Pesta Demokrasi tentunya tidak bisa lepas dari seluruh komponen, golongan dan lapisan masyarakat. Generasi masa kini atau yang familarnya yaitu kaum milenial khususnya di Kota Pekanbaru, mempunyai peran penting dalam menentukan hak pilih suaranya dalam Pemilu serta lebih kritis terhadap seluruh media informasi yang didapat mengenai Pesta Demokrasi. Persoalan maraknya informasi HOAKS tentu membuat seluruh lapisan masyarakat ragu atas informasi yang diperoleh dan juga menjadi dilema apakah informasi tersebut benar keakuratannya atau hanya kebohongan semata (HOAKS). Apalagi menentang aksi pada tanggal 21-22 Mei 2019 pemerintah melakukan tindakan yang merugikan sebagian lapisan masyarakat yaitu membatasi penggunaan internet semata-mata hanya untuk menghindari penyebaran hoaks yang dapat menyulut kerusuhan dalam aksi menentang hasil pemilu sehingga masyarakat tidak bisa mengirim atau mengunduh video dan foto di Media sosial. Untuk itulah dilakukan penelitian dengan metode kualitatif. Hasil Penelitian adalah generasi masa kini atau kaum millennial membentuk Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO). Kontribusi yang dilakukan MAFINDO sangatlah berperan penting untuk mengurangi informasi hoaks yang masuk di kalangan masyarakat. Adapun program yang dilakukan MAFINDO yaitu *Factchecking*, Edukasi, Advokasi, Silaturahmi. Hasil dari penelitian ini bahwa MAFINDO adalah salah satu relawan yang konsisten sampai saat ini melaksanakan program manangkal informasi hoaks.

Kata Kunci: Generasi, Kaum Millennial, Pesta Demokrasi, Hoaks, Negara

Abstract

The implementation of the democratic party in the State of Indonesia, is the right and necessity in choosing a state leader who will represent the people who will get the mandate to advance and prosper the country. Democracy party certainly cannot be separated from all components, groups and layers of society. The current generation or whose familiars are special millennials in Pekanbaru City, have an important role in determining their voting rights in the General Election and more importantly for all information media obtained from the Democratic Party. Information about the rise of HOAKS, of course, makes all people doubt the information obtained and also becomes a dilemma whether this information is accurate or just a lie (HOAKS). More than just an action on 21-22 May 2019, the government took actions to reduce some people by using the internet for free to avoid the spread of hoaks that could spark riots in actions that increase election results so that people cannot send or download videos and photos on Social media. To do research with qualitative methods. The results of the study are the current generation or millennial form the Indonesian Anti-Defamation Society (MAFINDO). Contributions made by MAFINDO decide on the importance of reducing information hoaxes that enter the community. The programs carried out by MAFINDO are Factchecking, Education, Advocacy, Silaturahmi. The results of this study that MAFINDO is one of the volunteers approved to date conducted a hoax information program.

Keywords: Generations, Millennials, Democratic Feast, Hoaks, Countries

PENDAHULUAN

Media merupakan salah satu sarana penting dalam demokrasi. Keberadaan media dibutuhkan agar jalannya demokrasi tidak mengalami ketimpangan. *Trias politica* yang diteorikan oleh Jhon Locke akan kian tegak apabila media berfungsi sebagaimana mestinya. Dalam lembaran sejarah Indonesia dapat dinarasikan, keberadaan media mengalami pasang surut yang berarti (Hari Wiryawan, 84). Masa orde lama, media

masih dapat dihitung dengan jari. Masa orde baru, media sudah mulai berkembang tetapi perkembangan media ini terhambat dengan tangan besi dari orde baru. Berita dari media yang tidak menguntungkan terhadap orde baru ini akan diberedel dan tidak memperoleh izin. Hanya berita yang mengabarkan tentang kebesaran orde baru yang terus bertahan (Kustadi Suhandang, 84). Tumbangnya orde baru pada 1998 bersamaan dengan terbukanya kebebasan dalam bersuara. Media mulai bisa melepaskan diri dari belenggu yang telah dilakukan oleh negara. Kebebasan berpendapat ini telah memunculkan lahirnya banyak media baru yang ada di Indonesia. Bersamaan dengan itu pula, perkembangan media tidak hanya bisa dikonsumsi oleh elite dan penduduk yang ada di perkotaan. Media massa dapat dinikmati pula oleh masyarakat di pelosok pedesaan. Awalnya memang tidak ada masalah. Karena media dapat dijadikan sebagai sarana untuk dapat mengakses informasi yang utuh. Pemilik media juga akan berebut pasar dari masyarakat. Pasar dimaksud berkenaan dengan kualitas dari media. Dengan asumsi dasar, media yang tidak berkualitas, akan gampang digilas dan gulung tikar.

Dewasa ini, Hoaks adalah fenomena baru yang muncul begitu pesat yang tersusun secara sistematis. Tersebarnya berita bohong kepada publik menjadi *boomerang* bagi kebhinekaan. Isu dimainkan. Berita disebar dengan cara dan sesuai dengan kepentingan. Kebohongan yang disebar berkali-kali akan menjadi kebenaran. Media telah kehilangan fungsinya sebagaimana di gunakan sebaik-baiknya. Berubah menjadi alat provokasi dan menebar kebencian terhadap yang berbeda dengan dirinya dan kelompoknya. Munculnya hoaks yang bertebaran ini tidak bisa dilepaskan dari momentum politik. Yang terjadi di Jakarta maupun juga di daerah lainnya dapat dikonsumsi dengan mudah. Hanya dengan menggunakan *Hand Phone* (HP) dapat mengakses berita yang tersebar di jaringan media sosial. Akibatnya cukup dirasakan dalam harmoni kebangsaan. Saling curiga dan gesekan yang tidak terelakkan antar sesama bangsa. Yang paling sering adalah ujaran kebencian yang diucapkan berulang-ulang dan kian menyesak nafas kebangsaan. Jika terus terjadi dan tidak terkendali, tentu akan mengakibatkan perang antar pribadi dan kelompok yang berbeda antar satu sama lainnya.

Namun karena suasana politik, menyebabkan media telah beralih fungsi. Pemilihan Presiden (Pilpres) dapat kita saksikan banyak media yang telah beralih fungsi untuk menyebarkan isu SARA atau yang dikenal berita hoaks. Demo yang berkali-kali terjadi di Jakarta berasal dari informasi media yang menyebarkan kebencian terhadap rival politik yang berbeda. Tidak hanya itu saja, pendukung salah satu paslon lainnya juga menggunakan media untuk bisa membela kelompoknya dan menyerang kelompok lainnya. Medsos menjadi ajang pertarungan tidak wajar antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Hoaks menyebar tak terkendali. Sebagai fenomena, hoaks layak diteliti.

Hoaks dapat menyebabkan dekonstruksi konsep kebhinekaan sehingga dapat menimbulkan perpecahan bangsa. Seperti yang dikatakan Septanto (2018) Hoaks akan menyasar emosi masyarakat, dan menimbulkan opini negatif sehingga mengarah pada disintegrasi bangsa. Oleh karena itu, Sikap bela negara diperlukan untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan NKRI dari berita *hoax* yang merupakan virus pemecah belah bangsa karena dalam sila ketiga Pancasila sangat menentang bentuk-bentuk aksi yang mengancam persatuan dan kesatuan nasional, terutama *hoax* yang bersifat propagandis dan hate *speech*. *Hoax* dapat menyebabkan dekonstruksi konsep kebhinekaan sehingga dapat menimbulkan perpecahan bangsa. Seperti yang dikatakan Septanto (2018) *Hoax* akan menyasar emosi masyarakat, dan menimbulkan opini negatif sehingga mengarah

pada disintegrasi bangsa. Oleh karena itu, Sikap bela negara diperlukan untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan NKRI dari berita *hoax* yang merupakan virus pemecah belah bangsa karena dalam sila ketiga pancasila sangat menentang bentuk-bentuk aksi yang mengancam persatuan dan kesatuan nasional, terutama *hoax* yang bersifat propagandis dan *hate speech*.

Penyebarkan *hoax* di media sosial yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong bisa dipidanakan. Pemerintah telah mengatur hal itu dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE (Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik). Ancaman pidana bagi pelaku yang melanggar pasal tersebut tercantum dalam Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yaitu pelaku dapat dijera dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar jika pelaku memenuhi unsur pidana.

Hal ini sejalan dengan fungsi kepolisian yang dinyatakan dalam pasal 2 Undang-undang RI Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI yaitu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Kampanye anti *hoax* yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya di Instagram berbeda dengan kampanye anti *hoax* lainnya, pesan kampanye anti *hoax* yang dilakukan Polda Metro Jaya tidak hanya menampilkan contoh berita *hoax* yang beredar di masyarakat yang meresahkan masyarakat, tetapi juga berisi informasi atau pesan ajakan maupun himbauan kepada masyarakat untuk tidak menyebarkan berita *hoax* dan dapat menyaring isu *hoax* yang beredar untuk mengantisipasi agar individu tidak menjadi pelaku maupun korban dari berita *hoax* yang dapat memicu akan adanya unsur pemecah belah bangsa sehingga keutuhan NKRI akan terus terawat dalam balutan Bhinneka Tunggal Ika. Selain itu dalam kampanye ini menggunakan tagar #stophoax dan menekankan bahwa *hoax* dapat menyebabkan disintegritas bangsa. Melihat fenomena yang cukup menarik diatas, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai “Partisipasi dan Aksi Kaum Millennial Untuk Melawan Informasi Hoaks Pada Pesta Demokrasi Pemilu Presiden 2019”, dengan pertanyaan penelitian: Bagaimanakah partisipasi dan aksi kaum millennial untuk melawan informasi hoaks pada pesta demokrasi pemilu presiden 2019?

Penelitian-penelitian terdahulu berfokus pada literasi media atas informasi hoaks dengan subjek penelitian para *netizen* dan siswa. Sementara itu, penelitian ini memiliki objek kajian berbeda, yaitu aktivitas melawan hoaks sebuah komunitas *online*. Subjek penelitiannya adalah para *netizen* yang tergabung dalam komunitas *online* tersebut.

Behrens (1994, h. 309) menjelaskan bahwa orang yang pertama kali mengemukakan tentang literasi informasi adalah Paul Zurkowski dari Amerika Serikat. Zurkowski berpendapat bahwa orang-orang yang terlatih mengenai aplikasi sumber daya dalam pekerjaan mereka disebut dengan literasi informasi. Sementara itu, pengertian literasi informasi menurut Catts dan Lau (2008, h. 12) adalah seseorang yang memiliki kemampuan kesadaran atas informasi yang dibutuhkan, memperoleh informasi, serta mampu melakukan evaluasi tentang mutu informasi tersebut. Literasi informasi juga identik dengan kemampuan seseorang melakukan penyimpanan dan menemukan informasi lagi. Informasi pun dapat dibuat sendiri, digunakan secara etis dan efektif, serta pengetahuan yang diperoleh dapat dikomunikasikan.

Sedangkan menurut ALA (1989, h. 1), literasi informasi adalah informasi yang dibutuhkan oleh seseorang yang dapat diidentifikasi, diakses, ditemukan, dievaluasi, serta digunakan secara efektif dan etis. Chan (2003, h. 1) berpendapat juga bahwa

fungsi dari literasi informasi adalah kontribusinya dalam pengembangan pengajaran dan pembelajaran. Literasi informasi juga penting untuk pembelajaran seumur hidup yang berhasil dan menjadi kompetensi utama yang perlu dimiliki seseorang di era informasi dewasa ini. Semua orang memiliki kemampuan ini dalam tingkatan tertentu. Kebutuhan informasi seseorang tidak serta merta memengaruhi peningkatan kemampuan literasi seseorang secara linier. *Sconul 7 Pillars* menjadi model literasi informasi yang dapat menggambarkan kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan informasi. Pertama, pemahaman kebutuhan informasi. Kedua, pengenalan jenis informasi, karakteristik, dan tantangan untuk memperoleh informasi. Ketiga, penentuan strategi pencarian dan kata kunci informasi. Keempat, setiap jenis informasi mampu dicari dan diakses. Kelima, kemampuan mengevaluasi relevansi dan akurasi informasi. Keenam, pengelolaan pengutipan dan penyusunan bibliografi, serta penggunaan informasi secara etis. Ketujuh, penyajian produk informasi dalam bentuk yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan khalayak (Sconul, 2011, h. 13).

Internet dimanfaatkan sebagai media untuk menjalin beragam hubungan sosial dengan orang lain. Berbagai cerita, pengalaman, keprihatinan, dan kepentingan dapat dibagikan melalui hubungan tersebut. Fenomena ini menghasilkan sebuah terminologi baru dalam masyarakat virtual, yaitu komunitas *online* (Basuki, Akbar, Pradono, & Miharja, 2013, h. 69). Komunitas *online* mudah terbentuk sesuai minat dan kepentingan masyarakat karena ditunjang kemudahan akses beragam aplikasi internet. Jenis dan anggota dari kelompok *online* pun tidak terbatas. Hummel dan Lechner (2002, h. 3) mendefinisikan komunitas *online* sebagai suatu kolektivitas dengan besaran anggota tidak menentu dan memungkinkan setiap orang yang memiliki tujuan yang sama dapat bergabung secara sukarela. Tujuan utama dari komunitas *online* adalah berbagi pengalaman dan pengetahuan. Setiap anggota komunitas dapat saling berinteraksi dan berkontribusi untuk memperoleh kesejahteraan kolektif.

Maslow (dalam Slife & Williams, 1995, h. 7) menjelaskan bahwa kuat lemahnya sebuah struktur komunitas *online* sangat dipengaruhi oleh komitmen para anggotanya. Umumnya aktivitas yang dilakukan adalah saling berhubungan berdasarkan kepentingan untuk bertukar pengetahuan dan informasi. Hummel dan Lechner (2002, h. 2) membagi komunitas *online* menjadi empat bagian besar, yaitu komunitas permainan, komunitas minat, komunitas antarkonsumen, dan komunitas antarbisnis. Seseorang tidak harus bertemu lebih dahulu untuk beraktivitas dalam komunitas *online* karena urusan dapat diselesaikan tanpa harus bertemu langsung. Komunitas *online* dapat digunakan menjadi media penyebaran hoaks baik di media sosial maupun di *instant messaging*. Sebaliknya, komunitas *online* bisa pula digunakan sebagai sarana literasi informasi bagi anggotanya untuk melawan hoaks.

Chen, Yong, dan Ishak (2014, h. 441) mendefinisikan hoaks sebagai informasi yang sesat dan berbahaya. Persepsi manusia dapat disesatkan oleh hoaks yang disampaikan sebagai sebuah informasi yang dianggap benar dan hal tersebut dapat memengaruhi orang banyak. Menurut Mastel (2017, h. 17), peredaran hoaks paling banyak adalah melalui media sosial. Van Dijk (dalam Nasrullah, 2015, h. 11) memberikan pengertian tentang media sosial sebagai media yang memberikan fasilitas kepada pengguna untuk eksis melakukan aktivitas dan berkolaborasi secara *online*. Tujuan media sosial adalah menguatkan hubungan ikatan sosial di antara pengguna.

Menurut Meike dan Young (dalam Nasrullah, 2015, h. 11), media sosial dianggap sebagai media untuk berbagi sesama pengguna. Sedangkan menurut Boyd (dalam Nasrullah, 2015, h. 11), media sosial menjadi kekuatan pengguna yang dapat

menciptakan konten sendiri. Hal ini biasa disebut dengan *user generated content*.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi kualitatif. Menurut Chan (2003,h.1) analisis isi kualitatif digunakan untuk menyusun tinjauan dan analisis literatur. Kerangka kode juga dikembangkan dalam metode kualitatif jenis deskriptif ini. Unit analisis dalam penelitian ini adalah berita hoaks bidang Politik yang beredar di media pada bulan Maret-Mei 2019. Sementara itu, rentang bulan ini dipilih karena pada bulan-bulan tersebut isu bidang Politik marak terjadi. Sedangkan indikator berita hoaks bidang politik yang dipilih adalah berita yang paling ramai dibicarakan oleh *netizen* dan banyak mendapat tanggapan dari *netizen*. Literasi informasi yang dikaji dalam penelitian ini meliputi tujuh hal. Pertama, identifikasi, yaitu informasi yang dibutuhkan mampu dipahami oleh responden. Kedua, cakupan, yaitu informasi yang diperoleh mampu dikenali oleh responden. Ketiga, perencanaan, yaitu informasi yang telah ditentukan mampu dicari dengan menggunakan kata-kata kunci oleh responden. Keempat, pengumpulan informasi, yaitu informasi yang dicari mampu diakses oleh responden. Kelima, evaluasi, yaitu informasi yang diperoleh mampu dievaluasi sesuai relevansi dan akurasinya oleh responden. Keenam, yaitu pengelolaan informasi yang diperoleh mampu dikelola, dikutip, disusun dan digunakan dengan etis. Ketujuh, penyajian informasi, yaitu informasi yang sudah ada mampu disusun menjadi baik dan disajikan dengan benar berdasarkan kebutuhan. Tujuh pilar literasi informasi ini dikaji dalam upaya melawan peredaran hoaks di media sosial. Data-data pendukung lain didapatkan dari pengamatan berita di beberapa media sosial yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Selain itu, peneliti juga menggunakan kajian pustaka yang didapat dari jurnal ilmiah, buku-buku referensi, dan bahan-bahan publikasi dari berbagai sumber lainnya. Hasil penelitian dianalisis dengan cara deskriptif, kemudian dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, teori, konsep, serta informasi dari berbagai sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rendahnya tingkat literasi ini membuat masyarakat mengalami kesulitan memilah konten-konten yang positif di antara banjir informasi di dunia maya. Di sisi lain, fenomena anonimitas di dunia digital juga membuat orang mudah terdorong untuk melakukan perilaku tak bertanggung jawab, seperti tindakan *hate speech*, produksi dan penyebaran hoaks, model-model penipuan *online*, dan sebagainya. Sebuah studi dalam ilmu sosial menunjukkan bahwa seseorang dapat bertindak lebih agresif ketika ia yakin tidak akan dikenali atau diketahui Citron & Norton, 2011:1447). Ditambah lagi, algoritma media sosial turut mendorong berkembangnya homogenitas masyarakat di media sosial sehingga orang menjadi tidak terbiasa dengan perbedaan dan tidak terlatih melihat persoalan dari berbagai sisi. Homogenitas ini mengarahkan masyarakat pada kutub-kutub polarisasi yang saling bertentangan satu sama lain. Studi yang dilakukan Michela Del Vicario dkk. (2018) menunjukkan bahwa homogenitas sosial dunia maya merupakan pendorong utama mengapa disinformasi begitu mudah tersebar sehingga menyebabkan masyarakat terbelah. Informasi yang keliru begitu mudah diterima karena dibawa oleh teman yang berasal dari *echo chamber* yang sama (Vicario, et. al, 2018: 558).

Situasi-situasi ini turut berkontribusi pada terciptanya *bad digital citizenship*, yaitu kondisi di mana kecakapan masyarakat untuk menggunakan teknologi digital secara aman, efektif, dan bertanggung jawab sangat kurang. *Bad digital citizenship*

sebagaimana tergambar pada situasi-situasi tersebut dapat mengancam kerukunan bangsa dan pada titik tertentu dapat mengakibatkan disintegrasi sosial, karena apa yang terjadi di dunia maya sangat berdampak pada interaksi sosial di dunia nyata. Aktivitas *online* dapat menimbulkan ancaman bagi partisipasi masyarakat di dunia nyata (Citron & Norton, 2011:1447). Ditangkapnya beberapa oknum MCA awal 2018 ini merupakan contoh bagaimana hoaks dan *hate speech* di dunia maya mempengaruhi interaksi antar manusia di dunia nyata. Kasus ini sekaligus menunjukkan bagaimana kebencian antar kutub polarisasi yang dieskalasi oleh penyebaran hoaks menjadi pemicu tindakan-tindakan intoleran, mulai dari *bullying* dan *doxing* di dunia maya, hingga persekusi di dunia nyata. Pada tanggal 20 Maret 2018, SAFENET (Southeast Asia Freedom of Expression Network) merilis hasil pengamatannya terhadap aktivitas MCA di internet. Menurut pengamatan jaringan relawan tersebut, beberapa akun yang berafiliasi dengan MCA terlibat aktif dalam mengarahkan massa untuk melakukan persekusi kepada orang-orang yang mereka targetkan. Selain melakukan praktik *doxing* yakni membuka data pribadi seseorang di dunia maya kepada publik agar kemudian diburu dan dipersekusi di dunia maya maupun dunia nyata MCA juga melangkah lebih jauh dengan cara membuat akun kloningan dari target mereka untuk kemudian diisi dengan konten-konten hoaks yang dapat memancing emosi massa.

Kasus-kasus persekusi di atas Pemilihan Umum terkhusus Pemilihan Presiden yang membelah masyarakat ke dalam dua kubu yakni pendukung Jokowi dan penantangannya yakni pendukung Prabowo. Hoaks dan *hate speech* mewarnai retorika politik di dunia maya. Aksi demo oleh massa berlangsung rusuh tepatnya tanggal 22 Mei 2019, tercatat sejumlah tindakan intoleran yang terjadi baik di dunia maya ataupun nyata yang mengiringi Pemilu tahun ini. tuduhan lembaga survei yang berpihak terhadap salah satu pasangan capres-cawapres serta isu kecuangan di Pilpres 2019, misalnya surat suara tercoblos dan Surat Presiden Jokowi Meminta Dukungan kepada BUMN untuk Pemenangan Pilpres 2019, beredarnya postingan di media sosial facebook tentang Amien tak percaya Mahkamah Konstitusi. Menyatakan bahwa “ ini bentuk provokasi yang nyata dan upaya mendelegitimasi KPU secara sistematis. Sangat disayangkan pernyataan tersebut dikeluarkan oleh seorang tokoh reformasi bangsa. Pernyataan itu seakan menarik mundur kembali bangunan demokrasi. Keseluruhan contoh-contoh tersebut merupakan praktik intoleran terhadap berita hoax yang melingkupi suasana politik seputar Pemilihan Umum tersebut.

Menurut Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), literasi digital memang harus dilakukan dan bisa menjadi senjata ampuh untuk menangkal informasi hoaks. Ketua Presidium Mafindo Septiaji Eko Nugroho menyatakan rendahnya literasi digital saat ini, membuat hoaks bisa merajalela dan berujung pada meningkatkan kebencian antar kelompok di masyarakat. Mafindo menganggap kenaikan jumlah hoaks di setiap penyelenggaraan Pemilu belum bisa dihindarkan. Penyebaran informasi hoaks bisa diatasi jika literasi digital sudah maksimal dilakukan dan polarisasi masyarakat akibat Pemilu tidak terjadi. "Selama dua hal ini belum kita atasi bersama, baik dengan program literasi secara masif maupun upaya rekonsiliasi untuk meredam kebencian, hoaks masih akan tumbuh subur," terangnya kepada bisnis. Agar hoaks bisa ditangkal, masyarakat khususnya generasi millennial masa kini diharapkan bijak menggunakan media sosial. Pengguna media sosial juga dipandang tak cukup hanya memahami bahaya hoaks, tapi harus mampu mencari informasi yang benar ketika menerima isu meragukan. Eko juga mengimbau masyarakat aktif melaporkan konten negatif di media sosial. Pelaporan ke platform (Facebook, Instagram, Twitter) dipercaya membantu meredam penyebaran

konten negatif terkait Pemilu.

Akan tetapi, menyodorkan fakta kepada orang yang sudah terpapar hoaks nyatanya bukan suatu hal yang mudah. Naluri survival seseorang akan membuatnya bertahan jika ideologi yang merupakan bagian dari identitasnya ditantang. Malahan fakta yang disodorkan itu bisa jadi justru membuat keyakinannya semakin kuat. Kondisi ini disebut sebagai *backfire effect*. Mengatakan bahwa ada bagian yang salah dari informasi yang diterima seseorang akan menciptakan adanya ruang mental yang kosong dalam pikirannya. Jika ruang kosong itu tidak ditempati oleh fakta pengganti maka usaha klarifikasi itu malah bisa menjadi bumerang yang menjerumuskannya lebih jauh dalam persepsinya yang keliru (Cook, 2017:212). Karena itu, dalam upaya melawan intoleransi, selain menyodorkan fakta dan data, dalam upaya ini juga harus digunakan pendekatan khusus yang membuat seseorang yang intoleran merasa dalam golongan yang sama dengan pihak yang berusaha mengubahnya. Bersamaan dengan massifnya penegakan hukum terhadap pelaku produsen dan penyebar hoaks oleh POLRI baru-baru ini, gerakan anti-hoaks pun tampaknya semakin merata. Anti-hoaks kini seakan menjadi kepentingan semua orang. Di mana-mana diadakan deklarasi dan kampanye anti-hoaks baik yang digagas oleh elemen pemerintah seperti Dinas Komunikasi dan Informatika dan POLRES di berbagai daerah maupun oleh elemen masyarakat seperti ormas maupun masyarakat umum.

Di berbagai daerah, Kemkominfo mengadakan program-program literasi digital dengan menggandeng berbagai elemen masyarakat khususnya generasi millennial yang memiliki visi untuk mewujudkan ekosistem internet yang sehat. Sementara itu POLRES di berbagai daerah juga membentuk komunitas netizen anti-hoaks dan mengadakan deklarasi antihoaks bersama dengan komunitas lintas agama. Dari elemen ormas, MPI Muhammadiyah dan NU mendukung Pedoman Bermedia Sosial yang dirilis oleh MUI. MPI Muhammadiyah merilis *Akhlaq Medsosiyah* sedangkan NU merilis fiqh medsos. Momentum di mana gerakan anti-hoaks telah menjadi kepentingan banyak pihak ini akan sangat berdampak jika dimanfaatkan untuk menyatukan semua pihak dalam program-program antihoaks yang dilaksanakan secara terstruktur dan dengan strategi yang tepat. MAFINDO merupakan akronim dari Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. MAFINDO adalah komunitas relawan yang diciptakan oleh kaum millennial masa kini yang berfokus pada gerakan anti hoax. Komunitas ini berasal dari gerakan *online* yang kemudian bertransformasi menjadi gerakan *online-offline*.

Pendekatan berskema trisula tersebut terejawantahkan dalam empat pilar program MAFINDO yang dapat dijelaskan sebagai berikut (Hasil observasi dan studi dokumen *Company Profile MAFINDO*):

1. Factchecking

Kegiatan ini dilakukan di FAFHH dengan cara mengklarifikasi informasi yang menyesatkan baik itu hoaks, disinformasi, atau misinformasi. Hoaks adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Disinformasi adalah penyampaian informasi yang salah (dengan sengaja) untuk membingungkan orang lain. Misi nformasi adalah penyampaian informasi yang salah secara tak disengaja. Perbedaan hoaks dengan disinformasi: hoaks peristiwanya tidak ada/tidak terjadi, disinformasi peristiwanya terjadi tetapi narasi tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya Hoax Buster Tools juga merupakan salah satu *output* dari pilar utama ini. Aplikasi berbasis android ini diciptakan oleh Tim IT MAFINDO dengan tujuan memudahkan masyarakat untuk mengecek kebenaran suatu informasi secara mandiri dengan memanfaatkan *tools* yang ada pada aplikasi tersebut.

Aplikasi ini diluncurkan pada tanggal 10 Februari 2018 dan diresmikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara di Borobudur Magelang Jawa Tengah. Produk MAFINDO yang lain adalah Yudhistira, yaitu aplikasi klarifikasi fakta yang diperuntukkan bagi para jurnalis yang tergabung dalam AMSI (Aliansi Media Siber Indonesia) dan juga Tim IT. Pada level internasional MAFINDO juga pernah diundang oleh Parlemen Singapura untuk menceritakan tentang upaya penanganan penyebaran hoaks di Indonesia (belajar-antihox kepada-indonesia).

2. Edukasi

Mafindo berperan aktif meningkatkan ketrampilan literasi digital masyarakat melalui kegiatan-kegiatan *workshop*, seminar, *talkshow* di sekolah, kampus, pesantren atau melalui berbagai media seperti televisi, radio, media massa baik online maupun cetak. Selain itu edukasi juga dilakukan dengan *public campaign* di Car Free Day di berbagai kota di mana relawan MAFINDO berada.

3. Advokasi

Mafindo mengajak beberapa pihak untuk duduk bersama dan bersinergi untuk membangun satu visi dalam memerangi hoaks. Sejauh ini MAFINDO telah membuat MOU dan bekerjasama dengan banyak pihak seperti Kemkominfo, POLRI, pengelola media sosial seperti Google dan Facebook, IDI, OJK, Yayasan Kanker Infonesia, AJI, SPAK dan sebagainya (Wawancara dengan Ketua MAFINDO Septiaji Eko Nugroho, 2018).

4. Silaturahmi

Dengan tetap independen dan netral Mafindo mempertemukan orang-orang dari berbagai latar belakang profesi, suku, orientasi politik, dan agama untuk bersama-sama menciptakan ekosistem internet yang sehat dengan cara memperbanyak tatap muka (Wawancara dengan Ketua MAFINDO Septiaji Eko Nugroho, 2018).

KESIMPULAN

Produksi dan penyebaran hoaks telah bersama-sama berkontribusi meningkatkan skala kebencian sehingga mendorong konservatisme yang terwujud dalam wacana dan aksi-aksi intoleran. Maka dari itu kontribusi kaum millennial sangat dibutuhkan untuk melawan informasi Hoaks pada momen Pemilihan Umum terhadap Pemilihan Presiden 2019 Karena pentingnya kontribusi pernanan generasi masa kini melakukan upaya melawan intoleransi melalui gerakan anti hoaks. Mengingat bahwa bisnis hoaks merupakan kejahatan yang terorganisir maka upaya melawannya juga harus menggunakan pendekatan yang strategis dan program-program yang terstruktur. Mafindo adalah salah satu contoh jaringan relawan yang sejak tahun 2016 sampai sekarang konsisten melaksanakan program-program semacam itu. Berbeda dengan kepolisian yang memiliki fokus dan wewenang penegakan hukum atau Kemkominfo yang memiliki wewenang untuk membatasi ruang gerak produsen dan penyebar hoaks, Mafindo memusatkan perhatiannya pada upaya klarifikasi fakta, diseminasi hasil-hasil klarifikasi tersebut dan edukasi literasi digital. Begitu juga peran masyarakat terkhusus kaum millennial berperan penting untuk melawan gejolak berita hoaks agar pesta demokrasi di negara tercinta kita ini berjalan sebagaimana mestinya. Upaya-upaya ini merupakan pendekatan skema trisula yang terdiri dari detect, counter dan prevent. Sebagai rekomendasi, cara-cara yang ditempuh oleh Mafindo ini dapat diadopsi sebagian atau keseluruhannya dan dikembangkan sedemikian rupa oleh institusi pendidikan agar upaya perlawanan terhadap hoaks berjalan lebih efektif.

KEPUSTAKAAN

- Juditha, C. (2018) Interaksi simbolik dalam komunitas virtual anti hoaks untuk mengurangi penyebaran hoaks. *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Pembangunan*, 19(1), 17-32.
- Juliswara, V. (2017) Mengembangkan model literasi media yang berkebhinnekaan dalam menganalisis informasi berita palsu (*hoax*) di media sosial. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 4(2), 142-164.
- Ramadhan, B. (2017, Mei 2) Survei: *Hoax* paling banyak di media sosial soal info kesehatan. *Republika.co.id*. <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/05/02/opa9ng330-survei-hoax-paling-banyak-dimedia-sosial-soal-info-kesehatan>
- Juliswara, Vibriza. (2017) “Mengembangkan Model Literasi yang Berkebhinnekaan dalam Menganalisis Informasi Berita Palsu (*Hoax*) di Media Sosial”. Vol 04(2)
- Hardiansyah. 2015. *Komunikasi Pelayanan Publik Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Gava Media.
- Septanto, Henri. (2018) *Pengaruh HOAX dan Ujaran Kebencian Sebuah Cyber Crime Dengan Teknologi Sederhana di Kehidupan Sosial Masyarakat*. *Jurnal Sains dan Teknologi* Vol. 5 No. 2, 2018. ISSN 2356 – 4393: hlm 157-162.

Internet

- <http://www.kbbionline.com/arti/gaul/hoax>. Diakses pada tanggal 22 Juni 2019 pukul 13.04 WIB
- <http://www.antaraneews.com/berita/605171/apa-itu-hoax>. Diakses pada tanggal 22 Juni 2019 pukul 13.06 WIB
- <https://rumahfilsafat.com/2009/08/19/fenomenologi-edmund-husserl/>. Diakses pada tanggal 22 Juni 2019 pukul 13.07 WIB
- https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis_framing. Diakses pada tanggal 22 Juni 2019 pukul 13.11 WIB
- <https://www.youtube.com/watch?v=zKmMPA3Y8AA>. Diakses pada tanggal 22 Juni 2019 pukul 13.21 WIB
- <https://news.detik.com/berita/3613345/begini-cara-kerja-dan-detail-pembayaran-sindikat-saracen>. Diakses pada tanggal 22 Juni 2019 pukul 13.28 WIB
- <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/08/24/terungkap-begini-cara-sindikat-saracen-viralkan-ujaran-kebencian-di-media-sosial>. . Diakses pada tanggal 22 Juni 2019 pukul 13.31 WIB
- <http://news.liputan6.com/read/3070491/cara-kerja-sindikat-saracen-dalam-menyebarkan-ujaran-kebencian> Diakses pada tanggal 22 Juni 2019 pukul 13.39 WIB

Inovasi Pelayanan Publik Berbasis *E-Government* Melalui Aplikasi Sistem Pelayanan Terpadu (SIPADU) di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru

Akhlakul Karimah dan Disya Anggreni M

¹Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau
Email: akhlakulkarimah2@gmail.com; disyaanggreni@gmail.com

Abstrak

Perkembangan pesat di bidang Teknologi, Informasi dan Komunikasi saat ini berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan berbasis internet atau e-government baik di tingkat pusat hingga daerah. Aplikasi SIPADU merupakan aplikasi yang dikeluarkan Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru yang sejatinya menginginkan kemudahan akses pelayanan melalui aplikasi otomatisasi proses administrasi pelayanan masyarakat di kantor kelurahan dan kecamatan secara cepat, akurat dan mudah. Tulisan bertujuan menganalisis bagaimana kualitas pelayanan publik lewat aplikasi SIPADU dan sejauhmana aplikasi tersebut sudah memiliki elemen-elemen penting dalam penerapan e-government di Kota Pekanbaru.

Kata Kunci: Inovasi Pelayanan Publik, Aplikasi SIPADU dan E-government.

Abstract

The rapid development in the field of Technology, Information and Communication currently has an impact on the administration of internet-based governance or e-government both at the central and regional levels. The SIPADU application is an application issued by the Bukit Raya District of Pekanbaru, which actually wants easy access to services through the automation application process of public service administration in the village and sub-district offices in a fast, accurate and easy way. The article aims to analyze how the quality of public services through the SIPADU application and the extent to which the application already has important elements in implementing e-government in Pekanbaru City.

Keywords: Public Service Innovation, SIPADU and E-Government Applications.

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi (IT) dewasa ini semakin pesat khususnya teknologi komputasi dan jaringan internet, penetrasi dan Telkom bahkan sudah merambah sampai pedesaan. Kemajuan teknologi ini, telah membawa pengaruh yang cukup signifikan terhadap pengelolaan pemerintahan yaitu telah dikembangkannya sistem pelayanan public melalui jaringan internet yang dinamakan e- government.

Peningkatan pelayanan public di berbagai daerah memacu semangat inovasi untuk mempermudah masyarakat. Upaya ini dilakukan mulai dari memangkas prosedur dan alur pelayanan, hingga integrasi dalam sistem online yang masuk dalam kerangka e government (e-gov). Hal inilah yang mendasari semangat peningkatan pelayanan public melalui pembangunan smart city. Smart city merupakan salah satu lompatan inovasi dalam melalui integrasi pelayanan public yang dipadukan dengan e-gov yang merupakan visi dari smart city (Hall et al., 2000). Hal inilah yang menjadi perhatian dari pemerintah daerah karena tata kelola pemerintahan yang tepat untuk menghubungkan semua kekuatan (stakeholders terkait) sehingga memungkinkan adanya transfer knowledge untuk saling belajar dalam mencapai sasaran (socioeconomic) (Ruhlandt, 2018).

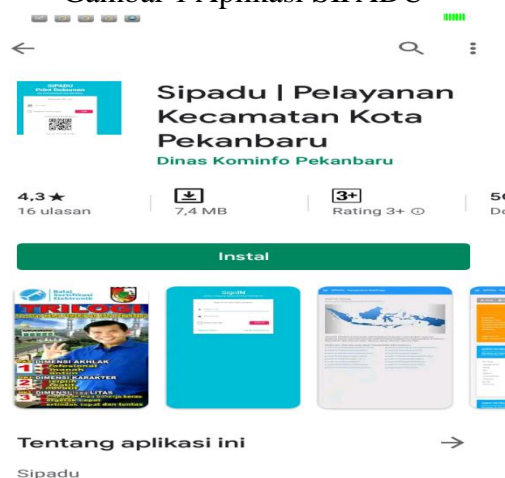
Menurut IEEE Smart Cities.org, sebuah kota pintar menyatukan teknologi, pemerintah dan masyarakat untuk memungkinkan karakteristik sebagai berikut: 1) Ekonomi Pintar (smart economy), 2) Mobilitas cerdas (smart mobility), 3) Lingkungan

cerdas (smart environment), 4) Orang pintar (smart people), 5) Hidup cerdas (smart living) dan 6) Pemerintahan cerdas (smart governance)

Saat ini penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berbasis internet sedang menjadi trend bagi pemerintah pusat bahkan hingga pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan public terbaik bagi masyarakat. Jika di Bandung memiliki Bandung Commad Center (BCC) yang merupakan ikon smart city dilengkapi dengan teknologi yang canggih bertujuan untuk menyempurnakan pelayanan public dari Pemerintah Kota Bandung kepada masyarakat. Maka Kecamatan Bukit Raya juga mengeluarkan aplikasi serupa yaitu aplikasi Sistem Pelayanan Terpadu (SIPADU), sebagai upaya dalam mendukung visi Pemerintah Kota Pekanbaru yaitu Smart City Madani. Meskipun fitur-fitur pada aplikasi Sipadu belum sebanyak BCC yang dimiliki Kota Bandung namun ada upaya positif dari Pemko Pekanbaru dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Sistem pelayanan terpadu (SIPADU) adalah inovasi pelayanan yang merupakan layanan aplikasi otomasi proses administrasi pelayanan masyarakat di kantor kelurahan dan kecamatan secara cepat, akurat dan mudah mulai dari pelayanan dalam bentuk perizinan atau pun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan. Sistem pelayanan terpadu (SIPADU) adalah salah satu inovasi yang dilakukan oleh Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru dan satu-satunya kecamatan di kota pekanbaru yang membuat inovasi sistem pelayanan terpadu (SIPADU) dalam hal untuk peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.

Gambar 1 Aplikasi SIPADU



Sumber: Screen Shoot Play Store

Banyak instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berinisiatif mengembangkan pelayanan publik melalui jaringan komunikasi dan informasi. Berdasarkan hasil pengamatan Kementerian Komunikasi Dan Informasi, mayoritas situs pemerintah dan pemerintah daerah berada pada tingkat pertama (persiapan), dan hanya sebagian kecil yang telah mencapai tingkat dua (pematangan). Sedangkan tingkat tiga (pemantapan) dan tingkat empat (pemanfaatan) belum tercapai. Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Haura Athahara (2018) tentang Inovasi Pelayanan Publik Berbasis E-Government Studi Kasus Aplikasi Ogan Lopian Dinas Komunikasi Dan Informatika Di Kabupaten Purwakarta, hasil penelitiannya menyatakan bahwa Aplikasi Ogan Lopian yang diluncurkan oleh Diskominfo

Pemda Purwakarta masih membutuhkan pematangan dan pemantapan dalam hal sumber daya infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi serta sumber daya manusia pengelola atau orang yang berkompeten di bidang IT.

Kemudian penelitian yang dilakukan Eko Eddy Suprianto (2016) tentang Kebijakan Inovasi Teknologi Informasi (IT) Melalui Program Elektronik Government dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia. menunjukkan bahwa inisiatif tersebut belum menunjukkan arah pembentukan e-government yang baik. Beberapa kelemahan yang menonjol adalah :

- a. Pelayanan yang diberikan melalui situs pemerintah tersebut, belum ditunjang oleh sistem manajemen dan proses kerja yang efektif karena kesiapan peraturan, prosedur dan keterbatasan sumber daya manusia sangat membatasi penetrasi komputerasi kedalam sistem manajemen dan proses kerja pemerintah.
- b. Belum mapannya strategi serta tidak memadainya anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan e- government pada masing-masing instansi;
- c. inisiatif-inisiatif tersebut merupakan upaya instansi secara sendiri-sendiri, dengan demikian sejumlah faktor seperti standarisasi, keamanan informasi, otentikasi, dan berbagai aplikasi dasar yang memungkinkan interoperabilitas antar situs secara andal, aman, dan terpercaya untuk mengintegrasikan sistem manajemen dan proses kerja pada instansi pemerintah ke dalam pelayanan publik yang terpadu, kurang mendapatkan perhatian.
- d. Pendekatan yang dilakukan secara sendiri-sendiri tersebut tidak cukup kuat untuk mengatasi kesenjangan kemampuan masyarakat untuk mengakses jaringan internet, sehingga jangkauan dari layanan publik yang dikembangkan menjadi terbatas pula

2. Metode

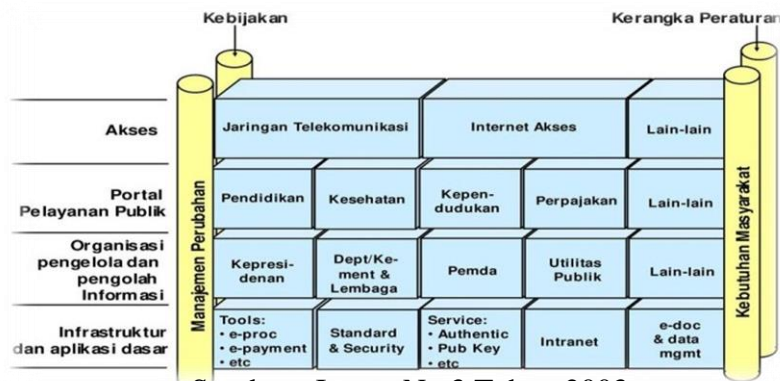
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2009:21) mendefinisikan penelitian deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian. Tujuan penelitian untuk melihat bagaimana kualitas pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan Bukit Raya dilihat kerangka arsitektur E-Government menurut Inpres No 3 Tahun 2003 dalam penerapan aplikasi Sipadu dilihat dari segi akses, portal pelayanan public, organisasi pengelolaan dan pengolahan informasi, infrastruktur dan aplikasi dasar. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Data sekunder yang digunakan adalah studi dokumen atau literature, dan artikel yang diinterpretasikan dalam karya tulis oleh pihak lain atau pihak kedua.

3. Hasil dan Pembahasan

Kerangka Arsitektur *E-government*

Dalam era reformasi saat ini, tuntutan masyarakat terhadap peningkatan pelayanan publik adalah sesuatu yang cukup beralasan dan tidak berlebihan, mengingat sampai sejauh ini masyarakat menilai bahwa kualitas pelayanan publik masih rendah serta kinerja pelayanan publik khususnya oleh pemerintah daerah masih sangat jauh dari yang diharapkan (Dwiyanto, 2002). Untuk menjamin keterpaduan sistem pengelolaan dan pengolahan dokumen dan informasi elektronik e-government pada setiap instansi harus berorientasi pada kerangka arsitektur dibawah ini.

Gambar 2 Kerangka Arsitektur E-Government



Sumber : Inpres No 3 Tahun 2003

Kerangka arsitektur e-government terdiri dari empat lapis struktur, yakni :

1. Akses. Jaringan telekomunikasi, jaringan internet dan media komunikasi lainnya yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengakses situs pelayanan publik.
2. Portal Pelayanan Publik. Situs web Pemerintah pada internet penyedia layanan publik tertentu yang mengintegrasikan proses pengolahan dan pengelolaan informasi dan dokumen elektronik di sejumlah instansi yang terkait.
3. Organisasi Pengelolaan dan Pengolahan Informasi Organisasipendukung (back office) yang mengelola, menyediakan dan mengolah transaksi informasi dan dokumen elektronik.
4. Infrastruktur dan Aplikasi Dasar. Semua prasarana, baik berbentuk perangkat keras dan lunak yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan, pengolahan, transaksi, dan penyaluran informasi maupun antar portal pelayanan publik dengan jaringan internet secara handal, aman, dan terpercaya.

Sistem Pelayanan Terpadu (SIPADU) Sebagai Inovasi Pelayanan Publik

Pelayan pulik pada dasarnya, menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Dalam kehidupan bernegara, maka pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan yang berbentuk perizinan ataupun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan.SIPADU pada hakikatnya adalah singkatan dari Sistem Pelayan Terpadu yang sudah dijalankan sejak bulan juli tahun 2017 oleh Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru. Sipadu merupakan layanan aplikasi untuk otomasi proses administrasi pelayanan masyarakat di Kantor Kelurahan dan Kecamatan secara cepat, akurat dan mudah. Adapun tujuan dari aplikasi sipadu tersebut adalah:

1. Untuk menjawab kebutuhan masyarakat dalam pelayanan pada instansi pemerintah yang cepat dan tepat.
2. Tingginya mobilitas aparatur pemerintah seperti lurah dan camat, tidak menjadi alasan terhambatnya pelayanan terhadap masyarakat.
3. Untuk menatausahakan surat menyurat yang diperlukan instansi pemerintah, karena pengimputan data dan aska surat melalui aplikasi, pengarsipan secara digital serta pengamanan arsip dengan QRcode.
4. Mendukung upaya pencapaian visi kota pekanbaru dalam mewujudkan smartcity yang madani.

Penerapan Aplikasi SIPADU berdasarkan kerangka arsitektur e-government menurut Ipres No 3 Tahun 2003 dapat dilihat sebagai berikut :

1. Akses, diwilayah kota pekanbaru dapat dikatakan sebagian besar akses jaringan internetnya sudah sangat stabil dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, khususnya wilayah kecamatan Bukit raya yang berada ditengah kota. Jadi permasalahan ataupun kendala mengenai akses jaringan internet dapat dikatakan tidak ada sama sekali.
2. Portal Pelayanan Publik, Aplikasi Sipadu hingga saat sudah mempunyai beberapa jenis fitur dalam upaya memberkan pelayanan yang efektif dan efisien.

Gambar 3 jenis pelayanan pada Aplikasi SIPADU



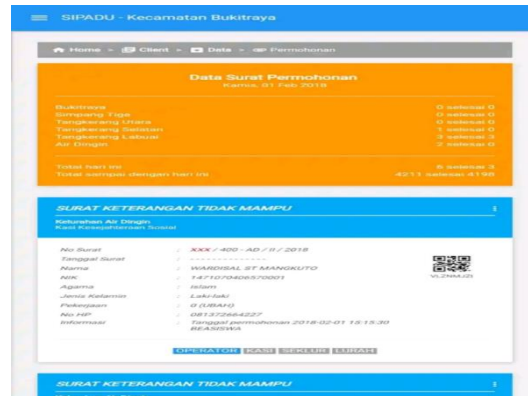
Sumber : Screen Shoot Play Store

Hanya dengan mengupload berkas persyaratan yang diinginkan, kemudian diverivikasi oleh pihak kecamatan sekitar 15 menit jenis surat menyurat yang diinginkan langsung bisa di donmload dan sudah dilengkapi dengan tanda tangan elektronik, sehingga masyarakat bisa memprint sendiri surat-menyurat tadi dimanapun mereka inginkan. Hal ini tentu dapat menghilangkan perilaku mal administrasi yang sering terjadi dalam birokrasi. Informasi mengenai jenis surat-menyurat yang dapat di akses secara langsung oleh masyarakat tanpa perlu datang ke kantor kecamatan bukit raya pada aplikasi SIPADU antara lain :

- a) Surat keterangan belum masuk listrik
 - b) Surat keterangan belum menikah
 - c) Surat keterangan catatan keterangan kepolisian
 - d) Surat keterangan janda/duda
 - e) Surat keterangan menikah
 - f) Surat keterangan perbedaan data
 - g) Surat rekomendasi pangkalan elpiji
 - h) Surat keterangan belum memiliki rumah
 - i) Surat keterangan bersih diri
 - j) Surat keterangan domisili
 - k) Surat keterangan jaminan kesehatan
 - l) Surat keterangan kehilangan surat keterangan penghasilan
 - m) Surat keterangan tidak mampu
3. Organisasi Pengelolaan dan Pengolahan Informasi, adapun yang mengelola, menyediakan dan mengolah transaksi informasi dan dokumen elektronik adalah bagian Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Bukit Raya sendiri, khususnya bagian memferivikasi surat permohonan yang di ajukan masyarakat. Sedangkan

untuk tanda tangan elektronik langsung diberikan oleh aparatur sesuai dengan kewenangannya, adapun kecepatan aparatur dalam menanggapi atau memberikan tanda tangan terhadap permohonan yang diajukan nantinya akan berpengaruh terhadap kinerjanya. Jadi aplikasi SIPADU ini juga dapat digunakan untuk menilai kinerja aparatur terkait dengan cepat atau lambatnya penyelesaian permohonan yang di ajukan masyarakat. Adapun jumlah surat permohonan yang masuk setiap harinya hingga selesai semua proses pengurusannya dapat dilihat contohnya pada gambar dibawah :

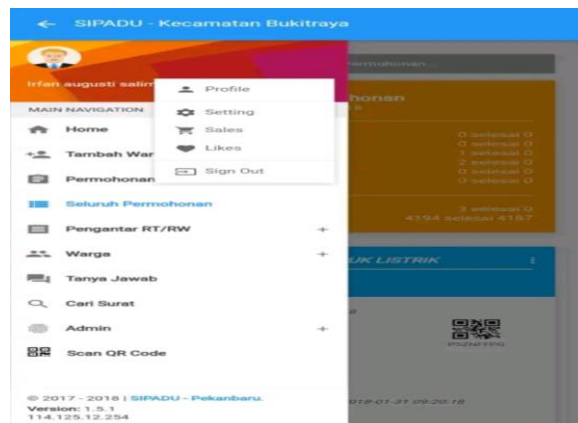
Gambar 5 Data Jumlah Surat Permohonan Pada Aplikasi SIPADU



Sumber : Screen Shoot Play Store

4. Infrastruktur dan Aplikasi Dasar, pengelolaan infrastruktur baik perangkat keras dan perangkat lunak dalam mendukung Aplikasi SIPADU semuanya dikelola oleh Kecamatan Bukit Raya, namun karena adanya mutasi yang terjadi dalam pemerintahan Kota Pekanbaru, akibatnya programmer SIPADU sebelumnya dipindah tugaskan ke instansi lain, karena belum adanya pengganti maka koordinasi terus dilakukan pihak Kecamatan Bukit Raya dengan programmer tersebut paling tidak sampai ada pengganti programmer tersebut.

Gambar 6 Menu Pada Aplikasi SIPADU



Sumber : Screen Shoot Play Store

4. Kesimpulan dan Saran

Penggunaan aplikasi SIPADU dalam pelayanan public merupakan upaya inovasi yang dikembangkan pemerintah setempat dalam memenuhi layanan otomasi proses administrasi pelayanan masyarakat di Kantor Kelurahan dan Kecamatan secara cepat, akurat dan mudah. Meskipun inovasi yang dilakukan oleh Kecamatan Bukit Raya Kota

Pekanbaru ini bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia, aplikasi ini sudah memberikan dampak positif kepada pemerintah dan masyarakat karena mempermudah bagi yang melayani dan yang dilayani.

Apabila dilihat dari kerangka arsitektur e-government menurut Ipres No 3 Tahun 2003 pelayanan public dengan menggunakan aplikasi SIPADU sudah cukup baik. Hal ini karena adanya kemudahan akses jaringan internet, portal pelayanan public yang sudah memiliki cukup banyak fitur, organisasi pengelolaan dan pengolahan yang dapat dilakukan oleh Kecamatan Bukit Raya sendiri dan infrastruktur dan aplikasi dasar yang cukup baik, hanya saja masih adanya ketergantungan dengan programmer yang juga merupakan insiator Aplikasi SIPADU yang sekarang sudah pindah tugas di instansi lain.

Daftar Pustaka

- Ahmad Imam Muslim. (2017), Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Pelayanan Laporan Gangguan Kamtibmas Melalui “Kentongan Online” Polres Jember. Skripsi Administrasi. Universitas Jember
- Ammi Zarkasyi Rahman. (2018). Smart City: Inovasi Peningkatan Pelayanan Publik Masa Kini. Seminar Administrasi Publik. Universitas Negeri Surabaya
- Dwiyanto, Agus, (2002), Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM
- Eko Eddy Supriyanto. (2016). Kebijakan Inovasi Teknologi Informasi (IT) Melalui Program Elektronik Government dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia. Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah. Volumr 1 Nomor 1. Halaman 141-161
- Haura Atthahara. (2018). Inovasi Pelayanan Public E-Government: Study Kasus Aplikasi Ogan Lopian Dinas Komunikasi Dan Informatika Di Kabupaten Purwakarta. Jurnal Politikom Indonesiana. Volume 3 Nomor 1. Halaman 66-77.
- Ivan Dinata. (2015). Kinerja Kecamatan Bukit Raya Sebagai Kecamatan Terbaik di Kota Pekanbaru. JOM Fisip. Volume 2 Nomor 2
- Ruhlandt, R. W. S. (2018). The governance of smart cities: A systematic literature review. Cities. doi: <https://doi.org/10.1016/j.cities.2018.02.014>
- Sugiyono, M. P. K. (2013). Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods). Bandung : Alfabeta

Dependensi Komunitarian Nelayan Wilayah Pesisir Tapal Batas; Studi Komunitas Nelayan Rupert Utara

Geovani Meiwanda, Nur Laila Meilani, dan Resa Vio Vani

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau
geovani.meiwanda@lecturer.unri.ac.id, meilanimeilani09@gmail.com, resa.vio1866@student.unri.ac.id

Abstrak

Komunitas atau kelompok selalu hadir dalam mewakili entitas suatu situasi, dengan kebutuhan, keadaan, dan tujuan yang sama untuk dicapai. Nelayan di wilayah pesisir selalu berada dalam situasi yang lebih rendah sehingga perlu, suatu kelompok untuk memastikan kebutuhan, keadaan dan tujuan dalam hal ini kesejahteraan dikirim ke pemerintah. Lokus dalam artikel ini tentang komunitas atau kelompok nelayan di kabupaten Rupert Utara, desa Tanjung Medang, desa Teluk Rhu dan desa Tanjung Punak. Tujuan artikel ini adalah untuk menganalisis ketergantungan yang terjadi pada nelayan komunitarian di wilayah pesisir, terhadap nelayan dan pemerintah untuk mencapai titik tujuan penciptaan masyarakat itu sendiri. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, untuk mempersempit penelitian yang hanya berfokus pada komunitas nelayan. Metode pengambilan sampel bola salju dan triangulasi data dianggap relevan untuk menjawab tujuan dari hasil penelitian artikel ini. Ditemukan bahwa fungsi tambahan dari komunitas nelayan di wilayah pesisir dari tiga desa berfungsi, sehingga banyak nelayan yang memilih untuk tidak berpartisipasi dalam kelompok. Dan sejumlah nelayan yang ikut serta tidak merasakan manfaat dan tujuan, singkatnya komunitas mapan bubuk tetapi sebagai boneka yang ditampilkan di etalase toko, bahkan boneka-boneka itu tidak semua mampu ditampilkan di etalase toko dalam Analogi.

Kata kunci: Komunitas nelayan, Dependensia, Komunitarian

Abstract

Communities or groups are always present in representing an entity of a situation, with equal needs, circumstances and objectives to be achieved. Fishermen in the coastal region are always in a subordinate situation so it is necessary, a group to ensure the needs, circumstances and objectives in this case the well-being delivered to the government. Lokus in this article on the community or group of fishermen in the district of North Rupert, Tanjung Medang village, Teluk Rhu village and Tanjung Punak village. The purpose of this article is to analyse the dependencies that occur on the komunitarian fishermen of coastal regions, against fishermen and governments to reach the point of destination of the creation of the community itself. Using a qualitative method of case study approach, to narrow the research focused only on the fishermen community. The snowball sampling and triangulation methods of data are considered relevant to answer the purpose of the research results of this article. It was found that the subsidiary function of the fishing community in the coastal areas of the three villages was functioned, so many fishermen who opted not to participate in the group. And a number of fishermen who participated not to feel the benefits and objectives, in short the established community mushed but as a doll displayed on the store's storefront, even those dolls are not all capable of being displayed in the storefront in a Analogy.

Keywords: Community fishermen, Dependencies, Komunitarian

PENDAHULUAN

Provinsi Riau memiliki karakteristik yang cukup unik diantara provinsi tetangganya di Pulau Sumatera, memiliki daratan dan sejumlah kawasan pesisir. Salah satu dari kawasan pesisir di Provinsi Riau terdapat Pulau yang langsung berbatasan dengan jalur perairan internasional, yaitu Selat Malaka, Malaysia. Keunikan geografis dari wilayah tapal batas yang ada di Provinsi Riau ini yaitu Pulau Rupert, namun tidak memberi perbedaan dengan kawasan pesisir pada umumnya yaitu terdapat Rumah Tangga Nelayan Miskin. Situasi yang umum tersebut pun ditambah dengan Pulau Rupert menurut analisis penulis termasuk dalam kategori, daerah tertinggal di Provinsi Riau.

Pulau Rupert khususnya Kecamatan Rupert Utara yang menjadi lokus dalam artikel

ini merupakan kawasan paling ujung, dan langsung berhadapan dengan laut lepas dan zonasi Selat Malaka. Uniknya kawasan ini budaya melayu cenderung Malaysian pun begitu kental dirasa, untuk pendidikan nelayan di kawasan itu rata-rata lulusan SD dan SMP. Pekerjaan masyarakat kebanyakan menjadi nelayan dan seiring perkembangan selain nelayan mereka pun berkebun. Nelayan merupakan profesi yang dianggap seperti warisan temurun, yang dijalankan oleh sejumlah masyarakat.

Identitas dari masyarakat pesisir Rupert Utara adalah nelayan, nelayan secara sosiologis dianggap pekerjaan turun menurun yang memang pasti akan didapatkan oleh masyarakat. Masyarakat bergabung dalam satu tempat tinggal dipinggir pantai, sehingga membentuk perkampungan nelayan salah satunya yang paling tampak mencolok yaitu di Desa Teluk Rhu. Dari setiap desa pesisir yang berada dikawasan Rupert Utara, dalam hal ini yang menjadi lokus dari analisis artikel ini berada ditiga desa. Dari sejumlah desa pada keseluruhan di Pulau Rupert berprofesi sebagai nelayan, dan wilayah pesisir terluar dianggap istimewa dan memiliki nilai keunikan karena pun langsung berhadapan dengan perairan internasional Selat Malaka.

Perkampungan nelayan secara identifikasi tentu membentuk kelompok-kelompok nelayan, secara sederhana kelompok terbentuk tidak lepas dari faktor kesamaan yaitu sebagai kelompok yang berprofesi nelayan, memiliki keterbatasan yang sama dan berharap kesejahteraan yang sama. Keunikan nelayan pada umumnya sama dengan Kawasan pesisir lain pada umumnya, miskin dan tidak memiliki Pendidikan tinggi yang sesuai dengan kebutuhan era saat ini. Namun dilokus dalam analisis artikel ini menunjukkan ketergantungan atau dependensia yang muncul dalam masyarakat nelayan melalui kelompoknya dengan negara yang menjadi tetangga dan berbatasan langsung yaitu Malaysia.

Rumpun melayu merupakan mayoritas yang ada di Pulau Rupert dan juga ada Suku Pedalaman Akit serta masyarakat transmigrasi dari Jawa salah satunya. Budaya melayu tentu mendominasi, hingga mempengaruhi nilai ekonomi masyarakat khususnya profesi nelayan. Tidak bisa dipungkiri negara tidak hadir dalam menyelenggarakan kebijakan, yang memang sesuai kebutuhan dengan masyarakat pesisir. Tenaga pendamping ada, bantuan ada serta membentuk kelompok. Faktanya kebijakan yang dihadirkan merupakan kebijakan yang bersifat umum, yang artinya serupa dengan sejumlah wilayah pesisir lainnya yang ada di Provinsi Riau khususnya. Secara sosiologis masyarakat pesisir menganggap Malaysia merupakan negara yang memiliki kebanggaan tersendiri, dan pola perilaku harian mereka menunjukkan lebih mengenal Malaysia. Nilai ikan yang dijual belikan di Pulau Rupert lebih rendah ketimbang, ikan yang ada di ibu kota, Pekanbaru. Wajah secara geografis lebih dekat ke Malaysia ketimbang kota Pekanbaru.

Harga jual ikan yang tidak pasti, dan tidak ada perlindungan untuk memastikan setiap anggota kelompok nelayan mendapatkan harga jual yang layak tidak ditemukan di wilayah pesisir Rupert Utara. Nilai jual ikan yang ditangkap nelayan tinggi rendahnya bergantung pada nilai tukar mata uang Malaysia, Ringgit. Disalurkan melalui pengepul ikan, dan ikan yang memiliki standar tertentu dapat di ekspor hingga ke Malaysia, jika tidak maka ikan-ikan tersebut akan dijual ke pengepul kecil untuk masyarakat sekitar dan konsumsi pribadi masyarakat nelayan tersebut. Melihat dari situasi pelabuhan kecil yang berada di Desa Tanjung Medang, tidak ditemukan indikasi control keluar masuk yang memiliki manajemen yang baik.

Menarik bahwa ditahun 2019 masyarakat nelayan pesisir masih miskin, dan butuh pembangunan karakter terlebih nelayan-nelayan tersebut berada diwilayah tapal batas.

Jika kajian internasional mengambil sudut pandang borders maka dari sisi administrasi public menganggap bagaimana menciptakan kebijakan yang kuat untuk menghasilkan dependensi kedalam, bukan dependensi yang kuat ke luar. Seolah benar yang diceritakan dalam buku kutukan sumber daya alam, negara yang kaya sumber daya alam selalu erat dengan keterbatasan dalam mengelola kelebihannya.

METODE

Artikel ini merupakan hasil penelitian yang menggunakan metode kualitatif, peneliti menganggap bahwa metode kualitatif merupakan metode yang tepat untuk mampu mencapai tujuan penelitian ini. Lokus penelitian ini dilaksanakan di wilayah terluar Provinsi Riau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau terdapat di Pulau Rupat yang langsung berbatasan dengan Malaysia dan berhadapan dengan perairan internasional Malaysia-Indonesia-Singapura dan Malaysia-Indonesia-Thailand. Metode penelitian ini menggunakan Teknik wawancara snowball sampling dengan nelayan-nelayan, kelompok nelayan, tokoh masyarakat, aparat desa yang menjadi informan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori dependensi merupakan turunan dari teori struktural, dimana kemiskinan yang terdapat di negara-negara dunia ketiga yang mengkhususkan pada produksi pertanian adalah akibat dari struktur perekonomian dunia yang eksploitatif sehingga surplus dari negara tersebut beralih ke negara industri-industri maju. Dalam teori dependensi ini, Menurut Raul Prebisch, negara dibagi menjadi dua yaitu negara pusat (*core countries*) dan pinggiran (*periphery*). Dimana Menurut Prebisch Industrialis makin kaya sedangkan agraris makin miskin karena:

- a) Permintaan untuk barang-barang pertanian tidak elastic.
- b) Negara-negara industri melakukan proteksi terhadap hasil pertanian mereka sendiri.
- c) Kebutuhan bahan mentah dikurangi karena adanya penemuan-penemuan teknologi baru.

Kondisi itu mengakibatkan banyaknya barang impor negara pinggiran dari negara pusat. Keterbelakangan negara-negara Amerika Latin tetap berlangsung karena negara-negara ini mengandalkan ekspor barang-barang primer. Sehingga negara-negara harus melakukan industrialisasi.

Teori dependensia merupakan teori klasik ketika akademisi membahas sebuah teori-teori yang mengisi dalam teori pembangunan. Ketika melihat pembahasan dependensia sebagai focus dalam artikel maka penulis melihat dari sudut pandang dependensia, masih ada dan masih dijalankan tanpa kita sadari namun memang tidak membentuk sebuah koloni ataupun jajahan. Faktanya dalam artikel ini berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, ketergantungan ekonomi masih terjadi di Indonesia, pada Rupat Utara yang merupakan wilayah pesisir Provinsi Riau. Ketergantungan yang terjadi seharusnya bisa diperkecil ruang nya dengan konsep Komunitarian, yang menjadikan kelompok sebagai bagian subsidiary (Schumaker, 2018).

Kelompok seharusnya menjadikan anggotanya menjadi sejahtera, sebagai agen untuk menjadi narahubung yang baik tidak hanya ke pemerintah namun juga dalam transaksi jual beli. Namun hal tersebut tidak terjadi pada kelompok-kelompok yang terbentuk, kelompok terbentuk hanya didapatkan guna kepentingan yang ingin dicapai

salah satunya sebagai syarat administrasi. Penulis tidak menemukan dilapangan bahwa terdapat, suatu keterikatan dari yang plural untuk mampu mencapai dalam satu tujuan yang utuh. Alhasil kelompok menjamur namun tidak memberikan manfaat yang besar dalam mensejahterakan, namun kelompok-kelompok tersebut pada ruang nyata bersifat semu. Nelayan menggantungkan nilai ekonomi pendapatan kepada pengepul besar ikan-ikan, tidak jarang para pengepul menerapkan system monopoli. Bahkan ketika peralatan operasional rusak makanya yang menjadi tempat membantu adalah pengepul.

Membantu tentu dalam pribahasa asing mengatakan *there is no free lunch*, yang makna nya bahwa bantuan tersebut harus ditukar dengan tangkapan ikan yang didapatkan nelayan. Tidak ada upaya mensejahterakan situasi, dan komunikasi pembangunan yang dimunculkan dari kelompok-kelompok nelayan ini kepada Pemerintah. Impact factor tersebutlah yang menyebabkan bahwa wajar kebijakan pun tidak mampu membaca situasi, yang lebih tepat dalam memberdayakan masyarakat pesisir berprofesi nelayan. Tidak ada yang perlu dibina dari nelayan-nelayan tersebut, karena nelayan bukan lah sebuah profesi namun sebuah keseharusan yang mesti didapatkan dan dijalankan setiap pemuda dijumlah desa Kawasan Pesisir Rupert Utara, terdapat beberapak yang harus dibenahi bagi kelompok nelayan, yang menyebabkan dependesia yang terjadi selama ina pada masyarakat dan kelompok nelayan, yaitu

a. Pematangan karakter kepribadian sesuai era

Saat ini era digital, tidak melihat sudut pandang profesi harus berada diwilayah utama atau wilayah pinggiran. Dahulu tantara sekutu membuat perlawanan dengan tank besi, namun sekarang menggunakan tank yang tidak lagi besi namun tidak Nampak. Yang artinya adalah kemajuan zaman, menuntut manusia untuk memiliki karakter yang kuat, berkualitas dan memiliki analisis yang baik dalam kemajuan ilmu pengetahuan. Pematangan karakter tidak membahas peralatan tradisional, the most important think adalah bagaimana karakter nelayan-nelayan dapat membangun kualitas yang unggul. Pendidikan formal menjadi kewajiban itu pasti, namun tidak cukup hanya Pendidikan formal saja namun menanggapi capaian hari ini, untuk mempersiapkan hari esok juga diperlukan. Karakter yang kuat kerja keras dan tidak egois dalam hidup diperlukan dalam kehidupan nelayan. Keuntungan uang yang harus difikirkan untuk kemajuan, bukan untuk dihabiskan. Ikan dengan nilai ekonomis tinggi yang tidak selalu memerlukan dan bergantung pada Ringgit yaitu negara Malaysia untuk maju pun diperlukan.

b. Manajemen Organisasi

Kelompok dibangun sangat dipahami oleh masyarakat, dengan membentuk struktur kedudukan fungsi namun sayang hanya berada diatas kertas. Tidak terbangun berdasarkan kekuatan persepsi dan pengembangan organisasi yang baik dengan mengelola kepentingan dari setiap anggota kelompoknya. Building on MacIver, Etzioni (1996) mengusulkan konsep “responsive komunitas ”dari perspektif komunitarian dan menunjukkan tiga karakteristik komunitas:

1. Komunitas memerlukan jaringan hubungan yang sarat pengaruhdalamsekelompok individu, hubungan yang sering saling silangdan memperkuat satulain
2. Komunitas membutuhkan komitmen ke satu set nilai bersama,norma,dan makna, dan berbagi sejarahdan identitas- singkatnya, dibagikan pengetahuan;
3. Komunitas adalah ditandai oleh Sebuah relative tingkat tinggi responsive

- c. Rasa cinta tanah air
- d. Hadirnya pemerintah lewat kebijakan yang tepat.

Selama ini pemerintah hadir dengan sejumlah pertimbangan. Memberdayakan masyarakat pesisir tidaklah seperti memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat lainnya, karena didalam habitat pesisir terdapat banyak kelompok kehidupan masyarakat diantaranya:

- a) Masyarakat nelayan tangkap, adalah kelompok masyarakat pesisir yang mata pencaharian utamanya adalah menangkap ikan dilaut. Kelompok ini dibagi lagi dalam dua kelompok besar, yaitu nelayan tangkap modern dan nelayan tangkap tradisional. Keduanya kelompok ini dapat dibedakan dari jenis kapal/peralatan yang digunakan dan jangkauan wilayah tangkapannya.
- b) Masyarakat nelayan pengumpul/bakul, adalah kelompok masyarakat pesisir yang bekerja disekitar tempat pendaratan dan pelelangan ikan. Mereka akan mengumpulkan ikan-ikan hasil tangkapan baik melalui pelelangan maupun dari sisa ikan yang tidak terlelang yang selanjutnya dijual ke masyarakat sekitarnya atau dibawah ke pasar-pasar lokal. Umumnya yang menjadi pengumpul ini adalah kelompok masyarakat pesisir perempuan.
- c) Masyarakat nelayan buruh, adalah kelompok masyarakat nelayan yang paling banyak dijumpai dalam kehidupan masyarakat pesisir. Ciri dari mereka dapat terlihat dari kemiskinan yang selalu membelenggu kehidupan mereka, mereka tidak memiliki modal atau peralatan yang memadai untuk usaha produktif. Umumnya mereka bekerja sebagai buruh/anak buah kapal (ABK) pada kapal-kapal juragan dengan penghasilan yang minim.
- d) Masyarakat nelayan tambak, masyarakat nelayan pengolah, dan kelompok masyarakat nelayan buruh.

Maka hal tersebutlah menjadi focus dari pemerintah untuk sejumlah kelompok nelayan, substansi dan fakta membuktikan sebelum berbicara hal tersebut pahami dulu keterbatasan apa yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Pahami subordinat seperti apa nelayan-nelayan yang ikut dalam komunitas. Dan apa keuntungan dari pemerintah dengan adanya komunitas, secara positif tentu memudahkan pemerintah dalam memetakan situasi dan meramu sebuah formula kebijakan yang tepat sehingga negara hadir dengan utuh bagi nelayan-nelayan. Situasi tersebut harus dihadirkan dan disusun formula yang baik untuk wilayah tapal batas penguatan kapasitas dari nelayan-nelayan untuk memperkokoh dependensia yang kuat kedalam bukan lagi dependensia keluar.

KESIMPULAN

Dependensia masih berlangsung, artikel ini tidak mengkritisi kekuatan atau pun keterbatasan namun memberikan pemaparan bahwa daerah tapal batas masih memiliki keterbatasan. Kekuatan masyarakat yang ada di wilayah pesisir tapal batas dimulai dengan adanya kelompok yang kuat dan sehat. Namun tidak di Rupert Utara, sejumlah pandangan dari penulis menjadi obat dasar yang harus diperbaiki diawal yaitu penguatan sumber daya manusia dari nelayan sebelum membentuk kelompok baru selanjutnya memperkuat kekuatan dari kelompok-kelompok yang terbentuk sehingga tidak hanya menjadi sebuah boneka dan alat politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal., 2016., *Metode Penelitian Kuantitatif*.,Raja Grafindo Persada., Jakarta.
- Aida, Ridha. 2005. Liberalisme dan Komunitarianisme: Konsep tentang Individu dan Komunitas. DEMOKRASI Vol. IV No. 2.
- Amin Mudzakkir, ... Kembalinya Tradisi: Rasionalitas Dan Etika Komunitarian Alasdair Macintyre. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia – LIPISSN 2407-0556
- Amrizal, Safrizal, Mahdi dan Junaidi, 2016. *Pengembangan Usaha Perikanan Laut Berkelanjutan Berbasis Zona Penangkapan di Kabupaten Bengkalis*, Disertasi Program Doktor Pascasarjana Universitas Andalas, Padang (tidak dipublikasikan)
- Badrudin, N.N Wiadnyana, B.Wibowo, 2005. *Deep water exploratory bottom long lining In the waters of the Arafura Sea*. Indonesian Fisheries Research journal, 11 (1) : pp 41-46.
- Badrudin, Wudianto, N.N. Wiadnyana, dan S.Nurhakim, 2006. *Deep sea fish resources Diversity and potential in the waters of western Sumatera of the Eastern Indian Ocean*. Indonesian Fisheries Reseach journal. 12(2) : pp 113-12.
- Bailey and Brorsen (1989). *Price Asymetry in Spatial Fee Cattle Markets*. Western Journal of Agriculture Economics, Vol. 14. pp 246-252 .
- Brill, R.W.et al, 1999. *Horizontal Movements and depth Distribution of large adult Yellowfin tuna (Thunnus albacores) near the Hawaiian Islands, recorded using Ultrasonic telemetry: Implications for the physiological ecology of pelagic fishes*, Marine Biologi (133) pp 395 – 408, Hawaii.
- Dahuri, R., 2001. *Potensi dan permasalahan pembangunan kawasan pesisir Indonesia*, Pusat kajian sumberdaya pesisir dan lautan IPB, Bogor.
- Fauzi, A.dan S.Anna, 2005. *Permodelan sumber daya perikanan dan kelautan untuk analisis kebijakan*, Gramedia pustaka utama, Jakarta.
- Ghofur, Abd. 2014. Problematika Pembangunan Pulau Terluar dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis. Jurnal Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama, 6 (1).
- Hariyanto, Ishak. 2015. Relevansi Aliran Utilitarianisme, Liberalisme, Libertalianisme, Dan Komunitarianisme Dalam Islam. Volume 7, No. 1, Juni 2015
- Indiahono, Dwianto., 2009.,*Perbandingan Administrasi Publik*., Gava Media., Yogyakarta.
- Kusumanegara, Solahuddin., 2010.,*Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*., Gava Media., Yogyakarta.
- Nugroho, Riant., 2006.,*Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang*., PT. Elex Media Komputindo., Jakarta.
- Schumaker, P. (2018). Amitai Etzioni: Communitarian Centrist and Principled Pluralist. *Social Science Journal*, 55(1), 4–5. <https://doi.org/10.1016/j.soscij.2018.02.004>

Analisis Faktor Kelembagaan, Kualitas SDM, Modal dan Strategi Pemasaran terhadap Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif (Studi pada Desa Wisata Pujon Kidul, Kabupaten Malang)

Achmad Sjafi¹, Zaenal Fanani², dan Anggraeny Puspaningtyas³

¹Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
email: ahmadsyafii@untag-sby.ac.id

²Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
email: fanani09.zf@gmail.com

³Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
email: anggraenypuspa@untag-sby.ac.id

Abstrak

Desa Wisata Pujon Kidul adalah usaha ekonomi desa di sektor pariwisata yang dikembangkan dalam perspektif ekonomi kreatif dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh independen variabel (faktor kelembagaan, kualitas SDM, modal usaha, strategi pemasaran) terhadap dependen variabel (pengembangan usaha) melalui intervening variabel (kondisi sosial ekonomi masyarakat). Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi linier berganda, dengan 100 responden yang dipilih secara *purposive*. Hasil analisa simultan pengaruh kelembagaan, kualitas SDM, modal usaha, dan strategi pemasaran memberikan pengaruh secara simultan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Sedangkan hasil analisa simultan pengaruh kondisi sosial ekonomi masyarakat terhadap pengembangan usaha menunjukkan pengaruh secara signifikan, sehingga secara keseluruhan faktor kelembagaan, kualitas SDM, modal usaha, dan strategi pemasaran memberikan pengaruh secara simultan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat dan secara tidak langsung memberikan pengaruh secara simultan terhadap pengembangan usaha melalui kondisi sosial ekonomi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk pengembangan Desa Wisata Pujon Kidul ke depan, Pemerintah Desa Pujon Kidul bersama-sama BUMDes "Sumber Sejahtera" dan Pokdarwis perlu menetapkan kebijakan program strategis, meliputi: Peningkatan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan warga masyarakat, peningkatan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan program Sadar Wisata dan Sapta Pesona, membangun kerjasama kemitraan untuk penyediaan dana pinjaman (kredit) dengan "skema khusus" melalui BUMDes "Sumber Sejahtera" Desa Pujon Kidul dengan lembaga perbankan, peningkatan kualitas produk serta pengembangan usaha yang menekankan pada aspek kualitas.

Kata kunci: kelembagaan, kualitas SDM, modal usaha, strategi pemasaran, pengembangan usaha

Abstract

Pujon Kidul Tourism Village is a village economic enterprise developed in the economic sector developed with available natural resources and human resources. This study aims to analyze the independent variables (institutional quality, HR quality, business capital, marketing strategy) on the dependent variable (business development) through intervening variables (socio-economic conditions of the community). This study uses quantitative analysis methods using multiple linear regression analysis, with 100 respondents selected purposively. The results of simultaneous analysis of institutional influences, HR quality, business capital, and marketing strategies have a simultaneous influence on the socio-economic conditions of the community. While the results of the simultaneous analysis of the socio-economic influence of the community on business development show the significance, performance of HR, capital, strategic business, and marketing strategies to provide a link with the socio-economic community and directly provide assistance simultaneously to business development through socio-economic communities. The results showed that in the future development of Pujon Kidul Tourism Village, the Government of Pujon Kidul Village together with the "Sumber Sejahtera" BUMDes and Pokdarwis needed to improve strategic program policies, covering: Increasing, increasing and increasing community expectations. partnership cooperation to provide loan funds (credit) by "special lending" through the "Sumber Sejahtera" BUMDes of Pujon Kidul Village with banking institutions, improving product quality and developing businesses that are in line with quality.

Keywords: institutions, quality of human resources, business capital, marketing strategy, business development

Pendahuluan

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Timur tahun 2014-2019, yaitu pengentasan kemiskinan menjadi salah satu prioritas pembangunan di Jawa Timur. Dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Jawa Timur maka ditetapkan program pembangunan yang menekankan pada upaya-upaya pemberdayaan ekonomi perdesaan melalui penguatan kelembagaan, pengembangan sarana dan prasarana ekonomi desa, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia (Kebijakan Strategis Pembangunan Daerah Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Provinsi Jawa Timur 2014-2019). Dalam konstruksi ini, salah satu solusi penting yang mampu mendorong gerak pembangunan ekonomi perdesaan adalah mengembangkan kewirausahaan bagi masyarakat desa. Secara konsepsional, kewirausahaan merupakan proses mengerjakan sesuatu yang baru (kreatif) dan berbeda (inovatif).

Desa wisata memiliki corak pengembangan sektor pariwisata melalui *creative tourism* dengan menghasilkan beberapa produk ekonomi kreatif seperti kerajinan tangan (*handicraft*), makanan dan minuman (kuliner), seni pertunjukan, dan arsitektur perdesaan. Salah satu desa wisata yang telah berkembang di Jawa Timur saat ini adalah Desa Wisata Pujon Kidul di Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Desa Wisata Pujon Kidul telah disahkan sejak tahun 2014 dan melibatkan beberapa warga masyarakat dalam bentuk usaha pengembangan desa wisata. Desa Pujon Kidul memiliki potensi wisata yang menarik untuk dijadikan atraksi wisata di antaranya: wisata alam air terjun Sumber Pitu, agrowisata petik sayur dan buah, *tracking* Gunung Kawi, wisata *outbound*, kesenian Sadukan, kesenian Kuda Lumping, sentra olahan susu sapi, dan wisata edukasi ternak sapi.

Berbagai atraksi wisata tersebut kemudian menumbuhkan berbagai usaha mikro kecil warga masyarakat desa berbasis ekonomi kreatif seperti: pembuatan makanan dan minuman khas (stik susu, *yoghurt*, dan permen susu), kerajinan (*handicraft*), seni pertunjukan, dan arsitektur perdesaan. Namun demikian, pengembangan Desa Wisata Pujon Kidul belum dilakukan secara optimal. Penyebab utama belum optimalnya kinerja Desa Wisata diantaranya disebabkan oleh belum tertatanya pengelolaan beberapa aspek, yakni: (1) kelembagaan yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif; (2) kualitas SDM yang kreatif, inovatif, profesional, dan kompetitif; (3) ketersediaan modal usaha (pembiayaan) yang sesuai, mudah diakses, dan kompetitif; dan (4) perluasan pasar bagi karya kreatif.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian yang dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Analisis pengaruh kelembagaan secara signifikan terhadap pengembangan usaha ekonomi kreatif pada Desa Wisata Pujon Kidul, Kabupaten Malang; (2) Pengaruh kualitas SDM terhadap pengembangan usaha ekonomi kreatif secara signifikan pada Desa Wisata Pujon Kidul, Kabupaten Malang; (3) Pengaruh modal usaha terhadap pengembangan usaha ekonomi kreatif secara signifikan pada Desa Wisata Pujon Kidul, Kabupaten Malang; (4) Pengaruh pemasaran berpengaruh secara signifikan terhadap pengembangan usaha ekonomi kreatif pada Desa Wisata Pujon Kidul, Kabupaten Malang; (5) Pengaruh kelembagaan, SDM, modal dan pemasaran secara signifikan terhadap pengembangan usaha ekonomi kreatif pada Desa Wisata Pujon Kidul, Kabupaten Malang.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

a. Hasil Penelitian

Adapun hasil analisis regresi untuk mengetahui pengaruh kelembagaan (x1), kualitas SDM (x2), modal usaha (x3), strategi pemasaran (x4), dan kondisi sosial ekonomi masyarakat (x5) terhadap pengembangan usaha (y) pelaku usaha ekonomi produktif di Desa Wisata Pujon Kidul yang menjadi responden dalam penelitian ini, meliputi uji parsial; uji simultan; koefisien determinasi (R-Square), dan analisis data kuantitatif, masing-masing secara berurutan disajikan sebagai berikut:

1. Uji Parsial

Analisa ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara terpisah (parsial) antara kelembagaan (x1), kualitas SDM (x2), modal usaha (x3), dan strategi pemasaran (x4) terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat (i) serta pengaruh terpisah antara kondisi sosial ekonomi masyarakat (i) terhadap pengembangan usaha (y), menggunakan statistik uji t. Adapun hasil analisa uji parsial sebagaimana Tabel dibawah ini :

Tabel 1. Hasil Uji Parsial Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat (i)

Variabel independent	t_{hitung}	$t_{tabel(0.05;4;95)}$	keterangan
Kelembagaan (x1)	2.834	1.711	signifikan
Kualitas SDM (x2)	-0.349		tidak signifikan
Modal Usaha(x3)	-0.003		tidak signifikan
Strategi Pemasaran (x4)	4.080		signifikan

Keterangan: Variabel dependen (Y) = Kondisi sosial ekonomi masyarakat

Sumber: Data primer (diolah)

Tabel 2. Hasil Uji Parsial Terhadap Pengembangan Usaha (Y)

Variabel independent	t_{hitung}	$t_{tabel(0.05;4;95)}$	keterangan
Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat (i)	5.189	1.711	signifikan

Keterangan: Variabel dependen (Y) = Pengembangan Usaha

Sumber: Data primer (diolah)

Berdasarkan hasil analisa parsial pada Tabel 1 dan 2, dapat diambil keputusan sebagaimana berikut:

1. Analisa parsial pengaruh kelembagaan (X1) terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat (i), menunjukkan bahwa t_{hitung} (2.834) > t_{tabel} , sehingga H_0 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa kelembagaan (X1) mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat (i).
2. Analisa parsial pengaruh kualitas SDM (X2) terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat (i), menunjukkan bahwa t_{hitung} (-0.349) < t_{tabel} , sehingga H_0 diterima. Dapat disimpulkan bahwa kualitas sdm (X2) tidak mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat (i).
3. Analisa parsial pengaruh modal usaha (X3) terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat (i), menunjukkan bahwa t_{hitung} (-0.003) < t_{tabel} , sehingga H_0 diterima. Dapat disimpulkan bahwa modal usaha (X3) tidak mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat (i).
4. Analisa parsial pengaruh strategi pemasaran (X4) terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat (i), menunjukkan bahwa t_{hitung} (4.080) > t_{tabel} , sehingga H_0 ditolak.

Dapat disimpulkan bahwa strategi pemasaran (X4) mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat (i),

- Analisa parsial pengaruh kondisi sosial ekonomi masyarakat (i) terhadap pengembangan usaha (Y), menunjukkan bahwa $t_{hitung} (5.189) > t_{tabel}$, sehingga H_0 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat (i) mempengaruhi pengembangan usaha (Y).

2. Uji Simultan

Analisa ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh kelembagaan (x1), kualitas SDM (x2), modal usaha (x3), dan strategi pemasaran (x4) secara bersama-sama (simultan) terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat (i) serta kondisi sosial ekonomi masyarakat (i) terhadap pengembangan usaha (y) menggunakan statistik uji F, hasilnya sebagaimana Tabel :

Tabel 3. Hasil Uji Simultan Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat (i)

Variabel independen	F_{hitung}	$F_{tabel(0.05;4;95)}$	keterangan
Kelembagaan (x1)	8.841	2.498	Signifikan
Kualitas SDM (x2)			
Modal Usaha(x3)			
Strategi Pemasaran (x4)			

Keterangan: Variabel dependen (Y) = Kondisi sosial ekonomi masyarakat

Sumber: Data primer (diolah)

Tabel 4. Hasil Uji Simultan Terhadap Pengembangan Usaha (Y)

Variabel independen	F_{hitung}	$F_{tabel(0.05;4;95)}$	Keterangan
Kondisi sosial ekonomi masyarakat (i)	26.930	2.498	signifikan

Keterangan: Variabel dependen (Y) = Pengembangan usaha

Sumber: Data primer (diolah)

Berdasarkan hasil analisa simultan pengaruh kelembagaan (x1), kualitas SDM (x2), modal usaha (x3), dan strategi pemasaran (x4) terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat (i), diketahui bahwa $F_{hitung} (8.841) > F_{tabel} (2.498)$, sehingga H_0 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa kelembagaan (x1), kualitas SDM (x2), modal usaha (x3), dan strategi pemasaran (x4) memberikan pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat (i). Sedangkan untuk hasil analisa simultan pengaruh kondisi sosial ekonomi masyarakat (i) terhadap pengembangan usaha (y) diketahui bahwa $F_{hitung} (26.930) > F_{tabel} (2.498)$, sehingga H_0 ditolak. Dengan demikian, secara keseluruhan dapat diambil kesimpulan bahwa kelembagaan (x1), kualitas SDM (x2), modal usaha (x3), dan strategi pemasaran (x4) memberikan pengaruh secara bersama-sama terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat (i) dan secara tidak langsung juga memberikan pengaruh secara bersama-sama terhadap pengembangan usaha (Y) melalui kondisi sosial ekonomi masyarakat (i).

3. Koefisien Determinasi (R-Square)

Analisa ini bertujuan untuk mengukur besarnya (dalam bentuk persentase) kelayakan model regresi yang telah terbentuk. Dengan kata lain, menunjukkan seberapa besar

peran kelembagaan (x1), kualitas SDM (x2), modal usaha (x3), dan strategi pemasaran (x4) dan kondisi sosial ekonomi masyarakat (i) dalam menjelaskan kondisi dan pengaruhnya terhadap pengembangan usaha (Y) menggunakan koefisien determinasi R² (R-Square).

Hasil Koefisien Determinasi

Variabel independent	R-Square
Kelembagaan (x1)	0.271
Kualitas SDM (x2)	
Modal Usaha(x3)	
Strategi Pemasaran (x4)	
Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat (i)	0.216

Keterangan: Variabel dependen (Y) = Pengembangan usaha

Sumber: Hasil Data primer

Rumus dan perhitungan *Q-square* :

$$Q^2 = 1 - (1 - R_1^2)(1 - R_2^2)$$

$$= 1 - (1 - 0.271)(1 - 0.216) = 0.428$$

Hasil perhitungan *Q-square* menunjukkan nilai sebesar 0.428 yang berarti bahwa kelembagaan (x1), kualitas SDM (x2), modal usaha (x3), dan strategi pemasaran (x4) dan kondisi sosial ekonomi masyarakat (i) memiliki kemampuan dalam menjelaskan kondisi pengembangan usaha (y) sebesar 42.8%, sedangkan sisanya sebesar 57.2% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dan error.

b. Pembahasan

a) Kelembagaan

Dari hasil analisis data kuantitatif penelitian ini, khususnya dari indikator tujuan, keberadaan Pokdarwis Desa Wisata Pujon Kidul sudah cukup membantu pelaku usaha ekonomi produktif yang ada di Desa Wisata Pujon Kidul, serta sejalan dengan keinginan warga masyarakat sehingga warga masyarakat memerlukan keberadaannya untuk membantu mereka dalam menjalankan usahanya.

Terkait dengan indikator struktur Pokdarwis, struktur organisasi Pokdarwis Desa Wisata Pujon Kidul sudah sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2012), terdiri dari unsur Pembina, Penasehat, Pimpinan, Sekretariat, Seksi-Seksi (antara lain: Keamanan dan Ketertiban; Kebersihan dan Keindahan; Daya Tarik Wisata dan Kenangan; Hubungan Masyarakat dan Pengembangan SDM; dan Pengembangan Usaha), dan Anggota. Selain itu, hubungan dan koordinasi kepengurusan Pokdarwis dilaksanakan secara intensif dan diterjemahkan dalam suatu struktur organisasi yang sistematis, sehingga setiap pihak dapat mengetahui jабaran tugas dan wewenang masing-masing dengan baik.

b) Kualitas SDM

Hasil analisis data kuantitatif penelitian ini terhadap variabel kualitas SDM menunjukkan secara umum pelaku usaha di Desa Wisata Pujon Kidul yang menjadi responden mengakui, pentingnya kualitas SDM dalam kelancaran berwirausaha serta pengembangannya di Desa Wisata Pujon Kidul. Dari 3 (tiga) indikator kualitas SDM yakni: pendidikan; pengalaman; dan keterampilan, nilai rata-rata (*mean*) keterampilan adalah yang tertinggi (4,25). Hal ini sangat dipengaruhi oleh karena dari ketiga indikator

tersebut, keterampilan lah yang paling feasibel ditingkatkan kualitasnya oleh pelaku usaha di Desa Wisata Pujon Kidul. Sedangkan pendidikan dan pengalaman tingkatnya relatif rendah, serta relatif sulit ditingkatkan sebab memerlukan waktu yang relatif panjang serta sarana dan prasarana yang memadai. Sementara dari indikator pengalaman, secara umum pengalaman pelaku usaha di Desa Wisata Pujon Kidul masih terbatas karena Desa Wisata Pujon Kidul baru tumbuh dan berkembang pesat mulai tahun 2016. Oleh sebab itu, untuk dapat meningkatkan kualitas SDM pelaku usaha di Desa Wisata Pujon Kidul, Pemerintah Desa melalui Pokdarwis perlu membuat atau menetapkan kebijakan peningkatan kualitas SDM dalam bentuk program-program dan atau kegiatan-kegiatan pelatihan keterampilan.

c) Modal Usaha

Hasil analisis data kuantitatif variabel modal usaha dalam penelitian ini menunjukkan nilai rata-rata (*mean*) indikator modal usaha yang terdiri dari: kecukupan modal sendiri; kemudahan mendapatkan modal; dan sumber pinjaman modal dinilai pelaku usaha di Desa Wisata Pujon Kidul yang menjadi responden cukup penting (3,43). Dari ketiga indikator tersebut, indikator kemudahan mendapatkan modal dinilai sebagai indikator yang terpenting. Hal ini menunjukkan bahwa bagi pelaku usaha di Desa Wisata Pujon Kidul, untuk memperoleh modal (pinjaman) masih dirasakan agak sulit. Hal ini lebih jauh diindikasikan meski BUMDes “Sumber Sejahtera” Pujon Kidul sudah menggalang kerjasama kemitraan dengan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), namun belum tersedia fasilitas pinjaman kredit. Pemerintah Desa Pujon Kidul melalui BUMDes “Sumber Sejahtera” sebagai lembaga ekonomi desa yang diakui dan direkomendasikan oleh Undang-Undang perlu membangun kerjasama kemitraan dengan lembaga perbankan, terutama bank-bank milik pemerintah yang sudah memiliki kantor cabang di Kecamatan Pujon. Secara lebih khusus, melalui fasilitasi dari Pemerintah Kabupaten Malang, BUMDes “Sumber Sejahtera” dapat membangun kerjasama kemitraan dengan Bank Jatim, di mana baik Pemerintah Kabupaten Malang maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur merupakan pemegang saham terbesar, sehingga memiliki “otoritas” atau setidaknya *privelege* untuk mengusulkan penetapan kebijakan pinjaman kredit lunak bagi BUMDes “Sumber Sejahtera” Pujon Kidul.

d) Strategi Pemasaran

Hasil analisis data kuantitatif dari 100 responden pelaku usaha di desa Wisata Pujon Kidul menunjukkan rata-rata (*mean*) tertinggi adalah indikator distribusi produk (4,24) dan kualitas produk (4,23). Bagi pelaku usaha di desa Wisata Pujon Kidul produk usaha dan distribusinya memegang peranan penting dalam strategi pemasaran, sebab menurut mereka hanya dengan produk yang berkualitas serta pendistribusiannya yang luas dan baik tingkat penjualan produk dapat ditingkatkan. Untuk lebih memajukan-kembangkan usaha ekonomi produktif pelaku usaha di Desa Wisata Pujon Kidul, Pemerintah Desa Pujon Kidul dan Pokdarwis perlu menetapkan kebijakan peningkatan kualitas produk dan distribusi produk secara luas dan merata melalui program-program dan atau kegiatan pengembangan produk. Terkait hal ini, setidaknya ada 5 (lima) hal yang harus diperhatikan dalam pengembangan produk sehingga dapat menstimuli konsumen untuk melakukan pembelian, yakni: (1) Atribut produk; (2) Pemberian merk/branding; (3) Pengemasan; (4) Pemberian label; dan (5) Jasa pendukung produk.

e) Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Hasil analisis data kuantitatif menunjukkan indikator pendapatan masyarakat memiliki rata-rata (*mean*) tertinggi (4,29), dan secara berturut-turut disusul oleh indikator nilai dan norma sosial (4,28), partisipasi masyarakat (4,23), dan sumber daya

ekonomi (4,12). Secara keseluruhan keempat indikator memiliki rata-rata (*mean*) sebesar 4,26 yang termasuk kategori baik. Dari sisi pemberdayaan masyarakat sebagai tujuan utama pendirian Desa Wisata Pujon Kidul, sebagian besar pelaku usaha yang menjadi responden mengakui bahwa tingkat pendapatan mereka meningkat hanya dalam kurun waktu sekitar 3 (tiga) tahun. Sedangkan indikator lainnya yakni partisipasi masyarakat juga berada pada tingkat yang baik, di mana pelaku usaha di Desa Wisata Pujon Kidul termotivasi untuk terlibat dan mengembangkan berbagai usaha ekonomi produktif yang berdampak positif bagi pengembangan usaha Desa Wisata Pujon Kidul ke depan, dan juga yang terpenting berdampak positif bagi pemberdayaan serta peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Sementara indikator sumber daya ekonomi dinilai oleh pelaku usaha yang menjadi responden perlu didayagunakan secara lebih optimal.

f) Pengembangan Usaha

Tujuan pengembangan usaha Desa Wisata adalah; (1) Mendukung program pemerintah dalam program kepariwisataan dengan penyediaan program alternatif; (2) Menggali potensi desa untuk pembangunan masyarakat desa setempat; dan (3) Memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa. Tidak semua desa dapat dan feasibel dikembangkan menjadi desa wisata, tetapi harus memenuhi syarat serta memiliki faktor pendukung sebagai berikut: (a) Memiliki potensi daya tarik yang unik dan khas yang mampu dikembangkan sebagai daya tarik kunjungan wisatawan (sumber daya wisata alam, sosial, dan budaya); (b) Memiliki dukungan ketersediaan SDM lokal; dan (c) Memiliki alokasi ruang untuk pengembangan fasilitas pendukung seperti sarana dan prasarana berupa komunikasi, akomodasi, dan aksesibilitas yang baik (Priasukmana, 2001:38). Berdasarkan beberapa perspektif di atas, maka dalam penelitian ini pengembangan usaha Desa Wisata Pujon Kidul dilihat dan atau diukur dari 3 (tiga) indikator, yakni: peningkatan *omzet* penjualan; pertumbuhan lapangan kerja; dan peningkatan kunjungan wisatawan. Hasil analisis data statistik menunjukkan indikator peningkatan kunjungan wisatawan memiliki nilai rata-rata (*mean*) tertinggi (4,42), disusul pertumbuhan lapangan kerja (4,40), dan peningkatan *omzet* penjualan (4,21). Hasil ini menunjukkan bahwa pengembangan Desa Wisata Pujon Kidul telah berhasil meningkatkan kunjungan wisatawan, yang kemudian berimplikasi kepada pertumbuhan lapangan kerja, serta peningkatan *omzet* penjualan produk usaha ekonomi produktif.

4. Kesimpulan dan Saran

a. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang didasarkan pada temuan lapangan, kebijakan, dan pendapat para ahli, berikut beberapa kesimpulan penting hasil penelitian ini. Dari sisi struktur, organisasi Pokdarwis Desa Wisata Pujon Kidul sudah cukup lengkap mengatur bidang-bidang usaha dan sudah sesuai dengan kebutuhan usaha ekonomi produktif yang dikembangkan. Dari sisi inisiatif, organisasi Pokdarwis Desa Pujon Kidul memiliki keterbukaan yang luas bagi para pelaku usaha maupun warga masyarakat lainnya, serta tidak birokratis sehingga warga masyarakat lebih leluasa untuk berkreasi dalam mengembangkan berbagai usaha ekonomi produktif. Pengalaman masyarakat secara umum pengalaman pelaku usaha dan warga masyarakat masih kurang atau terbatas karena Desa Wisata Pujon Kidul baru berkembang 3 (tiga) tahun terakhir. Sedangkan untuk keterampilan, secara umum keterampilan pelaku usaha dan warga masyarakat masih terbatas. Secara umum pelaku usaha dan warga masyarakat masih mengandalkan

modal sendiri, dan kurang memadai untuk pengembangan usahanya. Di sisi lain, mereka mengalami kesulitan memperoleh pinjaman modal (kredit) dari lembaga perbankan maupun lembaga keuangan lainnya.

Dari hasil pengolahan data Primer didapatkan hasil bahwa factor kelembagaan, kualitas SDM, Modal Usaha dan Pemasaran secara simultan (bersama-sama) berpengaruh kepada Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat. dilihat dari partisipasi masyarakat, secara umum tingkat partisipasi warga masyarakat dalam pengembangan usaha ekonomi produktif cukup tinggi, sehingga berdampak positif bagi pengembangan usaha Desa Wisata Pujon Kidul. Sedangkan nilai dan norma sosial sebagai modal sosial, secara umum sudah terbangun dengan baik sehingga berdampak positif bagi pengembangan usaha Desa Wisata Pujon Kidul.

b. Saran

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana tersebut di atas, untuk pengembangan Desa Wisata Pujon Kidul ke depan, disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Pujon Kidul bersama-sama BUMDes “Sumber Sejahtera” dan Pokdarwis perlu menetapkan kebijakan program strategis, meliputi: (a) Peningkatan pengetahuan/ wawasan pengurus/anggota Pokdarwis tentang kepariwisataan; (b) Peningkatan kemampuan dan keterampilan warga masyarakat tentang pengelolaan usaha wisata; dan (c) Peningkatan peranserta aktif warga masyarakat dalam melaksanakan program Sadar Wisata dan Sapta Pesona.
2. Pemerintah Desa Pujon Kidul bersama-sama BUMDes “Sumber Sejahtera” dan Pokdarwis perlu menetapkan Rencana Aksi (*plan of action*) dalam bentuk kegiatan-kegiatan berikut: Peningkatan kualitas SDM pengelola, pelaku usaha, dan warga masyarakat.
3. Membangun kerjasama kemitraan untuk penyediaan dana pinjaman (kredit) dengan “skema khusus” melalui BUMDes “Sumber Sejahtera” Desa Pujon Kidul dengan lembaga perbankan pemerintah, khususnya Bank Jatim.
4. Peningkatan kualitas produk melalui pelatihan yang meliputi: (a) Atribut produk; (2) Pemberian merk/branding; (3) Pengemasan; (4) Pemberian lebel; dan (5) Jasa pendukung produk. Sedangkan untuk distribusi produk dilakukan melalui penataan tempat usaha secara terpadu dan komplementer.

Daftar Pustaka

- Adiyana, I.B.G.N.S dan P.A. Ardiana., 2014, “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Risiko Bisnis, Pertumbuhan Aset, Profitabilitas dan Likuiditas pada Struktur Modal”, *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Asyari, Hasbullah, 2010, *Buku Pegangan Desa Wisata*, Yogyakarta: Tourista Anindya Guna.
- Departemen Perdagangan RI, 2008, “*Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025: Rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2009-2025*”, Jakarta: Departemen Perdagangan RI.
- Horton, Paul B. and Chester L. Hunt, 1984, *Sociology*, Sixth Edition, Sidney: McGraw-Hill Book Company.
- Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI, 2011, *Implementasi dan Implikasi Kelembagaan Pemasaran Pariwisata yang Bertanggungjawab (Responsible Tourism Marketing)*, Jakarta: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.
- Manullang, Marihot, 2001, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: BPF.

- Marbun, B.N., 2003, *Kamus Manajemen*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Moekijat. 2000. *Kamus Manajemen*, Bandung, Penerbit CV. Mandar Maju.
- Moelyono, Mauled, 2010, *Menggerakkan Ekonomi Kreatif: Antara Tuntutan dan Kebutuhan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Nasution, M.N., 2004, *Manajemen Jasa Terpadu*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ndraha, Taliziduhu, 2005, *Budaya Organisasi*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Pitana, I.Gede dan Gayatri, Putu G., 2005, *Sosiologi Pariwisata*, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Rahardjo, M. Dawam, 2010, *Intelektual, Intelegensia, dan Perilaku Politik dan Bangsa*, Bandung: Mizan.
- Reksoprayitno, 2004, *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, Jakarta: Bina Grafika.
- Soemardjan, Selo dan Soelaeman Soemardi, 1964, *Setangkai Bunga Sosiologi*, Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI.
- Soeroso, R., 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sumardi, Mulyanto, 2001, *Kemiskinan Daerah Urban*, Jakarta: Rajawali.
- Suryana, 2013, *Ekonomi Kreatif, Ekonomi Baru: Mangubah Ide dan Menciptakan Peluang*, Jakarta: Salemba Empat.
- Yoeti, Oka A., 2007, *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Program Desa Maju Inhil Jaya pada Kawasan Tertinggal Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir

Muammar Alkadafi¹ dan Desma Elita²

¹Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Email: alkadafi.amar@gmail.com

²Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Email: desmaelite@gmail.com

Abstrak

Program Desa Maju Inhil Jaya merupakan program unggulan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, program Desa Maju Inhil Jaya merupakan kebijakan langsung sebagai wujud nyata dari transformasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Kabupaten Indragiri Hilir. Program Desa Maju Inhil Jaya pada operasionalisasinya masih menghadapi berbagai masalah dan kendala, program Desa Maju Inhil Jaya belum memberikan dampak yang signifikan merubah status desa, dari desa tertinggal menjadi desa maju dan mandiri. Tujuan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan program Desa Maju Inhil Jaya, dan dampak dari program Desa Maju Inhil Jaya di Desa Nusantara Jaya. Metode penelitian Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian evaluatif. Sumber data diperoleh melalui observasi pada lokasi sasaran kegiatan program Desa Maju Inhil Jaya wawancara mendalam (*indepth interview*), dengan key informan; Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, tokoh masyarakat dan perwakilan kelompok masyarakat, pendamping desa. Data juga diperoleh melalui penyebaran kuisioner kepada 30 informan yang dipilih secara *purposive sampling*. Hasil penelitian, pelaksanaan program Desa Maju Inhil Jaya di Desa Nusantara Jaya, mencakup 4 (empat) bidang kegiatan, yaitu kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa. Pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, kegiatan program yang dijalankan tidak semuanya sesuai dengan item-item kegiatan, sesuai dengan petunjuk pelaksanaan program Desa Maju Inhil Jaya dan tujuan khusus dari program Desa Maju Inhil Jaya. Pelaksanaan program masih bersifat *konservatif-involutif* artinya para pelaku program; kepala desa, aparat desa, pendamping desa masih bekerja apa adanya (*taken for granted*), melaksanakan fungsi secara tekstual sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) merealisasikan anggaran sesuai prosedur target dan realisasi anggaran. Belum tampak adanya upaya melakukan inovasi (perubahan) yang mengarah kepada pencapaian perubahan status desa dari tertinggal menjadi desa maju dan mandiri. Program Desa Maju Inhil Jaya yang telah dijalankan selama 4 (empat) tahun di Desa Nusantara Jaya baru berdampak positif pada bidang pemerintahan yakni adanya alokasi penguatan dana operasional pemerintah desa dan insentif aparat penyelenggara pemerintah desa. Pada bidang pembangunan, bidang kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa hasil yang diinginkan belum tercapai, dampak dari program Desa Maju Inhil Jaya belum sepenuhnya dirasakan masyarakat, kontribusi program masih minim dalam memecahkan masalah ditengah-tengah masyarakat. khususnya dalam aspek pergerakan ekonomi masyarakat, dalam pengembangan sarana ekonomi produktif masyarakat pada sektor pertanian dan perkebunan, dan peningkatan kapasitas masyarakat.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Evaluasi Kebijakan, Pembangunan dan Pemberdayaan.

Abstract

The Maju Inhil Jaya Village Program is the flagship program of the Government of Indragiri Hilir Regency, the Maju Inhil Jaya Village Program is a direct policy as a tangible manifestation of the transformation of Law No. 6 of 2014 concerning Villages in Indragiri Hilir Regency. The Desa Maju Inhil Jaya Program in its operation still faces various problems and constraints, the Desa Maju Inhil Jaya program has not yet had a significant impact on changing the status of the village, from an underdeveloped village to a developed and independent village. The research objective was to determine the implementation of the Maju Inhil Jaya Village program, and the impact of the Maju Inhil Jaya Village program in the Nusantara Jaya Village. Research methods Research uses a qualitative approach, with

evaluative research types. The data source was obtained through observation at the target location of the program activities of Desa Maju Inhil Jaya in-depth interviews (indepth interview), with key informants; Village Heads, Village Officials, BPD, Village Community Institutions, community leaders and community group representatives, village assistants. Data was also obtained through distributing questionnaires to 30 informants selected by purposive sampling. The results of the study, the implementation of the Maju Inhil Jaya Village program in the Nusantara Jaya Village, covers 4 (four) areas of activity, namely the activities of village governance, village development, village community, village community empowerment. The implementation of the activities has not been fully carried out properly, the program activities carried out are not all in accordance with the activity items, in accordance with the instructions for implementing the Desa Maju Inhil Jaya program and the specific objectives of the Desa Maju Inhil Jaya program. Program implementation is still conservative-involutive, meaning program actors; village heads, village officials, village assistants still work as is (taken for granted), carry out textual functions according to the main tasks and functions (tupoksi) to realize the budget according to target procedures and budget realization. There has not yet been any attempt to innovate (change) that has led to the achievement of changes in the status of villages from disadvantaged to developed and independent villages. The Desa Maju Inhil Jaya program, which has been running for 4 (four) years in Nusantara Jaya Village, has had a positive impact on the government sector, namely the allocation of strengthening the operational funds of the village government and incentives for village government administrators. In the field of development, the field of village community and village community empowerment the desired results have not been achieved, the impact of the Desa Maju Inhil Jaya program has not been fully felt by the community, the program contribution is still minimal in solving problems in the midst of the community. especially in the aspect of community economic movements, in the development of productive economic facilities in the agricultural and plantation sectors, and community capacity building.

Keywords: Public Policy, Policy Evaluation, Development and Empowerment.

1.1 Pendahuluan

Ada dua masalah besar bagi negara berkembang, yaitu *kemiskinan* dan *pengangguran*. Kebijakan ekonomi dan sosial harus menyelesaikan masalah tersebut. Berbagai kebijakan pemerintah dalam bentuk program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan yang dijalankan oleh berbagai departemen/kementerian, lembaga, pemerintah daerah, Pogram-program tersebut dilaksanakan dalam berbagai bentuk, baik pemberian bantuan fisik maupun dalam bentuk bantuan dana bergulir, namun pada realitasnya belum efektif dalam mengurangi angka kemiskinan dipedesaan secara signifikan. fenomena di lapangan menunjukkan, ketika program berakhir maka keluaran program tersebut sudah tidak berfungsi atau tidak terpelihara dan dilestarikan oleh masyarakat.

Pada tahun 2005 Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir mengeluarkan kebijakan Program Desa Mandiri yang fokus pada program pembangunan infrastruktur pedesaan, dan berlangsung hingga akhir tahun 2013. Sesuai dengan visi dan misi Bupati Indragiri Hilir periode 2013-2018, pada tahun 2014 mengeluarkan kebijakan lanjutan kepala daerah sebelumnya, yang disebut dengan program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Pogram DMIJ yang telah diluncurkan sejak tahun 2014 sebagai perwujudan janji-janji politik Bupati / Wakil Bupati terpilih, (HM. Wardan dan Rosman Malomo). Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) adalah salah satu program prioritas pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013-2018. Program Desa Mandiri yang dikeluarkan oleh Kepala Deaerah dan Wakil Kepala Daerah sebelumnya (Indra Mukhlis dan Rosman Malomo) dan program DMIJ saat ini merupakan program yang sama, dimana sumber pendanaannya, maupun strategi pendekatan operasionalnya dan pencapaiannya tidak jauh berbeda dari program sebelumnya, proses transformasi program menggunakan tenaga pendampingan desa

(PD) yang direkrut dari berbagai latar belakang, secara profesional dengan tingkat pendidikan rata-rata berpendidikan sarjana setara satu (SI). Kemudian, dari sisi sumber pendanaannya bersumber dari APBD Kabupaten Indragiri Hilir yang terdiri dari Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta bantuan keuangan kepada desa yang berjumlah Rp. 500.000.000,- s.d 900.000.000,-.

Program DMIJ dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan desa dalam melaksanakan pembangunan desa lingkup kegiatan program DMIJ disesuaikan dengan ruang lingkup pengelolaan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang meliputi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan dan masyarakat desa. Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus kajian ialah evaluasi terhadap pelaksanaan program DMIJ dan sejauhmana program DMIJ melahirkan keluaran (*output*), manfaat (*benefits*), dan dampak (*impact*) terhadap kehidupan masyarakat, khususnya di desa Nusantara Jaya. Salah satu aspek penting dalam proses atau tahapan kebijakan publik menurut para ahli (William Dunn, 1994. Ripley, 1985. James Anderson, 1979. Michael Howlet & Ramesh, 1995. dalam Subarsono, 2005:9-13) adalah tahap evaluasi kebijakan. Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Tujuan evaluasi kebijakan ialah. *Pertama*, menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. *Kedua*, mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. *Ketiga*, mengukur tingkat keluaran (*outcome*) suatu kebijakan. *Keempat*, mengukur dampak suatu kebijakan. *Keenam*, untuk mengetahui apabila ada penyimpangan. *Ketujuh*, sebagai bahan masukan (*input*) untuk kebijakan yang akan datang. Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ), sebagai sebuah kebijakan, setelah dilakukan tindakan kebijakan, maka akan dihasilkan kinerja dan dampak kebijakan, dan proses selanjutnya adalah evaluasi terhadap implementasi, kinerja dan dampak kebijakan tersebut.

1.2 Metode Penelitian

Adapun Jenis penelitian ini adalah penelitian evaluatif, Penelitian evaluatif menggunakan kriteria, tolak ukur, atau standar yang digunakan sebagai pembandingan bagi data yang diperoleh, setelah data tersebut diolah dan merupakan kondisi nyata dari objek yang diteliti. Kesenjangan antara kondisi nyata dengan kondisi harapan yang dinyatakan dalam kriteria itulah yang dicari. Dari kesenjangan tersebut diperoleh gambaran apakah objek yang diteliti sudah sesuai, kurang sesuai, atau tidak sesuai dengan kriteria. (Arikunto, 2013:36) Penelitian ini dilaksanakan di desa Desa Nusantara Jaya Kecamatan Kabupaten Indragiri Hilir. Fokus dalam penelitian ini adalah evaluasi pelaksanaan program kegiatan DMIJ, Evaluasi dampak program DMIJ, Faktor kendala pelaksanaan. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Prosedur penelitian evaluatif ialah mengidentifikasi komponen dan objek sebagai sebuah sistem. Program DMIJ merupakan sistem kebijakan, maka peneliti menentukan komponen dalam program DMIJ yaitu Penyelenggaraan Pemerintahan desa, Pembangunan desa, Pembinaan kemasyarakatan desa, Pemberdayaan masyarakat desa.

Data yang diperoleh melalui observasi, indepth interview, kuisioner, dan telaah dokumen, berdasarkan komponen kegiatan program DMIJ dan tujuan khusus program DMIJ sebagaimana tercantum dalam tabel..... selanjutnya dianalisis secara kualitatif Model Miles dan Humberman (dalam Iskandar, 2009:139), dalam model ini analisis data penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui langkah-langka sebagai berikut: (1) Reduksi Data; (2) Display/penyajian data; dan (3) mengambil kesimpulan lalu diverifikasi.

1.3 Hasil dan Pembahasan

Adapun hasil penelitian evaluasi terhadap pelaksanaan program Desa Maju Inhil Jaya dalam mewujudkan desa maju dan mandiri di Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut :

1.3.1 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Tabel 1. Tanggapan Masyarakat Tentang Pelaksanaan Pemerintahan Desa Nusantara Jaya

No	Kegiatan	Skala Pengukuran		Jumlah
		Setuju	Tidak Setuju	
1	Musyawah Desa	25	5	30
2	Informasi Desa	7	23	30
3	Kerjasama antar Desa	2	28	30

Sumber : Data Olahan Peneliti 2019

Dari data tabel 4 diatas dapat diketahui bahwa musyawarah atau rapat-rapat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Nusantara Jaya telah terlaksana dengan baik. Hal tersebut senada dengan kutipan wawancara Syamsul Muarif (Kades) Nusantara Jaya yang menyebutkan : *“Musyawarah desa di Desa Nusantara Jaya sudah berjalan secara terbuka, kita punya prinsip yang jelas semua perwakilan tokoh masyarakat, kelembagaan desa kita libatkan”*. Musyawarah desa merupakan mekanisme dalam menyepakati keputusan yang bersifat stretegis sebagaimana diatur dalam Permendes PDTT No. 2 Tahun 2015 tentang pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan muswarah desa. Hal tersebut sejalan dengan tujuan dari program DMIJ dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa agar tercipta partisipasi, demokrasi, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sedangkan Informasi Desa Kerjasama antar desa, di Desa Nusantara Jaya belum terlaksana secara baik.

1.3.2 Pelaksanaan Pembangunan Desa

Tabel 2. Tanggapan Masyarakat Tentang Kegiatan Pembangunan Desa

No	Kegiatan	Skala Pengukuran		Jumlah
		Setuju	Tidak Setuju	
1	Pemanfaatan dan Pemeliharaan infrastruktur	19	11	30
2	Sarana dan prasarana kesehatan	5	25	30
3	Sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan	24	6	30
4	Pengembangan sarana ekonomi produktif	4	26	30
5	Sarana dan prasarana keamanan dan ketertiban	3	27	30

Sumber : Data Olahan Peneliti 2019

Pelaksanaan pembangunan desa di Desa Nusantara Jaya melalui program Desa Maju Inhil Jaya pada bidang infrastruktur jalan dan jembatan secara umum terlaksana dengan baik. Keterangan Mulyadi, Suryati, Syamsul Muarif menyebutkan *“ kegiatan DMIJ itu kebanyakan pada pembangunan jembatan dan jalan karena itu memang*

sangat dibutuhkan masyarakat, infrastruktur di desa kami menjadi prioritas untuk diselesaikan karena menjadi masalah utama dalam aktivitas masyarakat.”

Keterangan tokoh masyarakat (Jamaludin) mengenai pembangunan infrastruktur, “ yang dibutuhkan masyarakat di desa ialah pembangunan infrastruktur jalan, tapi jalan yang dibutuhkan untuk dibangun ialah jalan utama desa, akses ke ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan, dan saat ini jalan tersebut tidak terselesaikan oleh pemerintah sejak dari dahulu”.

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pembangunan di Desa Nusantara Jaya melalui program DMIJ, belum terlaksana secara maksimal untuk memberikan layanan kepada masyarakat.

1.3.3 Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Tabel 3. Tanggapan Masyarakat Tentang Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan Desa

No	Kegiatan	Skala Pengukuran		Jumlah
		Setuju	Tidak Setuju	
1	Magrib Mengaji	2	28	30
2	Posyandu	4	26	30
3	PAUD	3	27	30
4	PKK	5	25	30

Sumber : Data Olahan Peneliti 2019

Pembinaan kemasyarakatan desa melalui kegiatan program Desa Maju Inhil Jaya di Kabupaten Indragiri Hilir dimaksudkan untuk membiayai kegiatan lembaga-lembaga kemasyarakatan desa. keberadaan lembaga masyarakat sangat diperlukan karena dapat menjadi alat untuk memenuhi kebutuhannya dibidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan keamanan. Secara umum pembinaan merupakan upaya perbaikan terhadap pola kehidupan yang direncanakan, Miftah Thoha (2008:207) pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil dan pernyataan yang lebih baik dalam menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan pertumbuhan evolusi atas berbagai kemungkinan peningkatan atau perkembangan atas sesuatu.

Adapun kegiatan pembinaan kemasyarakatan desa yang dilaksanakan melalui program DMIJ ialah kegiatan magrib mengaji, pembinaan Posyandu, pembinaan PAUD, pembinaan keagamaan dan ketertiban, pembinaan organisasi PKK, pembinaan KPMD, pembinaan kegiatan hari besar dan HUT RI, pembinaan kemasyarakatan organisasi NU. Dari kegiatan pembinaan kemasyarakatan desa yang dilaksanakan melalui program DMIJ, dapat dikatakan telah terlaksana secara baik. Salah satu aspek penting dalam pembinaan kemasyarakatan desa ialah melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat desa, dan hal ini termasuk dalam kategori Indeks Desa Membangun (IDM) ialah tumbuh dan berkembangnya Modal Sosial ditengah-tengah masyarakat.

1.4 Pemberdayaan Masyarakat

Tabel 4. Tanggapan Masyarakat Tentang Kegiatan Pemberdayaa Masyarakat Desa

No	Kegiatan	Skala Pengukuran		Jumlah
		Setuju	Tidak Setuju	
1	Usaha ekonomi masyarakat, pertanian dan perkebunan	5	25	30
2	Pendidikan dan pelatihan perangkat desa	23	7	30
3	Peningkatan kapasitas masyarakat	22	8	30

Sumber : Data Olahan Peneliti 2019

Di Desa Nusantara Jaya kegiatan Program DMIJ dibidang pemberdayaan ialah pelatihan kepala desa, aparat desa, BPD, Posyandu, UP2K dan Dasawisma, Pelatihan Membatik. Namun dari kegiatan tersebut tidak ada kegiatan pemberdayaan dalam mengembangkan usaha ekonomi masyarakat pertanian dan perkebunan. Data menunjukkan, mata pencaharian utama masyarakat Desa Nusantara Jaya ialah sektor pertanian kelapa, 1.568 (79,9%) penduduknya berproduksi pada sektor pertanian kelapa. Kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat seharusnya diarahkan kepada penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat petani kelapa. Tidak adanya inovasi dan kreatifitas petani kelapa menyebabkan terjadinya ketidakberdayaan masyarakat petani dalam memproduksi kelapa yang hanya di jual dalam bentuk bahan mentah yang ditampung/dibeli oleh para agen (*tokeh*) yang kemudian dijual pada korporasi (perusahaan) kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir. Program DMIJ pada bidang pemberdayaan harus difokuskan pada penguatan kapasitas masyarakat petani kelapa agar mampu melahirkan produk-produk turunan dari produk kelapa tersebut.

Program DMIJ dalam transformasinya menggunakan pola pendampingan. Pendampingan adalah pekerjaan yang dilakukan oleh fasilitator atau pendamping masyarakat dalam berbagai kegiatan program. Fasilitator juga seringkali disebut fasilitator masyarakat (*community facilitator/CF*) karena tugasnya lebih sebagai pendorong, penggerak, katalisator, motivator masyarakat, sementara pelaku dan pengelola kegiatan adalah masyarakat sendiri. (afandi, dkk. 2013).

Pendampingan pengembangan usaha ekonomi produktif merupakan tujuan program DMIJ. Di Desa Nusantara Jaya memiliki Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai lembaga ekonomi. Desa. Namun BUMDes di Desa Nusantara Jaya tidak beroperasi secara sehat dan tidak memiliki unit-unit usaha yang sesuai dengan potensi lokal desa, dengan demikian BUMDes di Desa Nusantara Jaya tidak berfungsi dalam menggerakkan ekonomi masyarakat. Lemahnya Sumber Daya Manusia pengelola BUMDes menyebabkan BUMDes tidak tumbuh dan berkembang melakukan kegiatan bisnis yang inovatif. BUMDes sebagai lembaga untuk menggerakkan usaha ekonomi desa menurut (Mustakim, 2015) salah satu permasalahannya ialah kegagalan Desa dalam aspek kepemimpinan Desa. Kepala Desa sebagai pemimpin Desa tidak mempunyai imajinasi dan prakarsa yang kuat untuk menggerakkan masyarakat dan mengonsolidasikan aset ekonomi lokal. Kepala Desa ataupun Pemerintah Desa hanya disibukkan dengan mengelola bantuan dari pemerintah baik itu pusat, provinsi maupun Kabupaten Kota. Dan Seringkali bantuan yang diberikan tersebut masih belum menyentuh gerakan ekonomi lokal.

Pendamping desa, sesungguhnya mempunyai pekerjaan penting, dalam konteks implementasi Undang-undang nomor 6 tahun 2014 secara implisit memberikan amanah

kepada profesi pendamping desa untuk mampu melakukan kerja-kerja pemberdayaan di masyarakat. Dengan demikian, profesi pendamping desa harus betul-betul memahami apa itu kerja-kerja pemberdayaan masyarakat, bukan hanya sekedar datang ke desa satu, dua atau tiga kali dalam 1 (satu) minggunya untuk menyampaikan kepada aparat desa tentang jumlah anggaran program, petunjuk teknis pelaksanaan proyek, dan tata cara pembuatan LPJ Nya, dan setelah itu pulang.

Cakupan kegiatan pendampingan Desa yang diharapkan setidaknya menyangkut dua (2) hal, yaitu pengembangan kapasitas teknokratis dan pendidikan politik. Pengembangan Kapasitas teknokratis, mencakup pengembangan pengetahuan dan keterampilan terhadap para pelaku Desa dalam hal pengelolaan perencanaan, penganggaran, keuangan, administrasi, sistem informasi dan sebagainya. Pendidikan Politik, terwujudnya masyarakat yang aktif, kritis, peduli, berdaulat dan bermartabat. Pendampingan ini merupakan sarana kaderisasi pada masyarakat lokal Desa agar mampu menjadi penggerak pembangunan dan demokratisasi Desa. Kaderisasi dilakukan dengan melakukan pendidikan, pelatihan dan membuka ruang-ruang publik serta akses perjuangan politik untuk kepentingan masyarakat. Politik dalam konteks ini bukan dalam pengertian perebutan kekuasaan melainkan penguatan pengetahuan dan kesadaran akan hak, kepentingan dan kekuasaan mereka, dan organisasi mereka merupakan kekuatan representasi politik untuk berkontestasi mengakses arena dan sumberdaya Desa. Pendekatan pendampingan yang berorientasi politik ini akan memperkuat kuasa rakyat sekaligus membuat sistem Desa menjadi lebih demokratis.



Sumber : Mustakim, 2015.

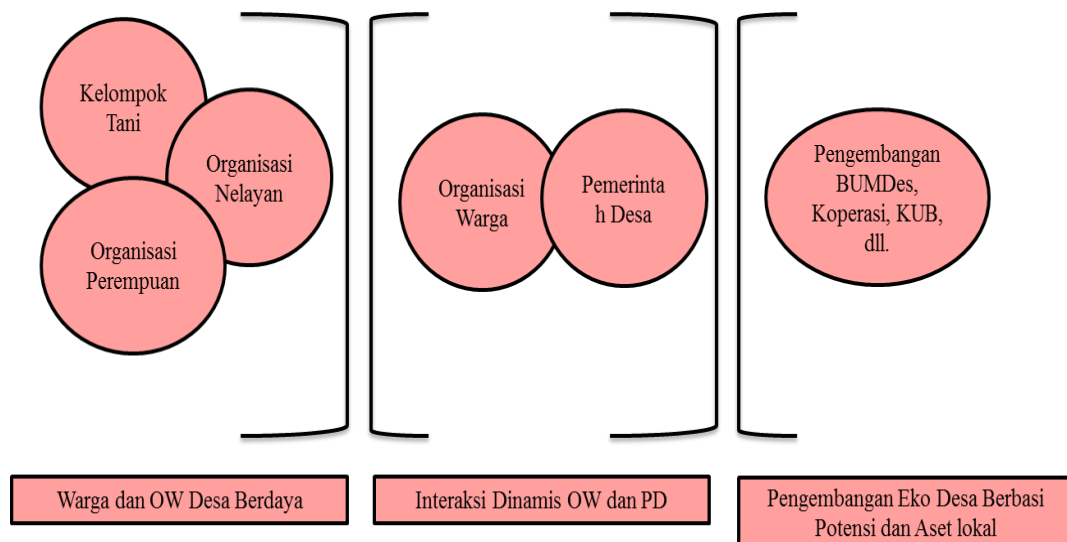
Gambar 1. Cakupan Kerja Pendamping Desa

Menurut (Sutoro Eko, 2014). Pendampingan Desa diarahkan untuk mengisi “ruang-ruang kosong” baik secara vertikal maupun horizontal. Mengisi ruang kosong identik dengan membangun “jembatan sosial” (*social bridging*) dan “jembatan politik” (*political bridging*). Pada ranah Desa, ruang kosong vertikal adalah kekosongan interaksi dinamis antara warga, pemerintah Desa dan lembaga-lembaga Desa lainnya.

Program DMIJ dalam transformasinya, menggunakan tenaga sumber daya manusia yang disebut dengan pendamping desa, pendamping desa direktut untuk mendampingi implementasi program DMIJ. Keberadaan pendamping desa sangat penting dan strategis dalam rangka mewujudkan tujuan inti (ruh) program DMIJ yaitu

“membangun kapasitas masyarakat desa untuk keluar dari rantai kemiskinan”, kebijakan program DMIJ dibangun atas konsep-konsep pembangunan yang berbasis atau bertumpu pada “masyarakat”. Dengan demikian, program DMIJ adalah program strategis agar terciptanya pelembangan sistem pembangunan partisipatif di pedesaan di Kabupaten Indragiri Hilir. Dari hasil temuan penelitian, menunjukkan salah satu evaluasi pelaksanaan program DMIJ yang berlangsung selama 5 (lima) tahun khususnya di Desa Nusantara Jaya pendamping desa harus lebih maksimal mentransformasikan program, kepada aparatur desa dan masyarakat dalam rangka mewujudkan gerakan sosial (*social movement*) menuju desa yang maju dan mandiri di Desa Nusantara Jaya dan Kabupaten Indragiri Hilir secara umum.

Desa mandiri bagaimana mewujudkannya?. Beberapa hasil penelitian mengungkapkan telah banyak desa-desa yang merintis kemandirian desa tanpa menunggu kehadiran pemerintah supradesa. Praktik inovatif dan emanstipatif yang tumbuh dari dalam desa-desa diberbagai belahan negeri Indonesia maka strategi yang ditawarkan ialah sinergisitas warga dan organisasi warga, sinergisitas organisasi warga dan pemerintah desa, menggerakkan ekonomi desa berbasis potensi dan aset lokal.



Sumber : Kurniawan, 2015

Gambar 2. Strategi Mewujudkan Desa Mandiri dari Dalam

Merujuk strategi tersebut, maka kebijakan Program DMIJ tidak mungkin dapat dilaksanakan secara maksimal sendiri melalui intervensi struktural birokrasi pemerintah semata. Memanfaatkan modal sosial (*social capital*) yang tumbuh ditengah-tengah masyarakat hendaknya menjadi kekuatan (*strenght*) dalam mentransformasikan tujuan program, dan para pendamping desa harus mendorong terbentuknya sinergisitas tersebut dalam kerja-kerja pemberdayaan.

1.4 Kesimpulan dan Saran

1. Pelaksanaan program Desa Maju Inhil Jaya di Desa Nusantara Jaya, mencakup 4 (empat) bidang kegiatan, yaitu kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, kemasyarakata desa, pemberdayaan masyarakat desa. Pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, kegiatan program

- yang dijalankan tidak semuanya sesuai dengan item-item kegiatan, sesuai dengan petunjuk pelaksanaan program DMIJ dan tujuan khusus dari program DMIJ.
2. Pelaksanaan program masih bersifat *konservatif-involutif* artinya para pelaku program; kepala desa, aparat desa, pendamping desa masih bekerja apa adanya (*taken for granted*), melaksanakan fungsi secara tekstual sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) merealisasikan anggaran sesuai prosedur target dan realisasi anggaran. Belum tampak adanya upaya melakukan inovasi (perubahan) yang mengarah kepada pencapaian perubahan status desa dari tertinggal menjadi desa maju dan mandiri.
 3. Program DMIJ yang telah dijalankan selama 4 (empat) tahun di Desa Nusantara Jaya baru berdampak positif pada bidang pemerintahan yakni adanya alokasi penguatan dana operasional pemerintah desa dan insentif aparat penyelenggara pemerintah desa. Pada bidang pembangunan, bidang kemasyarakata desa dan pemberdayaan masyarakat desa hasil yang diinginkan belum maksimal.
 4. Dampak dari program DMIJ belum sepenuhnya dirasakan masyarakat, kontribusi program masih minim dalam memecahkan masalah ditengah-tengah masyarakat. khususnya dalam aspek pergerakan ekonomi masyarakat, dalam pengembangan sarana ekonomi produktif masyarakat pada sektor pertanian dan perkebunan, dan peningkatan kapasitas masyarakat.

Sebagai saran penulis dalam penelitian evaluasi program DMIJ ialah

1. Pemerintah Daerah melalui dinas terkait sebaiknya merumuskan indikator-indikator pencapaian atau kriteria sukses program DMIJ.
2. Melakukan penguatan sumber daya manusia pelaku program DMIJ dalam konteks pemahaman esensi dan ruh pemberdayaan masyarakat.
3. Memaksimalkan peranan pendamping desa dalam mentransformasikan tujuan program dalam kerja-kerja pemberdayaan masyarakat.
4. Program DMIJ menjadi pendorong pergerakan ekonomi rakyat, dengan mengembangkan sarana ekonomi produktif sesuai dengan potensi desa, adanya inventarisasi aset-aset desa dan dikelola melalui BUMDes yang telah terbentuk, penguatan kapasitas masyarakat sebaiknya menjadi fokus dalam transformasi program DMIJ. Keluaran program DMIJ ditekankan melahirkan satu produk unggulan desa (*one village one product*).

Daftar Pustaka

- Afandi, Agus dkk. (2013). *Modul Participatory Action Research (PAR)* , LPM IAIN Sunan Ampel. Surabaya.
- Arif Muhammad, Suci Lestari Shinta, (2017). Analisis Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat (*Community Empowerment*) Studi Kasus pada Program Desa Maju Inhil Jaya di Kabupaten Indragiri Hilir. <http://jurnal.univrab.ac.id> Vol 4 No 1 (2018): Juni. Pekanbaru.
- Arikunto Suharsimi, (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta. Jakarta.
- Eko Sutoro, (2015). *Regulasi Baru, Desa Baru, Ide, Misi, dan Semangat UU Desa*, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan transmigrasi Republik Indonesia. Jakarta.
- Hamidi Hanibal, Nugroho Setijonegoro, Fujitriartanto, Armen Sa'id, Harioso, Huda, Andik Hardiyanto, Bambang Waluyanto, Indra Gunawan, Dani Setiawan. Hadi

- Prayitno, Ana Fitrotul, (2015). *Indeks Desa Membangun 2015*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Jakarta.
- Kurniawan Borni, (2015). *Buku 5 Desa Mandiri, Desa Membangun*, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan transmigrasi Republik Indonesia. Jakarta.
- Kessa Wahyudin, (2015). *Buku 6 Perencanaan Pembangunan Desa*, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan transmigrasi Republik Indonesia. Jakarta.
- Mustakim Mochammad Zain, (2015). *Buku 2 Kepemimpinan Desa*, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Jakarta.
- Subarsono, (2006). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar, Jakarta.

Implementasi Kebijakan Tata Kelola Sampah di Kota Pekanbaru

Hasim As'ari

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau
Email: hasimasari@lecturer.unri.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji secara komprehensif tentang implementasi kebijakan tata kelola sampah perkotaan di Kota Pekanbaru. Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dimana pendekatan kualitatif memiliki tahapan penelitian yang melampaui berbagai tahapan berfikir kritis ilmiah, yang mana seorang peneliti mulai berfikir secara induktif yaitu menangkap berbagai fakta atau fenomena-fenomena sosial melalui pengamatan di lapangan, kemudian menganalisisnya dan berupaya melakukan teorisasi berdasarkan apa yang diamati itu. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara secara mendalam (*indept interview*) yang diambil secara *purposive sampling*. Sedangkan analisa data dilakukan dengan analisa kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggunakan cara memaparkan data yang diperoleh dari pengamatan kepustakaan dan pengamatan lapangan, kemudian dianalisa dan diinterpretasikan dengan memberikan kesimpulan. Hasil penelitian menemukan bahwa secara keseluruhan implementasi kebijakan tata kelola sampah perkotaan di Kota Pekanbaru masih belum berjalan secara optimal. Faktor-faktor yang menjadi penghambat kebijakan tata kelola sampah perkotaan di Kota Pekanbaru adalah faktor SDM, faktor insentif, faktor fasilitas, faktor kesadaran masyarakat dan faktor kurangnya sosialisasi.

Kata Kunci: implementasi kebijakan, tata kelola sampah

Abstract

This study examines comprehensively about the implementation of urban waste management policies in Pekanbaru City. The research method is carried out with a qualitative approach, where the qualitative approach has stages of research that transcends the various stages of scientific critical thinking, in which a researcher begins to think inductively that is capturing various facts or social phenomena through field observations, then analyzing them and attempting to do theorization based what was observed then. Data collection is done through in-depth interviews (indept interviews) taken by purposive sampling. Whereas the data analysis was carried out with qualitative analysis, namely the problem solving procedure that was studied by means of describing the data obtained from library observations and field observations, then analyzed and interpreted by giving conclusions. The results of the study found that overall the implementation of urban waste management policies in Pekanbaru City was still not running optimally. Factors which become obstacles to urban waste management policy in Pekanbaru City are HR, incentive, facility, community awareness and lack of socialization.

Keywords: Policy Implementation, Garbage Governance

PENDAHULUAN

Isu persampahan merupakan isu penting dalam masalah lingkungan perkotaan yang dihadapi, hal ini sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk dan peningkatan aktivitas pembangunan di kawasan kota. Peningkatan volume sampah berkembang secara *eksponensial* yang belum dibarengi dengan peningkatan pendapatan Pemerintah Daerah yang sepadan untuk pengelolaan sampah kota. Akibatnya timbunan sampah yang tidak dapat dihentikan, membuat Pemerintah Daerah harus bisa memiliki pemikiran yang inovatif untuk dapat mengelola, mengurangi atau meminimalisasi sampah secara baik. Oleh karena itu pembiayaan dalam pengelolaan sampah harus secara efektif dikelola oleh Pemerintah Daerah, sebab pada umumnya pengelolaan sampah memerlukan anggaran/biaya yang besar terutama untuk biaya teknik operasional

dan pengumpulan, pengangkutan dan pengelolaan sampai di tempat pembuangan akhir.

Penyelenggaraan pengelolaan sampah seperti yang diamanahkan oleh Undang-undang No. 18 Tahun 2008 Bab VIII menjelaskan dapat dilakukan dengan kerjasama antar daerah atau bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah. Kemudian pada Bab IX menjelaskan bahwa masyarakat juga harus memiliki peran aktif dalam upaya pengelolaan sampah yang dilakukan melalui pemberian usul, pertimbangan dan saran kepada pemerintah dan/atau pemerintah daerah, perumusan kebijakan pengelolaan sampah dan pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan. Konsep ini memberikan pemahaman bahwa dalam melakukan pengelolaan sampah dibutuhkan peran pemerintah, pihak swasta dan masyarakat untuk menciptakan tata kelola yang baik. Hal ini sejalan dengan pendapat Sedarmayanti (2010) bahwa pada dasarnya unsur-unsur dalam pemerintahan (*governance stakeholders*) dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu : *Pertama*, negara/pemerintahan yaitu lembaga politik dan lembaga sektor publik yang melaksanakan kegiatan kenegaraan. *Kedua*, sektor swasta yaitu pelaku sektor swasta yang aktif dalam interaksi sistem pasar. *Ketiga*, masyarakat yaitu kelompok masyarakat yang berada pada suatu pemerintahan dan berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi.

Kota Pekanbaru merupakan salah satu wilayah perkotaan di Provinsi Riau yang mengalami perkembangan pesat setelah diberlakukannya otonomi daerah dan status sebagai Ibukota Provinsi Riau. Salah satu konsekuensi dari pertumbuhan dan perkembangan kota yang terjadi ternyata memberikan dampak negatif yaitu lingkungan kotor yang disebabkan oleh sampah, baik sampah industri ataupun sampah rumah tangga. Masalah yang disebabkan oleh sampah menjadi masalah yang sangat serius yang harus ditanggulangi. Karena masalah ini dapat mengancam kehidupan manusia, menyebabkan penyakit, mendatangkan bahaya banjir dan merusak keindahan kota.

Sampah tidak hanya masalah saat ini, namun juga menjadi masalah di masa mendatang. Kita sudah melihat bahwa dampak yang ditimbulkan oleh residu sampah terhadap lingkungan dan kemasyarakatan sangat ditentukan oleh enam faktor, yaitu : (1) potensi dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh bahan, (2) skala spasial dari dampak yang ditimbulkan, (3) tingkat bahaya yang ditimbulkan, (4) tingkat pajanan/eksposur yang muncul, (5) kualitas bahan yang digunakan, dan (6) waktu perbaikan dan pemulihan. Aspek yang terakhir ini mengimplikasikan faktor waktu dan mengindikasikan kebutuhan periode waktu tertentu sebelum kerusakan bisa dipulihkan. Untuk beberapa bahan (tergantung kepada tinggi rendahnya level polusinya), waktu yang diperlukan untuk pemulihan bisa lama dan bisa cepat dan bukan tidak mungkin efeknya tidak bisa dipulihkan. Mekanisme tunda (*delaying mechanism*) atau efek polusi yang baru dirasakan pada periode waktu yang lama kerap terjadi pada polusi yang terakumulasi. (Sofyan Arief, 2013)

Menurut BAPPENAS yang dikutip La Ode Agus Said dkk, (2015) mengungkapkan bahwa permasalahan utama di dalam pengelolaan sampah adalah rendahnya akses terhadap layanan pengelolaan sampah. Kondisi ini menurut Bappenas disebabkan oleh lima faktor, antara lain : a) Masih belum memadai perangkat peraturan yang mendukung pengelolaan sampah; b) Penanganan sampah belum optimal; c) Minim pengelolaan layanan persampahan yang kredibel dan profesional; d) Belum optimal sistem perencanaan pengelolaan sampah; e) Terbatasnya pendanaan untuk mendukung keseluruhan aspek pengeloaaah sampah.

Selain faktor-faktor di atas, faktor kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah di perkotaan juga menjadi faktor penting. Sebab realitas yang ditemukan tingkat

kesadaran masyarakat akan kebersihan ternyata masih kurang. Untuk itu dibutuhkan tata kelola sampah yang baik di wilayah perkotaan dengan melibatkan seluruh komponen yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Sebab pengelolaan persampahan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelolanya, pembiayaan serta proses penyediaan infrastrukturnya dengan tujuannya agar tercapainya efektifitas dalam pengelolaan sampah. Pemerintah Daerah telah berusaha menyusun kebijakan-kebijakan yang mampu mengayomi persoalan sampah yang muncul, namun kasus-kasus persampahan belum juga dapat diatasi dengan baik. Berdasarkan penjelasan ini, maka maksud dan tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis secara komprehensif implementasi kebijakan tata kelola sampah perkotaan di Kota Pekanbaru dan faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan tata kelola sampah perkotaan di Kota Pekanbaru.

Edward III dalam bukunya *"Implementing Public Policy"*, studi implementasi kebijakan adalah krusial bagi administrasi publik dan kebijakan publik. Implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. (*"The study of policy implementation is crucial for the study of public administration and public policy. Policy implementation, as we have seen, is the stage of policy making between the establishment of a policy and the consequences of the policy for the people whom it affects."*) (Edward III, 1980). Pendapat George Edward III dalam Sujianto (2008), ia mengembangkan model dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan, yaitu :

a) Komunikasi

Komunikasi merupakan alat kebijakan untuk menyampaikan perintah-perintah dan arahan-arahan (informasi) dari sumber pembuat kebijakan kepada mereka-mereka diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut..

b) Sumber daya

Sumber daya yang dimaksudkan mencakup : 1). Jumlah staff pelaksana yang memadai dengan keahlian yang memadai, 2). Informasi, 3). Wewenang atau kewenangan dan 4). Fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menjamin kebijakan dijalankan sesuai dengan yang diharapkan.

c) Disposisi

Ada tiga hal yang terdapat didalam disposisi atau sikap pelaksana yang merupakan unsur penting dalam implementasi kebijakan, yaitu : 1). Pemahaman dan pengetahuan (kognisi), 2). Arah respon dari para pelaksana terhadap implementasi kebijakan (penerimaan dan penolakan) dan 3). Intesitas dari respon.

d) Struktur birokrasi

Struktur birokrasi adalah struktur kelembagaan pelaksana program. Ada dua unsur atau bagian dalam hal ini, yaitu : 1). Prosedur rutin atau standart prosedur operasi dan 2). Fragmentasi (pemecahan/pembagian untuk beberapa bagian kekuasaan).

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan tentang tata kelola sampah yang dilakukan beberapa peneliti, menemukan hasil diantaranya sebagai berikut : *Pertama*, Mardia Putri Prasetya (2015) yang melakukan penelitian tentang *"Kebijakan Pengelolaan Persampahan dan Pengangkutan di Kota Manado"*, menemukan : proses implementasi kebijakan pengelolaan persampahan di Dinas Kebersihan Kota Manado dilihat dari aspek : komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Dari keempat aspek tersebut yang terindikasi belum optimal adalah aspek sumberdaya yaitu fasilitas pendukung pengangkutan sampah, di rasakan masih kurang memadai dengan

banyaknya volume sampah yang dihasilkan setiap harinya. Kegiatan pengelolaan sampah dengan metode 3R (reduse, reuse, recycle) tidak terlaksana. *Kedua*, La Ode dkk (2015) yang melakukan penelitian tentang “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan Kota Baubau”, menemukan bahwa implementasi kebijakan untuk komunikasi yang dibangun oleh pihak dinas terkait khususnya para pelaksana program di Dinas Kebersihan belum terlaksana secara optimal, adapun ketersediaan sumberdaya yakni sumber daya manusia sejauh ini masih terbatas yang menjadi kendala dalam pencapaian pelaksanaan program yang berpengaruh pada tercapainya program. *Ketiga*, Riswan, dkk (2011) yang melakukan penelitian tentang “Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Daha Selatan”, menemukan bahwa pengelolaan sampah belum dilaksanakan secara optimal. Tingkat pendidikan, tingkat pendapatan keluarga, perilaku terhadap kebersihan lingkungan, pengetahuan tentang peraturan persampahan dan kesediaan membayar retribusi sampah berkorelasi positif dengan cara pengelolaan sampah rumah tangga.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana dalam pelaksanaannya memiliki tahapan penelitian yang melampaui berbagai tahapan berfikir kritis ilmiah, yang mana seorang peneliti mulai berfikir secara induktif yaitu menangkap berbagai fakta atau fenomena-fenomena sosial melalui pengamatan di lapangan, kemudian menganalisisnya dan berupaya melakukan teorisasi berdasarkan apa yang diamati itu (Bungin, 2011). Peneliti menetapkan prosedur *sampling purposive* untuk mengidentifikasi orang-orang yang akan diwawancarai. Informan dalam penelitian ini diambil dari pihak pemerintah, masyarakat dan swasta. Analisis data menggunakan metode triangulasi dengan *cek and cross cek* terhadap hasil tanggapan yang diberikan informan penelitian, triangulasi dilakukan untuk uji keabsahan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Kebijakan Tata Kelola Sampah di Kota Pekanbaru

Untuk melihat sejauhmana keberhasilan implementasi kebijakan tata kelola sampah di Kota Pekanbaru, penulis merujuk model implementasi George C. Edward III yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh faktor: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.

1. Komunikasi

Menurut Edward III, ada tiga hal penting yang harus diperhatikan dalam proses komunikasi kebijakan, yakni: transmisi, konsistensi, dan kejelasan (*clarity*).

Pertama, transmisi adalah proses penyampaian misi atau isi dari kebijakan dalam bentuk koordinasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih sehingga misi atau isi dari kebijakan tersebut dapat diterima dan dilaksanakan oleh pelaksana kebijakan di lapangan. Informan Lurah Simpang Tiga mengatakan bahwa tujuan dikeluarkannya Perda Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah adalah untuk mewujudkan Kota Pekanbaru yang sehat dan bersih dari sampah yang dari waktu ke waktu volumenya cenderung bertambah dan jenis serta karakteristiknya semakin beragam, karena ini berpotensi menimbulkan dampak pencemaran lingkungan dan menurunkan kesehatan lingkungan penduduk.

Dari hasil wawancara dengan informan dari Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) yang mengatakan bahwa perda ini memiliki tujuan untuk mewujudkan kebersihan lingkungan di Kota Pekanbaru, dan dalam prosesnya

perda ini memberikan peluang kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam tata kelola sampah khususnya dilingkungan tempat tinggal masing-masing. Informan melanjutkan bahwa peran masyarakat dalam tata kelola sampah sudah diimplementasikan melalui LPMK dan melibatkan RT/RW setempat.

Pernyataan senada disampaikan oleh informan dari Koordinator Pengelolaan Sampah di tingkat Kelurahan, yang mengatakan bahwa pesan Walikota melalui Perda tentang Pengelolaan Sampah sampai kepada kami memang tidak secara langsung, namun disampaikan berjenjang melalui Lurah dan ketua LPMK. Koordinator Pengelolaan Sampah juga sering dilibatkan dalam rapat-rapat yang membahas terkait pengelolaan sampah yang dilaksanakan pada tingkat kecamatan dan dinas kebersihan.

Proses transmisi atau penyampaian isi kebijakan Perda Kota Pekanbaru tentang Pengelolaan Sampah dilakukan melalui rapat-rapat koordinasi antar stakeholder, melalui surat-surat dinas dari walikota kepada dinas, lurah, LPMK, maupun RW, dan juga melalui pengumuman-pengumuman baik secara langsung-maupun tidak langsung melalui media cetak maupun melalui media elektronik. Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara kepada berbagai informan sebagaimana dijelaskan dimuka diketahui bahwa faktor transmisi komunikasi sebagai salah satu syarat keberhasilan implementasi sudah terlaksana dengan baik dalam implementasi kebijakan tata kelola sampah di Kota Pekanbaru.

Kedua, konsistensi komunikasi mengandung pengertian bahwa implementasi kebijakan akan berjalan efektif apabila perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Berdasarkan wawancara dengan salah satu Lurah di Kota Pekanbaru mengatakan bahwa dalam melaksanakan kebijakan tata kelola sampah tidak ada yang berubah, semuanya masih sesuai dengan kebijakannya. Pengelolaan sampah dengan melibatkan masyarakat sudah disahkan oleh kebijakan dengan mengoptimalkan peran LPMK. LPMK dan pihak Kelurahan lainnya saling bermitra dalam mewujudkan visi-misi Pemerintah Kota Pekanbaru. Senada dengan pernyataan informan dari LPMK yang menyatakan bahwa komunikasi dalam implementasi kebijakan tata kelola sampah di Kota Pekanbaru sudah konsisten, karena ada tiga unsur pengelola dengan wilayah tugas dan kewenangannya masing-masing, dan LPMK punya tupoksi yang berkompeten menangani pengelolaan sampah di Kelurahan.

Ketiga, kejelasan komunikasi (*clarity*), kejelasan komunikasi sangat penting dalam rangka mencapai tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan tidak akan mungkin dapat tercapai sebagaimana yang diinginkan jika informasi yang disampaikan dari formulator kepada implementor tidak jelas. Dengan demikian, maka kebijakan harus menyiapkan petunjuk pelaksanaan yang tidak hanya mudah dipahami saja, namun petunjuk tersebut juga harus jelas. Jika petunjuk tersebut tidak jelas, maka para implementor akan mengalami kebingungan dalam melaksanakan kebijakan ditingkat lapangan.

Berdasarkan wawancara dengan berbagai informan sebagaimana disebutkan dimuka, dapat diketahui bahwa kebijakan tata kelola sampah di Kota Pekanbaru sudah dikomunikasikan secara jelas mulai dari tataran formulasi sampai kepada tataran implementasi. Terkait kejelasan komunikasi ini, Edward III mengatakan bahwa faktor ini merupakan salah satu penentu keberhasilan dalam implementasi kebijakan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dilihat dari faktor kejelasan komunikasi ini maka implementasi kebijakan tata kelola sampah di Kota Pekanbaru sudah tergolong baik.

2. Sumber Daya

Edward III mengatakan bahwa biarpun suatu pesan atau isi kebijakan sudah dikomunikasikan

munikasikan secara akurat, konsisten, dan jelas, namun jika pada tataran implementasi masih kekurangan sumber-sumber daya yang diperlukan, maka besar kemungkinan kebijakan tersebut akan gagal pada tataran implementasi. Adapun sumber-sumber daya yang diperlukan antara lain: Kecukupan dan kualifikasi sumber daya manusia, kewenangan, informasi, serta sarana dan prasarana.

Pertama, kecukupan dan kualifikasi sumber daya manusia. Informan dari Kelurahan dan LPMK menyatakan bahwa SDM dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru sudah cukup memadai jumlahnya dan dalam pelaksanaannya selama ini tidak ada permasalahan. Masalah SDM tak ada persoalan, karena dalam aktivitas pengurangan sampah tidak dibutuhkan kualifikasi pendidikan dan teknis yang dikhususkan, yang penting dedikasi, kejujuran dan kemauan untuk bekerja. Informan menambahkan bahwa kemampuan SDM dalam pengelolaan sampah khususnya yang ada di LPMK sudah sangat teruji dan mumpuni, karena sudah lebih dari 15 tahun pengelolaan sampah dilakukan oleh LPMK dengan hasil yang baik, walaupun masih ada juga sedikit kekurangan dalam pelaksanaannya namun masih bisa ditolerir karena hal tersebut bukan disebabkan oleh pihak LPMK melainkan dari pihak mengangkut sampah yang kadang-kadang lambat. Dari pernyataan informan dimuka dapat diketahui bahwa faktor kuantitas dan kualifikasi SDM dalam implementasi kebijakan tata kelola sampah di Kota Pekanbaru sudah memenuhi kriteria untuk mencapai keberhasilan implementasi kebijakan sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Edward III. Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian di dalam implementasi kebijakan tata kelola sampah faktor kualifikasi tidak terlalu diutamakan, dalam arti bahwa pengelolaan sampah ditingkat bawah tidak perlu berpendidikan tinggi, namun yang lebih diutamakan adalah faktor pengalaman dalam pengelolaan sampah.

Kedua, kewenangan (*authority*). Informan menyatakan bahwa mengenai kewenangan LPMK dalam mengelola sampah di Kota Pekanbaru, secara umum diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2005 tentang LPMK. Tata hubungan kerja antara LPMK dengan Pemerintah Kelurahan adalah mitra dalam menggerakkan semangat gotong-royong dan swadaya masyarakat dalam pembangunan yang partisipatif, termasuk dalam hal ini pengelolaan sampah.

Berdasarkan pernyataan informan menunjukkan bahwa kewenangannya memang sudah diberikan melalui kebijakan dalam bentuk peraturan daerah. Kewenangan tersebut memang sangat diperlukan bagi implementor khususnya ditingkat kelurahan, sehingga mereka akan mudah dan tidak ragu-ragu lagi dalam mengumpulkan dan mengangkut sampah-sampah yang ada di lingkungan kelurahan. Dengan adanya kewenangan yang diberikan kepada implementor kebijakan pengelolaan sampah, maka keberhasilan implementasi kebijakan tata kelola sampah akan mudah dicapai.

Ketiga, informasi (*information*). Sumber daya informasi dalam mengimplementasikan kebijakan tata kelola sampah, berdasarkan pengalaman informan diperoleh melalui rapat-rapat, surat edaran, maupun dialog dengan aparat Pemerintah. Informan mengatakan bahwa informasi terkait kebijakan tata kelola sampah di Kota Pekanbaru dapat diperoleh melalui Lurah dan aparatnya, ketua LPMK, ketua-ketua RW, melalui Koran dan televisi. Sumber daya informasi yang dimiliki dalam mengimplementasikan kebijakan tata kelola sampah di Kota Pekanbaru sudah cukup memadai, karena dapat diterima melalui berbagai media, baik langsung maupun tidak langsung. Hal ini menunjukkan pula bahwa jika dilihat dari faktor sumber daya informasi, maka implementasi kebijakan tata kelola sampah di Kota Pekanbaru dapat dikatakan berhasil.

Empat, sarana dan prasarana, informan dari Kelurahan, LPMK, dan para RW menyatakan bahwa sarana dan prasarana sebagai sumber daya yang sangat penting dalam mengimplementasikan kebijakan tata kelola sampah di Kota Pekanbaru keberadaannya sangat terbatas dan sangat belum memadai terutama alat transportasi pengangkutan sampah. Alat transportasi tersebut jumlahnya masih belum mencukupi dan kondisinya sudah tua, oleh karena itu agar sarana dan prasarana ini dapat memudahkan pelaksanaan pengelolaan sampah dengan baik, maka perlu ada penambahan dan perbaikan atau penggantian yang lebih baru.

Informan menambahkan bahwa sarana dan prasarana yang ada saat ini dalam mengimplementasikan kebijakan tata kelola sampah di Kota Pekanbaru masih belum milik sendiri dan kondisinya banyak yang rusak. Dari tujuh belas gerobak yang ada hanya tiga gerobak yang dalam kondisi baik, dan lainnya semua sudah rusak. Mobil pengangkut sampah masih menyewa dengan warga yang dibayar dengan uang iuran pungutan sampah, termasuk sewa sepeda motor roda tiga pengangkut sampah merk Kaisar. Dalam rangka mendapatkan dana untuk mengadakan sarana dan prasarana ini, informan mengatakan bahwa pihaknya terpaksa memungut dana iuran sampah kepada warga termasuk kepada rumah-rumah kos mahasiswa. Hanya saja untuk rumah kos mahasiswa yang dibebani iuran adalah pemilik kosan.

3. Sikap (Disposisi)

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Terkait sikap para implementor dalam mengimplementasikan kebijakan tata kelola sampah di Kota Pekanbaru, informan dari Kelurahan, LPMK, RW, maupun para tokoh masyarakat mengatakan bahwa para implementor sudah memiliki sikap yang mendukung terhadap kebijakan tata kelola sampah di Kota Pekanbaru. Implementor pada level atas yakni Pemerintah Kota tentu sangat mendukung sekali karena memang kebijakan ini merupakan produk pemerintah kota, namun demikian Pemerintah Kota Pekanbaru selain merupakan perumus kebijakan tata kelola sampah, juga sekaligus sebagai implementor kebijakan. Sikap para implementor yang menunjukkan sikap yang mendukung kebijakan tata kelola ini dibuktikan dengan pembuatan kebijakan pemberian insentif, subsidi, pemberian tipping fee, maupun pemberian penghargaan kepada pengelola sampah di tingkat kelurahan. Hanya saja menurut informan hal tersebut belum terealisasi.

4. Struktur Birokrasi

Menurut Edward III, ada dua karakteristik utama dalam birokrasi yaitu prosedur kerja baku atau *standard operating procedure* (SOP) dan fragmentasi. Terkait dengan keberadaan SOP dalam implementasi kebijakan tata kelola sampah di Kota Pekanbaru, informan mengatakan bahwa kebijakan tata kelola sampah yang ada tidak secara detail menjelaskan SOP dalam pengelolaan sampah. SOP pengangkutan meliputi pemungutan sampah dari sumber timbulan sampah, mengangkut, dan membuangnya ke TPA saja.

Informan lainnya mengatakan bahwa SOP tata kelola sampah di Kota Pekanbaru keberadaannya sangat dibutuhkan, agar petugas tahu apa mau dikerjakan, bagaimana caranya, prosedurnya, persyaratannya, sampai kepada biaya dan waktunya. Tanpa ada SOP ya kerja sembarangan, suka-suka jadinya. Kalau ada SOP, kita gampang untuk melakukan pengawasan. Apabila SOP tidak diikuti, bisa kita tegur karena bisa menyebabkan kealasan. Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai informan sebagaimana disebutkan di muka, dapat diketahui bahwa kebijakan tata kelola sampah di Kota Pekanbaru belu

m dilengkapi dengan SOP pengelolaan sampah.

Terkait struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan tata kelola sampah di Kota Pekanbaru menurut informan bahwa struktur organisasinya sangat sederhana dan penyebarannya tidak banyak sehingga memudahkan pengendalian dan koordinasi. Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan tata kelola sampah di Kota Pekanbaru sederhana sekali dan tidak ada fragmentasinya hanya ada tiga saja yakni Bendahara, Petugas pemungut iuran sampah dan Petugas Pemungut Sampah. Pernyataan informan di muka dikuatkan pula dengan pernyataan informan lainnya yang mengatakan bahwa struktur organisasi yang digunakan sesuai kebutuhan saja yakni pemungut sampah, pemungut iuran, dan pengatur uang masuk-keluar. Karena strukturnya sangat sederhana sehingga tidak ada fragmen yang menghambat dalam implementasi kebijakan tata kelola sampah di Kota Pekanbaru.

B. Faktor-faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Tata Kelola Sampah di Kota Pekanbaru

Adapun faktor-faktor penghambat tersebut antara lain:

Pertama, Sumber daya manusia. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan tata kelola sampah di Kota Pekanbaru memiliki latar belakang pendidikan dengan jenjang yang sangat beragam, mulai dari tamatan SMA/SMK sampai jenjang S2. Dari jenjang pendidikan yang dimiliki boleh dikatakan sudah sangat mumpuni, namun jika dilihat dari segi kualitasnya masih belum mumpuni, karena SDM yang ada tersebut berasal dari latar belakang pendidikan dengan jurusan keilmuan yang berbeda-beda, sementara SDM dengan latar belakang keilmuan teknis di pengelolaan sampah di lingkungan perkotaan jumlah sangat minim.

Kedua, Insentif. Insentif merupakan stimulus bagi pegawai untuk meningkatkan produktifitas dan kinerjanya. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diketahui bahwa pemberian insentif kepada pegawai lapangan yang bekerja dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru masih bersifat insidental dan tidak rutin. Selain itu, insentif yang akan diberikan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru kepada para pegawai lapangan pengelolaan sampah masih berupa janji yang masih sangat minim realisasinya, padahal para pegawai lapangan tersebut sangat membutuhkan insentif tersebut sebagai penerimaan tambahan yang dapat menimbulkan semangat kerja dalam pengelolaan sampah.

Ketiga, fasilitas. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diketahui bahwa fasilitas sarana transportasi mobil dengan kondisi baik hanya terdiri dari satu unit, sepeda motor operasional dengan kondisi yang masih baik juga hanya satu unit, dan dua unit lagi tidak baik. Demikian pula dengan gerobak sampah yang bersumber dari bantuan Pemerintah Kota Pekanbaru, dari 17 unit, yang baik dalam artian masih bisa dipakai tinggal 4 unit, itupun dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Selebihnya cangkul, sekop dan penggaru masih bisa pakai dan dalam kondisi baik. Kekurangan alat pengangkutan seperti mobil menyebabkan pekerjaan pengangkutan sampah sering terkendala, karena antara debit sampah yang ada dengan alat transportasi pengangkutan sampah tidak sesuai, sehingga kadang-kadang sampah yang tersisa belum terangkut menumpuk dan menimbulkan bau yang tidak sedap bagi masyarakat.

Keempat, kesadaran masyarakat. Sebagaimana hasil wawancara dengan informan yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat Kota Pekanbaru dalam pengelolaan sampah masih kurang yang mana dapat kita lihat masih banyak masyarakat tidak mematuhi aturan jam pembuangan sampah, banyak yang buang sampah pada pagi

hari yang sebenarnya dilarang untuk membuang sampah pada pagi hari. Informan melanjutkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru masih kurang apalagi untuk ikut dalam bank sampah, banyak masyarakat yang susah untuk merubah kebiasaan membuang sampah menjadi menabung sampah di bank sampah. Lemahnya kesadaran masyarakat ini juga menjadi salah satu kendala dalam mensukseskan implementasi kebijakan tata kelola sampah di Kota Pekanbaru.

Kelima, Kurangnya sosialisasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diketahui bahwa sosialisasi yang dilakukan pemerintah tentang pengelolaan sampah itu jarang dilakukan. Masih banyak masyarakat yang tidak paham tentang pengelolaan sampah serta bagaimana memisahkan sampah yang benar. Petugas sampah hanya datang untuk melakukan pemungutan iuran perbulan tanpa ada pengarahan. Terkadang ada masyarakat yang tidak mampu untuk membayar retribusi mereka akan berusaha membuang sampah sendiri celakanya mereka tidak tau harus membuang sampah kemana jadilah dibuang ke sungai, pinggir jalan, lahan kosong yang hanya membuat susah petugas sampah.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tata kelola sampah di Kota Pekanbaru belum berjalan secara optimal. Hal ini ditunjukkan dengan adanya proses komunikasi yang sudah jelas mulai dari tataran formulasi sampai kepada tataran implementasi, sumber daya yang dimiliki masih belum sempurna keberadaannya terutama sarana prasarana sampah, sikap pelaksana atau implementor dalam mengelola sampah sudah cukup mendukung dan struktur organisasi yang terbentuk sudah cukup sesuai dengan kebutuhan serta memutus mata rantai hirarki yang panjang. Selanjutnya, faktor-faktor yang menjadi penghambat implementasi kebijakan tata kelola sampah di Kota Pekanbaru adalah faktor SDM, faktor insentif, faktor fasilitas, faktor kesadaran masyarakat dan faktor kurangnya sosialisasi.

KEPUSTAKAAN

- Ana Puji Lestari, Mochammad Saleh Soeaidy dan Abdullah Said., 2014., *Program Inovasi Pengelolaan Sampah di Kota Malang.*, JAP : Jurnal Administrasi Publik., Volume 2 Nomor 3.
- Budi Winarno., 2012., *Kebijakan Publik : Teori, Proses dan Studi Kasus.*, Penerbit CAPS., Yogyakarta.
- Burhan Bungin., 2011., *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya.*, Edisi Kedua., Kencana Prenada Media Group., Jakarta.
- Emzir, Prof. Dr. M.Pd., 2012., *Metodologi Penelitian Kualitatif : Analisis Data.*, Raja Grafindo Persada., Jakarta.
- Gelbert M, Prihanto D, dan Suprihatin A., 1996., *Konsep Pendidikan Lingkungan Hidup.*, Buku Panduan Pendidikan Lingkungan Hidup., Malang.
- Kooiman, Jan., 1993., *Modern Governance, New Government Society Interaction.*, Sage Publication., India.
- Leo Agustino., 2008., *Dasar-dasar Kebijakan Publik.*, Penerbit Alfabeta., Bandung.
- La Ode Agus Said, Mardiyono dan Irwan Noor., 2015., *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan Kota Baubau.*, JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 4 Nomor 1, ISSN. 2442-6962.
- Meuthia Ganie Rochman., 2000., *Good governance : Prinsip, Komponen dan Penerapannya*”, dalam artikel buku HAM : Penyelenggaraan Negara Yang Baik

- & Masyarakat Warga. Komnas HAM., Jakarta.
- Mardia Putri Prasetya., 2015., *Kebijakan Pengelolaan Persampahan dan Pengangkutan di Kota Manado.*, Makalah., ITS., Surabaya.
- Nisjar S. Karhi. 1997. *Beberapa Catatan tentang "Good Governance.* Jurnal administrasi dan Pembangunan, Vol. 1 No. 2, 119.
- Rahardyan B. dan Widagdo A.S., 2005., *Peningkatan Pengelolaan Persampahan Perkotaan Melalui Pengembangan Daur Ulang.*, Materi Lokakarya 2 Pengelolaan Persampahan di Propinsi DKI Jakarta.
- Riswan, Henna Ryo Sunako dan Agus Hidayarto., 2011., *Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Daha Selatan.*, Jurnal Ilmu Lingkungan Vol.9, No. 1, April., Universitas Diponegoro., Semarang.
- Robert K. Yin., 2014., *Studi Kasus : Desain dan Metode.*, Raja Grafindo Persada., Jakarta.
- Said Gumbira., 1987., *Penanganan dan Pemanfaatan Limbah Padat.*, Mediyatama Sarana Perkasa., Jakarta.
- Said Zainal Abidin., 2012., *Kebijakan Publik.*, Penerbit Salemba Humanika., Jakarta.
- Sedarmayanti., 2010., *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi dan Kepemimpinan Masa Depan : Merwujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan yang Baik.*, Refika Aditama., Bandung.
- Slamet, Juli Soemirat., 2002., *Kesehatan Lingkungan.*, Gajahmada University Press., Yogyakarta.
- Sofian Efendi., 2005., *Membangun Budaya Birokrasi untuk Good Governanc.*, Lokakarya Reformasi Birokrasi Kementerian Negara Pemberdayaan Aparatur Negara., Jakarta.
- Sofyan Arief., 2013., *Pengelolaan Sampah Malang Raya Menuju Pengelolaan Sampah Terpadu Yang Berbasis Partisipasi Masyarakat.*, Jurnal Humanity, Volume 8 Nomor 2, ISSN 0216-8995
- Solahuddin Kusumanegara., 2010., *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik.*, Gava Media., Yogyakarta.
- Stoner James., 1986., *Manajemen.*, Penerjemah Agus Maulana, Hendradi dan Khristina., Erlangga., Jakarta.
- Syafrudin dan Priyambada I.B., 2001., *Pengelolaan Limbah Padat.*, Diktat Kuliah Program Studi Teknik Lingkungan., Fakultas Teknik Undip., Semarang.
- UNDP., 1997., *Governance for Suitable Development.*, A Policy Document., New York.

Analisis Strategi Bersaing Kelompok Usaha Bersama (KUB) Menghadapi Persaingan di Era Revolusi Industri 4.0

Helen Susra, Essy Desmita, dan Rini Anggraini

Program Pascasarjana Ilmu Administrasi Universitas Riau

Abstrak

Kelompok Usaha Bersama (KUB) Mekarjaya Tuah Madani merupakan salah satu UMKM yang bergerak pada sektor makanan dan minuman. Sebagai bagian dari UMKM di Indonesia, KUB Mekarjaya memberi kontribusi positif bagi perekonomian masyarakat sekitar. Sayangnya, ditemukan beragam persoalan yang perlu mendapat perhatian, seperti rendahnya produktivitas yang disebabkan oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia khususnya dalam bidang manajemen, organisasi, penguasaan teknologi, dan pemasaran, dan rendahnya kompetensi kewirausahaan KUB Mekarjaya yang relatif masih jauh dibandingkan usaha besar. Selain rendahnya produktivitas, KUB Mekarjaya juga diperhadapkan pada terbatasnya akses kepada sumberdaya produktif, terutama terhadap permodalan, teknologi, informasi dan pasar. Begitu juga banyak kegiatan usaha mikro mengalami kegagalan atau bangkrut dikarenakan tidak mampu mengelola keuangan dengan baik. Kondisi ini seringkali disebabkan karena keuangan usaha mikro yang dikelola tidak dipisahkan dengan keuangan keluarga. Oleh karena itu, dalam rangka menjaga keberlangsungan kegiatan usaha, maka diperlukan pengetahuan, ketrampilan dan sikap perilaku untuk mengelola seluruh aspek usaha dengan baik.

Kata Kunci: Usaha Mikro, Keuangan, Modal

Abstract

Mekarjaya Tuah Madani Joint Business Group (KUB) is one of the UMKM in the food and beverage sector. As part of UMKM in Indonesia, KUB Mekarjaya made a positive contribution to the economy of the surrounding community. Unfortunately, there are a variety of issues that need attention, such as low productivity caused by the low quality of human resources, especially in the fields of management, organization, mastery of technology, and marketing, and the low entrepreneurial competency of KUB Mekarjaya, which is still relatively far compared to large businesses. In addition to low productivity, KUB Mekarjaya is also faced with limited access to productive resources, especially to capital, technology, information and markets. Likewise, many micro business activities fail or go bankrupt due to not being able to manage finances properly. This condition is often caused because the microfinance that is managed is not separated from family finances. Therefore, in order to maintain the sustainability of business activities, knowledge, skills and behavioral attitudes are needed to manage all aspects of the business properly.

Keywords: Micro Business, Finance, Capital

PENDAHULUAN

Revolusi digital dan era disrupsi teknologi adalah istilah lain dari industri 4.0. Disebut revolusi digital karena terjadinya proliferasi komputer dan otomatisasi pencatatan di semua bidang. Industri 4.0 dikatakan era disrupsi teknologi karena otomatisasi dan konektivitas di sebuah bidang akan membuat pergerakan dunia industri dan persaingan kerja menjadi tidak linear. Salah satu karakteristik unik dari industri 4.0 adalah pengaplikasian kecerdasan buatan atau artificial intelligence (Tjandrawinata, 2016). Salah satu bentuk pengaplikasian tersebut adalah penggunaan robot untuk menggantikan tenaga manusia sehingga lebih murah, efektif, dan efisien.

Kemajuan teknologi memungkinkan terjadinya otomatisasi hampir di semua bidang. Teknologi dan pendekatan baru yang menggabungkan dunia fisik, digital, dan biologi secara fundamental akan mengubah pola hidup dan interaksi manusia (Tjandrawinata, 2016). Industri 4.0 sebagai fase revolusi teknologi mengubah cara

beraktifitas manusia dalam skala, ruang lingkup, kompleksitas, dan transformasi dari pengalaman hidup sebelumnya. Manusia bahkan akan hidup dalam ketidakpastian (uncertainty) global, oleh karena itu manusia harus memiliki kemampuan untuk memprediksi masa depan yang berubah sangat cepat. Tiap negara harus merespon perubahan tersebut secara terintegrasi dan komprehensif. Respon tersebut dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan politik global, mulai dari sektor publik, swasta, akademisi, hingga masyarakat sipil sehingga tantangan industri 4.0 dapat dikelola menjadi peluang. Wolter mengidentifikasi tantangan industri 4.0 sebagai berikut; 1) masalah keamanan teknologi informasi; 2) keandalan dan stabilitas mesin produksi; 3) kurangnya keterampilan yang memadai; 4) keengganan untuk berubah oleh para pemangku kepentingan; dan 5) hilangnya banyak pekerjaan karena berubah menjadi otomatisasi (Sung, 2017)

Irianto (2017) menyederhanakan tantangan industri 4.0 yaitu; (1) kesiapan industri; (2) tenaga kerja terpercaya; (3) kemudahan pengaturan sosial budaya; dan (4) diversifikasi dan penciptaan lapangan kerja dan peluang industri 4.0 yaitu; (1) inovasi ekosistem; (2) basis industri yang kompetitif; (3) investasi pada teknologi; dan (4) integrasi Usaha Kecil Menengah (UKM) dan kewirausahaan. Pemetaan tantangan dan peluang industri 4.0 untuk mencegah berbagai dampak dalam kehidupan masyarakat, salah satunya adalah permasalahan pengangguran. Work Employment and Social Outlook Trend 2017 memprediksi jumlah orang yang menganggur secara global pada 2018 diperkirakan akan mencapai angka 204 juta jiwa dengan kenaikan tambahan 2,7 juta. Hampir sama dengan kondisi yang dialami negara barat, Indonesia juga diprediksi mengalami hal yang sama. Pengangguran juga masih menjadi tantangan bahkan cenderung menjadi ancaman. Tingkat pengangguran terbuka Indonesia pada Februari 2017 sebesar 5,33% atau 7,01 juta jiwa dari total 131,55 juta orang angkatan kerja (Sumber: BPS 2017).

Pun demikian dengan keberlanjutan usaha kecil mikro kecil dan menengah KUB Mekarjaya Kelurahan Tuah Madani Kota Pekanbaru. Sebagai salah satu UMKM yang bergerak dalam bidang industri pengolahan makanan, KUB Mekarjaya juga dihadapkan pada tantangan disrupsi dan perkembangan teknologi. Oleh sebab itu, dalam menghadapi tantangan tersebut diperlukan strategi yang handal menghadapi era disrupsi tersebut.

Menurut Chandler strategi adalah tujuan jangka panjang dari suatu perusahaan, serta pendayagunaan dan alokasi semua sumber daya yang penting untuk mencapai sebuah tujuan. Dalam pengembangan produk perlu adanya strategi bersaing yang harus dijalankan untuk memperoleh keunggulan kompetitif. Jadi inti strategi bersaing yaitu bagaimana cara organisasi mendapatkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dan mampu menempatkan produknya dihati konsumen. Jajanan rumah adalah produk utama yang dihasilkan oleh Kelompok Usaha Bersama (KUB) Mekar Jaya sebagai sekelompok usaha rumah tangga di RT IV RW V Kelurahan Tuah Madani Kecamatan Tampan. Seiring berjalanya waktu, KUB Mekar Jaya telah melakukan inovasi terhadap produknya dan juga melakukan pengembangan terhadap produknya. Pengembangan produk yang dilakukan oleh KUB Mekar Jaya yaitu untuk meningkatkan penjualan dan perluasan pasar. Pengembangan produk yang dilakukan oleh KUB telah membawa perubahan yang lebih baik.

Kelompok Usaha Bersama Mekar Jaya adalah *home industry* yang bergerak dibidang makanan ringan tradisional. Meskipun kelompok ini baru berdiri secara resmi selama 3 tahun, namun penjualan produknya meningkat pesat dari tahun-ketahun, dari

501 bungkus di tahun pertama, 2.198 bungkus pada tahun kedua, dan telah mencapai 3.362 bungkus di tahun ketiga. Keberhasilan KUB Mekar Jaya dalam meningkatkan penjualan tidak terlepas dari keberhasilannya dalam menerapkan strategi bersaingnya.

Banyak olahan makanan ringan yang ada di pasaran namun jajanan tradisional KUB Mekar Jaya mampu membuktikan bahwa produknya dapat berkembang dan bersaing dengan makanan ringan yang lain. Penerapan strategi bersaing yang tepat menjadikan suatu produk dapat diterima oleh konsumen. Banyak strategi bersaing yang dapat digunakan untuk pengembangan produk diantaranya; strategi bersaing Michael Porter, Mintzberg dan lain-lain.

Strategi bersaing Michael Porter yaitu *cost leadership*, diferensiasi, dan fokus. *cost leadership* yaitu perusahaan yang unggul dalam produksi berbiaya rendah mampu menggunakan keunggulan biayanya untuk menawarkan harga yang lebih rendah atau untuk menikmati margin yang lebih tinggi. Diferensiasi yaitu perusahaan mampu menciptakan persepsi terhadap nilai tertentu pada konsumennya misalnya, persepsi terhadap keunggulan kinerja produk, inovasi produk, pelayanan yang lebih baik dan lain sebagainya. Fokus yaitu strategi yang digunakan perusahaan yang bersedia melayani wilayah-wilayah geografis yang terisolasi.

Mintzberg mengemukakan dua strategi yaitu; strategi bersaing diferensiasi dan strategi tidak terdiferensiasi. Ada enam strategi bersaing yang dapat mendukung keunggulan kompetitif diferensiasi yaitu; (harga, citra pasar, desain produk, kualitas produk, pendukung produk). Strategi tidak diferensiasi yaitu dimana perusahaan tidak mempunyai dasar untuk diferensiasi atau strategi yang digunakan hanya meniru strategi perusahaan lain. Dari uraian di atas terbukti bahwa strategi bersaing biaya rendah (*cost leadership*), diferensiasi, dan fokus dapat membangun keunggulan kompetitif dalam pengembangan produk, dan juga dapat meningkatkan pangsa pasarnya. Berawal dari situlah peneliti ingin mengetahui “Bagaimanakah penerapan strategi bersaing dalam pengembangan produk di Kelompok Usaha Bersama Mekar Jaya sehingga penjualannya meningkat pesat?” Untuk itu peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul: Analisis Strategi Bersaing Dan Pengembangan Produk Kelompok Usaha Bersama (Kub) Mekar Jaya Tuah Madani Menghadapi Persaingan Di Era Revolusi Industri 4.0.

Pada awalnya konsep strategi (*strategy*) didefinisikan sebagai cara untuk mencapai tujuan (*ways to achieve ends*). Porter berpendapat bahwa tujuan utama pembuatan strategi oleh perusahaan adalah agar perusahaan mampu menghadapi perubahan lingkungan dalam jangka panjang.

Strategi adalah cara terbaik untuk mencapai suatu sasaran atau untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Selain itu strategi berarti penentuan tujuan dan sasaran jangka panjang organisasi atau perusahaan. Pada saat perusahaan ingin memenangkan persaingan pada suatu industri satu hal yang harus diputuskan yaitu siasat yang harus diberlakukan. Keberhasilan suatu siasat tidak lepas dari sumber daya dan kecakapan pendayagunaannya.

Menurut Porter ada dua alasan mendasar dalam menentukan strategi bersaing perusahaan. Pertama, adalah daya tarik industri yang ditunjukkan oleh profitabilitas industri dalam jangka panjang. Kedua, analisis terhadap berbagai faktor yang akan menentukan posisi persaingan perusahaan di dalam industri. Porter menyebutkan adanya lima kekuatan persaingan yang akan berpengaruh terhadap profitabilitas suatu industri, yaitu: *potential entrants, suppliers, industry competitors, substitutes, buyers*.

Michael Porter menyebutkan ada tiga strategi yang dapat dilakukan perusahaan untuk memperoleh keunggulan bersaing yaitu:

1. Cost Leadership

Cost leadership, Sebuah perusahaan yang unggul dalam produksi berbiaya rendah mampu menggunakan keunggulan biayanya untuk menawarkan harga yang lebih rendah atau untuk menikmati margin yang lebih tinggi. Dengan hal tersebut, perusahaan dapat secara efektif mempertahankan diri dalam perang harga, menyerang pesaing dengan harga rendah untuk merebut pangsa pasar. Keunggulan dengan biaya rendah merupakan strategi bersaing yang bertujuan pada pasar yang luas dan sangat menuntut efisiensi dalam operasi. Perusahaan harus mempunyai fasilitas yang memadai agar bisa hemat, sehingga biaya operasi dan biaya overhead bisa dikontrol, serta meminimalkan biaya dibidang R & D, dan pelayanan. Jika strategi ini berhasil, biasanya pangsa pasar juga akan besar dan perusahaan bisa mempunyai daya tawar-menawar yang tinggi kepada pemasok mereka (yang akhirnya akan menurunkan biaya).

Perusahaan akan memperoleh manfaat yang sangat besar dengan adanya keunggulan biaya. Pertama, perusahaan dapat menentukan harga jual yang rendah tetapi masih memperoleh margin yang memadai dibanding pesaing yang menetapkan harga sama tetapi memiliki biaya yang lebih tinggi. Kedua, biaya yang rendah dapat menjadi hambatan bagi pesaing potensial yang ingin memasuki industri yang sama. Dalam pelaksanaannya strategi keunggulan harga/biaya mempunyai risiko, yang menyebabkan strategi tidak berhasil dan tidak dapat digunakan secara terus menerus yaitu;

- Adanya perubahan teknologi, yang menyebabkan investasi atau pengalaman masa lalu menjadi tidak bermanfaat atau hilang.
- Pendatang baru atau pesaing meniru/menjiplak pengalaman biaya rendah.
- Produk tidak terlalu berkembang, karena perhatian terlalu tertuju kepada biaya, sehingga (cenderung) kurang mampu/menyadari perlunya perubahan produk.
- Inflasi, sehingga kurang bersaing dengan perusahaan lain yang menerapkan strategi diferensiasi
- Minat pembeli berubah ke hal-hal pembeda (diferensiasi).

2. Diferensiasi

Strategi diferensiasi dirancang untuk menarik pelanggan yang memiliki sensitifitas khusus untuk satu atribut produk. Atribut produk juga dapat menjadi saluran pemasaran dimana perusahaan menyampaikan citranya akan keunggulan, fitur yang dimiliki serta jaringan yang mendukungnya. Oleh karena itu, iklan memainkan peran penting dalam pembangunan dan penentuan elemen yang berbeda dari merek suatu perusahaan.

Diferensiasi juga ditujukan untuk pasar yang luas dan melibatkan penciptaan produk atau jasa yang dianggap memiliki keunikan disuatu industri. Dari keunikan ini perusahaan dapat membebaskan harga ekstra (premium) bagi produknya. Tetapi di sisi lain, loyalitas merek bagi sekelompok konsumen akan membuat konsumen tidak mau beralih ke produk atau perusahaan lain. Perusahaan juga dapat melakukan strategi diferensiasi dengan menciptakan persepsi terhadap nilai tertentu pada konsumennya misalnya; persepsi terhadap keunggulan kinerja produk, inovasi produk, dan pelayanan yang lebih baik.

Strategi diferensiasi dalam penerapannya mempunyai beberapa resiko yang menyebabkan strategi tidak efektif untuk diterapkan, antara lain;

- Pembeli sudah semakin canggih sehingga kebutuhan pembeli terhadap diferensiasi menjadi hilang

- Maraknya imitasi yang dapat memperkecil kesan adanya diferensiasi, terutama bila industri sudah dewasa.
- Apa bila perusahaan mengeluarkan biaya yang relatif besar untuk mempertahankan loyalitas merek (dibandingkan dengan pesaing dengan kepemimpinan harga/biaya).

3. Fokus

Strategi yang fokus, baik yang didasarkan pada biaya rendah maupun diferensiasi berupaya untuk memenuhi kebutuhan dari segmen pasar tertentu. Perusahaan yang menerapkan strategi fokus akan bersedia melayani wilayah-wilayah geografis yang terisolasi. Perusahaan yang menggunakan strategi fokus memperoleh laba dari ketersediaannya untuk melayani segmen pelanggan yang biasanya diabaikan atau dipandang sebelah mata.

Strategi fokus disini ada dua macam yaitu; fokus pada biaya dan fokus pada diferensiasi. Fokus pada biaya ini adalah strategi dimana perusahaan membuat efisien biayanya, tapi sekaligus juga mencari ceruk pasar tertentu yang tidak menunggu pemimpin pasar (*market leader*). Fokus pada diferensiasi, strategi ini menyoroti sekelompok pasar tertentu, segmen lini produk tertentu, atau geografis tertentu. Bila perusahaan memilih strategi ini, maka perusahaan akan memilih satu atau beberapa kelompok segmen dalam suatu industri kemudian mereka akan mengembangkan strategi yang sesuai untuk segmen tersebut yang tidak bisa dilayani dengan baik oleh pesaing lain yang memiliki cakupan pasar lebih luas. Melalui optimalisasi strategi ini, perusahaan yang memilih cakupan strategi fokus akan memperoleh keunggulan kompetitif pada segmen pasar tertentu meskipun mereka tidak memiliki keunggulan kompetitif dalam industri secara keseluruhan.

Kekurangan strategi fokus

- Strategi fokus masih beroperasi pada skala kecil menyulitkan perusahaan untuk menurunkan biaya produksi secara signifikan.
- Sulitnya perusahaan dengan strategi fokus untuk berganti celah pasar secara cepat.
- Adanya ancaman dari perusahaan berbasis diferensiasi yang mungkin akan mengambil celah pasar dari perusahaan dengan strategi fokus.
- Selalu terdapat kemungkinan bahwa pesaing lain meniru strategi yang digunakan perusahaan.
- Perusahaan bisa terjebak dengan memilih celah pasar yang ternyata terlalu sempit.

Menurut Kotler, keunggulan bersaing sebuah perusahaan salah satunya dengan perbedaan (*differentiation*) tawaran perusahaan yang akan memberikan nilai lebih kepada konsumen ketimbang yang dibawakan pesaing. Penawaran perusahaan kepada pasar dapat di diferensiasikan, diantaranya: Diferensiasi produk, diferensiasi kualitas pelayanan, diferensiasi personalia, diferensiasi Citra dan diferensiasi saluran distribusi.

4) Analisis Pesaing

Pengertian pesaing menurut perspektif industri yaitu mengidentifikasi pesaing sebagai organisasi yang membuat produk atau jasa yang sama. Kedua, perspektif pemasaran menyatakan bahwa pesaing adalah organisasi yang mampu memenuhi kebutuhan konsumen yang sama. Yang ketiga, perspektif kelompok strategik yaitu kumpulan perusahaan yang bersaing dalam sebuah industri yang mempunyai kesamaan strategi dan sumber daya meliputi; harga, kualitas, karakteristik produk dan

pangsa pasar. Jadi pengertian pesaing adalah perusahaan atau industri yang menghasilkan atau menjual barang atau jasa yang sama atau mirip dengan produk yang kita tawarkan baik berupa strategi maupun sumber daya. Halhal yang perlu diketahui dari pesaing dan terus-menerus kita pantau adalah produk pesaing, baik mutu kemasan, label, atau lainnya. Kita bandingkan kelebihan dan kelemahan produk yang dimiliki pesaing dengan produk kita. Pengusaha juga harus mampu menangkap peluang yang ada di pasar sebelum ditangkap pesaing.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Keuangan KUB Mekarjaya Tuah Madani

Salah satu hambatan bagi pengembangan usaha KUB Mekarjaya adalah terbatasnya modal yang dimiliki para pelaku usaha di sektor ini. Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan usaha mikro pada umumnya disebabkan karena usaha mikro merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup, yang mengandalkan modal dari si pemilik yang jumlahnya sangat terbatas, sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh karena persyaratan secara administratif dan teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi. Persyaratan yang menjadi hambatan terbesar bagi usaha mikro adalah adanya ketentuan mengenai agunan karena tidak semua usaha mikro memiliki harta yang memadai dan cukup untuk dijadikan agunan. Untuk mengawali sebuah usaha tentu harus mengenali kebutuhan modal untuk usaha. Ada modal berupa uang dan modal yang non finansial. Dalam setiap menjalankan usaha diperlukan modal (capital) yang didayagunakan untuk menjadi bahan-bahan yang akan diproses dan diolah, yang diharapkan dapat menghasilkan keuntungan. Modal usaha merupakan sejumlah dana atau yang dapat diuangkan yang akan dialokasikan untuk mendukung kegiatan usaha.

Menghitung Kebutuhan Investasi dan Permodalan (Pendanaan)

Kebutuhan permodalan usaha perlu dihitung dengan cermat untuk menggambarkan kegiatan usaha yang akan dilakukan, termasuk didalamnya adalah volume produksi yang akan dihasilkan dan kebutuhan dana yang akan digunakan untuk proses produksi. Analisis perhitungan kebutuhan modal yang tepat akan dapat:

- a. Diketahui jumlah dana yang dibutuhkan untuk modal kerja dan biaya-biaya yang diperlukan.
- b. Memberikan gambaran apakah usaha ini menguntungkan atau tidak.
- c. Dipergunakan untuk memperkirakan volume usaha yang akan dilakukan.

Sementara itu, unsur-unsur yang diperhitungkan dalam melakukan perhitungan kebutuhan modal usaha adalah sebagai berikut: a. Volume produk yang direncanakan. b. Harga satuan pembelian baku maupun bahan pendukung. c. Harga satuan pembelian peralatan dan usia ekonomi pemakaian. d. Nilai tanah dan bangunan (tempat usaha). e. Periode waktu produksi f. Biaya-biaya produksi lainnya: tenaga kerja, transportasi, air/listrik, retribusi, dan sebagainya. Suatu usaha mikro memerlukan modal kerja baik yang bersifat permanen maupun musiman. Kebutuhan modal kerja yang permanen akan lebih baik jika didanai oleh modal sendiri. Ada beberapa komponen umum yang dikategorikan sebagai sumber modal kerja suatu bisnis. Komponen pertama ialah hasil operasi perusahaan yang dapat dihitung dengan menganalisis laporan perhitungan laba rugi.

Komponen selanjutnya ialah penjualan aktiva tidak lancar juga menjadi salah

satu dari sumber modal kerja. Perubahan dari aktiva ini menjadi kas atau piutang akan bertambahnya modal kerja. Mengelola modal kerja merupakan pengelolaan seluruh aktiva lancar serta kewajiban lancar guna perusahaan dapat menjalankan kegiatan operasional hariannya. Tujuan dari manajemen modal kerja adalah untuk mengelola dan mengatur jumlah aktiva lancar serta hutang lancar supaya dapat terjamin seluruh jumlah modal kerja bersih (net working capital) yang dapat diterima dan juga menjamin tingkat likuiditas suatu bisnis. Artinya kebutuhan untuk membeli bahan baku produksi, membayar upah tenaga kerja, maupun untuk membayar biaya operasional seperti listrik, air, sewa, dll dapat terpenuhi dan tidak terganggu. Manajemen modal kerja pada suatu usaha pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mengelola profabilitas dan risiko perusahaan. Cara terbaik untuk mencapai tujuan tersebut pada manajemen modal kerja untuk bisnis mikro adalah dengan mempersingkat cash conversion cycle (siklus perputaran kas) sampai ke tingkat tertentu. CCC merupakan ukuran berapa lama waktu yang dibutuhkan dari ketika suatu bisnis mengeluarkan kas untuk produksi sampai dengan bisnis tersebut mendapatkan kas kembali dari hasil penjualan. Untuk memperpendek CCC, suatu usaha mikro perlu mempercepat proses produksinya, barang yang selesai diproduksi secepatnya harus dapat terjual, dan barang yang sudah terjual secepatnya dibayar oleh konsumen (semakin lama konsumen membayar maka akan semakin panjang CCC nya). Perhitungan Arus Kas Bila dilihat pada sumber kas, maka bisa disampaikan bahwa kas bisa berasal dari modal sendiri, utang, penjualan tunai, pembayaran piutang, dan penjualan aktiva tetap. Sedangkan penggunaan kas bisa digunakan untuk pembayaran bahan baku, gaji, pembayaran biaya operasional (listrik, air, dll) dan pembelian aktiva tetap.

Analisis sumber penggunaan dana diarahkan pada penerapan matching principle dalam pendanaan. Prinsip ini mengatakan bahwa penggunaan jangka panjang harus didanai dengan jangka panjang, sedangkan jangka pendek hanya untuk keperluan jangka pendek. Analisis sumber dan penggunaan dana lebih menekankan pada pertimbangan likuiditas mikro di Desa Purwadadi Barat dan Pasirbungur maka hasilnya akan dapat dilihat bahwa sebagian besar dana adalah dari operasi perusahaan (dari penjualan secara tunai). Sementara itu, penggunaan dana sebagian besar adalah untuk membayar bahan baku, upah, biaya operasional, dan kebutuhan sehari-hari. Perencanaan Keuangan Jangka Pendek Sebagaimana namanya menunjukkan, perencanaan keuangan jangka pendek umumnya berdimensi waktu kurang dari satu tahun. Tujuan utamanya seringkali untuk menjaga likuiditas perusahaan. Alat yang dipergunakan adalah dengan menyusun anggaran kas. Anggaran kas merupakan taksiran tentang kas masuk dan kas keluar pada periode waktu tertentu.

Strategi Keunggulan Biaya

Strategi keunggulan biaya atau harga adalah strategi yang dilakukan KUB Mekarjaya dengan menawarkan produk (standar) dengan harga yang murah (dan bersaing) dan dengan basis pelanggan yang luas. Industri lempuk durian yang menerapkan strategi keunggulan biaya dimaksudkan untuk memberikan efisiensi biaya dalam menjalankan usaha lempuk durian. Untuk mewujudkan tercapainya keunggulan tersebut industri lempuk durian memandang penting dalam penerapan efisiensi biaya. Hal ini, dimaksudkan agar industri dapat mengusahakan biaya yang relatif rendah untuk dapat memperoleh biaya produksi lempuk yang rendah, sehingga dapat menjual lempuk dengan harga yang murah.

Strategi keunggulan biaya menjadi strategi bersaing yang menarik bagi para

pengusaha dikarenakan strategi keunggulan biaya memberikan keuntungan bagi perusahaan. Dari hasil penelitian, KUB Mekarjaya mewujudkan terciptanya keunggulan biaya dalam persaingan industri makanan tradisional dengan beberapa cara, diantaranya:

1. Produk sama dari segi jenis/bentuk/ukuran
2. Efisiensi Biaya, efisiensi biaya pada industri diartikan sebagai upaya untuk penghematan pengeluaran biaya pada produksi untuk menghasilkan produk dengan biaya produksi yang rendah.

Strategi Differensiasi

Strategi diferensiasi merupakan strategi perusahaan untuk menciptakan produk unik guna menghadapi pesaing dalam industrinya. Kelompok Usaha Bersama (KUB) Mekarjaya memilih strategi diferensiasi berharap dengan adanya perbedaan dari pesaing lain KUB dapat dikenali dengan mudah oleh konsumen. Industri makanan KUB Mekarjaya menciptakan suatu produk yang berbeda dengan pesaing yang ada baik dari kemasan dan keunikan terhadap atribut produk lempuk durian, dengan harapan pemilik dapat menciptakan loyalitas dari konsumen terhadap produknya. Dengan begitu perusahaan berharap dengan strategi ini dapat meningkatkan loyalitas konsumen terhadap produknya.

Strategi Fokus

Strategi fokus adalah strategi yang mengkhususkan diri untuk melayani kelompok konsumen, segmen lini produk, ataupun pasar geografis tertentu. Kelompok Usaha Bersama Mekarjaya yang menerapkan strategi ini dimaksudkan untuk memperkecil segmen pasar yang dituju oleh KUB.

KESIMPULAN

1. Kelompok Usaha Bersama (KUB) Mekarjaya Buah Madani menerapkan strategi bersaing dalam pemasaran dengan menggunakan strategi keunggulan biaya, strategi differensiasi, dan strategi fokus.
2. kendala yang dihadapi perusahaan yaitu dari modal yang kecil, bahan baku yang terbatas

DAFTAR PUSTAKA

- Ernest Dale, Michelin, Metode-metode Manajemen Moderen, Jakarta: 1986, Cet. Pertama, diterjemahkan oleh Jhon N. Rosyandi
- Freddy Rangkuti, Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis Reorientasi Konsep perencanaan strategic untuk menghadapi abad 21, Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, cet-12, 2006
- Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian Dengan Statistik, Jakarta, Bumi Aksara, 2008, Cetakan 3
- Ismail Solihin, Manajemen Strategik, Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2012.
- Jeff Madura, Pengantar Bisnis, Buku 2, Jakarta: Salemba Empat, 2001.
- Jemsly Hutabarat, Matini Huseini, Peoses, Formasi & Implementasi Manajemen Strategik Kontenporer Operasionalisasi Strategi, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2006
- John A Pearce II, Richard B. Robinson Jr, Manajemen Strategik:Formulasi , Implementasi, dan Pengendalian, Jakarta: Salemba Empat, 2014, edisi 12 buku 1
- Kasmir, Kewirausahaan, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006, edisi 1

- Kasmiruddin, “Analisis Strategi Bersaing Bisnis Eceran Besar/ Modern (Kasus Persaingan Bisnis Ritel Di Pekanbaru)”, Jurnal Aplikasi Bisnis, (Vol. 3 No. 1, Oktober 2012)
- Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993, h. 6.
- M Fuad, Christine H.. (et. al), Pengantar Bisnis, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003, Cet ketiga
- Mudrajad Kuncoro, Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Bersaing, Jakarta: PT. Gelora Aksara, 2005.
- Mudrajad Kuncoro, Strategi Bagaimana Meraih Keuntungan Kompetitif, Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2005
- Ni Nyoman Resmi “Strategi Meningkatkan Kualitas Produk Untuk Menang Dalam Kompetisi”, WIDYATECH Jurnal Sains dan Teknologi, (Vol. 10 No. 3 April 2011)
- Pontas M. Pardede, Manajemen Strategik Dan Kebijakan Perusahaan, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011
- Tatang M. Amirin, Menyusun Rencana Penelitian, Jakarta: Rajawali, 1990
- Taufiq Amir, Manajemen Strategik konsep dan Aplikasi, Jakarta: Raja Wakli Pers, 2011

Efektivitas Sistem *E-Procurement* dalam Pelelangan Umum Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau

Grestarydwiwanti, Vina Museliza, dan Ijalnoer

Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial,
Universitas Islam Negeri Sultan Syaraif Kasim Riau
grestarydwiwanti95@gmail.com

Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial,
Universitas Islam Negeri Sultan Syaraif Kasim Riau
vmuseliza66@gmail.com

Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial,
Universitas Islam Negeri Sultan Syaraif Kasim Riau
Ijalnoer69@gmail.com

Abstrak

Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik atau E-Procurement adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi secara elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tujuan Penelitiannya adalah Untuk mengetahui Efektivitas Sistem E-Procurement dalam Pelelangan Umum Pengadaan Barang dan Jasa dan Untuk mengetahui faktor penghambat sistem E-Procurement tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan merujuk pada teori Efektivitas dari Agus Dharma dengan indikator Kuantitas, Kualitas dan Ketepatan Waktu memperlihatkan bahwa sistem E-Procurement ini sudah terlaksana dengan baik dan efektif, setelah menggunakan sistem E-Procurement pelelangan umum mengalami peningkatan jumlah paket lelang setiap tahunnya dibandingkan dengan sewaktu lelang konvensional. Pemerintah Provinsi Riau dapat meminimalisir kecurangan yang terjadi dalam proses pengadaan barang/jasa, panitia lelang tidak dapat lagi bekerja sama dengan penyedia untuk melakukan perubahan-perubahan dokumen setelah dilakukan pembukaan sampul penawaran. Karena dokumen telah tersimpan di server LPSE dan tidak bisa dirubah. Dengan menggunakan sistem elektronik ini, proses lelang bisa dapat membantu tim pengawasan dalam menjalankan tugasnya, hanya dengan melihat server pada website lelang saja berapa jumlah paket lelang dan sesuai atau tidaknya dengan APBD.

Kata Kunci : Kuantitas, Kualitas, Ketepatan Waktu

Abstract

Electronic Products and Services Procurement or E-Procurement is a procurement of goods / services carried out using electronic information and transactions technology in accordance with the law. The purpose of this research is to know the effectiveness of the E-Procurement System in the Common Auction of Goods and Services and to know the factors that inhibit the E-Procurement system. Based on the results of the study using a qualitative descriptive approach and referencing the theory of Effectiveness of Agus Dharma with the Quantity, Quality and Timing indicators, it is shown that the E-Procurement system has been implemented well and effectively, after using the general auction E-Procurement system. annual auctions compared to conventional auctions. The Riau Provincial Government is able to minimize the shortfall in the procurement process, the auction committee can no longer work with the provider to make changes to the document after the opening of the bidding cover. Because the document has been stored on the LPSE server and cannot be modified.

Keywords: quantity, quality, timeliness

PENDAHULUAN

Pada mulanya pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan secara konvensional yaitu dilaksanakan secara langsung oleh pengguna Barang/Jasa atau panitia. Namun dalam praktek pelaksanaannya banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan dari prinsip-prinsip dan ketentuan pengadaan Barang/Jasa yang diatur

dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003. Penyimpangan tersebut ada yang berwujud penyimpangan administrasi juga berupa tindakan korupsi yang merugikan keuangan Negara. Banyaknya tindakan korupsi yang terjadi pada pengadaan Barang/Jasa menunjukkan bahwa masih buruknya sistem transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta tidak berjalannya sistem pencegahan yang efektif untuk meminimalisasi terjadinya praktik korupsi (Sutedi,2012)

Inovasi terhadap metode Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diperlukan dalam pelaksanaan percepatan belanja Pemerintah, khususnya terhadap Barang/Jasa Pemerintah diperlukan dalam pelaksanaan percepatan belanja Pemerintah,

Oleh karena itu, pada tahun 2010 Presiden Indonesia mengatur secara tegas mengenai pengaturan tata cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik (*E-Procurement*) yang di atur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, serta perubahannya yaitu Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011, Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diwajibkan dilakukan secara elektronik atau *e-procurement* yaitu Pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/Kota wajib melakukan pengadaan Barang/Jasa secara elektronik atau *e-procurement*. Adapun tujuan Peraturan Presiden ini diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi yang kondusif, efisiensi belanja negara, dan percepatan pelaksanaan APBN/ APBD.

E-procurement adalah suatu bentuk sistem baru dalam pengadaan Barang /Jasa yang mampu membentuk pemerintah dalam hal transparansi informasi serta layanan masyarakat berbasis web.

Tujuan *E-Procurement* diantaranya adalah meningkatkan transparansi dan keterbukaan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah; meningkatkan persaingan yang sehat dalam rangka penyediaan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan; meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Efektivitas ini merupakan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai yang dapat dilihat dari kualitas yang memadai. Kualitas ini berpengaruh pada hasil yang akan dicapai. Produktivitas individu merupakan perbandingan dari efektivitas keluaran (pencapaian hasil 50 kerja yang maksimal) dengan efektivitas salah satu masukan (tenaga kerja) yang mencakup kuantitas, kualitas dalam satuan waktu tertentu.

Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau sistem *E-Procurement* bisa dikatakan hal yang baru karena Dinas ini baru diterapkan pada tahun 2014 yang lalu. Peralihan dari sistem konvensional menuju sistem elektronik dalam pengadaan Barang/Jasa sangatlah penting. Maka perlu adanya analisa sistem dan proses pengadaan yang baru ini di dinas PUPR Provinsi Riau.

Jika kita melihat paket lelang pada tahun 2014 dan 205 terjadi kesamaan jumlah paket, ini menekankan bahwa pada tahun 2014 dan 2015 pegawai dan penyedia jasa belum memahami bagaimana pelaksanaan lelang secara elektronik ini, maka dari itu tidak adanya penambahan jumlah paket lelang dan tidak bertambahnya penyedia jasa yang mengikuti lelang tersebut. Tetapi terjadi peningkatan jumlah paket setiap jenis lelang pada tahun 2016. Dan adanya transparansi dalam sistem pengadaan barang dan jasa melalui elektronik, sehingga masyarakat umum dapat melihat pemenang hasil lelang dan banyaknya paket lelang yang telah *update* oleh dinas terkait. Guna mempercepat

pelaksanaan pembangunan infrastruktur ini dibutuhkan percepatan belanja Negara yang dapat dilaksanakan dengan percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Pengadaan barang/jasa pada hakikatnya adalah usaha pemerintah sebagai pengguna barang/jasa yang diinginkan.

Penelitian ini bertujuan Menganalisis efektivitas sistem *E-Procurement* dalam Pengadaan Barang dan Jasa dan faktor penghambat dalam pelaksanaan Sistem *E-Procurement*

METODE

Penelitian ini dilakukan ULP dan LPSE.. Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan adalah orang yang dianggap mengetahui tentang apa yang diharapkan dari penelitian yang dilakukan. Penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan secara purposive yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Sistem *E-Procurement* dalam Pelelangan Umum Pengadaan Barang dan Jasa

Untuk menganalisis Efektivitas Sistem *E-Procurement* dalam Pelelangan Umum Pengadaan Barang dan Jasa digunakan 3 (tiga) indikator yang dijadikan alat ukur dalam pelaksanaannya.

Kuantitas

Menurut Dharma, Agus. (2004: 355) Kuantitas yaitu jumlah yang harus diselesaikan dan dicapai.

Kuantitas berdasarkan Pemaketan Pekerjaan ditentukan oleh KKPA penentuan tersebut telah sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 dan mengalami perubahan Peraturan Presiden nomor 4 tahun 2015 tentang pengadaan barang dan jasa secara elektronik serta Peraturan kepala LKPP nomor 1 Tahun 2015 tentang E-Tendering, jadi peraturan tersebut yang mengatur proses pelelangan. Pelaksanaan Pemaketan Pekerjaan juga sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku baik secara teknis. Aturan khusus dalam pemilihan peserta lelang menyesuaikan dengan kemampuan pokja, untuk 1 orang pokja bisa ada 3-5 paket lelang sesuai dengan peraturan presiden yang berlaku.

Untuk perusahaan kami yang bergerak dalam bidang Jasa Konstraktor, Pemaketan Pekerjaan dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)

Kuantitas berdasarkan Jumlah peserta lelang semakin meningkat dikarenakan menggunakan sistem E-Procurement atau masyarakat lebih mengenalnya dengan sistim lelang elektronik, Strategi Unit Layanan Pengadaan dalam meningkatkan jumlah peserta lelang ini dengan cara sosialisasi yang diselenggarakan oleh Asosiasi LPJK atau Asosiasi perusahaan-perusahaan di masing-masing wilayah, waktu penyelenggaraan biasanya pada awal tahun Anggaran (awal-awal tahun). Peserta lelang pada umumnya sudah memahami semua persyaratan menjadi penyedia barang/jasa, jadi perusahaan penyedia jasa bisa mengikuti paket pekerjaan mana yang cocok atau sesuai dengan perusahaannya karena persyaratan menjadi penyedia barang/jasa bisa dilihat dan dipahami di masing-masing website elektronik.

Kualitas

Menurut Dharma, Agus. (2004: 355) Kualitas yaitu mutu yang harus diselesaikan (baik tidaknya). Pengukuran kualitatif keluaran mencerminkan pengukuran "tingkat kepuasan", yaitu seberapa baik penyelesaiannya. Ini berkaitan dengan bentuk keluaran.

Kualitas berdasarkan pemilihan Peserta lelang, penyedia barang dan jasa sendiri yang menentukan paket pekerjaan yang sesuai dengan bidang usaha mereka masing-masing dan sesuai juga dengan klasifikasi perusahaannya, penyedia sendiri yang memilih paket mana yang menurut mereka cocok dan mempunyai peluang untuk menang. Sejak 2011 lelang di Provinsi Riau sudah menggunakan elektronik dan memberikan manfaat bagi penyedia barang/jasa karena pemilik perusahaan yang mendaftar perusahaannya untuk ikut lelang. Informasi lelang ini dilakukan secara terbuka, masyarakat dapat mengakses informasinya pada Lpse.riau.go.id pada bagian yang sudah terbuka, karna ada bagian yang juga belum terbuka seperti bagian evaluasi yang sifatnya masih tertutup, yang kewenangannya ada di Pokja ULP, tapi setelah ada pemenang masyarakat umum sudah dapat melihat tanpa harus login. Sebelum pendaftaran peserta lelang, terlebih dahulu ada pelatihan dari LPSE, pelatihannya sesuai dengan permintaan Penyedia Jasa, LPSE menyediakan ruang untuk pelatihan, boleh saja setiap saat penyedia meminta untuk diadakannya pelatihan atau sosialisasi, permintaan minimal 12 orang penyedia jasa, jikalau diminta pihak LPSE siap untuk melayani peserta pelelangan tersebut.

Kualitas berdasarkan Pengawasan, ada APIP (Aparatur Pengawas Internal Pemerintah), ada auditor dan lain sebagainya yang bertugas mengawasi jalannya lelang elektronik tersebut, LPSE hanya bisa menyampaikan berapa jumlah paket yang dilaksanakan., kalau dipertanyakan masalah KKN itu lebih kepada APIP dan inspektorat. LPSE sebagai orang yang diawasi, tidak mungkin LPSE juga memberikan informasi masalah pengawasan. Pada prinsipnya lelang yang diselenggarakan bukan tidak boleh memberikan keuntungan, tetapi lebih tepatnya memberikan keuntungan yang wajar kepada pihak penyedia, pemerintah harus memperhitungkan keuntungan bagi penyedia atau peserta lelang (yang wajar).

Dalam pengawasan pihak ULP didampingi oleh KPK, dari Inspektorat juga ada APIP, dan dari kejaksaan yang dinamakan TP4D. Peningkatan pengawasan dibandingkan secara manual lebih berkurang. Pengawasan ini sudah cukup baik. Jika bicara tentang persaingan tidak sehat maka itu ada pada pokjanya, pokja juga tidak bisa bermain main, jika mereka mulai mengarah pada pihak tertentu, maka akan ada sanksi hukumnya. Pengadaan barang dan jasa elektronik ini memudahkan badan pengawasan dalam proses lelang ini, jika mereka ingin melihat atau mengawasi mereka tinggal mendownload file yang ingin mereka lacak, tinggal meminta user id kepada pihak terkait dan mereka lihat pamaketannya apakah sesuai dengan APBD atau tidak, tim pengawasan tidak perlu lagi memanggil atau menemui pihak pihak yang terkait untuk meminta file untuk dilacak. Pengadaan barang/jasa ini sudah aman dan tersimpan dengan baik pada server data, karena server data ini sama dengan bank data, sudah tersimpan semua file data lelang. Jika berbicara Hacker sampai sekarang belum ada, tetapi tidak menutup kemungkinan akan ada pembobolan, karna ini menyangkut IT, siapa saja bisa membobol

Penilaian kualifikasi yang dilakukan sudah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 yang berlaku saat sekarang ini, dan sesuai juga dengan syarat-

syarat Dinas yang mengadakan lelangnya. Tetapi proses penilaian kualifikasi dilakukan oleh panitia/pokja yang berwenang. Dalam hal ini E-Procurement sudah terlaksana dengan baik dalam hal penggunaan dana dan biaya yang seminimum mungkin untuk mencapai kualitas yang maksimum, lebih efisien dibandingkan dengan konvensional, hasil dan sasaran lelang ini dikontrol oleh dinas yang bersangkutan seperti perusahaan kami pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Dengan E-Procurement ini persaingan sudah kompetitif, ada juga penyedia barang/jasa yang melakukan penawaran serendah mungkin tetapi panitia lelang biasanya tetap melakukan evaluasi apakah penawaran terendah pantas untuk dimenangkan, jadi penawar terendah tidak pasti selalu menang

Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu adalah sesuai tidaknya dengan waktu yang direncanakan. Pengukuran ketepatan waktu merupakan jenis khusus dari pengukuran kuantitatif yang menentukan ketepatan waktu penyelesaian suatu kegiatan.

Ketepatan Waktu berdasarkan Keterlambatan Pemasukan Dokumen Penawaran, Jika penyedia terlambat mengupload dokumen penawaran, otomatis penyedia tidak dapat mengikuti pelelangan, ada jadwal yang telah ditentukan oleh Pokja. Ada juga beberapa peserta lelang yang terlambat dalam memasukan dokumen penawaran, tergantung pada sistem ULP, jika sistem ULP lagi down, disana kendala penyedia yang terlambat memasuki dokumen. Tidak ada toleransi yang diberikan kepada penyedia atau peserta lelang yang terlambat dalam memasukan dokumen penawaran, ketika sistem sudah tutup otomatis pendaftaran tertutup. Jika pelelangan secara manual bisa saja penyedia bernegosiasi dengan dinas atau pokja nya.

Ketepatan Waktu berdasarkan Waktu yang diberikan untuk memasukan dokumen penawaran kepada peserta lelang atau penyedia sudah tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, paling lambat 1 x 24 jam addendum document, ada batas minimum, batas waktunya relative, tergantung pojka dan penyedia, bisa dibahas dalam proses penjelasan pekerjaan Tetapi tidak sedikit para penyedia jasa yang aktif untuk mengupload dokumen penawaran pada saat last minute, secara otomatis kemungkinan dokumen akan terupload sangat kecil karena mengingat infrastruktur jaringan dan di dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 ada aturan mengenai berapa lama membuka proses lelang, jika proses lelang secara elektronik antara 7 sampai 10 hari. Jika proses lelang secara konvensional bisa lebih dari 15 hari. Batas waktu yang diberikan bisa dilihat pada website lelang elektronik jika penyedia tidak mendapat informasi secara manual oleh penyedia lain atau pihak terkait.

Ketepatan Waktu berdasarkan Penetapan pemenang di tetapkan di ULP, dalam penetapan pemenang telah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, tidak ada penundaan pengumuman pemenang, apabila ada penundaan pengumuman pemenang, maka akan ada verifikasi alasan kenapa ditunda. Tetapi selama ini sudah tepat waktu dalam menetapkan pemenang lelang, sudah dilakukan secara terbuka atau transparan pada situs lelang. Pokja yang bertanggung jawab dalam proses penetapan pemenang lelang sudah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, jika tidak sesuai akan ada konsukuensinya.

Ketepatan Waktu berdasarkan waktu pelaksanaan yang diperlukan

Ketentuan waktu pengadaan barang dan jasa sudah ada di Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, pokja mengikuti aturan perpres tersebut Penentuan waktu pelaksanaan dalam proses pelaksanaan pengadaan penyelesaian kontraknya ada di OPD,

tetapi proses pemilihan penyedia ada di ULP, ada ketentuan yang harus diikuti dan ada jadwal-jadwal baku, jadwalnya relative, jika lelang sederhana memakan waktu 2-3 minggu, kurang lebih sama dengan lelang konvensional., jika prakualifikasi waktu pengerjaannya akan lama tetapi jika pascakualifikasi pengerjaan akan lebih cepat. Bagi para peserta lelang yang tidak tepat waktu dalam pelaksanaan pekerjaan akan dikenakan denda keterlambatan sesuai dengan pasal kontrak kerja yang telah disepakati, maksimal waktu 50 Hari, denda 100 hari keterlambatan dari sisa kerja. Apabila masa tambahan waktu sudah habis dan kontak kerja masih belum siap, maka pihak penyedia jasa akan putus kontrak dan kena sanksi blacklist selama 2 tahun. Perpanjangan waktu proses lelang ditetapkan oleh panitia lelang dan sudah terschedul tidak bisa diganggu gugat lagi.

Faktor Penghambat Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik

1. Para penyedia barang/jasa masih menyamakan proses lelang elektronik ini seperti lelang konvensional di mana para penyedia jasa takut isi dokumen penawaran mereka dilihat oleh penyedia jasa lainnya. Ketakutan ini membuat mereka mengunggah (upload) dokumen menjelang waktu penutupan (biasanya 1 jam sebelum penutupan). Hal ini dianggap sebagai masalah karena jika semua/banyak penyedia jasa mengunggah dokumen pada saat-saat terakhir, maka kemungkinan pengunggahan gagal sangat tinggi. Hal ini dikarenakan akan terjadi penyumbatan/kemacetan (*bottle necking*) karena overload jaringan. Dua Mbps yang dimiliki e-proc sesungguhnya sudah lebih dari cukup untuk menunjang LPSE, tetapi jika setiap penyedia menggunakan tunnel yang sama di satu waktu, maka kemacetan pada jaringan tidak dapat dihindarkan. Keadaan seperti ini memiliki risiko yang besar, terutama ketika penyedia jasa harus mengunggah dokumen yang berukuran besar, karena semakin besar dokumen maka waktu unggah juga semakin lama sehingga ketika waktu sudah habis sementara proses pengunggahan belum selesai maka penyedia jasa tidak dapat menyertakan dokumen tepat waktu yang akibatnya adalah penyedia jasa gagal mengikuti proses lelang.
2. Penggunaan alamat e-mail oleh penyedia jasa belum maksimal. Penyedia jasa sering menggunakan email pribadi karyawannya untuk berkorespondensi dengan pihak LPSE/ ULP. Hal ini akan menjadi masalah apabila karyawan tersebut tidak bekerja lagi pada penyedia jasa yang bersangkutan. Penyedia jasa tersebut, tidak dapat serta merta mengirimkan dokumen lelangnya dan berkorespondensi dengan pihak LPSE/ULP, karena email milik karyawan tersebutlah yang teregistrasi. Hal ini mengakibatkan email baru yang akan digunakan oleh penyedia barang/jasa harus didaftarkan kembali ke LPSE setelah email yang lama dinonaktifkan.

SIMPULAN

1. Efektivitas Sistem *E-Procurement* dalam Pelelangan Umum Pengadaan Barang Dan Jasa yang diukur dari kuantitas, kualitas dan ketepatan waktu dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
 - a. Kuantitas *E-Procurement* sudah cukup Efektif dalam Pengadaan Barang dan Jasa dari sisi peningkatan jumlah paket pekerjaan atau paket lelang, karena sewaktu lelang konvensional paket pekerjaan hanya sanggup dilakukan hingga 200 paket saja, dengan menggunakan lelang elektronik ini bahkan mencapai 600 paket pekerjaan setiap tahunnya, mengalami peningkatan lebih banyak dari pada

sewaktu lelang konvensional, karena dengan penggunaan sistem ini masyarakat luas terutama bagi penyedia jasa dapat dengan mudah ikut serta menjadi peserta lelang baik itu dalam kota/provinsi maupun luar kota/provinsi klasifikasi penyedia jasa tersebut.

- b. Kualitas *E-Procurement* mencerminkan “tingkat kepuasan” yaitu seberapa baik penyelesaiannya, (ketepatan dalam mengisi formulir) dan semakin besar kontribusi keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, dapat dikatakan efektif pula unit tersebut, maka kualitas *E-Procurement* dikatakan sudah efektif karena, sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Perpres Nomor 4 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik, dimana didalam peraturan tersebut diatur bagaimana pemilihan peserta lelang, pengawasan dan penilaian kualifikasi. Pemerintah Provinsi Riau dapat meminimalisir kecurangan yang terjadi dalam proses pengadaan barang/jasa. Karena ketika penggunaan *E-Procurement*, panitia lelang tidak akan bisa melihat siapa saja yang mengikuti proses pelelangan sebelum proses pembukaan sampul penawaran dilakukan. Dan juga panitia lelang tidak dapat lagi bekerja sama dengan penyedia untuk melakukan perubahan-perubahan dokumen setelah dilakukan pembukaan sampul penawaran. Karena dokumen telah tersimpan di server LPSE dan tidak bisa dirubah. Tetapi dengan menggunakan sistem elektronik ini, proses lelang bisa dapat membantu tim pengawasan dalam menjalankan tugasnya, hanya dengan melihat server pada website lelang saja berapa jumlah paket lelang dan sesuai atau tidaknya dengan APBD. Tingkat keamanan, sistem pengadaan secara elektronik yang dikelola LPSE sudah sangat baik. Dokumen penawaran yang dikirimkan tidak dapat dicuri dan dibuka oleh sembarang orang, karena menggunakan sistem enkripsi dan dekripsi dari Lembaga Sandi Negara sehingga para penyedia akan merasa aman dengan dokumen penawaran yang mereka upload.
- c. Ketepatan Waktu *E-Procurement* sudah bisa dikatakan Efektif dan efisien, karena dalam pelelangan secara elektronik ini hanya diperlukan waktu 7 hari saja (1 minggu), dibuktikan dari proses lelang secara elektronik ini tidak memakan waktu yang lama seperti halnya sewaktu lelang konvensional, tidak memakan waktu untuk mengadakan pertemuan antara pihak terkait panitia dan penyedia jasa. Waktu yang ditentukan untuk proses lelang ini juga sudah sangat sesuai dengan waktu yang diatur pada perpres nomor 4 tahun 2015. Jikalau waktu tersebut telah diterakan pada server lelang, maka secara otomatis akan terbuka jika waktunya sudah datang, dan tertutup dengan sendirinya jika waktunya sudah habis. Tidak ada perpanjangan waktu tambahan atau pengurangan waktu, semuanya telah sesuai dengan apa yang sudah ditentukan pada Perpres tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Dharma, Agus. 2004. *Manajemen Supervisi*. Jakarta : Rajawali Perss
- Hadari, Nawawi. 2001. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada Offset.
- Hadiguna, Rika Ampuh. 2009. *Manajemen Pabrik Pendekatan Sistem untuk Efisiensi dan Efektivitas*. Jakarta : Bumi Aksara
- Halim, Abdul. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UNPP AMN YKPN

- Handayaniingrat, Suwarno. 1990. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Gunung Agung
- Hartono, Jogiyanto, 2007. *Model Kesuksesan Sistem Teknologi Informasi*. Yogyakarta: Hasan, Iqbal. 2008. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Yogyakarta : Bumi Aksara
- Husen, Abrar MT. 2011. *Manajemen Prroyek*. Yogyakarta : ANDI
- Jogiyanto. 2005. *Analisis dan Desain Sistem Informasi*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Ruslan, Rosady. 2003. *Metode Penelitian PR dan Komunikasi*. Jakarata : PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta
- Suherman, Ade Maman. 2010. *Pengadaan Barang dan Jasa (Government Procurement)*. Jakarta : PT. Raja Wali Pers
- Tampubolon, Mahanan. P. 2008. *Perilaku Organisasi*. Perspektif Organisasi Bisnis. Bogor : Ghalia Indonesia
- Wahab, Solihin Abdul. 2014. *Analisis Kebijakan*. Jakarta : Bumi Aksara

Peraturan

- Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang *Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*
- Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 *Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 *Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan Dan Pengendalian Pembangunan*

Penelitian Terdahulu

- Kodar Udoyono, 2009 dengan judul *E-Procurement dalam Pengadaan Barnng/Jasa untuk Mewujudkan Akuntabilitas di Yogyakarta*
- Ratu, Filda, 2012 dengan judul *Efektivitas Sistem Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik Pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Serang*
- Septyan Ericka Widiyatna, 2015 dengan judul *Efektifitas E-Procurement Menurut Pegawai dan Peserta Lelang Pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Serang Pada Tahun 2014*
- Virna Museliza, 2015. *Peranan Sistem E-Procurement dalam Efektivitas Pengadaan Barang/Jasa Di Kota Pekanbaru*.

Pengembangan Masyarakat di Kabupaten Pelalawan Melalui Program *Corporate Social Responsibility* oleh PT. Riau Andalan Pulp and Paper

Made Devi Wedayanti

Universitas Islam Riau
Email: madedewiwedayanti@soc.uir.ac.id

Abstrak

Corporate Sosial Responsibility atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah bagaimana perusahaan membangun hubungan dengan masyarakat dengan melakukan program pengembangan masyarakat. PT. Riau Andalan Pulp and Paper merupakan salah satu perusahaan besar yang berada di Kabupaten Pelalawan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis program PT. Riau Andalan Pulp and Paper dalam melakukan pengembangan masyarakat di Kabupaten Pelalawan. Metode yang digunakan adalah Analisis kualitatif. Hasil penelitian ini adalah PT. RAPP melakukan pengembangan masyarakat untuk mendorong kemandirian masyarakat setempat. PT. RAPP telah berkontribusi pada pembangunan masyarakat di Provinsi Riau khususnya Kabupaten Pelalawan dengan membantu menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup melalui berbagai program pembangunan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.

Kata kunci: Pengembangan Masyarakat, *Corporate Sosial Responsibility*, Kemandirian Masyarakat.

Abstract

Corporate Social Responsibility is how companies build relationships with the community by carrying out community development programs. PT. Riau Andalan Pulp and Paper is one of the big companies in Pelalawan Regency. The purpose of this study was to analyze the program of PT. Riau Andalan Pulp and Paper in conducting community development in Pelalawan Regency. The method used is qualitative analysis. The results of this study are PT. RAPP conducts community development to encourage local community independence. PT. RAPP has contributed to community development in Riau Province, especially Pelalawan Regency by helping to reduce poverty and improve quality of life through various economic, health, education and infrastructure development programs.

Keywords: Community Development, Corporate Social Responsibility, Community Independence.

PENDAHULUAN

Perusahaan dalam melakukan kegiatan harus menyelaraskan antara pencapaian kinerja dengan kinerja sosial dan kinerja lingkungan atau disebut *triple bottom-line performance*. Penyelarasan ketiga kinerja tersebut pada akhirnya akan membuat perusahaan mampu meraup berkah dan keuntungan yang langgeng. Untuk menyelaraskan kinerjanya, serta tetap menjunjung tinggi kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat, perusahaan menggunakan strategi *corporate social responsibility* (CSR). CSR merupakan kewajiban asasi perusahaan yang tidak bisa dihindari. Dasar argumentasinya adalah teori akuntabilitas korporasi (*corporate accountability theory*). Menurut teori ini, perusahaan bertanggungjawab atas semua konsekuensi yang ditimbulkan dari operasional perusahaan termasuk untuk pemberdayaan masyarakat tempatan.

Secara historis, banyak perusahaan yang berupaya mencari untung namun tidak memperhitungkan kelanjutan kelestarian lingkungan dan mengabaikannya pengembangan masyarakat lokal sebagai pekerja didalam perusahaan, dan kurang memperhatikan hak hak masyarakat dilingkungan perusahaan. Lingkungan diperlakukan sebagai bahan baku yang digunakan dalam proses produksi serta tempat yang tidak terbatas untuk membuang limbah industri. Tantangan di masa depan adalah

bagaimana menciptakan modernisasi yang berbeda, yang ditandai dengan kehidupan bisnis yang terus melestarikan lingkungan alam.

Berbagai peraturan telah dibuat terkait dengan kegiatan bisnis perusahaan. Perusahaan yang didirikan dengan modal dengan tujuan menguntungkan untuk mencari keuntungan. Hal ini membuat perusahaan operasional mempertimbangkan perbedaan sosial, menekankan lingkungan yang tidak nyaman, pemborosan penggunaan sumber daya alam, dan kualitas perubahan lalu lintas antara pengguna dan konsumen, dan kualitas antara tawar-menawar. posisi perusahaan dan karyawan. Padahal, tanpa disadari, perusahaan harus melakukan investigasi terhadap martabat lingkungan.

Keberadaan perusahaan telah menjadi bisnis yang dominan. Perusahaan telah berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional. Kegiatan perusahaan yang menyediakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi, dan membuat masyarakat mengembangkan sistem keuangan yang kompetitif. Di sisi lain, interaksi antara perusahaan dan masyarakat semakin dekat. Perusahaan telah memasuki dan meningkatkan semua lini kehidupan masyarakat. Perusahaan, selain sebagai bisnis, juga telah menjadi bagian dari warga negara yang terlibat langsung dengan dinamika masyarakat. Keberlanjutan bisnis perusahaan juga sangat tergantung pada kondisi ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Perusahaan mungkin tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga harus mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan kepedulian dengan diskusi sosial yang membahas komunitas.

Dilihat dari sudut pandang administrasi publik setidaknya ada manajemen yang dilakukan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan untuk pengembangan masyarakat ini dalam rangka tertib administrasinya suatu perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. PT. RAPP yang berada di provinsi riau juga memiliki pedoman administrasi terhadap peraturan daerah Provinsi Riau No. 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau Pasal 6 (dalam Wedayanti:2017) penyelenggaraan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan diselenggarakan dengan asas: a) Kepastian hukum; b) Kepentingan umum; c) Keterpaduan; d) Partisipasi dan aspirasi; e) Keterbukaan; f) Berkelanjutan; g) Kemandirian; h) Berwawasan lingkungan; i) Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional; dan j) Kearifan lokal.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau Pasal 7 dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Perusahaan berhak:

- a. Menyusun program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang akan dilaksanakan oleh perusahaan sebagai bagian dari kebijakan internal perusahaan yang berkesinambungan;
- b. Menentukan masyarakat sasaran yang akan menerima manfaat program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dari perusahaan yang bersangkutan, setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah; dan
- c. Mendapatkan fasilitas dan/atau penghargaan dan Pemerintah Daerah berdasarkan kontribusi perusahaan dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Selanjutnya menurut Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau Pasal 8 dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Perusahaan wajib:

- a. Menyusun rancangan penyelenggaraan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip Tanggung Jawab Sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan pemerintah daerah dan peraturan perundang-undangan;
- b. Menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan system jejaring kerja sama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dengan memperhatikan perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan;
- c. Menetapkan komitmen bahwa program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan didalam peraturan perusahaan; dan
- d. Menerima usulan masyarakat baik perorangan maupun kelompok yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Penerapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) melihat bahwa perusahaan bukan hanya merupakan aktivitas bisnis, tetapi perusahaan adalah merupakan instansi yang harus juga memikirkan kondisi ekonomi, sosial dan lingkungan yang diperlukan disekitar perusahaan termasuk pengembangan masyarakat. Dilihat dari penjelasan asas penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan di provinsi Riau berdasarkan Perda di atas maka jelas pengembangan masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan asas kemandirian, kepentingan umum dan keberlanjutan. Pengembangan masyarakat perlu diperhatikan oleh perusahaan – perusahaan yang ada di sekitar masyarakat karena program ini sejalan dengan prioritas pemerintah sesuai dengan UUD 1945 yaitu mensejahterakan masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan dalam ilmu sosial yang mendasar untuk penelitian manusia dan berhubungan dengan orang-orang dalam diskusi dan terminologi mereka (Moleong, 2007). Menurut Faisal (1990) dalam Suharna (2006) dalam metode penelitian ilmu sosial, penelitian kualitatif digunakan untuk menguji fakta-fakta terbatas dengan fokus pada memfasilitasi dan mengajukan pertanyaan tentang resolusi dan resolusi peserta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP), unit bisnis APRIL Group, beroperasi di Riau. Keberadaan operasional perusahaan telah berhasil mendorong pertumbuhan Pangkalan Kerinci dari desa kecil dengan 200 kepala keluarga menjadi kecamatan kota dengan 100.000 orang penduduk. Seiring dengan semangat APRIL, PT. RAPP beroperasi berdasarkan filosofi bisnis 5C: bahwa kegiatan operasionalnya harus baik untuk Masyarakat, Negara, Iklim, Pelanggan, dengan demikian akan baik pula bagi Perusahaan.

RAPP membantu mengembangkan bisnis dan usaha masyarakat setempat. Pengusaha lokal diberi pelatihan, dukungan dan bantuan finansial untuk membantu mereka mendirikan usaha, terutama di bidang-bidang usaha yang sejalan dengan kebutuhan PT RAPP, seperti penyedia tenaga kerja dan transportasi. PT RAPP telah membantu lebih dari 180 pengusaha lokal, menyediakan ribuan lapangan pekerjaan di berbagai bidang seperti bengkel otomotif dan katering. Petani juga diberi dukungan melalui Sistem Pertanian Terpadu, sebuah program yang mengajarkan mereka teknik

hortikultura modern untuk meningkatkan hasil panen dan menanam tanaman baru. Para petani mengelola 2.400 hektar lahan dan menerima pelatihan di pusat pelatihan.

RAPP berada di garis terdepan dalam upaya untuk mengembangkan masyarakat setempat. Pelestarian budaya Indonesia dilakukan melalui sejumlah program demi menghidupkan kembali kerajinan tradisional, seperti program yang mendorong wanita setempat meningkatkan pendapatan keluarga lewat membuat. Para wanita juga diberdayakan melalui program kerajinan kain tenun. Mereka diberikan pelatihan dan peralatan pendukung untuk memproduksi kain tersebut yang kemudian dapat dijual kembali.

RAPP juga mendukung atlet-atlet muda berbakat melalui Future Athlete Training Centre yang didirikan tahun 2007. Pada tahun 2017, pusat pelatihan tersebut telah berhasil mengantongi total 40 medali skala nasional dengan 19 emas dan 5 medali skala internasional dimana 2 diantaranya adalah medali emas. Pusat pelatihan ini merupakan bagian dari visi pendiri APRIL Sukanto Tanoto bahwa setiap orang harus memiliki kesempatan dalam mengembangkan potensi dirinya.

Dalam rangka membantu masyarakat dalam mendapatkan akses pendidikan, PT RAPP memberikan sejumlah program beasiswa mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, pelatihan guru, dan menyediakan fasilitas dan peralatan sekolah. Selain itu juga yang merupakan prinsip dasar dalam pengembangan perusahaan untuk meningkatkan keunggulan komparatif (*Comparative advantage*) dan daya saing perusahaan. Salah satu yang dilakukan PT. RAPP adalah dengan cara mensejahterakan karyawannya. Sebagai perusahaan yang terintegrasi, para karyawan terlibat dalam berbagai peran dari perkebunan hingga produksi sampai produk jadi. PT. RAPP memiliki ilmuwan, teknisi, pekerja pembibitan, operator mesin berat, ahli IT dan banyak spesialis lainnya - semuanya bergabung untuk menjadikan Grup Asia Pacific Resources International Limited (APRIL) sebagai pemimpin industri.

PT. RAPP percaya dan terus berinvestasi dalam pengembangan bakat karyawan PT. RAPP. Grup APRIL memberikan dukungan bagi karyawan saat ini dan masa depan, melalui penawaran beasiswa, tunjangan kesejahteraan dan program pelatihan dapat di jelaskan sebagai berikut:

Pengembangan Bakat

Pelatihan karyawan merupakan hal penting untuk keberhasilan bisnis. Dengan melatih karyawan dengan baik, memudahkan mereka untuk mencapai potensi mereka sepenuhnya, yang dampaknya membuat organisasi PT. RAPP lebih kompetitif. Dalam konteks yang lebih luas, keterampilan karyawan yang PT. RAPP kembangkan dapat membantu mereka untuk menemukan tempat dalam perekonomian Indonesia yang berkembang pesat.

Sebuah komponen utama pada pengembangan karyawan Grup APRIL (PT.RAPP) adalah program Beasiswa Master, bertujuan untuk mengembangkan generasi masa depan industri pulp dan kertas yang profesional. Setiap tahun, PT. RAPP mensponsori 5 karyawan untuk studi pascasarjana di luar negeri. 26 penerima beasiswa Grup APRIL telah bergabung di *Institute of Technology* di Thailand dan 60 penerima beasiswa telah bergabung di *Academy of Pulp & Paper Technology* di Indonesia. PT. RAPP juga terus menawarkan beasiswa pendidikan untuk studi di universitas daerah.

Grup APRIL (PT. RAPP) memiliki dua pusat pelatihan: *Asian Agri and APRIL Learning Institute* (AAALI) dan *APRIL Learning Institute* (ALI). Pusat-pusat pelatihan ini memiliki lingkungan yang kondusif dan infrastruktur yang lengkap untuk belajar bagi para karyawan. Kebutuhan pelatihan karyawan individu ditentukan oleh Pusat

Penilaian Grup APRIL (*Grup APRIL Assessment Centre*) yang melakukan pra-penilaian pada sebagian besar karyawan untuk menentukan kesenjangan kompetensi dan peluang pelatihan. Program pengembangan disesuaikan dengan individu kemudian dilaksanakan bersama-sama untuk karyawan melalui Rencana Pembangunan Individu.

Pencarian Bakat

Karyawan adalah aset terbesar PT. RAPP. PT. RAPP tidak hanya peduli pada karyawan saat ini, PT. RAPP sadar bahwa bertanggung jawab membina karyawan di masa depan. PT. RAPP terus berupaya untuk membangun tenaga kerja lokal agar meningkatkan pemahaman dan keahlian karena hal ini menambah kekuatan besar sebagai perusahaan. Setiap tahun APRIL menawarkan beasiswa untuk sekitar 40-50 lulusan SMA dari Akademi Teknologi Pulp Dan Kertas, Bandung dan Instiper, Yogyakarta yang menunjukkan minat bekerja dengan APRIL untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. PT. RAPP juga bekerja sama dengan Tanoto Foundation untuk memberikan Beasiswa Kejuaraan Regional (*Regional Champion Scholarships*) setiap tahun.

Kesejahteraan dan Manfaat bagi Karyawan

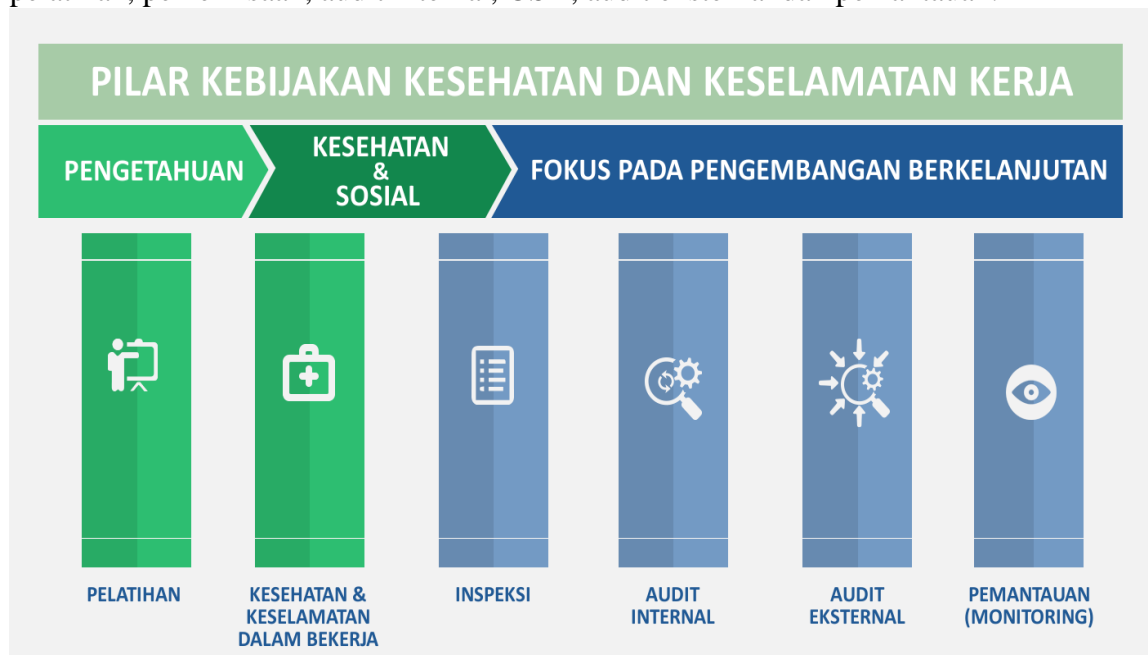
Karyawan PT. RAPP menjadi bagian dari keluarga besar Grup APRIL. PT. RAPP peduli terhadap kesejahteraan para karyawan serta keluarga mereka. Di Indonesia, PT. RAPP membangun fasilitas umum bagi karyawan PT. RAPP serta masyarakat setempat untuk membantu mengimbangi peningkatan standar hidup. Sebagian wilayah operasi PT. RAPP berada di lokasi terpencil yang memiliki akses layanan medis profesional yang tidak memadai. Untuk mengatasi tantangan ini, PT. RAPP menawarkan pemeriksaan kesehatan tahunan, klinik-klinik kesehatan di lokasi dan dana bantuan karyawan untuk membantu karyawan dan keluarga mereka jika mereka menderita penyakit kritis atau kecelakaan. Manfaat jaminan sosial lainnya seperti rencana pensiun dan asuransi jiwa serta asuransi kecelakaan juga diberikan kepada karyawan. Karyawan, termasuk ekspatriat, diberikan akomodasi atau tunjangan perumahan setiap bulan.

Pentingnya Pendidikan

PT. RAPP sangat percaya pada pentingnya pendidikan. Keluarga karyawan diberikan akses ke sekolah yang dikelola dengan standar yang diakui secara internasional, seperti dari *International Baccalaureate Primary Years Programme* dan *Cambridge International* tingkat A di daerah PT. RAPP beroperasi. Guru-guru berkualitas mengajar sekolah PT. RAPP dengan biaya-biaya yang disubsidi. Saat ini, PT. RAPP memberikan 150 beasiswa 100% dari SD hingga tingkat perguruan tinggi untuk anak-anak karyawan setiap tahunnya melalui Tanoto Foundation. Selain mensejahterakan karyawan yang menjadi prinsip dasar dalam pengembangan perusahaan untuk meningkatkan keunggulan komparatif dan daya saing perusahaan PT. RAPP juga menerapkan Budaya Kesehatan dan Keselamatan dalam berkerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

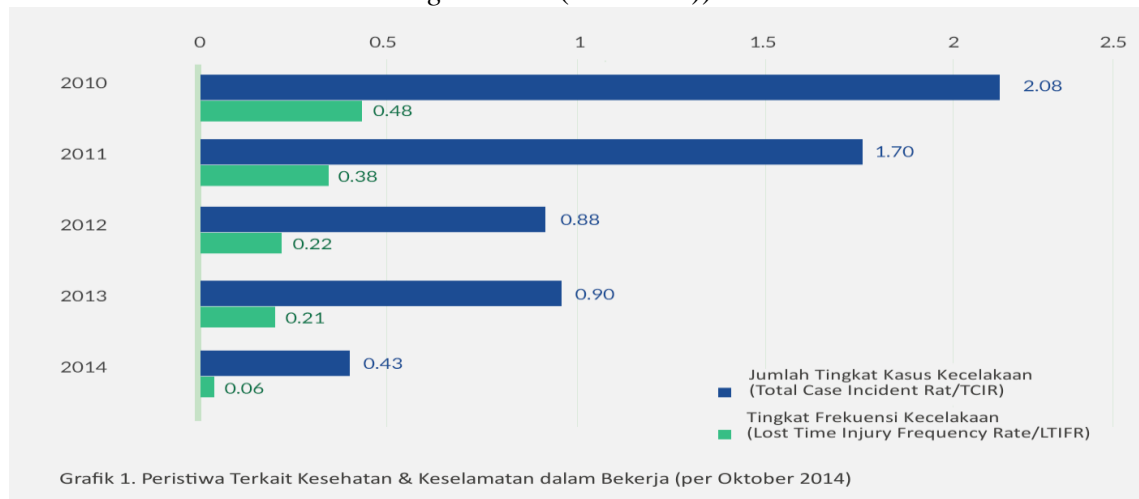
Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dan kehutanan dengan fasilitas industri yang besar, keselamatan adalah hal yang paling penting. tercermin dalam komitmen PT. RAPP untuk mencapai Budaya Keselamatan Total (*Total Safety Culture*). Bekerja di sektor kehutanan dapat membuat kita menjadi kotor, terancam bahaya dan berdebu, di mana masing-masing elemen ini memiliki risiko potensial terhadap kesehatan dan keselamatan karyawan. Risiko ini sering diperburuk oleh lokasi perkebunan. Kebijakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (OHS) Grup Asia Pacific Resources International Limited (APRIL) meningkatkan pemeliharaan lingkungan kerja

yang selamat, sehat dan aman bagi seluruh karyawan, kontraktor, konsumen dan pengunjung. Kebijakan ini adalah kerangka kerja holistik yang disokong oleh 6 pilar: pelatihan, pemeriksaan, audit internal, OSH, audit eksternal dan pemantauan.

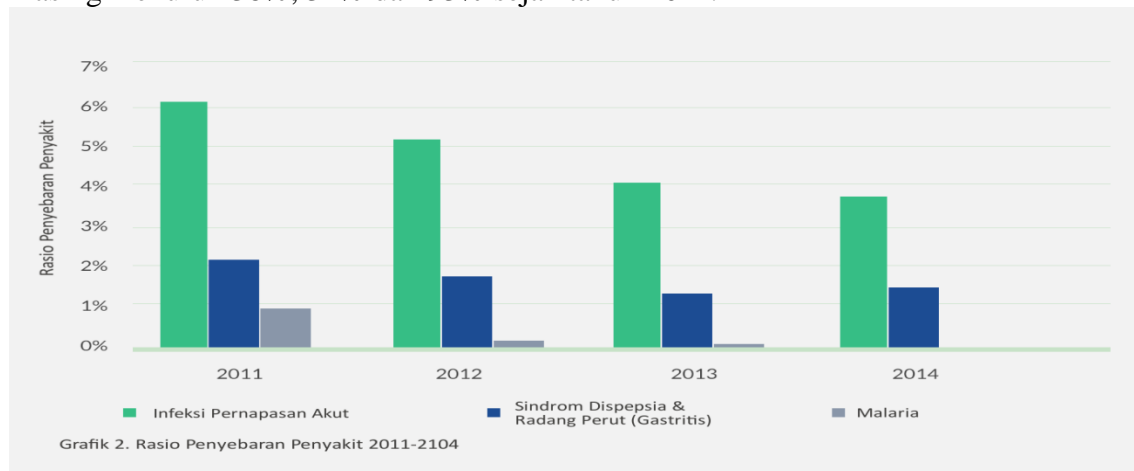


Masing-masing pilar memperkuat komitmen untuk perbaikan berkelanjutan di seluruh operasional PT. RAPP. Pilar pelatihan sangat penting dalam memastikan karyawan tidak hanya dilengkapi dengan pengetahuan yang berkaitan dengan keamanan dan kepatuhan, namun juga kesehatan, aspek sosial dan budaya pekerjaan mereka. Pemeriksaan, audit dan pemantauan memastikan PT. RAPP agar tetap fokus pada perbaikan yang berkelanjutan.

Di samping mengurangi potensi cedera, OHS meliputi strategi untuk mengurangi penyakit dan meningkatkan kesejahteraan karyawan, serta memantau fasilitas dan kualitas air untuk digunakan dan dikonsumsi masyarakat. Hal ini untuk memastikan setiap lokasi didukung oleh ambulans, dokter dan perawat serta kemampuan evakuasi medis dalam keadaan darurat. PT. RAPP juga telah menerapkan langkah-langkah pengukuran pencegahan yang lebih ketat dengan menggunakan sebuah sistem Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko dan Penentuan Kendali (*Hazard Identification, Risk Assessment dan Determining Control (HIRADC)*).



Pendekatan holistik untuk kesehatan dan keselamatan ini telah berhasil. Berdasarkan Total Case Incident Rate (Jumlah Tingkat Kasus Kecelakaan) – tolak ukur internal yang mengukur cedera dan ketidakhadiran di tempat kerja karena cedera terhadap total jam kerja tenaga kerja - telah menurun tajam sebesar 79% sejak tahun 2010, sebagaimana yang ditampilkan pada Gambar 1. Perbaikan yang signifikan telah dilakukan untuk tenaga kerja yang lebih sehat dengan penyediaan air bersih, perbaikan pemukiman dan fasilitas infrastruktur dan kunjungan lapangan oleh dokter perusahaan untuk memberikan edukasi kepada karyawan tentang kesehatan dan kebersihan. Sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 2, telah terjadi penurunan drastis pada persentase karyawan yang tertular infeksi saluran pernapasan atas, sindrom dispepsia dan gastritis serta malaria. Tingkat kejadian untuk tiga penyakit masing-masing menurun 38%, 31% dan 93% sejak tahun 2011.



Operasional perkebunan dan pabrik Grup APRIL telah disertifikasi di bawah Sistem Manajemen Kesehatan & Keselamatan OHSAS 18001 pada tahun 2005, yang mensyaratkan pemeriksaan tiga tahunan. PT. RAPP juga mengikuti prinsip sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Indonesia, Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja (SMK3). Pada tahun 2011, Grup APRIL berhasil melewati Audit OHSAS tiga tahunan dan pada tahun 2013, dianugerahi "Bendera Emas" dan sertifikat berdasarkan SMK3 yang mengakui keberhasilan pelaksanaan lebih dari 90% kriteria SMK3.



Gambar 3: Pengarahan keselamatan



Gambar 4: Kesadaran keselamatan



Gambar 5: Pelatihan pertolongan pertama



Gambar 6: Pemeriksaan dan pengawasan keselamatan

Grup APRIL (PT.RAPP) memegang teguh prinsip Free, Prior, Informed Consent (FPIC) dalam pelaksanaan operasionalnya di Indonesia. Grup APRIL (PT.RAPP) berupaya menyelesaikan konflik sosial yang ada secara adil dan transparan melalui keterbukaan dalam menerima saran dan masukan dari para pemangku kepentingan. Dan beberapa program pengembangan masyarakat PT. RAPP dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Pelibatan Masyarakat

Grup APRIL (PT. RAPP) terus melibatkan masyarakat sekitar tempat beroperasi. Selaras dengan prinsip Free Prior, Informed Consent (FPIC), Grup APRIL (PT.RAPP) melakukan peninjauan terkait kebutuhan masyarakat di sejumlah desa dan melaksanakan dialog untuk membahas pengelolaan lahan serta menjawab pertanyaan yang diutarakan oleh anggota komunitas lokal setempat. Tim Grup APRIL (PT.RAPP) juga secara berkala melakukan kunjungan dan bertemu dengan perwakilan berbagai desa sekitar.

Grup APRIL (PT.RAPP) menyadari bahwa dalam kegiatan yang melibatkan masyarakat, khususnya di Indonesia, adalah suatu hal yang kompleks mengingat setiap individu memiliki pandangan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, Grup APRIL (PT.RAPP) berupaya untuk mencapai musyawarah mufakat atau suara mayoritas warga desa sekitar wilayah konsensi Grup APRIL (PT.RAPP) sebelum mengambil langkah selanjutnya dalam pengelolaan lahan.

Penandatanganan suatu perjanjian dengan para pemimpin desa setempat menunjukkan komitmen Grup APRIL untuk mengakomodir kebutuhan warga desa sekitar. Dalam suatu perjanjian, pada umumnya, berisikan komitmen Grup APRIL (PT.RAPP) untuk berkontribusi pada pengembangan masyarakat terkait mata pencaharian, kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur termasuk pada bidang pertanian dan peternakan.



Jika terjadi perselisihan, Grup APRIL (PT.RAPP) memiliki proses penyelesaian sengketa yang baik dan transparan yang dirancang untuk mengatasi situasi secara wajar bagi semua pihak. Jika diperlukan, proses penyelesaian ini termasuk bekerja sama dengan pihak ketiga untuk membantu mediasi hasil yang adil.

2. Dampak Ekonomi

Sebagai sebuah perusahaan besar yang sukses, Grup APRIL secara konsisten memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian lokal, daerah, dan nasional. Hal tersebut terlihat dari hasil studi yang dilakukan oleh Unit Penelitian Ekonomi dan Sosial Universitas Indonesia sebagai berikut:



Berdasarkan gambar di atas maka dapat dijelaskan dalam melakukan pengembangan masyarakat PT. RAPP memiliki dampak ekonomi yang meningkat pada masyarakat sebesar 6,9 % dengan adanya pendapatan rumah tangga yang bertambah menjadi 5,4 % karena PT RAPP telah menciptakan lebih dari 5000 lapangan pekerjaan di Provinsi Riau dan secara tidak langsung menciptakan 90.000 kesempatan kerja bagi

masyarakat khususnya yang berada disekitar perusahaan. Selain itu dengan adanya PT RAPP ini juga berkontribusi terhadap pendapatan daerah provinsi Riau 2,29 kali lipat.

3. Penghidupan

Grup APRIL (PT. RAPP) terus berupaya untuk menciptakan lapangan kerja dan menawarkan berbagai pelatihan keterampilan yang dibutuhkan dalam rangka mendukung aktivitas mata pencaharian warga sekitar. Program-program tersebut meliputi:

a. Sistem Pertanian Terpadu (IFS)

IFS memiliki tujuan untuk meningkatkan keterampilan para petani setempat yang mencakupi tanaman hortikultural, perkebunan, peternakan, perikanan, dan pengembangan pengolahan padi. Grup APRIL memberikan berbagai pelatihan, fasilitas, dan dukungan teknis yang berkelanjutan kepada petani.

- Pada mulanya, IFS hanya menangani lahan pertanian desa seluas 170 hektar. Namun saat ini, IFS telah berkembang hingga 2.400 hektar;
- 1.618 rumah tangga telah menerima bantuan untuk bahan pertanian;
- 566 petani telah mengikuti pelatihan dan seluas 4.845 hektar lahan pertanian telah dibudidayakan melalui program dan pusat pelatihan IFS; dan
- 2 pusat pelatihan telah didirikan dan dikelola untuk memberikan pengetahuan teknis dan praktis kepada petani lokal, termasuk sebuah pusat pelatihan yang disumbangkan ke pemerintah kabupaten setempat.

b. Masyarakat Petani Serat

Pada umumnya, pemilik lahan akan melakukan pembalakan liar untuk mengolah lahannya tersebut. Program Masyarakat Petani Serta bertujuan untuk mendorong kerja sama kemitraan dengan pemilik tanah untuk membangun perkebunan Acacia yang kemudian dikelola oleh mereka sendiri. Pada konteks ini, Grup APRIL memberikan bantuan pembiayaan, pembibitan dan pemupukan, serta pemeliharaan perkebunan.

- 28.384 hektar telah dideikasikan untuk masyarakat petani serat.
- US\$1.200 diinvestasikan pada setiap hektar tanaman.
- 30-35 kesempatan pekerjaan tercipta untuk setiap 100 hektar tanaman.

c. Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Grup APRIL meluncurkan program pengembangan UKM dengan tujuan membantu pengusaha dalam hal bantuan teknis dan finansial. Program ini menargetkan pada bisnis baik yang secara langsung mendukung maupun tidak mendukung operasional Grup APRIL.

- Grup APRIL secara konsisten membantu 189 pengusaha secara langsung untuk mendukung kegiatan operasionalnya.
- Menciptakan 1.600 lapangan pekerjaan.

Grup APRIL juga memberikan sejumlah pelatihan keterampilan khusus seperti menjahit, salon, memasak, pengolahan dan produksi madu, pemotongan kayu, dan otomatis.

4. Pendidikan, Kesehatan & Infrastruktur

Grup APRIL percaya bahwa akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur adalah kunci utama untuk mengentaskan kemiskinan. Oleh karena itu, Grup APRIL (PT.RAPP) secara konsisten berupaya berkontribusi kepada masyarakat sekitar tempat Grup APRIL (PT.RAPP) beroperasi, meliputi:

a. Pendidikan

Dalam rangka membantu masyarakat dalam mendapatkan akses pendidikan, Grup APRIL (PT.RAPP) memberikan sejumlah program beasiswa mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, pelatihan guru, dan menyediakan fasilitas dan peralatan sekolah.

- Memberikan 17.613 beasiswa kepada siswa sekolah dasar dan menengah;
- Menawarkan 50 beasiswa untuk lulusan sekolah menengah setempat untuk melanjutkan studi pertanian strata 1 di INSTIPER;
- Membantu renovasi dan pengembangan 219 sekolah di daerah pedesaan sejak tahun 1999; dan,
- Mensponsori pelatihan untuk 600 guru sejak tahun 2009 hingga 2012.

b. Kesehatan

Grup APRIL (PT.RAPP) berkomitmen untuk meningkatkan akses dan pelayanan kesehatan di daerah pedesaan, yang mayoritas masih berada di luar jangkauan pemerintah. Program ini memiliki dua pendekatan, pendidikan kesehatan yang menargetkan sekolah-sekolah, dan bantuan kepada petugas kesehatan di desa setempat. Grup APRIL (PT.RAPP) juga mensponsori program suplemen nutrisi untuk ibu dan bayi di wilayah pedesaan.

- Sejak 1999-2012, sebanyak 132.716 warga telah merasakan manfaat dari program kesehatan Grup APRIL (PT.RAPP); dan,
- Sejak 2011-2012, Grup APRIL (PT.RAPP) juga telah menjalankan 25 kampanye kesehatan

c. Infrastruktur

Sebagai upaya menyediakan akses transportasi dan fasilitas yang lebih baik, Grup APRIL (PT.RAPP) telah membangun sejumlah infrastruktur dan memperbaiki fasilitas untuk menunjang kegiatan masyarakat.

- Membangun 178 tempat ibadah dan sekolah agama, 96 sekolah negeri, dan 17 fasilitas olahraga;
- Berkomitmen dalam pembangunan 30 fasilitas kesehatan, air dan sanitasi; dan,
- Menyediakan 98 generator listrik.

5. Tonoto Foundation

Tanoto Foundation berkomitmen untuk menjadi pelopor dalam pengentasan kemiskinan melalui program pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kualitas hidup. Tanoto Foundation didirikan dengan berlandas keyakinan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi diri. Sejalan dengan prinsip ini, Tanoto Foundation berupaya berkontribusi untuk mengentaskan kemiskinan, dengan bekerja sama dengan masyarakat untuk mengatasi akar penyebab kemiskinan di daerah pedesaan Provinsi Sumatera Utara, Riau, dan Jambi.

Upaya Tanoto Foundation untuk mengurangi angka kemiskinan kemudian berlandas pada keyakinan bahwa solusi terbaik untuk mengentaskan kemiskinan berada di tangan generasi masa depan. Hal ini mendorong Tanoto Foundation untuk berfokus pada aspek pendidikan dan pemberdayaan. Secara lebih spesifik, Tanoto Foundation berfokus pada sejumlah program inovatif yang bertujuan membangun kapasitas dan pemberdayaan masyarakat, pemberian pelatihan keterampilan dan praktikal. Meskipun sebagian besar program-program Tanoto Foundation dilaksanakan di sejumlah daerah pedesaan di Pulau Sumatera, namun Grup APRIL (PT.RAPP) juga berkomitmen untuk menjalankan berbagai program tersebut di seluruh daerah di Indonesia.

Sebagai contoh, terdapat beberapa program di bidang pendidikan yang telah Grup APRIL (PT.RAPP) lakukan, seperti pemberian beasiswa pendidikan untuk semua tingkat dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, pelatihan guru, pendirian TK, SD, dan SMP, serta penyediaan buku dan perlengkapan kegiatan belajar mengajar. Pada tingkat perguruan tinggi sendiri, Tanoto Foundation telah memberika dana kepada sejumlah profesor di berbagai universitas untuk kegiatan penelitian di bidang kesehatan, energi terbarukan, dan kehutanan. Selain itu, Tanoto Foundation juga bekerja sama dengan berbagai perguruan tinggi di Indonesia dan luar negeri untuk meningkatkan kualitasnya sebagai pusat pendidikan tinggi. Di Kota Pangkalan Kerinci, Tanoto Foundation bermitra dengan Grup APRIL (PT.RAPP) dalam berkoordinasi dan menjalankan program-program yang dimilikinya, termasuk pemberian beasiswa, bantuan kepada sekolah-sekolah, dan pelayanan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat di simpulkan bahwa dalam melakukan pengembangan masyarakat di kabupaten Pelalawan PT. RAPP melakukan dengan melalui program CSR yang mereka kenal dengan program pengembangan Masyarakat melakukan kegiatan kegiatan yang memperhitungkan pelibatan masyarakat, dampak ekonomi, penghidupan dengan program IFS, Masyarakat Petaniserat dan UKM, Pendidikan , Kesehatan dan Infrastruktur. Jadi tidak terlepas kemungkinan dengan menggunakan dana CSR mempercepat pembangunan yang ada disuatu daerah.

KEPUSTAKAAN

- Mapisangka, A. (2009). Implementasi CSR terhadap Kesejahteraan Hidup Masyarakat. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, 1*(1).
- Pranoto, A. R., & Yusuf, D. (2014). Program CSR Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Menuju Kemandirian Ekonomi Pasca Tambang di Desa Sarijaya. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 18*(1), 39-50.
- Rasyid, A., Saleh, A., Cangara, H., & Priatna, W. B. (2015). Komunikasi dalam CSR Perusahaan: Pemberdayaan Masyarakat dan Membangun Citra Positif. *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan, 31*(2), 507-518.
- Triyono, A. (2014). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Community Development Program Posdaya (Pos Pemberdayaan Keluarga) Pt. Holcim Indonesia Tbk Pabrik Cilacap.
- Rasyid, A., Saleh, A., Cangara, H., & Priatna, W. B. (2015). Komunikasi dalam CSR Perusahaan: Pemberdayaan Masyarakat dan Membangun Citra Positif. *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan, 31*(2), 507-518.
- Wedayanti, M. D. (2017). Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau (Studi Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar PT. Tamora Agro Lestari Desa Serosah Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi). *PUBLIKA, 3*(1), 154-167.

Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Riau dengan Pendekatan Kemiskinan Multi Dimensi (*Multidimension Poverty Approach*)

Hasan Warso

Program Magister Ilmu Administrasi FISIP Universitas Riau

Abstrak

Program Studi Magister Ilmu Administrasi, FISIP Universitas Riau Provinsi Riau merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki isu kemiskinan yang perlu dituntaskan. Berdasarkan Data BPS terakhir 2018, jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau sampai dengan Maret 2018 adalah sebanyak 500,44 ribu jiwa atau sebesar 7,39 persen dari total penduduk Riau. Jika dibandingkan dengan posisi Maret 2017 yang berjumlah 514,62 ribu jiwa atau sebesar 7,78 persen, maka terjadi penurunan penduduk miskin sebanyak 14,18 ribu jiwa atau turun sebesar 2,76 persen. Maksud dan tujuan penulisan laporan ini adalah dalam rangka mengidentifikasi dan mengetahui permasalahan kemiskinan serta melihat sejauhmana pendekatan *Multidimensional Poverty Approach* (MPA) dapat diintegrasikan kedalam SDGs sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap upaya-upaya penanggulangan kemiskinan di Provinsi Riau. Kajian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendekatan kemiskinan multi dimensi (MPA) dapat membantu mendefinisikan kemiskinan itu sendiri secara lebih komprehensif sehingga langkah-langkah yang diambil untuk pengurangan kemiskinan itu sendiri lebih menyeluruh dan integratif. Disisi lain SDGs telah menetapkan indikator-indikator capaian yang lebih holistik dan komprehensif, sehingga dengan mengintegrasikannya dengan MPA diharapkan rekomendasi terhadap penanggulangan kemiskinan tersebut lebih tepat sasaran dan terukur. Ketersediaan penyediaan pelayanan publik seperti fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan air bersih, pelayanan perumahan dan pelayanan administrasi umum merupakan indikator-indikator utama dalam SDGs yang menjadi kewajiban bagi stakeholder (pemerintah dan non pemerintah) untuk mewujudkannya.

Kata Kunci: Pengentasan Kemiskinan, Pendekatan Kemiskinan Multidimensi.

Abstract

Administrative Studies Master Program, FISIP University of Riau, Riau Province is one of the regions in Indonesia that has poverty issues that need to be resolved. Based on the latest BPS data in 2018, the number of poor people in Riau Province as of March 2018 was 500.44 thousand people or 7.39 percent of the total population of Riau. If compared to the position in March 2017, which amounted to 514.62 thousand people or 7.78 percent, there was a decrease in the poor population of 14.18 thousand people or decreased by 2.76 percent. The purpose and purpose of writing this report is to identify and identify poverty problems and see the extent to which the Multidimensional Poverty Approach (MPA) approach can be integrated into the SDGs so that it can contribute to poverty reduction efforts in Riau Province. This study uses qualitative research methods. The results of the study show that the multi-dimensional poverty approach (MPA) can help define poverty itself more comprehensively so that the steps taken to reduce poverty are more comprehensive and comprehensive. On the other hand SDGs have applied more holistic and comprehensive performance indicators, so that by integrating them with the MPA it is hoped that the recommendations on poverty reduction are more targeted and measurable. The availability of public services such as education facilities, health services, clean water services, housing services and general administrative services are the main indicators in the SDGs which are an obligation for stakeholders (government and non-government) to make it happen.

Keywords: Poverty Alleviation, Multidimensional Poverty Approach.

PENDAHULUAN

Percepatan penanggulangan kemiskinan merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk mempercepat penanganan kemiskinan bersama-sama dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Adanya campur tangan dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diharapkan dapat mempercepat penanggulangan kemiskinan mengingat permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan dasar dalam

kehidupan masyarakat. Dengan adanya konsep SDGs diharapkan dapat memberikan warna dalam upaya pengentasan kemiskinan lebih dari pada itu SDGs menggunakan *Multidimension Poverty Approach* (MPA).

Keterlibatan Indonesia dalam SDGs (Sustainable Development Goals) merupakan sebuah komitmen pemerintah untuk menjalankan program pembangunan berkelanjutan yang telah menjadi agenda pembangunan dunia yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia dan planet bumi. SDGs ini diterbitkan pada tanggal 21 Oktober 2015 menggantikan perogram sebelumnya yaitu MDGs (Millennium Development Goals) sebagai tujuan pembangunan bersama sampai tahun 2030 yang disepakati oleh banyak negara dalam forum resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Secara resmi 193 negara anggota PBB mengadopsi secara aklamasi dokumen berjudul *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. Sebagai konsekuensi kesepakatan tersebut Indonesia bersama dengan negara-negara lain di dunia hanya memiliki waktu selama 15 tahun sejak tahun 2015 untuk bisa mencapai manifesto SDGs. Tentu saja dalam upaya mencapai agenda SDGs tersebut pemerintah perlu mengintegrasikan tujuan-tujuan SDGs dalam perencanaan pembangunan pada setiap level pemerintahan, untuk itu perlu adanya penyelerasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

SDGs mempunyai 17 tujuan dengan 169 target, dimana tujuan dan target-target dari SDGs ini bersifat global serta dapat diaplikasikan secara universal yang dipertimbangkan dengan berbagai realitas nasional, kapasitas serta tingkat pembangunan yang berbeda dan menghormati kebijakan serta prioritas nasional. Salah satu tujuan utama SDGs adalah untuk pengentasan kemiskinan tidaklah berdiri sendiri, perlu adanya implementasi yang dilakukan secara terpadu. Pada level pemerintah daerah SDGs tentu saja perlu diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), selanjutnya untuk mengimplementasikan SDGs maka sebagaimana amanat Perpres Nomor 59 Tahun 2017 masing-masing pemerintah daerah harus menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) yang juga selaras dengan Rencana Aksi Nasional (RAN) SDGs.

Mengacu pada latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan diangkat dalam tulisan ini adalah: a) Bagaimana gambaran kemiskinan masyarakat di Provinsi Riau? b) Bagaimana konsep pendekatan Multidimensional Poverty Approach (MPA) memandang kemiskinan di Provinsi Riau? dan c) Bagaimana mengintegrasikan SDGs dengan Multidimensional Poverty Approach (MPA) dalam upaya-upaya penanggulangan kemiskinan di Provinsi Riau? Adapun maksud dan tujuan penulisan laporan ini adalah dalam rangka mengidentifikasi dan mengetahui permasalahan kemiskinan serta melihat sejauhmana pendekatan *Multidimensional Poverty Approach* (MPA) dapat diintegrasikan kedalam SDGs sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap upaya-upaya penanggulang kemiskinan di Provinsi Riau. Selanjutnya dengan identifikasi permasalahan ini akan coba dianalisa sehingga dapat menghasilkan masukan dan rekomendasi langkah-langkah yang dapat diambil oleh pemerintah dan non pemerintah untuk dapat memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan pengentasan kemiskinan diprovinsi Riau.

Kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana seseorang merasa tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Beberapa pendapat ahli seperti Ritonga (2003:1) memberikan definisi bahwa kemiskinan adalah kondisi kehidupan yang serba

kekurangan yang dialami seorang atau rumah tangga sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal atau yang layak bagi kehidupannya, sedangkan Sen (1997); 2 Alkire (2015) menunjukkan bahwa penyebab kemiskinan justru bersifat multidimensional. Artinya banyak faktor diluar kemampuan untuk konsumsi yang mampu membuat seseorang menjadi miskin.

Pengertian kemiskinan antara satu Negara dengan Negara lain juga berbeda. Karena itu, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) membuat kriteria kemiskinan, agar dapat menyusun secara lengkap pengertian kemiskinan sehingga dapat diketahui dengan pasti jumlahnya dan cara tepat menanggulangi kemiskinan tersebut. BPS mendefinisikan kemiskinan dengan membuat kriteria besarnya pengeluaran per orang per hari sebagai bahan acuan. Dalam konteks itu, pengangguran dan rendahnya penghasilan menjadi pertimbangan untuk penentuan kriteria tersebut. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan.

Michael. P Todaro (1997) dalam buku *Economic Development* menyatakan bahwa variasi kemiskinan dinegara berkembang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: (1) perbedaan geografis, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan, (2) perbedaan sejarah, sebagian dijajah oleh Negara yang berlainan, (3) perbedaan kekayaan sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusianya, (4) perbedaan peranan sektor swasta dan negara, (5) perbedaan struktur industri, (6) perbedaan derajat ketergantungan pada kekuatan ekonomi dan politik negara lain dan (7) perbedaan pembagian kekuasaan, struktur politik dan kelembagaan dalam negeri.

Pada dasarnya definisi kemiskinan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu:

- a. Kemiskinan absolut
Kemiskinan yang dikaitkan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan yang hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk hidup secara layak. Dengan demikian kemiskinan diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasarnya yakni makanan, pakaian dan perumahan agar dapat menjamin kelangsungan hidupnya.
- b. Kemiskinan relatif
Kemiskinan dilihat dari aspek ketimpangan sosial, karena ada orang yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya tetapi masih jauh lebih rendah dibanding masyarakat sekitarnya (lingkungannya). Semakin besar ketimpangan antara tingkat penghidupan golongan atas dan golongan bawah maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dapat dikategorikan miskin, sehingga kemiskinan relatif erat hubungannya dengan masalah distribusi pendapatan.

Pendekatan Multi Dimensi (MPA)

Multidimension Poverty Approach (MPA) adalah pendekatan yang memandang kemiskinan yang dilihat dari beberapa dimensi seperti kondisi kesehatan yang buruk, kurangnya pendidikan, standar hidup yang tidak memadai, kurangnya pendapatan, ketidakberdayaan, kualitas kerja yang buruk dan ancaman dari kekerasan. Pendekatan multidimensional dapat menggabungkan berbagai indikator untuk menangkap kompleksitas kemiskinan, dengan demikian maka kebijakan pengentasan kemiskinan dapat dikeluarkan dengan lebih baik.

Penggunaan pendekatan multidimensional terhadap kemiskinan disebabkan kerap kali satu faktor saja tidak cukup baik menggambarkan kondisi kemiskinan itu sendiri, sebagai contoh pertumbuhan ekonomi telah kuat di India dalam beberapa tahun terakhir, tetapi sebaliknya prevalensi kekurangan gizi anak masih tetap tinggi di angka hampir 50 persen, dan merupakan salah satu angka tertinggi di seluruh dunia. (*Drèze and Sen (2013), An Uncertain Glory: India dan Kontradiksinya. Princeton University Press*).

Dengan menggunakan pendekatan MPA, maka kita dapat memasukan ukuran kemiskinan multidimensi sebagai rangkaian indikator yang menangkap kompleksitas fenomena ini untuk menginformasikan kebijakan yang bertujuan mengurangi kemiskinan dan kekurangan di suatu negara. Bergantung pada konteks suatu negara dan tujuan pengukuran, berbagai indikator dapat dipilih untuk mencerminkan kebutuhan dan prioritas suatu negara, serta daerah, kabupaten, provinsi, dan konstituennya.

Sustainable Development Goals (SDGs)

Sustainable Development Goals (SDGs) / Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan agenda pembangunan global periode 2016-2030 sebagai transformasi *Millenium Development Goals (MDGs)* untuk menjangkau kelompok masyarakat yang sangat rentan. SDGs meneruskan prioritas-prioritas pembangunan MDGs yang meliputi penanggulangan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, dan gizi, serta tujuan-tujuan yang lebih luas dari ekonomi, sosial dan lingkungan. SDGs juga menjanjikan masyarakat yang lebih damai dan inklusif, sehingga keterlibatan pihak-pihak atau yang lebih dikenal dengan platform merupakan keharusan dalam implementasi SDGs.

SDGs mempunyai 17 tujuan dengan 169 target, dimana tujuan dan target-target dari SDGs ini bersifat global serta dapat diaplikasikan secara universal dimana masing-masing negara dapat menterjemahkan masing-masing tujuan dan target global tersebut. Berdasarkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tujuan dari SDGs (Sustainable Development Goals) adalah sebagai berikut:

• **Pilar Sosial**

1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun.
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.
3. menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.
4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan

• **Pilar Lingkungan**

1. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua
2. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua
3. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya
4. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan
5. Melindungi, merotasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosisten daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan,

memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati

6. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan

- **Pilar Ekonomi**

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua
2. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.
3. Mengurangi kesenjangan intra dan antar Negara
4. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan
5. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

- **Pilar Hukum dan Tata Kelola**

Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan

Di tingkat daerah implementasi SDGs diformulasikan ke dalam rencana aksi daerah (RAD) yang penyusunannya dilakukan secara bersama-sama antara Gubernur dan Bupati/Walikota dengan melibatkan seluruh aktor pembangunan antara lain organisasi masyarakat, pelaku usaha, filantropi, akademisi, dan pihak terkait lainnya. Seluruh aktor pembangunan yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.187/II/2017 telah bekerja bersama didukung oleh UNDP dan Tanoto Foundation dalam mengintegrasikan SDGs dalam perencanaan pembangunan Provinsi Riau.

Pendekatan partisipatif dan inklusif yang merupakan prinsip pelaksanaan TPB/SDGs telah dilakukan dalam setiap tahapan penyusunan draft RAD TPB/SDGs. Dalam draft RAD telah melibatkan Kabupaten/Kota yang memiliki peran sangat penting dalam pencapaian SDGs sebagai ujung tombak pelaksanaan pembangunan terutama dalam penyediaan pelayanan publik yang berhadapan langsung dengan pemenuhan hak warga negara.

METODE

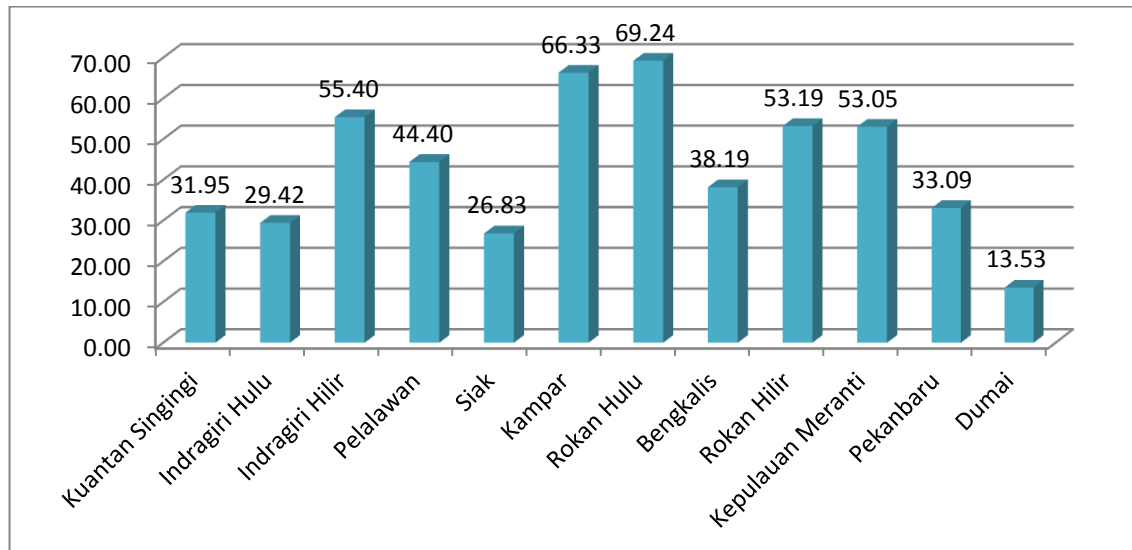
Untuk menjawab permasalahan di atas maka metodologi penelitian yang digunakan adalah metodologi penelitian kualitatif, metode penelitian kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana mengintegrasikan pendekatan kemiskinan multidimensi (MPA) dan SDGs kedalam perencanaan dan pengentasan kemiskinan di Provinsi Riau sebagaimana tujuan ambisius SDGs yaitu “tanpa kemiskinan” yang harus dicapai pada tahun 2030. SDGs secara terstruktur akan menjadi warna dari pada implementasi pembangunan daerah dimana indikator-indikator SDGs khususnya pada goal pertama akan diadopsi menjadi indikator keberhasilan dalam pelaksanaan program.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Kemiskinan Provinsi Riau

Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Provinsi Riau pada Bulan

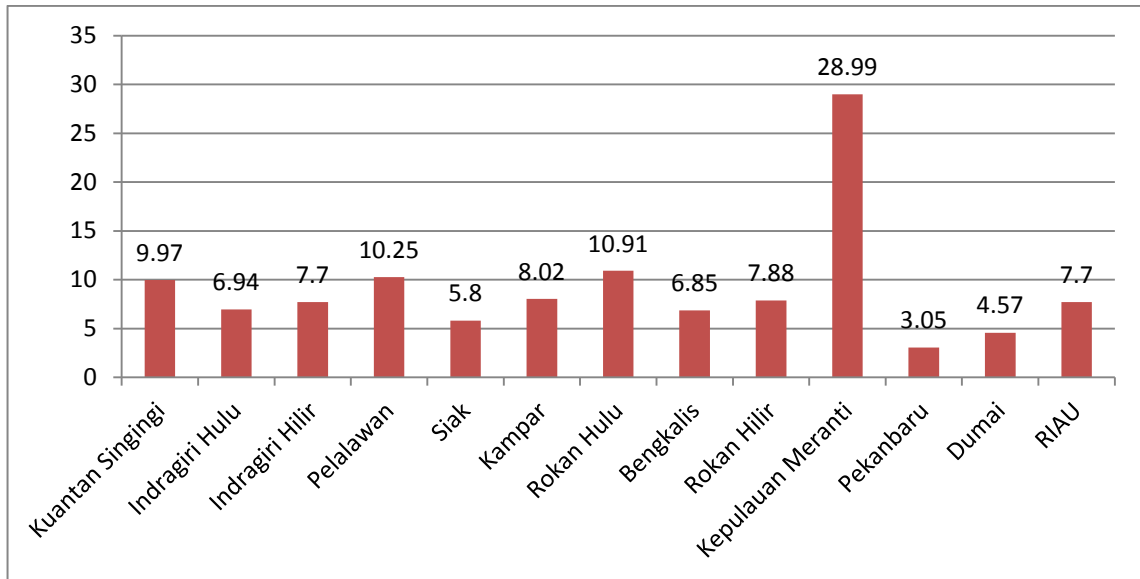
September 2018 sebanyak 494,26 ribu jiwa. Terjadi penurunan jumlah penduduk miskin dibandingkan dengan kondisi September 2017 sebesar 2,13 ribu jiwa, penduduk miskin tersebut tersebar di 12 kabupaten/kota. Penduduk miskin terbanyak berada Kabupaten Rokan Hulu dengan jumlah 69.240 jiwa, disusul Kabupaten Kampar sebanyak 66.330 dan Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 55.400 jiwa, grafik berikut akan menggambarkan penyebaran kemiskinan di Provinsi Riau.



Grafik. 1 Penyebaran Penduduk Miskin Provinsi Riau Tahun 2017

Sumber: BPS, data diolah 2018.

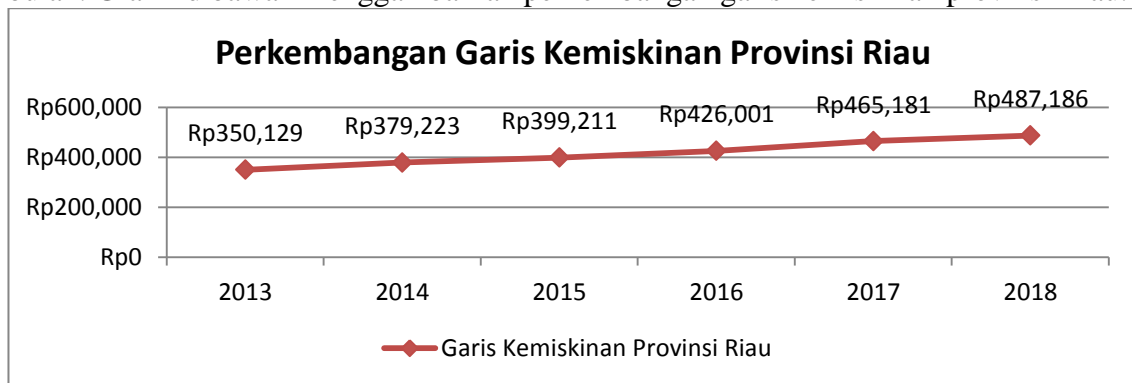
Berbeda dengan tahun 2015, jumlah penduduk miskin terbesar yang sebelumnya ada di kabupaten Kampar, saat ini telah digeser oleh Kabupaten Rokan Hulu, namun demikian kab Kampar tetap menempati peringkat kedua mengingat jumlah penduduk yang cukup besar di kabupaten Kampar. Jika dilihat dari tingkat kemiskinan yaitu dengan membandingkan persentasi penduduk miskin terhadap jumlah penduduk maka kabupaten Kepulauan Meranti adalah kabupaten dengan tingkat kemiskinan terparah yaitu 28,99% jauh diatas rata-rata tingkat kemiskinan provinsi Riau yaitu 7,7%. Berikut ditampilkan grafik tingkat kemiskinan di Provinsi Riau.



Grafik. 2 Tingkat Kemiskinan di Provinsi Riau Tahun 2017 (%)

Sumber: BPS, data diolah

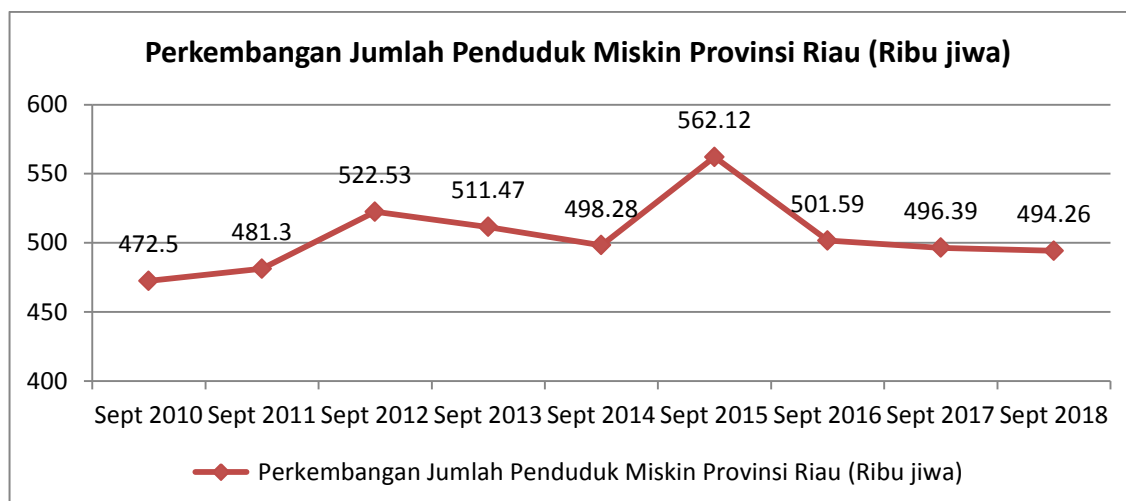
Dinamika perkembangan penduduk miskin di Provinsi Riau sangat dipengaruhi beberapa faktor antara lain pertumbuhan ekonomi, inflasi dan tingkat perpindahan penduduk baik emigrasi maupun imigrasi. Inflasi sangat terkait dengan garis kemiskinan, hal ini disebabkan pengaruh kenaikan harga barang dan kemampuan daya beli masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut garis kemiskinan provinsi Riau meningkat tiap tahunnya, pada September 2018 sebesar Rp. 487.146,- per kapita per bulan, meningkat 4,72 persen dari September 2017 yang sebesar Rp.465.181,- per kapita per bulan. Grafik dibawah menggambarkan perkembangan garis kemiskinan provinsi Riau.



Grafik. 3 Perkembangan Garis Kemiskinan di Provinsi Riau (Rp.)

Sumber: BPS, data diolah

Tingginya tingkat imigrasi ke provinsi Riau terutama dari provinsi tetangga Sumatera Utara dan Sumatera Barat menyebabkan pertumbuhan jumlah penduduk yang cukup pesat, banyaknya pendatang dengan tingkat pendidikan rendah dan tidak memiliki keahlian menyebabkan bertambahnya pengangguran, disisi lain intrusi penduduk akan menyebabkan persaingan terhadap sumber daya alam, faktor-faktor tersebut pada akhirnya juga akan memperparah tingkat kemiskinan di Provinsi Riau. Perkembangan jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau dapat dilihat dalam grafik berikut.



Grafik. 3 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Riau Tahun 2010-2018
 Sumber: BPS, data diolah

B. Pendekatan Multi Dimensi (MPA) Dalam Pengentasan Kemiskinan Provinsi Riau

Secara garis besar para ahli membagi dua pendekatan dalam mengukur kemiskinan yaitu pendekatan moneter dan pendekatan non moneter. Pendekatan moneter dengan memasukan unsur pendapatan perkapita, pengeluaran konsumsi perkapita, dan garis kemiskinan sebagai indikator yang dinilai, sedangkan pendekatan non moneter bersifat lebih luas dan lengkap dengan memasukan pendekatan kemampuan, pendekatan partisipatif, pendekatan sosial, indikator kesehatan, indikator pendidikan dan lingkungan dalam analisisnya.

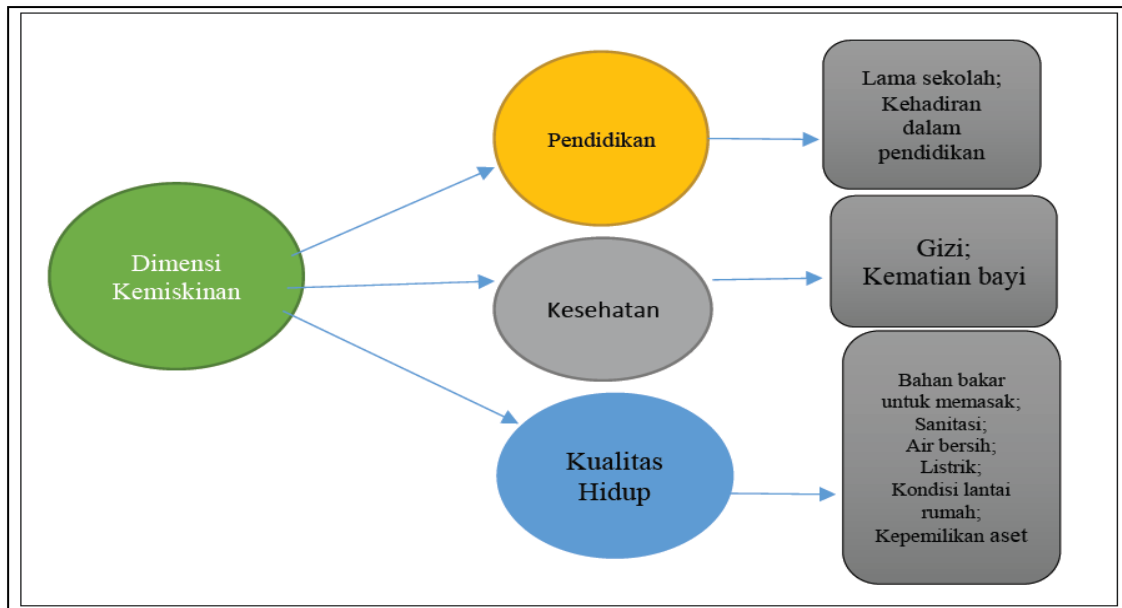
Selama ini kerap kali perhitungan kemiskinan hanya menggunakan indikator pendapatan dan pengeluaran konsumsi (*monetary poverty*). Sen (2000); Diaz (2003) menganggap metode tersebut hanya memotret sedikit dari banyaknya persoalan kemiskinan. Persoalan kemiskinan tidak hanya menyangkut daya beli namun lebih luas seperti keterbatasan akses pada pendidikan, kesehatan dan hidup yang layak (Wardhana, 2010; Budiantoro dkk, 2013; Tsui, 2002).

Kekurangan pendekatan moneter adalah karena tidak memasukan dimensi lain selain pendapatan dan konsumsi, padahal dimensi lain seperti pendidikan, kesehatan, dan standar hidup juga penting untuk dianalisis. Langkah-langkah kemiskinan berbasis moneter bisa sangat tidak tepat. Penelitian telah mengungkapkan bahwa tumpang tindih antara ukuran kemiskinan moneter dan non-moneter tidak sempurna. Dalam kebanyakan kasus, tidak semua individu yang miskin pendapatan adalah miskin multidimensial dan tidak semua individu miskin multidimensi adalah miskin pendapatan. Analisa kemiskinan moneter dan non-moneter diperlukan untuk memberikan informasi yang lebih baik tentang kebijakan yang dimaksudkan untuk mengatasi kebutuhan dan perampasan yang dihadapi oleh populasi miskin (Alkire, 2007).

Semakin banyak informasi yang relevan dengan kebijakan tentang kemiskinan, para pembuat kebijakan yang dilengkapi dengan lebih baik akan mengurangnya. Sebagai contoh, suatu daerah di mana sebagian besar orang kehilangan pendidikan membutuhkan strategi pengentasan kemiskinan yang berbeda dari daerah di mana kebanyakan orang kekurangan dalam kondisi perumahan. Beberapa metode untuk pengukuran multidimensi, seperti metode Alkire-Foster, dapat digunakan dalam

menganalisa kemiskinan. Selain mengukur kemiskinan dan kesejahteraan, metode Alkire-Foster dapat diadaptasi untuk menargetkan layanan dan transfer tunai bersyarat atau untuk memantau kinerja program.

Pendekatan kemiskinan multi dimensi melihat kemiskinan dalam dimensi yang terintegrasi dengan menggunakan 3 dimensi (pendidikan; kesehatan; dan kualitas hidup) dan menggunakan 10 indikator dalam melihat kondisi penduduk miskin, sepuluh indikator tersebut adalah lama sekolah; Kehadiran dalam pendidikan; gizi; kematian bayi; bahan bakar untuk memasak; sanitasi; air bersih; listrik; kondisi lantai rumah; dan kepemilikan aset. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada ilustrasi grafik berikut;



Grafik. 4 Pendekatan Kemiskinan Multidimensi

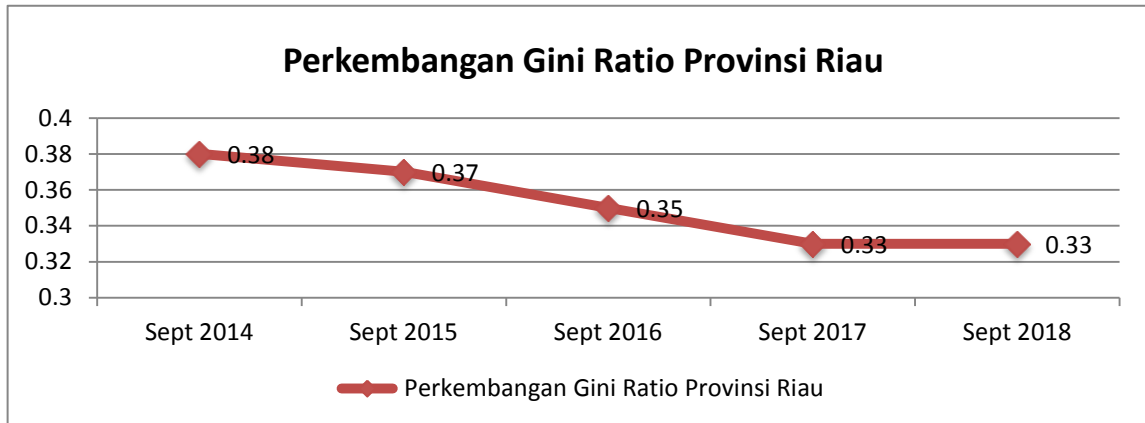
Sumber: Sri Endang Cornita, *Paparan Workshop Penyusunan Kerangka Kerja Percepatan SDGs Bidang Kemiskinan Tahun 2018*

Dengan menggunakan pendekatan multidimensi dalam pengentasan kemiskinan di Provinsi Riau maka dapat diidentifikasi keterkaitan determinan kemiskinan (berdasarkan bidang) kemiskinan (masalah pokok kemiskinan) dalam bidang-bidang yang berhubungan dengan kondisi umum kemiskinan. Determinan kemiskinan tersebut dapat dikelompokkan dalam beberapa bidang:

1. Bidang pendidikan.
2. Bidang kesehatan.
3. Bidang infrastruktur (prasarana) dasar.
4. Bidang ketenagakerjaan dan kewirausahaan.
5. Bidang ketahanan pangan.

C. Integritasi Pendekatan Kemiskinan Multidimensi (MPA) Dengan SDGs Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Riau

Pertumbuhan ekonomi tidak akan selalu mengurangi kemiskinan atau kekurangan lainnya. Beberapa penelitian telah sering kali menemukan bahwa adanya pertumbuhan ekonomi namun kejadian kekurangan gizi anak atau kematian anak masih juga terjadi. Hal ini dimungkinkan mengingat ketidakmerataan pendapatan maupun kesejangan yang terjadi. Memahami hal tersebut SDGs mengemukakan prinsip *no one left behind* atau tidak ada satupun yang tertinggal dibelakang, sehingga dengan melibatkan pihak-pihak dalam pembangunan diharapkan kesenjangan dapat dikurangi. Grafik berikut menggambarkan perkembangan kesenjangan di Provinsi Riau yang diukur berdasarkan Gini Ratio.



Grafik. 5 Perkembangan Gini Ratio di Provinsi Riau

Sumber: BPS, data diolah

Pengentasan kemiskinan merupakan salah satu tujuan utama dalam pencapaian target SDGs, namun permasalahan yang masih mengganjal dalam upaya pengentasan kemiskinan di provinsi Riau selama ini adalah ketepatan prediksi dari tingkat kemiskinan. SDGs telah menetapkan tujuan dan indikator-indikator yang pasti dan terukur, kiranya indikator-indikator tersebut dapat dipakai dalam sudut pandang MPA dalam menganalisa kemiskinan di Provinsi Riau.

Secara prinsip SDGs mengkolaborasikan empat pilar bagi pengentasan kemiskinan yaitu pilar sosial, lingkungan, ekonomi dan hukum. Selanjutnya paradigma yang dibangun adalah bahwa perlu keterlibatan dan kemitraan semua pihak dalam pembangunan (pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat filantropi).

Selanjutnya dalam upaya pengentasan kemiskinan di Provinsi Riau, maka prioritas intervensi kebijakan Provinsi Riau dilakukan dengan menganalisis determinan kemiskinan (masalah pokok kemiskinan) dalam bidang-bidang yang berhubungan dengan kondisi umum kemiskinan. Determinan kemiskinan tersebut dapat dikelompokkan dalam beberapa bidang:

1. Bidang pendidikan.
2. Bidang kesehatan.
3. Bidang infrastruktur (prasarana) dasar.
4. Bidang ketenagakerjaan dan kewirausahaan.
5. Bidang ketahanan pangan.

Dengan menggunakan pendekatan multidimensi dalam pengentasan kemiskinan di Provinsi Riau maka dapat dilakukan pemetaan dan perbandingan antar jumlah penduduk miskin di desa selalu lebih besar dibanding dengan di kota. Beberapa

penyebab tingginya angka kemiskinan di desa antara lain, rendahnya tingkat pendidikan, ketiadaan kepemilikan lahan pertanian dan banyaknya anak dalam satu keluarga. Berbeda dengan pedesaan kemiskinan di perkotaan lebih disebabkan oleh sempitnya lowongan kerja dan rendahnya kualitas sumber daya manusia.

Memperhatikan hal tersebut maka pemerintah perlu mempertimbangkan arah dan strategi penanggulangan kemiskinan baik di desa maupun di perkotaan, mengingat hal ini membutuhkan dua pendekatan yang berbeda. Perlu juga dipahami bahwa kemiskinan adalah sesuatu hal yang bersifat multi dimensi, untuk itu diperlukan strategi dan kebijakan yang holistik multi sektor untuk penanggulangan kemiskinan tersebut.

Berdasarkan dokumen SPKD Provinsi Riau, maka strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah terhadap pemenuhan target pengentasan kemiskinan diarahkan pada:

1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin melalui pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar dan penciptaan peluang pekerjaan dengan pengembangan kewirausahaan dan pemenuhan kebutuhan pangan. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai kelanjutan pengentasan kebodohan dengan tujuan (a) mewujudkan daerah yang memiliki sumber daya manusia handal dengan produktifitas tinggi yang bermartabat dan berkeadilan, (b) meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, dengan strategi meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan, kesempatan berusaha, mendorong berkembangnya iklim pendidikan non formal yang berkualitas, membangun sarana dan prasarana pendidikan dan membangun sarana dan prasarana kesehatan.
2. Memperkuat keseimbangan pembangunan antar-wilayah sebagai kelanjutan pembangunan infrastruktur dengan tujuan (a) menyediakan infrastruktur wilayah yang mampu mendukung aktifitas sosial ekonomi masyarakat, (b) mewujudkan pemerataan dan kesimbangan pembangunan antar wilayah dengan strategi meningkatkan kondisi kualitas infrastruktur perkotaan, jalan dan jembatan, memelihara kawasan tangkapan air dan saluran irigasi, pemanfaatan sumber energi terbarukan di kawasan terpencil dan membangun infrastruktur pedesaan.
3. Meningkatkan pembangunan perekonomian berbasis potensi sumber daya daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui penguatan koperasi dan UKM sebagai kelanjutan pengentasan kemiskinan, dengan tujuan (a) meningkatkan daya beli masyarakat dan ketahanan pangan melalui pengembangan aktifitas ekonomi berbasis potensi lokal, (b) mendayagunakan sumber daya pertambangan dan energi (fosil dan terbarukan), kehutanan dan pertanian dengan cerdas, arif, dan bijaksana untuk kepentingan masyarakat, (c) meningkatkan kesetaraan gender dalam kesempatan berusaha, (d) menumbuhkan kembangkan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan koperasi yang profesional, dengan strategi mendorong pembangunan kawasan agropolitan serta peningkatan ketahanan pangan, mendorong tumbuhnya agro teknologi, meningkatkan kerjasama pengelolaan sumber daya alam untuk pembangunan masyarakat, meningkatkan kerjasama perdagangan, membina kelompok usaha wanita mandiri, mendorong minat koperasi dalam pengembangan ekonomi sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan serta memfasilitasi kerjasama jaringan usaha koperasi dan UMKM.
4. Meningkatkan peran masyarakat dan kelembagaan di pedesaan dalam pembangunan dengan tujuan (a) meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa, (b) mewujudkan desa mandiri, dengan strategi yang dilakukan mendorong penguatan

kelembagaan ekonomi pedesaan, mendorong masyarakat menjadi pelaku ekonomi pedesaan dan mendorong gerakan ekonomi rakyat yang tangguh dan mandiri sebagai lokomotif ekonomi pedesaan.

KESIMPULAN

Pada tahap awal permasalahan pengentasan kemiskinan provinsi Riau adalah bagaimana mengidentifikasi kemiskinan itu sendiri, sehingga adanya persamaan persepsi mengenai definisi kemiskinan, faktor determinan dan langkah-langkah penanggulangannya. Identifikasi dan persamaan persepsi ini penting mengingat ini adalah kunci keberhasilan dari program kemiskinan. Upaya sporadis yang dilakukan pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan akan lebih efektif dan efisien jika semua pihak dapat bersinergi dalam arah dan langkah penanggulangan kemiskinan itu sendiri, sehingga target yang dituju akan lebih tepat sasaran.

Data statistik menunjukan adanya sedikit penurunan angka kemiskinan di provinsi Riau pada akhir tahun 2018, hal ini merupakan hasil dari serangkaian strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan. Namun hasil tersebut tidaklah signifikan mengingat tingkat kemiskinan di provinsi Riau masih cukup tinggi. Mengingat begitu kompleksnya masalah kemiskinan, maka strategi dan arah kebijakan serta program yang tepat harus diambil pemerintah, tidak hanya bersifat sektoral dan berorientasi material pengentasan kemiskinan harus melibatkan berbagai peran stakeholder sebagaimana prinsip SDGs. Disisi lain bsanyaknya lembaga/institusi dengan program pengentasan belum menjamin keberhasilan penanggulangan permasalahan kemiskinan itu sendiri selagi masing-masing lembaga institusi berjalan sendiri-sendiri.

Pendekatan kemiskinan multi dimensi (MPA) dapat membantu mendefinisikan kemiskinan itu sendiri secara lebih komprehensif sehingga langkah-langkah yang diambil untuk penngulangan kemiskinan itu sendiri lebih menyeluruh dan intregatif. Disisi lain SDGs telah menetapkan indikator-indikator capaian yang lebih holistik dan komprehensif, sehingga dengan mengintegrasikanya dengan MPA diharapkan rekomendasi terhadap penanggulangan kemiskinan tersebut lebih tepat sasaran dan terukur. Ketersediaan penyediaan pelayanan publik seperti fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan air bersih, pelayanan perumahan dan pelayanan administrasi umum merupakan indikator-indikator utama dalam SDGs yang menjadi kewajiban bagi stakeholder (pemerintah dan non pemerintah) untuk mewujudkannya.

Partisipasi Masyarakat dalam Pengolahan Lahan Tanpa Bakar di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis

Febri Yuliani¹ dan Rosnita²

¹Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Email: febby_sasha@yahoo.co.id

²Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Riau

email: rosnitamag@gmail.com

Abstrak

Bencana kabut asap yang terjadi, sesungguhnya masih terbuka kesempatan luas untuk memperbaiki dan meningkatkan pengelolaan ekosistem rawa gambut agar menjadi lebih baik. Salah satunya memberikan peran lebih besar pada masyarakat melalui akses terhadap pengelolaan lahan dan hutan, juga merancang insentif ekonomi dan pendampingan terus-menerus dalam mengelola potensi sumberdaya ekosistem rawa gambutnya. Masyarakat yang telah lama mendiami dan mengelola lahan gambut memahami bahwa mempertahankan ekosistem gambut tetap basah adalah sistem pengelolaan yang sesuai dalam rangka mempertahankan produktivitas ekosistem gambut. Pengabdian Masyarakat dalam bentuk Desa Binaan ini bertujuan Meningkatkan keterampilan masyarakat di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis sehingga mampu menerapkan teknik membuka lahan pertanian tanpa bakar, pengelolaan air, dan budidaya pertanian di lahan gambut, serta panen dan pasca panen serta Meningkatkan keterampilan masyarakat sehingga mampu memperkuat kelembagaan, analisis usaha dan pasar, serta penumbuhan jiwa kewirausahaan serta penerapan usaha pertanian yang baik atau good agricultural practice (GAP) yang mensejahterkan masyarakat melalui pembukaan lahan dan budidaya pertanian ramah lingkungan. Desa Binaan tersebut dilaksanakan dalam tiga bentuk kegiatan selama 3 (tiga) tahun, yaitu: bantuan teknis, pelatihan dan pendampingan. Ketiga bentuk kegiatan tersebut diimplementasikan pada tiga aspek, yaitu: aspek teknis, aspek sosial budaya, dan aspek ekonomi. Aspek teknis mencakup: (1) pembukaan lahan tanpa bakar (dengan alat berat dan manual), (2) budidaya tanaman pertanian (tanaman tahunan dan tanaman berumur pendek), (3) penanganan panen dan pasca panen (pembersihan, pengemasan, pengawetan, dan pengolahan). Aspek sosial budaya mencakup: (1) pemberdayaan masyarakat (perubahan pola pikir dan etos kerja), (2) penguatan kelembagaan pertanian (kelompok tani dan koperasi), (3) melestarikan kearifan local. Selanjutnya dari aspek ekonomi mencakup: (1) menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan (jiwa kepemimpinan, motivasi, kreatifitas dan inovasi), (2) peningkatan akses pasar dan pemasaran (segmentasi pasar, struktur pasar, bauran pemasaran, perluasan pasar), dan (3) peningkatan akses keuangan (lembaga keuangan bank dan non bank).

Kata Kunci : kebakaran hutan dan lahan, pembukaan lahan tanpa bakar, kewirausahaan,

Abstrack

The haze disaster that occurred, is actually still wide open opportunities to improve and improve the management of peat swamp ecosystems for the better. One of them is giving a greater role to the community through access to land and forest management, as well as designing economic incentives and ongoing assistance in managing the potential of peat swamp ecosystem resources. Communities that have long inhabited and managed peatlands understand that maintaining a wet peat ecosystem is an appropriate management system in order to maintain the productivity of peat ecosystems. Community Service in the form of the Fostered Village aims to improve community skills in Bukit Batu District, Bengkalis Regency so that they can apply techniques to open agricultural land without burning, water management, and cultivation of agriculture on peatlands, as well as harvest and post-harvest as well as Improve community skills so as to strengthen institutions, business and market analysis, and the growth of entrepreneurial spirit and the application of good agricultural practices (GAP) that prosper the community through land clearing and environmentally friendly agricultural cultivation. The guided village was carried out in three forms of activities for 3 (three) years, namely: technical assistance, training and assistance. The three forms of activities are implemented in three aspects, namely: technical aspects, socio-cultural aspects, and economic aspects. Technical aspects include: (1) land clearing without burning (with heavy equipment and manual), (2) cultivation of agricultural crops (annual crops and short-lived plants), (3) handling of harvest and post-harvest (cleaning, packaging, preserving, and processing). Socio-cultural aspects include: (1) community empowerment (changing mindset and work ethic), (2) strengthening agricultural institutions (farmer groups and cooperatives), (3) preserving local

wisdom. Furthermore from the economic aspects include: (1) fostering an entrepreneurial spirit (leadership, motivation, creativity and innovation), (2) increasing market access and marketing (market segmentation, market structure, marketing mix, market expansion), and (3) increasing financial access (bank and non-bank financial institutions).

Keywords: forest and land fires, land clearing without burning, entrepreneurship.

PENDAHULUAN

Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Riau. Ibukota Kabupaten ini berada di Bengkalis tepatnya berada di pulau Bengkalis yang terpisah dari Pulau Sumatera. Pulau Bengkalis sendiri berada tepat di muara Sungai Siak. Kabupaten Bengkalis mempunyai letak yang sangat strategis. Karena dilalui oleh jalur perkapalan internasional menuju ke Selat Malaka. Bengkalis juga termasuk dalam salah satu program *Indonesia Malaysia Singapore Growth Triangle* (IMS-GT) dan *Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle* (IMT-GT).

Kabupaten Bengkalis terletak disebelah pulau sumatera yang mencakup area seluas 7.793,93 km². Kabupaten Bengkalis merupakan daerah dataran rendah ketinggian rata-rata sekitar 1-6,1 m dari permukaan laut. Sebagian besar merupakan tanah organosol, yaitu jenis tanah yang banyak mengandung organik. Di Kabupaten Bengkalis juga terdapat berbagai sungai, tasik (danau) serta 24 pulau besar dan kecil. Beberapa diantara pulau besar itu adalah Pulau Rupat (1.524,84 km²) dan pulau Bengkalis (938,40 km²).

Secara administrasi pemerintah, Kabupaten Bengkalis terbagi dalam 8 kecamatan, 102 Kelurahan/ Desa dengan luas wilayah 7.793,93 km². Tercatat jumlah penduduk Kabupaten Bengkalis 498.335 jiwa dengan sifat yang heterogen. Untuk luas daerah Kabupaten Bengkalis berdasarkan kecamatan dapat dilihat pada tabel 2 berikut:

Tabel 1.2
Luas Daerah Kabupaten Bengkalis Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase (%)
1	Mandau	937,47	12,06
2	Pinggir	2.503,00	32,20
3	Bukit batu	128,00	14,51
4	Siak kecil	742,21	9,55
5	Rupat	896,35	11,53
6	Rupat utara	6:8,50	8,08
7	Bengkalis	514,00	6,61
8	Bantan	424,00	5,46
Total		7.773,93	100%

Sumber : <http://bengkaliskab.go.id/home/page/luas-wilayah-kecamatan>

Pengembangan dan pemanfaatan lahan pertanian yang ada berupa kawasan gambut merupakan tantangan tersendiri, perlu penataan system pertanian termasuk didalamnya adalah kelembagaan agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan serta system pertanian yang mendukung pada pembukaan lahan tanpa bakar. Berbagai Aspek yang akan dilibatkan 1. Aspek Teknologi (1) Anggota kelompok yang merupakan kelompok petani yang memiliki kemampuan dalam pengolahan beberapa produk olahan pertanian. (2) Teknologi yang dimiliki anggota kelompok masih sederhana. Kelompok belum mampu membuat system pengolahan lahan tanpa bakar yang baik dan

berkelanjutan. (3) Pemahaman yang dimiliki anggota kelompok belum memadai, sehingga kelompok belum memanfaatkan atau belum mengolah lahan tanpa bakar secara baik dengan dukungan teknologi dan kelembagaan. 2. Aspek Ekonomi (1) Pembukaan dan pengelolaan dengan sistem pengolahan lahan tanpa bakar akan meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat (2) Keterbatasan peralatan, pengetahuan dan teknologi, menyebabkan pengolahan lahan tanpa bakar tidak maksimal dilaksanakan. (3) Anggota kelompok pada umumnya memiliki kebun sehingga penerapan teknologi relatif tidak akan kesulitan untuk menerapkan sistem tanpa bakar tersebut. 3. Aspek Kelembagaan (1) Kelompok tani merupakan kelembagaan yang dapat mengimplementasikan sistem pengolahan lahan tanpa bakar (2) Namun kelompok usaha belum tertata dengan baik. Baru hanya sebagai kumpulan petani saja. Kelompok belum memiliki kelembagaan yang resmi (3) Kelompok tani yang ada belum mampu mewadahi kebutuhan anggotanya tentang teknologi, pengetahuan dan kelembagaan

Berdasarkan kondisi ini kelompok tani tersebut sangat prospektif untuk dilakukan pembinaan. Melalui program Desa Binaan Universitas Riau ini diharapkan masyarakat termotivasi menghargai lingkungan dan menjaga kelestariannya dan keberlanjutan ekosistem lahan gambut.

Berdasarkan potensi dari Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis memiliki letak geografis yang strategis dengan lahan gambut yang luas. Untuk hal tersebut *road mapping* dalam kurung 3 tahun kedepan. Sehingga dapat digambarkan identifikasi dan perumusan masalah dalam setiap tahunnya. Pengabdian desa binaan ini, mengidentifikasi dan merumuskan masalah sebagai berikut: (1) Kelembagaan yang ada saat ini masih belum kuat untuk mengajak masyarakat menggunakan sistem pengolahan lahan tanpa bakar dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan pada kawasan gambut yang disebabkan oleh kurangnya informasi dan teknologi dalam pengolahan lahan tanpa bakar. (2) Kurangnya keseriusan pemerintah dan anggota kelompok untuk melakukan sistem pengolahan lahan tanpa bakar dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan pada kawasan gambut yang disebabkan oleh kurangnya informasi dan teknologi dalam pengolahan lahan tanpa bakar. (3) Kurangnya pemahaman terhadap aspek teknologi pengolahan lahan tanpa bakar dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan pada kawasan gambut yang disebabkan oleh kurangnya informasi dan teknologi dalam pengolahan lahan tanpa bakar.

Maksud dari pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai wujud kepedulian Universitas Riau dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan cara membuka lahan dengan teknik tanpa bakar lahan untuk pertanian serta meningkatkan perekonomian masyarakat di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah: (1) Meningkatkan keterampilan masyarakat di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis sehingga mampu menerapkan teknik membuka lahan pertanian tanpa bakar, pengelolaan air, dan budidaya pertanian di lahan gambut, serta panen dan pasca panen. (2) Meningkatkan keterampilan masyarakat sehingga mampu memperkuat kelembagaan, analisis usaha dan pasar, serta penumbuhan jiwa kewirausahaan. (3) Membentuk perilaku masyarakat membuka lahan pertanian tanpa bakar, pengelolaan air, dan budidaya pertanian di lahan gambut berkelanjutan, serta panen dan pasca panen. (4) Mewujudkan pembangunan pertanian berwawasan lingkungan yang menguntungkan serta transformasi teknologi dan informasi untuk mengaktifkan kelompok usaha tani memotivasi kelompok agar dapat berkelanjutan.

METODE

Ada enam tahapan kegiatan yang perlu dilakukan untuk mensukseskan Program Pembukaan Lahan Pertanian Tanpa Bakar Lahan Sebagai Upaya Pencegahan Kebakaran Hutan Adapun ketujuh tahapan program tersebut meliputi: (1) Tahap Persiapan, (2) Tahap Penyusunan Program Kerja, (3) Tahap Pelaksanaan Workshop, (4) Tahap Pelaksanaan Pendampingan, (5) Tahap Monitoring dan Evaluasi Program, dan (6) Tahap Pelaporan. Simplifikasi tahapan kegiatan disajikan pada gambar berikut ini.



Gambar 3.1. Tahapan Kegiatan

Dapat dinyatakan bahwa Desa Binaan tersebut dilaksanakan dalam tiga bentuk kegiatan selama 3 (tiga) tahun, yaitu: bantuan teknis, pelatihan dan pendampingan. Ketiga bentuk kegiatan tersebut diimplementasikan pada tiga aspek, yaitu: aspek teknis, aspek sosial budaya, dan aspek ekonomi. Aspek teknis mencakup: (1) pembukaan lahan tanpa bakar (dengan alat berat dan manual), (2) budidaya tanaman pertanian (tanaman tahunan dan tanaman berumur pendek), (3) penanganan panen dan pasca panen (pembersihan, pengemasan, pengawetan, dan pengolahan).

HASIL

Potensi gambut yang sangat besar di wilayah ini perlu dikelola secara arif sehingga dapat memberikan nilai tambah tanpa merusak fungsi alami lahan gambut itu sendiri. Restorasi gambut yang menyelaraskan antara fungsi ekonomi dan fungsi ekologi akan memberikan dampak positif dalam pembangunan yang berwawasan

lingkungan.

Daerah rawa gambut pada umumnya datar dan terletak diantara dua sungai besar. Meskipun disebut datar, lahan rawa gambut ini pada umumnya berbentuk kubah (dome), sehingga terdapat beda ketinggian (elevation) antara pinggir sungai dan tengah diantara dua sungai tersebut sebagai puncak dome. Dalam kondisi tertentu memungkinkan terjadi pergerakan air dari puncak dome ke arah pinggir sungai. Pergerakan air inilah yang memungkinkan ekosistem rawa bergambut dapat menunjang kehidupan.

Kebakaran hutan dan lahan bukan semata-mata karena faktor alam berupa kekeringan. Faktor alam menyediakan kondisi untuk terjadinya kebakaran, tetapi manusia juga memegang peranan penting. Kebakaran hutan yang disebabkan oleh manusia terjadi karena adanya aktivitas masyarakat di dalam dan di luar kawasan hutan. Aktifitas masyarakat di luar kawasan hutan pada saat musim kemarau adalah dengan melakukan pembakaran untuk pembersihan lahan atau untuk membuka lahan baru bagi kegiatan pertanian dan perkebunan.

Konsep Partisipasi Masyarakat

Masyarakat lokal memiliki peran kontrol yang sangat substansial dalam pengembangan desa karena kontrol terhadap proses pengambilan keputusan harus diberikan kepada mereka yang nantinya menanggung akibat pelaksanaan pengembangan termasuk kegagalan atau dampak negatif yang terjadi akibat pengembangan desa. Oleh karena itu, kewenangan pengambilan keputusan harus diberikan kepada masyarakat lokal. Parameter partisipasi masyarakat dalam pengawasan adalah keterlibatan dalam tim pengawasan berikut kewenangan yang dimiliki.

Keterlibatan masyarakat lokal dalam melakukan pengawasan terhadap pengembangan desa terlihat minim. Alasannya, karena perencanaan pengembangan dilakukan oleh pemerintah tanpa melibatkan masyarakat, sehingga masyarakat tidak berkompentensi untuk melakukan pengawasan, dan merasat tidak perlu untuk melakukan pengawasan terhadap apa yang terjadi di sekitar mereka. Pola pembangunan yang *top-down* tidak melatih masyarakat untuk dapat mengetahui permasalahan dan potensi yang mereka miliki, sehingga mereka gagap dalam menentukan tujuan hidupnya, tidak heran jika selama ini masyarakat hanya menjadi objek pembangunan.

Pembakaran lahan memiliki efek yang berbeda pada perlindungan tanaman. Di sisi positif setelah membakar lahan dapat mengurangi kompetisi antara tanaman yang bermanfaat/dibutuhkan dengan jenis pohon/tanaman liar yang tidak dibutuhkan. Pembakaran lahan juga dapat mengurangi risiko hama dan penyakit seperti kumbang badak (*Oryctes rhinoceros*) dan busuk akar tanaman kelapa sawit (*Ganoderma boninensis*) yang dapat menyebabkan kerugian parah pada perusahaan perkebunan. Selain dengan pembakaran lahan, *Ganoderma* dapat dikontrol dengan membajak dan penggunaan pestisida, dan *Oryctes* dapat diberantas menggunakan kombinasi praktek penanaman (*pulverisation*, mencacah vegetasi dan menutupinya dengan tanaman polong-polongan), aplikasi insektisida atau kontrol biologi, seperti perangkap feromon. Di sisi negatif, pembakaran lahan mendorong pertumbuhan alang-alang (*Imperata spp.*). Jenis rumput yang dikenal sangat sulit dan sangat mahal untuk dikendalikan setelah menyebar, yang dapat terjadi sangat cepat.

DISKUSI

Potensi Pengembangan (Pemberdayaan) Masyarakat

Masyarakat desa Bukit Batu memiliki potensi sumber daya manusia yang memadai yang di buktikan dengan keinginan untuk mengembangkan ekonomi kreatif dengan mengolah hasil pertanian mereka sebagai salah satu penunjang pendapatan mereka. Kendala yang saat ini di hadapi masyarakat petani adalah menggunakan teknologi tepat guna untuk mengembangkan potensi pengolahan tanpa bakar. Melalui kegiatan pengabdian yang telah dilakukan seperti sosialisasi, penyuluhan dan pelatihan mengenai pengelolaan hasil pertanian yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal masyarakat merasa sangat terbantu.

Penyiapan lahan tanpa bakar atau *Zero burning* adalah suatu teknik penyiapan lahan dimana sisa hasil tebang tidak dibakar. Di Indonesia penggunaan teknik ini terutama pada perkebunan masih jarang digunakan karena beberapa faktor seperti biaya, tenaga kerja dan waktu. Pengolahan lahan yang dilakukan oleh masyarakat setelah peraturan perundang-undangan yang berlaku masyarakat melakukan pengolahan lahan dengan cara tanpa bakar. Pengolahan ini dilakukan karena masyarakat merasa takut akan hukuman berupa denda sebesar 10 Milyar, dan bahkan ada informasi mengenai hukuman tembak di tempat yang di tetapkan oleh pemerintah bagi seseorang yang dengan sengaja melakukan pembukaan ataupun pengolahan lahan dengan cara membakar.

Pengolahan lahan secara tanpa bakar baru dilaksanakan masyarakat karena hukum yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian, alasan masyarakat terpaksa melakukan sistem ini ialah karena rasa takut akan hukum, dan yang memberatkan mereka ialah karena besarnya biaya yang di perlukan jika melakukan pengolahan lahan dengan cara tanpa bakar. Biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk mengolah 1 ha lahan dalam hal pemeliharaan dengan cara tanpa bakar ialah sekitar Rp1.000.000-2.000.000, jika dilakukan secara manual dan jika dilakukan menggunakan bantuan alat berat bisa mencapai Rp12.000.000-14.000.000 per hektar. Namun masyarakat tidak ada yang menggunakan bantuan alat berat dalam hal pengolahan lahannya, hal ini karena pengolahan yang dilakukan hanyalah pada tahap pemeliharaan tanaman yang telah dibudidayakan sehingga hanya menggunakan cara manual, sedangkan alat berat digunakan ketika proses penggantian tanaman perkebunan yang lama dengan yang baru (*replanting*) dengan membuat galian atau lajur tanam (*Stecking*) namun saat ini masyarakat tidak sedang berada pada masa *replanting*.

Menurut Rostiyanti (2008) menyatakan bahwa alat-alat berat merupakan alat yang digunakan untuk membantu dan memudahkan manusia dalam melakukan pekerjaannya, sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai dengan lebih mudah dan dengan waktu yang relatif lebih singkat. Alat-alat berat dalam fungsinya memegang peranan penting. Dimana dalam setiap pengoperasiannya, alat berat ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sehingga alat-alat berat harus di manfaatkan seoptimal mungkin.

Hal lain yang menjadi alasan masyarakat tidak banyak yang menggunakan alat berat ialah karena luas areal lahan yang dimiliki tidak terlalu luas sehingga kurang efisien jika menggunakan alat berat. Hal ini sesuai dengan pendapat Onrizal (2008), mengatakan bahwa pengolahan lahan dengan teknik tanpa bakar sangat tergantung pada alat berat (mekanis), sehingga hanya cocok untuk areal yang luas karena investasinya yang mahal. Selain itu, suatu jenis alat berat umumnya tidak bisa digunakan untuk semua kondisi lahan, misalnya keterbatasan lereng, lahan kering dan basah dan lain sebagainya, sehingga diperlukan pemilihan alat yang tepat.

Pengolahan lahan tanpa bakar dalam hal pemeliharaan masih dapat dijalankan dengan baik oleh masyarakat karena tidak harus menggunakan bantuan alat berat yang memerlukan biaya mahal dan bisa dilaksanakan dengan menggunakan alat-alat sederhana yang sudah dimiliki oleh masyarakat. Selain itu masyarakat juga saat ini merasa khawatir jika mengolah menggunakan bakar karena kekhawatiran api akan merembet dan membakar lahan yang dimiliki serta lahan disekitarnya.

1. Membabat, menebang dan/ penyemprotan

Tahap membabat dan menebang yang dilakukan hampir sama dengan tahap yang ada pada pengolahan lahan dengan cara bakar. Kegiatan membabat vegetasi yang ada dilahan sehingga menjadi berdiameter lebih kecil. Pekerjaan ini dilakukan dengan parang ataupun kampak dan dodos. Tujuan pembabatan ini adalah untuk mempercepat proses dekomposisi yang terjadi. Untuk serasah daun ataupun alang-alang hasil tebasan tidak di tumpukkan pada tempat lain dengan tujuan agar serasah tersebut dapat menjadi pupuk bagi tanah.

Pemeliharaan tanaman yang dibudidayakan, penebasan dilakukan untuk mengurangi jumlah pelepah yang terlalu banyak pada pohon. Hal ini harus dikarenakan ketika jumlah pelepah yang ada terlalu banyak akan mengurangi produktivitas yang di hasilkan, dimana unsur hara yang diserap akan banyak habis oleh pertumbuhan baru, sehingga yang dihasilkan tidak maksimal.

Ada beberapa masyarakat yang memilih untuk menggunakan herbisida dalam pemeliharaan lahan. Hal ini dilakukan oleh masyarakat ketika kebun sudah ditumbuhi banyak rerumputan dan semak belukar, namun tidak ingin repot dengan harus membabatnya. Cara ini tidak memerlukan peralatan untuk menebas dan melakukan penumpukan, karena hanya menyemprotkan cairan herbisida yang telah di campurkan dengan air dan disemprotkan menggunakan *spayer* ke tanaman pengganggu yang tumbuh di areal lahan.

2. Penumpukan dan pelapukan

Kegiatan penumpukan bertujuan untuk mempermudah proses pengolahan yang akan dilakukan selanjutnya. Sisa-sisa tebasan yang ditumpuk ialah potongan kayu ataupun ranting yang berukuran sekitar 10 cm. ranting-ranting tersebut dikumpulkan pada pinggiran lahan sehingga tidak menghalangi dalam proses pembalikan tanah baik menggunakan cangkul. Pada kasus dilokasi penelitian yang mayoritas masyarakatnya adalah petani maka hasil tebasan di tumpuk di tengah barisan tanaman.

Rumpukan sisa hasil tebasan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk terdekomposisi sehingga sangat berpotensi menjadi inang penyakit. Menurut Khoeng dalam Nugroho (2012), dalam *zero burning* daun-daunan membutuhkan sekitar 29 minggu untuk terdekomposisi secara sempurna, cabang dengan diameter 0-5 cm membutuhkan waktu sekitar 73 minggu, cabang besar dengan diameter 10-15 cm dan akar membutuhkan waktu sekitar 129 minggu untuk terdekomposisi.

Tingkat Ketercapaian Sasaran Program

Berdasarkan tujuan pengabdian yang sudah ditetapkan yakni melakukan pembinaan penguatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal dalam pengelolaan perikanan, memberikan pembinaan melalui pembentukan kelompok dan kelembagaan hasil produk olahan ikan, dan memberikan pembinaan pengemasan produk dan pengurusan perizinan. Untuk tahun pertama pembinaan ilmu pengetahuan dan teknologi sudah dilakukan melalui adanya sosialisasi, penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat nelayan sebanyak 30 orang. Ketercapaian sasaran program yang dimulai

sejak bulan Desember 2018 – September 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tahapan Sosialisasi: Observasi lapangan, pengumpulan data, potensi dan masalah, pengenalan dengan masyarakat sasaran, sosialisasi pada masyarakat sasaran mengenai pengenalan program pengabdian (tanggal 22-24 Desember 2018). Hasil yang didapatkan ialah diperolehnya data mengenai hasil tangkap ikan terutama ikan lomek yang setiap bulan selalu mengalami peningkatan tapi tidak di dukung dengan daya beli masyarakat sehingga menimbulkan masalah. Selain itu ketercapaian dari kegiatan pertama yang dilakukan adalah pemahaman yang diberikan kepada masyarakat nelayan mengenai pentingnya pengelolaan berkelanjutan dalam sector perikanan.
2. Tahapan Penyuluhan: Pengurusan perizinan kegiatan dengan perangkat desa Bukit Batu, penyampaian materi program yang akan dilaksanakan (tanggal 22-26 April 2019). Ketercapaian dari kegiatan yang dilakukan ialah adanya partisipasi penuh masyarakat untuk menghadiri forum diskusi untuk mendengarkan materi yang disampaikan oleh tim pengabdian. Selain itu, antusiasme masyarakat untuk mendapatkan pelatihan dan pembinaan terlihat melalui adanya diskusi dan tanya jawab.
3. Tahapan Pelatihan: Pelatihan mengenai sistem pengolahan lahan tanpa bakar yang memiliki jumlah yang cukup banyak, pengenalan teknologi yang tepat kepada masyarakat sasaran (tanggal 3-4 Agustus 2019). Hasil dari kegiatan yang dilakukan keberhasilan tim pengabdian yang dibuktikan dengan adanya pembukaan lahan tanpa bakar
4. Tahap Evaluasi: Pengumpulan informasi dari masyarakat sasaran mengenai pelatihan yang telah dilakukan melalui adanya monitoring dan evaluasi (tanggal 2 September 2019)

Lahan dapat diartikan sebagai lingkungan fisik yang terdiri atas iklim, relief, tanah, air, dan vegetasi serta benda yang ada di atasnya, sepanjang ada pengaruhnya terhadap penggunaan lahan, termasuk di dalamnya juga hasil kegiatan manusia di masa lampau dan sekarang. Lahan juga memiliki unsur-unsur yang dapat diukur atau diiperkirakan, seperti tekstur tanah, struktur tanah, kedalaman tanah, jumlah curah hujan, distribusi hujan, temperatur, drainase tanah, serta jenis vegetasinya. Dalam lahan terbayang apa yang terkandung di dalamnya dan bagaimana keadaan tanahnya, serta menggambarkan bagaimana daya dukung dari lingkungan fisis dan biotik terhadap kehidupan manusia (Silanata dalam Sari,2017).

Pengolahan Lahan Tanpa Bakar

Pembukaan lahan dengan teknik tanpa bakar ini dilakukan pada beberapa perkebunan, baik untuk areal baru, maupun peremajaan. Sebagaimana dilaporkan Chee dan Chiu (2007), Majid (2007) dalam Purba *et al.* (2007). Alasan utama penggunaan ini dalam pembukaan lahan adalah karena system ini dapat: (a) mempertahankan kesuburan tanah, (b) mempertahankan struktur tanah, (c) menjamin pengembalian unsure hara, (d) mencegah erosi permukaan tanah dan (e) membantu pelestarian lingkungan. Penerapan teknik tanpa bakar dalam pembukaan lahan untuk berbagai tujuan mengandung dua kegiatan utama yaitu penebangan dan penumpukan. Majid (2007) mengemukakan bahwa meningkatkan efektifitas dan efisiensi pembukaan lahan, diperlukan persiapan pendahuluan untuk pelaksanaan penebangan dan penumpukan yang meliputi: (a) pengukuran luas areal, (b) pengukuran setiap blok, (c) pengukur jarak tanam, (d) pembuatan jalan masuk, (e) pembuatan konservasi air. Hal ini penting

dilakukan agar penumpukan dapat dilakukan secara tepat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Identifikasi daerah bebas asap diperlukan untuk memudahkan dalam mengevakuasi korban kebakaran. Mengingat asap yang dihasilkan dari kebakaran memberikan dampak negatif terhadap kesehatan, menyebabkan penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), alergi kulit, asma dan lain-lain.

Desa binaan dengan focus pada System pengolahan lahan tanpa bakar melibatkan masyarakat, pemadaman api atau pencegahan penjaralan api lebih besar dilakukan dengan cara:

1. Pembuatan aliran api atau jalur pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Lebar dan jarak aliran api dari areal yang terbakar tergantung pada tipe kebakaran, arah, dan kecepatan angin, keadaan topografi dan keadaan kekeringan biomasa, kesediaan personalia, alat dan bahan pemadaman api.
2. Pembuatan jalur pemadaman kebakaran terbalik (*back firing*). Metode ini dapat digunakan bila kecepatan angin kecil dan tipe kebakaran bawah atau permukaan.
3. Pemadaman api secara langsung. Metode ini dapat digunakan bila personalia siap serta api kecil dan kebakaran belum meluas.

Saran

- a. Tindakan Pasca Kebakaran Lahan

Kebakaran berdampak buruk tidak hanya bagi lingkungan dan aspek kesehatan, beberapa upaya juga perlu dilakukan guna memperbaiki keadaan lahan yang telah terbakar, Beberapa tindakan sebagai upaya tindakan pasca kebakaran.

1. Penilaian Dampak Kebakaran

Penilaian dampak kebakaran dilakukan setelah terjadinya kebakaran, dengan tujuan untuk mengetahui dampak yang merugikan bagi manusia dan lingkungan dari berbagai sudut pandang, baik dari segi ekonomi, ekologi, sosial maupun kesehatan. Banyak penelitian telah dilakukan untuk mengetahui dampak kebakaran, diantaranya dampak akibat kebakaran besar tahun 1997/1998 yang melanda Indonesia dan negara-negara tetangga baik mengenai luasan yang terbakar maupun kerugian-kerugiannya.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan rehabilitasi di lahan gambut bekas terbakar (Wibisono *et al.*, 2007) :

- 1) Pemilihan jenis tanaman.

Pemilihan jenis tanaman hendaknya digunakan tanaman jenis lokal/indigenous (hindari tanaman eksotik seperti akasia).

- 2) Bahan tanaman.

Bahan tanaman dapat berupa biji, anakan alam yang terdapat di sekitar lokasi terdekat serta stek yang selanjutnya dilakukan pembibitan pada lokasi yang terdekat dengan lokasi yang akan di rehabilitasi.

- 3) Sistem penanaman.

Mengingat kondisi rawa gambut yang khas, yaitu adanya genangan, maka untuk tanaman yang tidak tahan genangan seperti Meranti dan Ramin, sistem gundukan (*mound system*) merupakan salah satu alternatif yang dapat diterapkan. Sistem gundukan ini dilakukan dengan cara membuat gundukan buatan dari tanah gambut di sekitar titik tanam yang disekelilingnya ditahan dengan kayu, atau bahan lainnya agar tidak longsor.

- 4) Partisipasi masyarakat.

Keterlibatan masyarakat lokal merupakan salah satu potensi sumber daya manusia yang

mendukung keberhasilan pelaksanaan rehabilitasi sehingga diperlukan upaya untuk mendorong masyarakat terlibat dalam kegiatan rehabilitasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Sardjono, dan Mustofa, 2004 Mosaik Sosiologis Kehutanan : Masyarakat Lokal, Politik dan Kelestarian Sumber Daya, Yogyakarta : Debut Press.
- Agus, F., dan I.G. Subiksa. 2008. Lahan gambut: potensi untuk pertanian dan aspek lingkungan. Balai Penelitian Tanah. Badan Litbang Pertanian. World Agroforestry Centre. Bogor.
- BALIBANG PEMPROV RIAU. 2010. Seminar dan Lokakarya: Pengelolaan Terpadu Lingkungan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Provinsi Riau
- BBSDLP Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian. 2009. Identifikasi dan Karakterisasi Lahan Rawan longsor dan Rawan Erosi di Dataran Tinggi untuk Mendukung Keberlanjutan Pengelolaan Sumberdaya Lahan Pertanian. Laporan Tengah Tahun, DIPA 2009. Bogor: Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian.
- Darmawan, T., dan Masroh, A.H. 2004. Pentingnya Nilai Tambah Produk Pangan Dalam Buku Pertanian Mandiri. Penebar Swadaya. Jakarta.
- Dinas Perkebunan Provinsi Riau. 2009. Laporan Tahun. Dinas Perkebunan Provinsi Riau. Pekanbaru
- Fadila, Ila. 2011. Potensi Sagu dalam Upaya Diversifikasi Pangan. Universitas Terbuka. Tangerang Selatan.
- Fahroji. 2011. Pengolahan Sagu. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Riau. Pekanbaru.
- Hariandja, Marihot Tua Efendi, 2002, Manajemen Sumber Daya Manusia, Grasindo, Jakarta
- Hariyanto, Bambang. 2011. Manfaat Tanaman Sagu (*Metroxylon* sp) dalam Penyediaan Pangan dan dalam Pengendalian Kualitas Lingkungan. Jurnal Teknik Lingkungan. Volume 12(2): 143 - 152.
- Huneryager dan Heckman. 1992. Partisipasi dan Dinamika Kelompok. Semarang: Dahara Priza
- Soeriaatmadja. 1997. Ilmu Lingkungan. ITB Press. Bandung
- Suharto dan Tata Iryanto, Kamus Bahasa Indonesia Terbaru, Surabaya: Penerbit INDAH, 1989
- United Nation Development Programme (UNDP).(1995). The state of human development. UNDP,NewYork (forth coming in September).

Si Maskot yang Tersingkir: Efek Kebijakan Pengembangan Destinasi Pariwisata Kota Solok

Era Sonita

Pariwisata Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Bukittinggi
Email: esonitha@yahoo.com

Abstrak

Pulau Belibis adalah daerah yang telah berkembang menjadi objek wisata yang menarik, didukung oleh beberapa atraksi lainnya seperti telaga, taman pramuka, lapangan pacuan kuda dan peninggalan bersejarah lainnya. Dikatakan Pulau Belibis karena di daerah ini terdapat danau yang cukup besar, tempat tinggal kawanan burung belibis yang menjadi maskot kawasan wisata ini. Namun seiring dengan perkembangan kawasan Pulau Belibis menjadi destinasi wisata unggulan di Kota Solok, pengelolaannya justru memunahkan habitat burung Belibis yang menjadi maskot dari objek wisata ini. Pembangunan sarana dan prasarana penunjang wisata ini semakin memperburuk habitat burung Belibis. Sampai tahun ini habitat tempat hidup burung tersebut sudah tidak ada sama sekali. Tujuan penulisan ini ingin melihat sejauh mana kebijakan pemerintah Kota Solok terhadap keberlangsungan hidup Burung Belibis yang merupakan maskot wisata tersebut. Melalui metode pengumpulan data sekunder terkait kebijakan pemerintah Kota Solok terhadap kawasan wisata ini, maka didapat hasil bahwa kebijakan pengembangan yang dilakukan tidak memiliki master plan yang jelas. Pembangunan dilakukan tidak melalui analisis kajian terhadap dampak social dan lingkungan. Pembangunan lebih menekankan kepada aspek ekonomi dalam meningkatkan PAD Kota Solok. Perlunya keterlibatan stakeholder seperti pelaku wisata, masyarakat, ninik mamak, dalam pembuatan draf pengembangan kerjasama menjadi salah satu alasan utama habitat Burung Belibis punah.

Kata kunci: si mascot, burung belibis, pengabangan, kawasan wisata

Abstract

Belibis Island is an area that has developed into an attractive tourist attraction, supported by several other attractions such as the lake, scout parks, horse racing fields and other historic relics. It is said Belibis Island because in this area there is a fairly large lake, home to a flock of grouse that is the mascot of this tourist area. But along with the development of the island of Belibis become a leading tourist destination in the city of Solok, its management actually killed the grouse habitat of the grouse which became the mascot of this tourism object. Development of supporting facilities and infrastructure for this tour further worsen the habitat of grouse birds. Until this year, the habitat where the birds live has disappeared. The purpose of this paper is to see the extent of the Solok City government policy towards the viability of the grouse that is the tourist mascot. Through the secondary data collection method related to the Solok City government policy towards this tourism area, the results are obtained that the development policy undertaken does not have a clear master plan. Development is not done through analysis of studies of social and environmental impacts. Development places more emphasis on economic aspects in increasing the PAD of Solok City. The need for stakeholder involvement such as tourism actors, community, ninik mamak, in making the draft development of cooperation is one of the main reasons for the extinction of the grouse of the grouse.

Keywords: the mascot, grouse, branching, tourist area

1. Pendahuluan

Dicanangkannya Sumatera Barat sebagai salah satu dari 3 daerah tujuan wisata selain Nusa Tenggara Barat dan Nagro Aceh Darusalam Oleh Menteri Pariwisata, menjadi tantangan bagi daerah-daerah yang berpotensi wisata di Sumatera Barat. Bercerita tentang pariwisata tidak terlepas dari objek yang menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke suatu lokasi. Di samping sarana dan prasarana pendukung yang ada di sekitar objek tersebut hanyalah sebagai faktor pendukung dari daya tarik objek tersebut.

Kota Solok merupakan salah satu kota di Propinsi Sumatera Barat yang menjadi

destinasi wisata di Indonesia. Letak Kota Solok sangat strategis yaitu diantara beberapa kota penting pariwisata lainnya di Indonesia antara lain : Padang lebih kurang 64 km, Bukittinggi lebih kurang 90 km dan Batusangkar lebih kurang 70 km. Sama halnya dengan beberapa kota tujuan wisata lainnya di Sumatera Barat Kota Solok juga mempunyai objek wisata yang menarik yaitu pulau Belibis.

Pulau Belibis adalah merupakan suatu kawasan yang telah dikembangkan menjadi objek wisata yang menarik di dukung oleh beberapa objek wisata lainnya seperti gelanggang pacuan kuda ampang kualo, taman pramuka dan peninggalan sejarah lainnya. Dikatakan pulau belibis karena di kawasan ini terdapat sebuah telaga yang cukup besar, dimana disana hidup kawanan burung belibis yang menjadi maskot kawasan wisata ini.

Dari keterangan di atas kita dapat disimpulkan bahwa yang menjadi daya tarik dari objek wisata Pulau belibis adalah burung belibis yang merupakan salah satu jenis burung yang memiliki keunikan serta rasa dagingnya yang enak untuk di konsumsi. Namun keinginan pemerintah kota Solok yang ingin menjadikan kawasan hidup burung belibis sebagai kawasan objek wisata menjadi salah kaprah. Keinginan untuk menjadikan habitat tersebut untuk menjadi kawasan menarik yang dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung dan dapat menambah pemasukan bagi daerah berupa PAD, justru malah sebaliknya.

Kawasan tersebut dikelola tanpa standar yang layak untuk kawasan wisata dan terutama sangat merusak habitat burung belibis yang seharusnya dijaga kelestariannya karena merupakan maskot dari objek wisata tersebut. Kesalahan-kesalahan secara terus menerus dilakukan sejak dibukanya daerah tersebut menjadi daerah kawasan wisata, dengan alasan peningkatan kenyamanan wisatawan saat berkunjung dan menikmati burung pemerintah daerah di bawah dinas pariwisata kota solok terus membangun dan merusak habitat dari burung belibis. Sehingga dari bulan ke bulan populasi dari burung belibis berkurang dan dalam 15 tahun terakhir sudah habis sama sekali.

Bila ditinjau dari luas kawasan wisata alam pulau belibis yang hanya lebih kurang 20 Ha termasuk telaganya yang lebih kurang 1.7 Ha, maka objek wisata alam ini masih jauh dari syarat yang telah ditetapkan terutama pada point dua. Lahan basah yang cocok untuk rekreasi dan pariwisata adalah tempat yang memiliki prasarana yang cukup, atau potensi untuk dikembangkan sarannya. Nilainya sebagai lokasi untuk pariwisata akan meningkat. Jika nilai bagi konservasi dan sosial budaya juga tinggi.

Masalah lain dalam pengembangan objek wisata Pulau Belibis adalah perencanaan awal yang kurang memperhatikan segi analisis dampak lingkungan terutama terhadap kehidupan belibis yang menjadi maskot objek wisata. Ketergantungan burung ini terhadap vegetasi sekitar telaga sangat tinggi. Hilangnya sebagian besar vegetasi di pinggir telaga menyebabkan populasi burung ini menurun dengan cepat. Vegetasi pinggir telaga bagi belibis merupakan tempat untuk mencari makan, beristirahat/ tidur, tempat bersarang dan berlindung dari predator (Nirarita et al, 1996).

Kerusakan habitat yang terjadi terutama penggundulan vegetasi pada daerah pinggir telaga. Daerah ini sengaja dibersihkan oleh pihak pengelola dan pengunjung yang datang untuk kegiatan memancing dan sepeda air. Di samping itu kerusakan ini diperparah lagi oleh masyarakat sekitar yang mengambil rumput sekitar telaga untuk dijadikan makanan ternak. Dan memang pada kenyataannya seiring dengan punahnya populasi burung belibis maka kawasan wisata belibis pun tidak lagi memiliki daya tarik, malah dapat dikatakan kawasan tersebut sebagai kawasan wisata yang gagal,

gagal dalam menarik jumlah wisatawan gagal dalam mempertahankan habitat burung belibis yang menjadi maskot objek wisata.

Pada kenyataannya keadaan suatu habitat memang tidak selalu dapat memenuhi kehidupan optimal satwa secara berkesinambungan. Keadaan habitat satwa liar seringkali mengalami kerusakan atau penurunan baik jumlah (luas) ataupun mutunya. Kerusakan atau penurunan habitat satwa liar itu dapat disebabkan oleh berbagai aktifitas manusia, satwa itu sendiri atau bencana alam. Kerusakan atau penurunan keadaan habitat inilah yang menyebabkan menurunnya kemampuan daya dukung suatu habitat satwa liar dan pada akhirnya mengakibatkan berpindah atau matinya satwa liar yang hidup di situ.

2. Metode Penelitian

Dari teori yang dipaparkan, kerangka teoritis dalam penulisan ini adalah bagaimana efek dari kebijakan pemerintah terhadap pengembangan kawasan wisata Pulau Belibis dari lingkungan, ekonomi, fisik (alam dan bangunan fisik), dengan system aktifitas system pariwisata di suatu destinasi wisata alam Pulau Belibis. Dampak yang ditimbulkan terbagi atas dampak positif dan negative dari pengembangan kawasan ini. Selanjutnya akan diberikan rekomendasi terhadap kemajuan destinasi wisata Pulau Belibis ke depannya. Penelitian ini dilakukan dengan memakai metode deskriptif kualitatif. Pendekatan yang digunakan melalui pendekatan partisipatif. Penelitian dilakukan di Objek wisata pulau belibis Kota Solok Sumatera Barat dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara tidak terstruktur dan studi dokumentasi. Informan kunci dalam penelitian Dinas Kebudayaan dan pariwisata kota Solok, pengelola wisata pulau Belibis, masyarakat sekitar objek wisata. Informan kunci dalam penelitian ini yang sesuai dengan kapasitas dan kompetensi dalam menjawab permasalahan adalah stakeholder pelaku wisata. Teknik analisa data menggunakan analisa kualitatif melalui tahapan reduksi data, disply data dan menarik kesimpulan.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Sejarah Pulau Belibis

Pesona pulau belibis sebagai kawasan kecil yang terletak di daerah Ampang Kualo Kelurahan Kampung Jawa Kota Solok ini diberi nama karena terdapatnya burung belibis di daerah telaga yang berada di tengah wisata belibis. Pulau belobis ini dalam perkembangan sampai saat ini selalu melakukan pembenahan dan kelengkapan sarana pendukung objek ini. Saran tersebut diantaranya: Mushalla, arena bermain anak-anak, arena memancing, kolam renang, pondok istirahat, outbond, pentas seni, arena kegiatan pramuka dan lain-lain.

Pulau belibis pernah mengalami masa jaya menjadi objek wisata andalan yang namanya sempat terkenal di seluruh Indonesia dengan dibuat lagu dengan judul pulau belibis. Petikan syairnya seperti: pulau balibih di ampang kualo, di Kota Solok oi, iyo tampeknyo, tampek bakacimpuang dek nan mudo-mudo, pulau balibih di ampang kualo rami aleknyo dek bapacu kudo.

Pacuan kuda ampang kualo ikut meramaikan orang berkunjung ke Pulau Belibis, karena letaknya yang berdekatan dan kegiatan pacu Kuda dilakukan rutin setiap tahun dalam rangka merayakan hari jadi Kota Solok.

b. Kebijakan Pemda terkait pariwisata

Bentuk kepedulian pemda Kota Solok dalam mengembangkan wisata di Kota Solok tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 13 tahun 2012 pada paragraf 5 pasal 40 yang berbunyi:

- 1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf e bertujuan untuk menyelenggarakan jasa pariwisata atau mengusahakan objek dan pariwisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait dengan sektor pariwisata
- 2) Kawasan pariwisata budaya dengan objek wisata

c. Dampak yang ditimbulkan dari kebijakan pengembangan kawasan wisata Belibis

- Dampak positif pengembangan kawasan wisata

* Peningkatan perekonomian masyarakat, Dampak positif dari pengembangan kawasan wisata Pulau Belibis dilihat dari peluang usaha berjualan di sekitar kawasan. Dampak dibangunnya beberapa ruko-ruko untuk masyarakat lokal yang ingin berjualan makanan dan minuman, cendramata. Pembangunan ini membuat wisatawan yang ingin mencari makanan dan minuman serta cendramata bias terpusat di satu tempat.

* Dampak penyerapan tenaga kerja. Dibukanya beberapa fasilitas pendukung seperti arena bermain, tunggangan kuda, kolam pancing, kebersihan arena kawasan, penjaga kolam renang, parkir di kawasan wisata Pulau Belibis menyerap beberapa tenaga untuk terlibat dalam pengelolaan fasilitas tersebut. Penyerapan tenaga pengangguran menjadikan kawasan Pulau Belibis sebagai solusi menyerap tenaga kerja.

- Dampak Negatif pengembangan

Beberapa dampak negative dari pengembangan kawasan Pulau Belibis adalah:

* Penebangan pohon secara liar

Pembanguna fasilitas di kawasan Pulau Belibis yang tanpa perencanaan yang matang menyebabkan penebangan pohon yang tidak sesuai. Akibatnya kawasan hijau Pulau Belibis berkurang. Sehingga Pulau Belibis sebagai kawasan wisata alam tidak memberikan ciri khas sebagai wisata alam.

* Alih fungsi Habitat Burung Belibis

Kebijakan mengubah fungsi habitat Burung Belibis di tengah kawasan telaga merupakan kesalahan fatal yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Keputusan yang tergesa-gesa tanpa melibatkan dinas terkait seperti dinas pertanian, dinas lingkungan hidup, lembaga pendidikan, LSM dan masyarakat menjadikan kepunahan dari Burung Belibis yang merupakan mascot dari kawasan wisata tersebut.

* Tekanan terhadap Lahan

Karena hilangnya ikon dari kawasan Pulau Belibis, menuntut pemerintah untuk mengembangkannya beberapa atraksi wisata agar kawasan ini tetap bertahan sebagai kawasan wisata unggulan di Kota Solok. Pembangunan beberapa atraksi wisata, kolam renang, pemancingan, ruko-ruko, atraksi bermain, pondok istirahat, arena pertemuan menjadikan tata letak fasilitas tidak memberikan area lahan kawasan terbuka bagi wisatawan.

4. Diskusi

Strategi dalam pengembangan kawasan Belibis di masa Yang akan datang, Pulau Belibis masih memiliki potensi sebagai habitat belibis di masa yang akan datang. Untuk itu perencanaan kawasan ini jangan hanya didominasi oleh kepentingan ekonomi semata tapi juga memperhatikan aspek ekologis dari satwa

belibis yang menjadi maskot dari objek wisata ini. Rusaknya habitat belibis

dan menurunnya populasi burung ini merupakan suatu kasus yang harus ditanggapi dengan serius. Jika mengacu pada syarat lahan basah yang bisa dijadikan kawasan wisata, maka kawasan ini sebetulnya sudah tidak memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai kawasan wisata. Untuk itu pengelolaan kawasan ini di masa yang akan datang hendaknya lebih berhati-hati lagi sehingga populasi burung belibis sebagai maskot wisata dapat dikembalikan seperti semula.

Salah satu alternatif yang dapat dilakukan untuk melestarikan burung belibis adalah memperbaiki kembali habitat yang telah rusak. Habitat yang baik memungkinkan belibis melaksanakan aktifitas hidupnya seperti makan, istirahat, berkembang biak dan aktifitas lainnya.

Pembinaan habitat perlu dilakukan secara menyeluruh termasuk lahan di sekitar telaga. Sebaiknya tumbuhan yang akan dikembangkan di kawasan ini harus dapat mendukung seluruh aspek ekologis burung yang terdapat di pulau belibis. Di samping itu tumbuhan yang dipilih juga harus mempunyai nilai estetika, disukai masyarakat serta memiliki manfaat ekonomi karena pulau belibis juga berfungsi sebagai objek wisata.

Upaya penyelamatan burung dari kepunahan telah dilakukan sejak beberapa tahun yang lalu, namun kebijaksanaan konservasi burung yang ditempuh selama ini kurang efektif, sehingga perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan. Kelemahan dasar kebijaksanaan tersebut terletak pada tidak melibatkan partisipasi beberapa unsur dinas terkait, perguruan tinggi, dan masyarakat sekitar. Hal ini disebabkan pengaruh manusia baik langsung maupun tidak langsung ikut mempengaruhi keberadaan satwa di suatu kawasan. Disamping mengikut sertakan masyarakat diperlukan juga Undang-Undang pelestarian maupun tindakan hukum yang jelas untuk mendukung usaha pelestarian burung belibis yang merupakan maskot kawasan wisata Pulau Belibis.

Dalam hal ini kebijakan stakeholder dalam hal ini pemerintah daerah diuntut selain menguasai substansi dan seluk beluk pariwisata juga mampu menjamin proses keberlanjutan dan mengakomodasi kepentingan stakeholder kegiatan wisata. Diharapkan peran pemerintah tidak hanya pembuat strategi kebijakan dan operasional akan tetapi juga agen yang piawai dalam mengkoordinasi berjalannya kebijakan yang akan diambil.

4. Kesimpulan

Berjalannya suatu organisasi atau perusahaan tidak terlepas dari manusia yang terlibat dalam kegiatan tersebut baik sebagai objek maupun sebagai subjek. Jika melihat kepada sumber daya yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan wisata di Pulau belibis masih rendah baik dari segi pendidikan maupun dalam pengelolaan. Pengelolaan belibis diserahkan kepada pihak swasta dalam hal ini penduduk sekitatar yang tidak memiliki kompetensi di bidang manajemen pengelolaan baik itu dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring.

Untuk merespon kecendrungan di atas maka perlu bagi pemerintah Kota Solok untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia, karena sesungguhnya kualitas SDM diyakini secara langsung akan menentukan kualitas dari pengelolaan dan pelayanan wisata pulau Belibis. Kebijakan dalam bentuk pemberian pendidikan dan pelatihan kepariwisataan yang mendukung kompetensi tenaga kerja pariwisata. Kemampuan SDM tadi secara tidak langsung juga dilihat dari kemampuan dalam menggunakan teknologi informasi sebagai tuntutan dalam industri 4.0. kemampuan SDM dalam menggunakan teknologi bukan merupakan ancaman SDM pariwisata

akan tetapi bagaimana dapat menciptakan inovasi dan kreatifitas. Dengan kompetensi hard skill SDM pariwisata dapat memanfaatkan untuk memberikan pelayanan berkualitas.

Sudah saatnya pemerintah daerah dan pengelola wisata Pulau Belibis menggunakan fasilitas teknologi dalam mengembangkan wisata dan melakukan pembenahan agar kawasan pulau belibis menjadi kawasan yang tetap melestarikan habitas makhluk hidup sekaligus mengembangakn kawasan wisata ramah lingkungan

Daftar Pustaka

- Laksono Khsanul Ni'am dan Mussadun, "*Dampak Aktivitas Ekowisata di Pulau Karimunjawa Berdasarkan Persepsi Masyarakat*". Undip. 2014
- Lestyono Renna, "*Dampak Negatif Perkembangan Pariwisata Terhadap Lingkungan Fisik Pesisir. Studi Kasus: Pantai Pangandaran*". Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK) ITB. 2011.
- Limbong Ferncius dan Sugiono Soetomo. "*Dampak Perkembangan Pariwisata Terhadap Lingkungan Taman Nasional Karimunjawa*" Jurnal Ruang. Volume 2 Nomor 1 Tahun 2014.
- Pitana I Gde, I Ketut Surya Diarta, "*Pengantar Ilmu Pariwisata*". Andi, Yogyakarta. 2009.
- Qomarudin, "*Perubahan Sosial dan Peran Masyarakat Dalam Pengembangan Kawasan Wisata Kepulauan Karimunjawa*". Program Pasca Sarjana Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Negeri Semarang Indonesia. 2013.
- Ramly Nadjamuddin Dr. M.Si, "*Pariwisata Berwawasan Lingkungan: Belajar dari Kawasan Ancol*". Grafindo Khasanah Ilmu, Jakarta, 2007.

Dinamika Kebijakan Pembangunan Pariwisata di Pulau Rupert Kabupaten Bengkalis

Meyzi Heriyanto¹, Adianto² dan Hasim As'ari³

¹Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Email: meyzi2000@yahoo.com

²Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Email: adianto@lecturer.unri.ac.id

³Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Email: hasimasari@lecturer.unri.ac.id

Abstrak

Perkembangan kepariwisataan di Provinsi Riau menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan nusantara maupun mancanegara yang berkunjung ke Provinsi Riau dari tahun ketahun selalu menunjukkan peningkatan. Salah satu potensi wisata yang ada di wilayah pesisir Provinsi Riau terletak di Pulau Rupert Kabupaten Bengkalis. Pulau Rupert banyak menyimpan pesona alam yang masih asri dan masih alami. Mulai dari pemandangan sungai kecil yang mengalir tenang, hingga sungai besar yang membelah pulau. selain itu juga pemandangan pantai dengan panorama pantai pasir putih yang sanggup menawan hati para pengunjung. Banyak pantai-pantai yang belum di explore jadi masih banyak yang masih alami. Oleh karena tujuan penelitian ini ingin mengetahui dinamika kebijakan pembangunan pariwisata di Pulau Rupert Kabupaten Bengkalis. Dalam upaya menjawab tujuan tersebut, penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara kepada informan yang telah ditetapkan. Informan penelitian berasal dari pihak implementor yaitu Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Riau dan Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkalis. Data dan informasi yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dalam upaya menjawab permasalahan penelitian. Terjadinya dinamika kebijakan pembangunan pariwisata di wilayah pesisir Pulau Rupert Kabupaten Bengkalis disebabkan oleh belum munculnya derivate kebijakan pembangunan pariwisata yang secara khusus muncul di level provinsi maupun level kabupaten. Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten Bengkalis hanya mengandalkan kebijakan pemerintah pusat dan kebijakan RTRW daerah dalam rangka membangun pariwisata di wilayah pesisir Pulau Rupert Kabupaten Bengkalis. Fakta empiris menemukan bahwa pembangunan pariwisata yang dilakukan di wilayah pesisir Pulau Rupert masih belum terwujud secara maksimal sejak diterbitkannya kebijakan pemerintah pusat yang mengatur tentang kepariwisataan dan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional.

Kata Kunci: Kebijakan, Pembangunan dan Pariwisata

1. PENDAHULUAN

Pulau Rupert Kabupaten Bengkalis merupakan wilayah pesisir Provinsi Riau yang memiliki banyak potensi wisata. Pulau Rupert banyak menyimpan pesona alam yang masih asri dan masih alami. Mulai dari pemandangan sungai kecil yang mengalir tenang, hingga sungai besar yang membelah pulau. selain itu juga pemandangan pantai dengan panorama pantai pasir putih yang sanggup menawan hati para pengunjung. Banyak pantai-pantai yang belum di explore jadi masih banyak yang masih alami. Di Pulau Rupert ada pantai yang cukup dikenal diantaranya adalah Pantai Rhu di Desa Teluk Rhu, Pantai Ketapang di Desa Sungai Cingam, Pantai Lapin di Desa Tanjung Punak ataupun salah satu pantai yang melegenda, Pantai Alohong. Ada lagi pantai yang pemandangannya tak kalah indah, yaitu Pantai Makeruh. Pantai Makeruh yang terletak di Desa Makeruh Kecamatan Rupert masih termasuk jarang dikunjungi pengunjung. Obaknya tergolong tenang dan sepanjang pantai memiliki pasir putih terhampar luas, dominasi biru dan putih sepanjang mata memandang dapat menyejukan hati serta

merefresh pikiran. Pada sore hari, deburan ombak silih berganti menghantam perahu nelayan yang tertambat di bawah pohon kelapa. Pemilik kapal mungkin sedang beristirahat atau menjahit jala ikan untuk dibawa berburu ke tengah laut.

Pantai yang menawarkan pesona dan pemandangan alam bahari yang menarik di Pulau Rupat yaitu Pantai Rupat Utara. Keunikan dari Pantai Rupat Utara, dapat langsung terlihat pada panjangnya pesisir pantai yang mencapai sekitar 11 kilometer, serta lebar 30 meter tersebut. Letaknya yang juga berada disekitar pesisir Selat Malaka, menjadikan pantai ini sebagai salah satu pantai dengan pemandangan alam bahari terindah yang terdapat di Kabupaten Bengkalis. Pesona pemandangan alam disekitar objek wisata bahari Pantai Rupat Utara, akan terasa begitu indah dan pastinya sangat memukau. Suasana dipesisir pantai ini, terasa begitu teduh dan juga menyegarkan, dengan banyaknya pepohonan jenis tumbuhan mangrove yang tumbuh dengan rindang disepanjang pantai. Disamping itu, Pantai ini juga memiliki keunikan tersendiri. Dimana terdapat banyak sekali binatang-binatang kecil yang sesekali terlihat berkumpul dan membentuk sebuah susunan yang menyebabkan warna pada pesisir pantai terlihat berubah menjadi berwarna merah. Selain itu, jernihnya warna air laut di pantai ini, juga terlihat seperti menambah pesona eksotik yang terdapat pada pantai dikawasan Pulau Rupat tersebut.

Keindahan alam yang disajikan di Pulau Rupat menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki potensi wisata yang cukup besar untuk dikembangkan. Oleh karena itu, pemerintah harus memiliki keseriusan untuk membangun pariwisata yang dimiliki oleh Pulau Rupat. Pembangunan pariwisata yang dilakukan tentunya harus dipayungi oleh kebijakan yang jelas. Sehingga bisa menjadi pedoman dan panduan bagi implementornya untuk melaksanakan kebijakan pembangunan pariwisata yang ditetapkan untuk Pulau Rupat Kabupaten Bengkalis. Maka dari itu permasalahan dalam penelitian ingin melihat bagaimana dinamika kebijakan pembangunan pariwisata di Pulau Rupat Kabupaten Bengkalis.

Secara terminology, pengertian kebijakan publik (*public policy*) sangat banyak. Kata kebijakan adalah terjemahan dari kata Inggris "*policy*" dan, *policy* atau kebijakan mencakup aturan-aturan yang ada didalamnya. *Policy* dalam konteksnya tidak dapat dipisahkan dengan politik, karena pada hakekatnya proses pembuatan kebijakan adalah merupakan proses politik. *Policy* itu, apapun cakupannya, sesungguhnya merupakan tindakan-tindakan terpola (*patterns of actions*), yang mengarah pada tujuan tertentu yang disepakati dan bukan sekedar keputusan acak (*at random decision*) untuk melakukan sesuatu. (Wahab, 2016)

Hornby dalam Erwan (2015) menyatakan bahwa berdasarkan segi kepastakaan, kebijakan merupakan terjemahan dari kata *policy* yang diartikan sebagai sebuah kegiatan yang diadopsi oleh pemerintah atau partai politik yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Makna kebijakan akan semakin jelas jika kita ikuti pandangan seorang ilmuwan politik Carl Friedrich dalam Indiahono (2009) yang menyatakan bahwa kebijakan itu ialah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu, sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan tertentu. Dari beberapa defenisi diatas, bisa diperoleh pemahaman-pemahaman baru mengenai kebijakan, kebijakan apapun, sebenarnya mencerminkan respons/ tanggapan sistem politik dan administrasi terhadap sebuah realita sosial, yang secara politis dianggap tak lagi bisa di toleransi.

Thomas R. Dye dalam Agustino (2016) mendefinisikan kebijakan publik adalah “*Anything governments chooses to do or not to do*” (semua pilihan-pilihan pemerintah untuk melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu). Kilpatrick dalam Asra (2014) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah sebuah sistem atau aturan hukum, pilihan tindakan, dan prioritas alokasi dana yang berkenaan dengan permasalahan-permasalahan yang ada atau timbul dalam suatu masyarakat.)

Menurut Edward dan Sharkansky dalam Kusumanegara (2010) kebijakan publik adalah apa yang dikatakan dan dilakukan pemerintah, mencakup: tujuan-tujuan, maksud program pemerintah, pelaksanaan niat, dan peraturan. Menurut Richard Rose dalam Ranjabar (2016) mendefinisikan kebijakan publik sebagai sebuah rangkaian panjang dari banyak atau sedikit kegiatan yang saling berhubungan dan memiliki konsekuensi bagi yang berkepentingan sebagai keputusan yang berlainan. Hal ini diperkuat dengan pendapat dari RC. Chandler dan JC. Plano dalam Syafiiie (2003) yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai pemanfaatan strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah publik.

Michael Howlet dan M. Ramesh sebagaimana dikutip dalam Subarsono (2011) menyatakan bahwa proses kebijakan publik terdiri dari lima tahapan sebagai berikut :

1. Penyusunan agenda (*agenda setting*)
2. Formulasi kebijakan (*policy formulation*)
3. Pembuatan kebijakan (*decision making*)
4. Implementasi kebijakan (*policy implementation*)
5. Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*)

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat di simpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik.

Pariwisata didefinisikan sebagai perjalanan dari suatu tempat ketempat lain bersifat sementara, dilakukan oleh perorangan maupun kelompok sebagai usaha untuk mencapai keseimbangan atau keserasian dengan lingkungan hidup untuk mencapai kebahagiaan dalam dimensi social, budaya, alam dan ilmu. Menurut Wardiyanto (2011:46), pariwisata adalah kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan untuk sementara waktu dalam rangka menambah wawasan bidang sosial kemasyarakatan, system perilaku dari manusia itu sendiri dengan berbagai dorongan kepentingan sesuai dengan budaya yang berbeda-beda yang berhubungan dengan upaya kesenangan, termasuk pengusaha objek dan daya tarik wisata serta usaha lain yang terkait dibidang tersebut.

Yoeti dalam Risky (2011:24), mengatakan bahwa pariwisata adalah suatu usaha rangkaian yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk meningkatkan, memelihara ataupun membangun, baik secara kuantitatif maupun kualitatif terhadap ciptaan tuhan, manusia, tata hidup, seni budaya dan tempat atau keadaan alam yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi atau dinikmati oleh wisatawan.

Suwantoro (2004 : 19) mengatakan bahwa unsur pokok yang harus mendapat perhatian guna menunjang pengembangan objek wisata daerah tujuan wisata yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pengembangannya meliputi 5 unsur yaitu :

a. Objek wisata dan daya tarik wisata

Objek wisata dan daya tarik wisata merupakan potensi yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan untuk datang kesuatu daerah tujuan wisata. Pengusaha objek wisata dan daya tarik dappat dikelompokkan menjadi :

- Pengusaha objek dan daya tarik wisata alam
- Pengusaha objek dan daya tarik wisata budaya
- Pengusaha objek

b. Prasarana Wisata

Prasarana wisata merupakan sumber daya alam dan sumber daya buatan manusia yang mutlak dibutuhkan oleh wisatawan dalam perjalanannya di daerah tujuan wisata. Misalnya jalan, listrik, air, telekomunikasi, terminal, jembatan, dan sebagainya. Untuk kesiapan objek-objek wisata yang akan dikunjungi oleh wisatawan di daerah tujuan wisata, prasarana wisata tersebut perlu dibangun dengan disesuaikan dengan lokasi dan kondisi objek wisata yang bersangkutan.

c. Sarana Wisata

Sarana wisata merupakan kelengkapan daerah tujuan wisata yang diperlukan untuk mencapai melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati perjalanan wisatanya. Pembangunan sarana wisata di daerah tujuan wisata maupun objek wisata tertentu harus disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan. Sarana wisata dapat dibagi menjadi dua unsur pokok, yaitu:

- Sarana Pokok Kepariwisata
 1. Biro perjalanan umum dan agen perjalanan
 2. Transportasi wisata baik darat, laut maupun udara
 3. Restoran
 4. Objek wisata yaitu berupa keindahan alam dan ciptaan manusia
 5. Atraksi wisata seperti kesenian, festival, ritual, upacara perkawinan tradisional dan lain-lain.
- Sarana perlengkapan Kepariwisata
 1. Fasilitas rekreasi dan olahraga
 2. Prasarana umum seperti jalan raya, jembatan, listrik, telekomunikasi, air bersih, dan lain-lain

d. Tata laksana dan infrastruktur

Infrastruktur merupakan situasi yang mendukung fungsi sarana dan prasarana wisata, baik sistem pengaturan maupun bangunan fisik di atas dan dibawah permukaan tanah seperti:

- sistem pengairan, distribusi air bersih, sistem pembuangan air limbah yang membantu sarana perhotelan/ restoran.
- Sumber listrik dan energi serta jaringan distribusinya yang merupakan bagian vital bagi terselenggaranya penyediaan sarana wisata yang memadai.
- Sistem jalur angkutan dan terminal yang memadai dan lancar akan mempermudah wisatawan untuk mengunjungi objek-objek wisata.
- Sistem komunikasi yang memudahkan para wisatawan untuk mendapatkan informasi maupun mengirimkan informasi secara cepat dan tepat.
- Sistem keamanan atau pengawasan yang memberikan kemudahan diberbagai sektor bagi para wisatawan. Keamanan di terminal, di perjalanan, dan di objek-objek wisata, di pusat-pusat perbelanjaan, akan meningkatkan daya tarik suatu objek wisata maupun daerah tujuan wisata.

Infrastruktur yang memadai dan terlaksana dengan baik di daerah tujuan wisata akan membantu meningkatkan fungsi sarana wisata, sekaligus membantu masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidupnya.

e. Masyarakat dan lingkungan

Daerah dan tujuan wisata yang memiliki berbagai objek wisata dan daya tarik wisata akan mengundang kehadiran wisatawan.

- Masyarakat
Masyarakat disekitar objek wisatalah yang akan menyambut kehadiran wisatawan tersebut dan sekaligus akan memberikan layanan yang diperlukan oleh para wisatawan. Untuk ini masyarakat disekitar objek wisata perlu mengetahui berbagai jenis dan kualitas layanan yang dibutuhkan oleh para wisatawan. Dalam hal ini pemerintah melalui instansi-instansi terkait telah menyelenggarakan berbagai penyuluhan kepada masyarakat. Salah satunya adalah bentuk bina masyarakat sadar wisata.
- Lingkungan
Disamping masyarakat disekitar objek wisata, lingkungan alam disekitar objek wisatapun perlu diperhatikan dengan seksama agar tidak rusak dan tercemar. Lalu-lalang manusia yang tarus meningkat dari tahun ketahun dapat mengakibatkan rusaknya ekosistem dari fauna dan flora disekitar objek wisata. Oleh sebab itu perlu ada upaya menjaga kelestarian lingkungan melalui penegakan berbagai aturan dan persyaratan dalam pengelolaan suatu objek wisata.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bersifat deskriptif. Informan penelitian berasal dari pihak implementor yaitu Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Riau dan Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkalis. Pengumpulan data dilakukan dengan berbagai tehnik, seperti: (a) Wawancara yang dilakukan kepada informan yang sudah ditetapkan, dimulai dari informasi pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Riau, Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkalis, Kepala Desa di Lokasi Wisata, Pokdarwis di lokasi wisata dan masyarakat di lokasi wisata. Wawancara dilakukan secara terstruktur untuk mempermudah peneliti dalam menggali informasi tentang dinamika kebijakan pembangunan pariwisata di Wilayah Pesisir Pulau Rupat Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. (b) Observasi peneliti lakukan dengan mengamati infrastruktur-infrastruktur dan fasilitas wisata lainnya di lokasi wisata yang ada di Pulau Rupat Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Data dan informasi yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dalam upaya menjawab permasalahan penelitian.

3. HASIL

Pembangunan kepariwisataan Indonesia dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Pembangunan kepariwisataan diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata. Pembangunan kepariwisataan ini meliputi: industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan kelembagaan pariwisata. Penugasan Undang-undang Kepariwisata kepada Kementerian Pariwisata khususnya terkait fungsi perencanaan dan perancangan adalah antara lain:

1. Mendorong penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di sektor kepariwisataan.
2. Mengkoordinasikan pembangunan kepariwisataan lintas sektor dan linstas provinsi
3. Menyelenggarakan kerja sama internasional di sektor kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Menetapkan dan mengembangkan kawasan pariwisata strategis nasional, dan kawasan pariwisata khusus.
5. Menetapkan norma, standar, pedoman, prosedur, kriteria dan system pengawasan dalam penyelenggaraan kepariwisataan.

Derivate Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS) Tahun 2010-2025 mengatur pembangunan kepariwisataan Indonesia. Wilayah pengembangan destinasi pariwisata nasional diarahkan pada 222 Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN), 50 Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) dan 88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). KPPN menunjukkan kawasan pengembangan pariwisata di seluruh Indonesia yang diwujudkan dalam bentuk DPN dan KSPN. DPN merupakan destinasi pariwisata berskala nasional, sedangkan KSPN merupakan kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata nasional yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

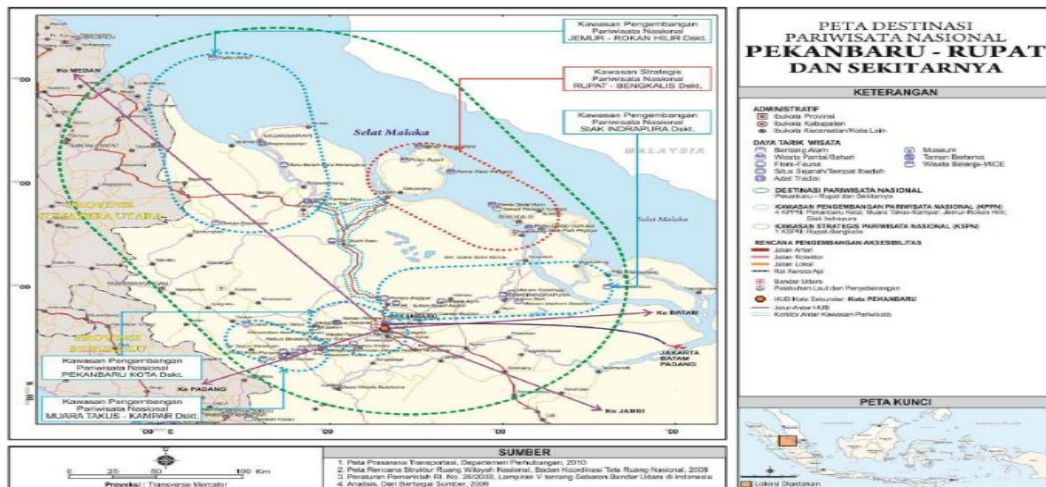
Rincian wilayah yang termasuk dalam KPPN, DPN dan KSPN sebagai berikut:

- a. Pulau Sumatera terdiri dari 55 KPPN, 11 DPN dan 20 KSPN.
- b. Pulau Jawa terdiri dari 48 KPPN, 11 DPN (termasuk DPN Krakatau-Ujung Kulon) dan 23 KSPN.
- c. Pulau Bali dan Nusa Tenggara terdiri dari 33 KPPN, 8 DPN dan 21 KSPN.
- d. Pulau Kalimantan terdiri dari 25 KPPN, 7 DPN dan 9 KSPN.
- e. Pulau Sulawesi terdiri dari 28 KPPN, 5 DPN dan 8 KSPN.
- f. Pulau Maluku dan Papua terdiri dari 33 KPPN, 8 DPN dan 7 KSPN.

Fokus pengembangan dan pembangunan pariwisata sesuai amanat pada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang RIPPARNAS, dilakukan penyusunan rencana induk dan rencana detil pengembangan KSPN. Provinsi Riau destinasi wisata yang termasuk ke dalam RIPPARNAS adalah Pulau Rupat Utara. Pulau Rupat Utara adalah salah satu destinasi wisata yang masuk dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Pulau Rupat memiliki luas wilayah 1.524 km² yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka di bagian utara. Pulau Rupat terdiri dari 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Rupat dan Kecamatan Rupat Utara merupakan salah satu pulau terluar Indonesia yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Selain itu, pulau yang berbentuk seperti gunung kecil di tengah laut luas ini juga memiliki posisi yang sangat strategis, karena langsung berhadapan dengan perairan internasional yang sangat ramai, yaitu Selat Malaka. Pulau Rupat memiliki nilai jual yang sangat eksotis, karena kapal-kapal asing yang melintas di Selat Malaka bisa langsung merapat ke pulau yang memiliki pasir putih terpanjang di Indonesia ini. Pantai pasir putihnya membentang sepanjang ± 17 km mulai dari Desa Teluk Rhu, Tanjung Samak (Rupat Utara) sampai Sungai Cingam (Rupat). Pantai yang lebarnya ± 30 meter jika air surut atau sekitar ± 7 meter saat air pasang ini memiliki keindahan yang tidak kalah penting dengan pantai-pantai di Pulau Bali.

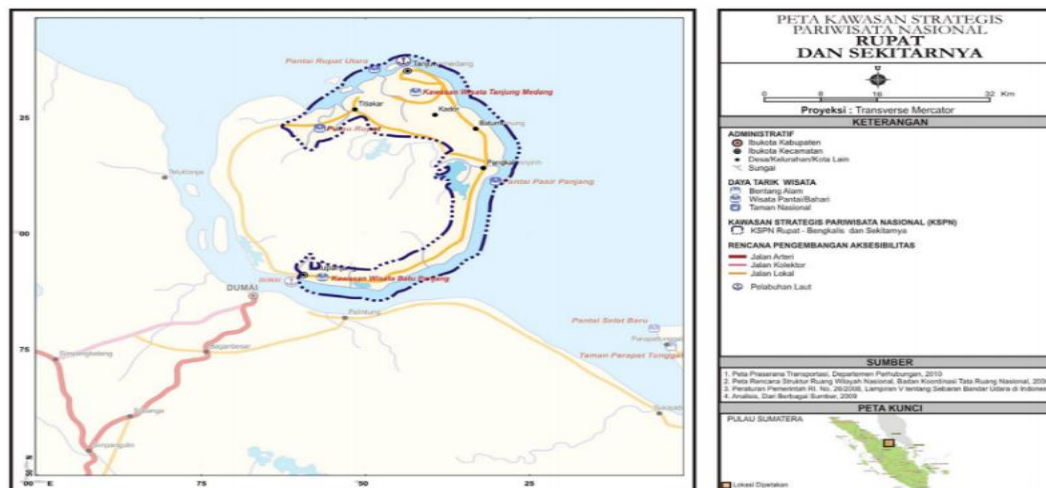
Wilayah Rupat yang ditetapkan sebagai KSPN adalah KSPN Rupat dan sekitarnya. Untuk lebih jelasnya mengenai peta DPN dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 1.
Peta DPN Pekanbaru – Rupert dan sekitarnya



Sumber: Olahan Penelitian, Tahun 2019

Gambar 2.
Peta KSPN Pulau Rupert dan sekitarnya



Sumber: Olahan Penelitian, Tahun 2019

Kebijakan RIPPARNAS menyebutkan pembangunan DPN dan KSPN dilaksanakan secara bertahap, dengan kriteria prioritas sebagai berikut: *Pertama*, komponen destinasi yang siap untuk dikembangkan. *Kedua*, posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis. *Ketiga*, posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan kepariwisataan di wilayah sekitar baik dalam konteks regional maupun nasional. *Keempat*, potensi kecenderungan produk pariwisata masa depan. *Kelima*, kontribusi yang signifikan dan/atau prospek. *Keenam*, positif dalam menarik kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara dalam waktu yang relatif cepat. *Ketujuh*, citra yang sudah dikenal secara luas. *Kedelapan*, kontribusi terhadap pengembangan keragaman produk pariwisata di Indonesia. *Kesembilan*, keunggulan daya saing internasional.

Pelaksanaan kebijakan RIPPARNAS yang telah disusun didukung oleh visi dan

misi kerja dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Riau. Dimana visi pengembangan kepariwisataan daerah tahun 2012 – 2025 adalah “*Terwujudnya Provinsi Riau sebagai Pusat Kebudayaan Melayu, didukung dengan Kepariwisataan yang Berbasis Kerakyatan serta Berwawasan Lingkungan Masyarakat yang Agamis Tahun 2020*”. Sedangkan Misi pengembangan kepariwisataan daerah Provinsi Riau dalam Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Riau 2012 – 2025 sebagai berikut:

1. Pembinaan, pelestarian dan pengembangan asset budaya untuk mendukung pengembangan pariwisata di daerah Riau.
2. Pembinaan, pelestarian dan pengembangan kesenian daerah sehingga dapat meningkatkan atraksi wisata di Provinsi Riau.
3. Pengembangan museum daerah sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan informasi budaya, seni tradisi, serta benda cagar budaya.
4. Pembinaan dan pengembangan potensi pariwisata sehingga layak dijual kepada wisatawan.

Tujuan pengembangan kepariwisataan daerah Provinsi Riau dalam Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Riau 2012-2025 meliputi: *Pertama*, mengembangkan dan melestarikan Kebudayaan Melayu sebagai landasan pengembangan kepariwisataan Provinsi Riau dengan menjadikan Riau sebagai pusat pengembangan kebudayaan Melayu di Kawasan Asia Tenggara. *Kedua*, meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata di Provinsi Riau yang mampu menarik dan meningkatkan arus kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara, meningkatkan PAD dan PDRB, dan pendapatan masyarakat, dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan. *Ketiga*, mengomunikasikan destinasi pariwisata di Provinsi Riau dengan menggunakan media komunikasi pemasaran secara efektif dan efisien untuk meningkatkan citra destinasi pariwisata Provinsi Riau sehingga mampu meningkatkan apresiasi dan menarik kunjungan dan kunjungan ulang wisatawan mancanegara dan wisatawan Nusantara. *Keempat*, mewujudkan industri pariwisata di Provinsi Riau yang mampu menggerakkan perekonomian nasional melalui peningkatan investasi di bidang pariwisata, kerjasama antarusaha pariwisata, memperluas lapangan kerja, dan melaksanakan upaya-upaya untuk mendukung pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. *Kelima*, mengembangkan lembaga kepariwisataan dan sistem tata kelola yang mampu menyinergikan pengembangan industri pariwisata, destinasi pariwisata, dan pemasaran pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien.

Sasaran pengembangan kepariwisataan daerah Provinsi Riau dalam Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Riau 2012 – 2025 meliputi:

- a. Terwujudnya pengembangan dan lestarnya Kebudayaan Melayu sebagai landasan pengembangan kepariwisataan Provinsi Riau dengan menjadikan Riau sebagai pusat pengembangan kebudayaan Melayu di Kawasan Asia Tenggara.
- b. Terciptanya peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata di Provinsi Riau yang mampu menarik dan meningkatkan arus kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara, meningkatkan PAD dan PDRB, dan pendapatan masyarakat, dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan.
- c. Terkomunikasikannya destinasi pariwisata di Provinsi Riau dengan menggunakan media komunikasi pemasaran secara efektif dan efisien untuk meningkatkan citra destinasi pariwisata Provinsi Riau sehingga mampu meningkatkan apresiasi dan menarik kunjungan dan kunjungan ulang wisatawan mancanegara dan wisatawan Nusantara.

- d. Tewujudnya industri pariwisata di Provinsi Riau yang mampu menggerakkan perekonomian melalui peningkatan investasi di bidang pariwisata, kerjasama antarsaha pariwisata, memperluas lapangan kerja, dan melaksanakan upaya-upaya untuk mendukung pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.
- e. Terciptanya pengembangan lembaga kepariwisataan dan sistem tata kelola yang mampu menyinergikan pengembangan industri pariwisata, destinasi pariwisata, dan pemasaran pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien.

Berdasarkan tujuan dan sasaran pengembangan kepariwisataan daerah Provinsi Riau dalam Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Riau 2012 – 2025, maka tercatat potensi pariwisata Provinsi Riau antara lain:

Tabel 1.

Potensi Pariwisata di Provinsi Riau

Lokasi	Potensi	Arahan Pembangunan
Kota Pekanbaru	Pusat perbelanjaan, Masjid, Danau, Recreation park, Istana Bandar Serai	Pengembangan city market park Pasar Bawah
		Pengembangan masjid sebagai wisata religi
		Pengembangan wisata kuliner
		Pengembangan theme park di sekitar danau bandar Khayangan
		Pengembangan <i>city walk park Labuay</i>
		Pengembangan wisata budaya Bandar Serai
		Pengembangan wisata Sungai Siak
Kota Dumai	Perkebunan, Teluk, Danau	Pengembangan Agro wisata Buah naga
		Pengembangan taman wisata Teluk Makmur
		Pengembangan taman rekreasi Danau Bunga Tujuh
		Pengembangan wisata mangrove
Kab. Bengkalis	Pelatihan gajah, masjid, pantai, Pulau Rupert, hutan, rumah kapitan	Pengembangan Sebungan animal park
		Pengembangan wisata pantai dan resort terpadu Pulau Rupert, Selat Baru
		Pengembangan taman kuliner dan taman rekreasi Andam Dewi
		Pengembangan wisata ekologi Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu
		Pengembangan wisata sejarah dan living museum Rumah Kapitan dan Balai
Kab. Indragiri Hilir	Pantai, Pulau, air terjun, makam syekh	Adat Melayu
		Pengembangan wisata bahari pantai Solop, Pulau Cawan
		Pengembangan event wisata budaya menongkah dan Sampan Leper
		Pengembangan wisata ziarah makam syekh Abdurraachman Siddiq
		Pengembangan ekowisata bukit berbunga

Lokasi	Potensi	Arahan Pembangunan
		Pengembangan ekowisata Mangrove Mandah
Kab. Indragiri Hulu	Taman Nasional, suku asli, danau, kesultanan	Pengembangan wisata ekologi dan taman botani Bukit Tigapuluh
		Pengembangan event wisata living culture suku Talang Mamak
		Pengembangan taman wisata tirta Danau Raja dan Danau Meduyan
		Pengembangan wisata sejarah kesultanan Indragiri
Kab. Siak	Istana Siak, danau, hutan raya	Pengembangan wisata sejarah Istana Siak Indrapura
		Pengembangan wisata ekologi air danau Zamrud
		Pengembangan wisata ekologi Taman hutan raya Syarif Hasyim
		Pengembangan event festival Siak Bermada
Kab. Kampar	Muara Takus, Taman Rekreasi, masjid, desa wisata	Pengembangan wisata sejarah dan budaya Candi Muara Takus
		Pengembangan taman bertema dan taman rekreasi Stanum dan Bukit Candika
		Pengembangan desa wisata Buluh Cina
		Pengembangan Agro wisata Bangkinang
		Pengembangan wisata religi masjid dan Islamic Center
Kab. Pelalawan	Sungai Kampar, Taman Nasional	Pelestarian Istana Gunung Sahilan
		Pengembangan wisata Sungai "Bono white water Surfing"
		Pengembangan wisata ekologi dan edutor taman nasional Tesso Nilo
Kab. Rokan Hilir	Pulau Jemur, danau	Pengembangan wisata budaya dan sejarah istana sayap dan Equator
		Pengembangan wisata resort Pulau Jemur
		Pengembangan wisata bahari Pulau Jemur
		Pengembangan wisata tirta Danau Napangga
Kab. Rokan Hulu	Air terjun, taman nasional, sungai, istana Rokan, benteng	Pengembangan desa wisata Rantau Bais
		Pengembangan wisata museum Tiong Hoa
		Pengembangan wisata sejaah benteng tujuh lapis
		pengembangan wisata alam dan ekowisata Taman Nasional Bukit Siguli
Kab. Rokan Hulu		Pengembangan wisata sejarah istana rokan
		Pengembangan wisata alam air terjun Aek Mertua
Kab. Kuantan	Air terjun	Pengembangan wisata air panas
		Pengembangan alam tirta Air Terjun Tujuh Tingk

Lokasi	Potensi	Arahan Pembangunan
Singingi		at dan Guruh Gemurai
		Pengembangan taman wisata Danau Mesjid
		Pengembangan desa wisata Kuantan Singingi
		Pengembangan wisata Pacu Jalur Kuantan Singingi
Kab. Kep. Meranti	Selat Panjang, pulau, tasik	Pengembangan wisata bahari Selat Panjang
		Pengembangan wisata kepulauan P. Dedap Durhaka
		Pengembangan wisata danau Tasik Putri Pepuyu dan tasik Nambus
		Pengembangan wisata Bokor

Sumber: RIPPDA Provinsi Riau 2012-2025, Tahun 2019

Arah kebijakan pengembangan daya tarik wisata dalam lingkup Provinsi Riau melalui pendekatan kawasan, meliputi kebijakan pengembangan:

- 1) Kawasan Kota Pekanbaru sebagai kawasan wisata berbasis perkotaan.
- 2) Kawasan Kota Dumai sebagai kawasan wisata berbasis agro dan alam.
- 3) **Kawasan Kabupaten Bengkalis sebagai kawasan wisata berbasis budaya dan alam.**
- 4) Kawasan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai kawasan wisata alam dan budaya.
- 5) Kawasan Kabupaten Indragiri Hulu sebagai kawasan wisata budaya.
- 6) Kawasan Kabupaten Siak sebagai kawasan wisata budaya dan sejarah.
- 7) Kawasan Kabupaten Kampar sebagai kawasan wisata sejarah, budaya dan desa wisata.
- 8) Kawasan Pelalawan sebagai kawasan wisata budaya dan desa alam.
- 9) Kawasan Kabupaten Rokan Hilir sebagai kawasan wisata alam.
- 10) Kawasan Kabupaten Rokan Hulu sebagai kawasan wisata alam dan sejarah.
- 11) Kawasan Kabupaten Kuantan Singingi sebagai kawasan wisata alam.
- 12) Kawasan Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai kawasan wisata alam.

Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Daerah Provinsi Riau Tahun 2012 – 2025 dijelaskan melalui arah kebijakan, strategi dan program di Kawasan Kabupaten Bengkalis sebagai berikut:

Tabel 2.
Arah Kebijakan, Strategi, dan Program di Kawasan Kabupaten Bengkalis

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
Pengembangan Kawasan Bengkalis sebagai kawasan wisata berbasis budaya dan alam	a. Mengembangkan animal park	1) penataan lansekap kawasan theme park bertema hewan 2) pengembangan event secara berkala 3) Pengembangan aktivitas-aktivitas bertema leisure, edukatif dan sains, dan budaya lokal 4) Penataan fungsi bangunan di kawasan 5) Pengembangan fasilitas pendukung 6) Pengembangan pemasaran terpadu 7) Penataan aspek kelembagaan masyarakat di kawasan animal park 8) Membangun kebijakan investasi yg “ramah” untuk menarik investor 9) Pengembangan kerjasama dengan sekolah dan institusi pendidikan untuk pembelajaran dan perjalanan wisata 10) Program pengembangan dan pelestarian flora dan fauna 11) Pengembangan bazaar kerajinan lokal dan kuliner	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bidang kepariwisataan
	b. Mengembangkan wisata pantai dan resort terpadu	1) Pengembangan desa wisata budaya 2) Pengembangan aktivitas wisata pantai marine area 3) Pengembangan even secara berkala 4) Peningkatan akomodasi, fasilitas, infrastruktur pendukung dan pelayanan di obyek wisata Pantai 5) Program pengembangan struktur, dan jaringan aksesibilitas 6) Pelaksanaan kajian pemetaan lahan, perizinan, dan kajian-kajian lainnya 7) Pengembangan marina community yang mampu membangkitkan ekonomi masyarakat sekitar 8) Program pemasaran terpadu	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bidang kepariwisataan
	c. Mengembangkan taman kuliner dan taman rekreasi	1) penataan kawasan taman kuliner 2) Peningkatan akomodasi, fasilitas, infrastruktur pendukung dan pelayanan 3) Pembenahan dan penataan fasilitas kuliner dari kelas K5 hingga kelas bisnis ritel. 4) Pembinaan kepada pengusaha kuliner mengenai hygiene dan sanitasi. 5) pengembangan area bermain 6) pengembangan area diskusi dan pentas	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bidang kepariwisataan

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
		outdoor	
		7) pengembangan bazaar kerajinan lokal dan kuliner	
	d.	Mengembangkan wisata ekologi cagar biosfer	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bidang kepariwisataan
		1) Pengembangan area penelitian dan pendidikan	
		2) Pengembangan aktivitas wisata bertema ekologi	
		3) Pengembangan sarana prasarana pendukung	
		4) Program Penataan kebijakan	
		5) Pelaksanaan program <i>education</i> dan <i>public awareness</i> terhadap lingkungan bagi masyarakat	
		6) Pengembangan wisata outbound	
		7) Penzoningan kawasan cagar alam dan pariwisata	
	e.	Mengembangkan wisata sejarah, budaya, dan religi	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bidang kepariwisataan
		1) Revitalisasi bangunan rumah kapitan	
		2) Pengembangan aktivitas wisata sejarah dan budaya	
		3) Pelaksanaan program pemasaran terpadu	
		4) Pengembangan prasarana dan fasilitas pendukung	
		5) Program pelestarian nilai-nilai budaya dan sejarah	
		6) Pengembangan area komersial di sekitar objek wisata rumah kapitan	
		7) Pengembangan even secara berkala	

Sumber : RIPPDA Provinsi Riau 2012-2025, Tahun 2019

Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Daerah Provinsi Riau Tahun 2012 – 2025 untuk Kawasan Kabupaten Bengkalis dalam arahan kebijakan di KSPN Rupert Utara, direncanakan untuk mengembangkan wisata pantai dan resort terpadu dengan program kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengembangan desa wisata budaya.
- b. Pengembangan aktivitas wisata pantai marine area.
- c. Pengembangan even secara berkala.
- d. Peningkatan akomodasi, fasilitas, infrastruktur pendukung dan pelayanan di obyek wisata Pantai.
- e. Program pengembangan struktur, dan jaringan aksesibilitas.
- f. Pelaksanaan kajian pemetaan lahan, perizinan, dan kajian-kajian lainnya.
- g. Pengembangan *marina community* yang mampu membangkitkan ekonomi masyarakat sekitar.
- h. Program pemasaran terpadu.

Namun pada saat pekerjaan penyusunan rencana induk dan rencana detail Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Pengembangan Kawasan Wisata Pulau Rupert Utara ini disusun pada Tahun 2016, Kabupaten Bengkalis belum melakukan penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA). Walaupun demikian KSPN Rupert Utara merupakan salah satu unggulan destinasi wisata yang ada

di Kabupaten Bengkalis. Karena pada kawasan Rupert Utara terdapat 2 buah atraksi yang sudah rutin dilaksanakan, yaitu: Festival Pantai Rupert dan Festival Mandi Safar. Kedua acara ini menjadi daya Tarik tersendiri untuk mendukung keindahan alam dari Pantai yang ada di Rupert Utara.

Kawasan wisata yang sangat memberi daya tarik yang tinggi di Kabupaten Bengkalis berada pada Kawasan Pesisir Pulau Rupert yang terbagi menjadi dua kecamatan yaitu Kecamatan Rupert dan Kecamatan Rupert Utara. Pada dua kecamatan ini memiliki keindahan pantai yang luar biasa dan menjadi daya tarik wisata cukup signifikan. Awalnya Pulau Rupert merupakan daerah yang terisolir, karena wilayahnya yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka dan jauh dari pusat ibukota Kabupaten Bengkalis membuat pembangunan di Pulau Rupert berjalan sangat lambat. Akibatnya perekonomian masyarakat di Pulau Rupert jauh tertinggal dari daerah lain yang ada di Kabupaten Bengkalis. Namun dengan adanya potensi wisata pantai yang memiliki daya tarik tersendiri, ternyata telah memberikan peluang bagi Pulau Rupert untuk dikembangkan. Apalagi peluang pengembangan wisata Pulau Rupert ternyata masuk prioritas bagi pemerintah pusat melalui Kawasan Strategi Pariwisata Nasional (KSPN). Peluang ini memberikan harapan yang besar bagi seluruh masyarakat di Pulau Rupert untuk terbuka dari keterisoliran dan membangun wilayahnya berdasarkan potensi yang dimiliki.

4. SIMPULAN

Dinamika kebijakan pembangunan pariwisata di wilayah pesisir Pulau Rupert Kabupaten Bengkalis terjadi disebabkan belum munculnya *derivate* kebijakan pembangunan pariwisata yang secara khusus muncul di level provinsi maupun level kabupaten. Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten Bengkalis hanya mengandalkan kebijakan pemerintah pusat dan kebijakan RTRW daerah dalam rangka membangun pariwisata di wilayah pesisir Pulau Rupert Kabupaten Bengkalis. Fakta empiris menemukan bahwa pembangunan pariwisata yang dilakukan di wilayah pesisir Pulau Rupert masih belum terwujud secara maksimal sejak diterbitkannya kebijakan pemerintah pusat yang mengatur tentang kepariwisataan dan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional. Karena pembangunan pariwisata harus didukung dengan kesiapan infrastruktur penunjang yang baik, selain dari tawaran wisata yang menarik. Realitas ini masih tergambar di kawasan wisata Pulau Rupert Kabupaten Bengkalis, walaupun potensi wisata yang dimiliki sangat mendukung untuk dikembangkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- AG, Subarsono. 2011. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik Edisi Revisi*. Bandung: Alfabeta.
- Asra, Abuzar. 2014. *Esensi Statistik Bagi Kebijakan Publik*. Jakarta: In Media.
- Indiahono, Dwianto. 2009. *Perbandingan Administrasi Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Raco, J.R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Kusumanegara, Solahuddin. 2010. *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.

- Nugroho, Riant. 2006. *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Parsons, Wayne. 2005. *Public Policy Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana.
- Prastowo, Andi. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Purwanto, Erwan Agus, dkk. 2015. *Mengembangkan Profesi Analisis Kebijakan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Suwantoro, Gamal. 2004. *Dasar-Dasar Pariwisata*. Yogyakarta: Andi.
- Tahir, Arifin. 2015. *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Tangkilisan, Hassel, Eddi dan T.Saiful. 2004. *Kebijakan Publik Dan Budaya*. Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI).
- Wahab, Solichin Abdul. 2016. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Catrans (Calon Transmigrasi) di UPT Padang Tarok Sp-1 Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat

Weli Erayuana¹, Yesi Nazila², dan Indri Islamiati³

¹Pascasarjana Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau
E-mail: weliyuana84@yahoo.com

²Pascasarjana Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau
Email: nazila_ymajid@yahoo.com

³Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau
Email: indriislamiati3@gmail.com

Abstrak

Pemberdayaan telah muncul menjadi wacana publik di sekitar tahun 1970an ketika pemerintah order baru sedang melancarkan percepatan pembangunan ekonomi yang mensyaratkan adanya stabilitas politik dan keamanan, serta dalam rangka mempercepat pemerataan penduduk, penciptaan lapangan kerja baru guna mengurangi pengangguran dan potensi kemiskinan bagi daerah asal serta mempercepat pengembangan wilayah dan pengelolaan potensi sumber daya alam. Padang tarok SP-1 merupakan wilayah transmigrasi, dari tahapan penjajakan lokasi pada tahun 2007, beriringan waktu berjalan sudah 12 tahun perjalanan panjang menuju transmigrasi, pada tahun 2017 penetapan kawasan transmigrasi di SP-1 Padang Tarok. Pembangunan masyarakat transmigrasi tidak terbatas pada pembangunan fisik, maka pemerintah melakukan pelatihan Calon Transmigrasi (CATRANS) untuk memberikan bekal kepada masyarakat Padang Tarok dengan pemberdayaan melalui pelatihan tersebut guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian masyarakat. Metode yang digunakan ialah kualitatif dengan melakukan 10 tahapan pemberdayaan masyarakat. Tujuan tulisan ini ialah untuk mengulas pelatihan Calon Transmigrasi (CATRANS) untuk meningkatkan kemandirian masyarakat transmigrasi Padan Tarok SP-1 sebagai upaya pembangunan kawasan tertinggal dan perbatasan.

Abstract

Empowerment has emerged as a public discourse around the 1970s when the new order government is launching accelerating economic development requiring political and security stability, and in order to accelerate equitable New employment creation to reduce unemployment and potential poverty for the region and accelerate regional development and natural resources management. The SP-1 Tarok is a transmigration area, from the location-selling phase of 2007, with the running time already 12 years long journey to transmigration, in the year 2017 the establishment of the Transmigration area at SP-1 Padang Tarok. Community development of Transmigration is not limited to physical development, then the government conducted the candidate for Transmigration training (CATRANS) to provide provision To the people of Padang Tarok with empowerment through training to improve community welfare and community independence. The method used is qualitative by performing 10 stages of community empowerment. The purpose of this article is to review the candidates for Transmigration (CATRANS) training to improve the independence of the Society's transmigration of Padan Tarok SP-1 as the development efforts of lagging and border areas.

1. PENDAHULUAN

Padang Tarok SP-1 Kecamatan Kamang Baru merupakan wilayah yang dibuka untuk lahan masyarakat transmigrasi pada tahun 2017 dengan luas 16,34 km² dengan jumlah penduduk 7.195 jiwa. Padang tarok SP-1 merupakan wilayah transmigrasi, dari tahapan penjajakan lokasi pada tahun 2007, beriringan waktu berjalan sudah 12 tahun perjalanan panjang menuju transmigrasi, pada tahun 2017 penetapan kawasan transmigrasi di SP-1 Padang Tarok. Dalam rangka mempercepat pemerataan penduduk, penciptaan lapangan kerja baru guna mengurangi pengangguran dan potensi kemiskinan bagi daerah asal serta mempercepat pengembangan wilayah dan pengelolaan potensi sumber daya alam bagi daerah tujuan tepatnya Nagari Padang Tarok SP-1.

Setelah kesepakatan dengan ‘niniak mamak’ dan pemuka masyarakat di Nagari Padang Tarok yang dituangkan dalam berita acara penyerahan lahan, disusunlah kelengkapan administrasi untuk pembangunan transmigrasi, mulai dari rencana tataruang satuan permukiman (RTSP), pembebasan lahan, dan izin pinjaman pakai kawasan hutan seluas 740 Ha dan daya tampung sebanyak 300 KK. Dimana untuk warga Transmigran ini sudah disepakati bagi yang beragama Muslim dan harus mencari tepatan.

Pembangunan fisik dimulai sejak tahun 2012, tetapi tidak selesai dilaksanakan karena adanya masalah dalam tahap pembangunan, pada tahun 2013 kembali Kabupaten Sijunjung mendapat anggaran pembangunan transmigrasi dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, namun kembali gagal karena sarana dan prasarana belum mendukung. Pada tahun 2016 setelah sempat terhenti 2 tahun, pembangunan fisik dimulai dan telah dilakukan penempatan Warga Transmigrasi sebanyak 30 KK dengan rincian 55 KK dari Klaten, 5 KK dari Kulon Progo, 8 KK dari Agam dan Pariaman (korban gempa 2009) dari 12 KK dari penduduk setempat.

Saat ini selain penempatan penduduk setempat di lokasi Transmigrasi adalah telah terbangunnya jembatan permanen menuju Nagari Padang Tarok sepanjang 120 M dan telah dibukanya akses yang telah dibangun melalui ladang dan perkebunan milik masyarakat. Pada tahun 2017 tidak ada pembangunan permukiman baru di UPT Padang Tarok SP-1, hal ini karena keterbatasan anggaran di Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi RI, untuk itu belum siapnya sarana prasarana penunjang pembangunan di UPT Padang Tarok. Walau tidak adanya pembangunan pemukiman baru, pemerintah memberikan pelatihan CATRANS (Calon Transmigrasi) kepada masyarakat transmigrasi UPT Padang Tarok SP-1.

Pelatihan Calon Transmigran (CATRANS) adalah Pelatihan yang bertujuan antara lain untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya, serta meningkatkan dan melakukan pemerataan pembangunan di daerah dan juga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Pelatihan Calon Transmigrasi (CATRANS) di UPT Padang Tarok Kabupaten Sijunjung. Kabupaten Sijunjung merupakan salah satu dari 19 (sembilan belas) kabupaten/kota di bagian Selatan Propinsi Sumatera Barat, terletak diantara 0°18'43" LS – 1°41'46" LS dan 101°30'52" BT – 100°37'40" BT dengan ketinggian dari permukaan laut antara 100 – 1.250 meter. Kabupaten Sijunjung berada di bagian Timur Provinsi Sumatera Barat, pada jalur utama yang menghubungkan Provinsi Riau dan Propinsi Jambi. Karena terletak di lokasi persimpangan jalur utama yang cukup strategis ini, mengakibatkan Kabupaten Sijunjung memiliki potensi dan prospek yang cerah dalam pengembangan pembangunan bidang ekonomi dan bidang sosial budaya khususnya untuk pengembangan sektor pariwisata.

Secara administratif wilayah Kabupaten Sijunjung dengan luas 313.080 Ha meliputi 8 Kecamatan, 61 Nagari dan 1 desa dengan 299 Jorong, yang wilayahnya berbatasan dengan: Sebelah Utara : Kabupaten Tanah Datar, Sebelah Selatan: Kabupaten Dharmasraya, Sebelah Barat : Kabupaten Solok dan Kota Sawahlunto, Sebelah Timar: Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau

Sebelum terjadi pemekaran dengan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Sijunjung merupakan sebuah kabupaten terluas ketiga di Propinsi Sumatera Barat. Saat ini Kabupaten Sijunjung memiliki luas wilayah ± 3.130,80 Km² atau sekitar 7.41 persen dari luas Sumatera Barat. Kondisi dan topografi Kabupaten Sijunjung bervariasi pada setiap wilayah antara bukit, bergelombang dan dataran. Beberapa kecamatan berada

pada lahan curam dan sangat curam (daerah berbukit), yaitu di Kecamatan Tanjung Gadang, Kecamatan Sijunjung, Kecamatan Sumpur Kudus, dan Kecamatan Lubuak Tarok dengan kemiringan antara 15 – 40 % dan lebih besar dan 40%. Hanya sebagian kecil wilayah Kabupaten Sijunjung yang dikategorikan sebagai dataran.

Pelaksanaan Pelatihan Calon Transmigran (CATRANS) di UPT Padang Tarok SP I Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung Propinsi Sumatera Barat dilaksanakan berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana tehnik di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
2. Surat Perintah Tugas Kepala Balai Latihan Masyarakat Propinsi Riau Nomor. SPT. 51/BLM-PKU/03/2017 tanggal 8 Maret 2017, tentang penunjukan Panitia Penyelenggara, Pemandu dan Peserta Pelatihan Calon Transmigran (CATRANS) di UPT Padang Tarok SP I Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung Propinsi Sumatera Barat.
3. Program Kerja Balai Latihan Masyarakat Pekanbaru Tahun Anggaran 2017.
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Latihan Masyarakat Pekanbaru Tahun Anggaran 2017

2. METODE

Berdasarkan bentuk permasalahannya, penelitian ini digolongkan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Populasi dalam konteks penelitian ini adalah seluruh masyarakat transmigran yang berdomisili di UPT Padang Tarok, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, mengingat jumlah populasi sasaran relatif besar, maka peneliti menetapkan sebagian dari masyarakat transmigran yang berdomisili di Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Padang Tarok sebagai sampel penelitian dengan jumlah 40 peserta pelatihan Calon Transmigrasi (CATRANS), ditentukan dengan menggunakan teknik *Simple Random Sampling*, *Simple Random Sampling* menurut Sugiyono (2008:121) adalah teknik penentuan sampel dimana anggota populasi penelitian mendapatkan kesempatan atau peluang yang sama untuk dapat terpilih sebagai sampel penelitian. Metode pelatihan Calon Transmigrasi (CATRANS) menurut Arif Rohman (2018) dilakukan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pelatihan CATRANS di UPT Padang Tarok SP-1 ini dilakukan mulai dari tahap persiapan, tahap pengkajian, tahap perencanaan, tahap Pemformalisasi Rencana Aksi, tahap implementasi, dan tahap evaluasi (Soekanto, 1987).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahap Persiapan

Tahap persiapan pada pelatihan Calon Transmigrasi (CATRANS) di Padang Tarok SP 1 Kecamatan Kamang Baru yaitu dengan penyiapan petugas yaitu tenaga pemberdaya masyarakat yang dilakukan oleh pelatih penyelenggara (panitia) dan pengajar pelatih internal pemerintah penyelenggara dan eksternal. Selanjutnya panitia pelaksana pelatihan Calon Transmigrasi melakukan penyiapan lapangan yang pada dasarnya diusahakan dilakukan secara *non direvitif* seperti perlengkapan sarana dan prasarana, administrasi, dan ruang belajar peserta. Tahap persiapan tersebut dapat dirangkum pada tabel berikut:

Tabel 1. Persiapan Pelatihan CATRANS

No	Item Persiapan	Jumlah
1	Modul pemberdayaan	40
2	Buku UU tentang Kader Pemberdayaan 40	40
3	Literatur Pemberdayaan Masyarakat	40
4	Perlengkapan Pelatihan	40
5	Sarana Prasarana	

Selain itu, masyarakat peserta pelatihan juga mendapatkan bantuan dana untuk BUMDES yang langsung di dapat dari pemerintah pusat dan Transmigrasi. Masyarakat juga mendapatkan dana bantuan pelatihan langsung dari pemerintah seperti pelatihan lahan tanpa bakar, dana bantuan tersebut berupa 3 unit sinso, dan perlengkapan lainnya.

Tahap Pengkajian

Tahap pengkajian pada pelatihan Calon Transmigrasi (CATRANS) di UPT Padang Tarok, Kecamatan Kamang Baru proses pengkajian dilakukan secara individual melalui kelompok-kelompok masyarakat, juga pengkajian dilakukan dengan pemerintah desa, juga sesuai dengan tingkat pendidikan masyarakat yang menjadi peserta pelatihan. Pada tahap ini, petugas panitia pelatihan dari masyarakat membahas mengenai pelatihan yang akan diselenggarakan seperti pelatihan pemberdayaan masyarakat (Kader) untuk memajukan dan memandirikan suatu desa agar desa dapat maju, terampil dan sejahtera. Selain itu meyakinkan pemerintah desa melalui pelatihan tersebut bahwa masyarakat dapat menggunakan potensi desa tersebut.

Tahap Perencanaan

Petugas pelatihan memberikan langkah-langkah dan materi bagaimana menjadi kader yang baik dan dapat dimanfaatkan untuk kemajuan desanya. Mencoba melakukan *brainstorming* dengan menggali pemikiran masyarakat mengenai permasalahan yang mereka hadapi. Petugas pelatihan Calon Transmigrasi melibatkan seluruh peserta pelatihan untuk dapat memberikan aspirasi mereka terhadap program dan kegiatan apa yang dapat dilakukan untuk kemajuan desa baru mereka. Pada tahap ini, di UPT Padang Tarok masyarakat secara keseluruhan memberikan aspirasi untuk mengembangkan potensi pertanian dan perkebunan, dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah untuk masyarakat transmigran Padang Tarok SP 1.

Tahapan Pemformalisasi Rencana Aksi

Pada tahap ini, petugas pelatih membantu peserta pelatihan Calon Transmigrasi (CATRANS) untuk mengelola lahan pertanian agar tanah yang diberikan pemerintah dapat dimanfaatkan untuk kemajuan masyarakat desa transmigran. Rencana aksi tersebut seperti memberikan pelatihan bagaimana mengelola tanah yang tandus agar menjadi subur, memberikan pelatihan teknik-teknik pertanian yang benar. pelatihan ini juga mengajarkan masyarakat bagaimana membuat pupuk organik dengan memanfaatkan dedaunan yang dicampur bahan kimia dan difermentasikan, sehingga setelah beberapa minggu, masyarakat dapat menggunakan hasil fermentasi pupuk tersebut untuk keperluan pertanian.

Tahap Implementasi

Pada tahap pelaksanaan yaitu tahap kegiatan pelaksanaan program transmigrasi, menurut penelitian Salhudin (2015), sesuai prinsip-prinsip *Participatory Rural Appraisal* (PRA), pelaksanaan kegiatan pelatihan ini sebaiknya diorganisir dan dipimpin oleh anggota masyarakat sendiri, sedangkan petugas pelatih internal dan eksternal hanya mendampingi.

a. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Pelaksanaan Pelatihan Calon Transmigran (CATRANS) dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari kalender dimulai dari tanggal 21 s/d 27 Maret 2017. di UPT Padang Tarok SP I Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung Propinsi Sumatera Barat.

b. Peserta Pelatihan Calon Transmigran (CATRANS) adalah sebanyak 40 (empat puluh) orang peserta yang berasal dari UPT Padang Tarok SP I Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat dengan perincian, Laki-laki 32 orang, Perempuan 8 orang.

Tabel 2. Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah (Orang)	Keterangan
1.	SD	14	-
2.	SLTP	11	-
3.	SLTA	10	-
4.	D3	2	-
5.	S1	-	-

Mengingat jumlah populasi sasaran relatif besar, maka peneliti menetapkan sebagian dari masyarakat transmigran yang berdomisili di Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Padang Tarok sebagai sampel penelitian dengan jumlah 40 peserta pelatihan Calon Transmigrasi (CATRANS), ditentukan dengan menggunakan teknik *Simple Random Sampling*, *Simple Random Sampling*

c. Pemandu

Pemandu yang dilibatkan pada kegiatan Pelatihan Calon Transmigran (CATRANS) sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari :

1. PSM Balatmas Pekanbaru : 1 orang
2. PSM UPTD Balatrans Propinsi Sumatera Barat: 1 orang
3. Pemandu dari Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat: 1 orang

d. Metode pembelajaran

Proses Pelatihan Calon Transmigran (CATRANS) ini menggunakan pendekatan partisipatif dan Andrologi dengan melibatkan peserta secara aktif, yaitu memberikan kesempatan kepada peserta untuk berperan aktif sebanyak banyaknya. Pemandu bertindak sebagai fasilitator yang berperan menciptakan suasana belajar yang nyaman dan memberikan kemudahan berangsungnya proses belajar mengajar.

Proses Pelatihan Calon Transmigran (CATRANS), peserta ditempatkan sebagai orang dewasa yang sedikit banyak telah memiliki pengetahuan dasar tentang Calon Transmigran (CATRANS). Oleh karena itu maka metode yang digunakan dalam isi modul yang meliputi Ceramah Partisipatif, Diskusi Kelompok, *Brainstormin*, Simulasi, Diskusi Pleno, Praktek.

e. Proses Pembelajaran

Tabel 3. Proses Pembelajaran

No.	Materi Pelajaran	JPL
1	2	3
1	Pembentukan Suasana	3
2	Kebijakan penyelenggaraan pelatihan calon transmigran	2
3	Melakukan adaptasi dengan lingkungan	2
4	Melakukan komunikasi	3
5	Penataan lahan pekarangan	4
6	Menentukan kalender pertanian	4
7	Melakukan pengolahan lahan tanaman pangan	16
8	Melakukan penanaman tanaman pangan	8
9	Pemeliharaan tanaman pangan	7
10	Pemanenan tanaman pangan	3
11	RKTL	4
	Jumlah.....	56

f. Hasil yang dicapai

Dari keseluruhan proses pembelajaran baik didalam kelas/ruangan dan praktek telah memberikan hasil kepada peserta antara lain yaitu :

1. Peserta bisa mengidentifikasi Calon Transmigran (CATRANS) di lokasi.
2. Mengetahui serta bisa melakukan cara Calon Transmigran (CATRANS) yang berbasis potensi secara mekanis ataupun mekanisme
3. Membuat Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL).

g. Pelaksanaan Pelatihan Calon Transmigrasi (CATRANS)

Berikut ini disampaikan mengenai proses yang terkait dengan pelaksanaan dan hasil yang di capai dari pelatihan Calon Transmigran (CATRANS) di UPT Padang Tarok SP I Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat

Program pelatihan Calon Transmigran (CATRANS) ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya, serta meningkatkan dan melakukan pemerataan pembangunan di daerah dan juga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Tabel 4. Pencatatan Proses Pembelajaran

No	Hari/ Tgl	Uraian Kegiatan	Dipandu oleh
1	Selasa 21 Maret 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Pembukaan • Membangun Suasana Kondusif • Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan Catrans • Melakukan Adaptasi dengan lingkungan • Melakukan Komunikasi 	Panitia Pemandu
2	Rabu	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan Komunikasi 	Pemandu

	22 Maret 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan Lahan Pekarangan • Menentukan Kalender Pertanian 	
3	Kamis 23 Maret 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Menentukan Kalender Pertanian • Melakukan Pengolahan Lahan Tanaman Pangan 	Pemandu
4	Jumat 24 Maret 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan Pengolahan Lahan Tanaman Pangan 	Pemandu
5	Sabtu 25 Maret 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan Penanaman Tanaman Pangan 	Pemandu
6	Minggu 26 Maret 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeliharaan Tanaman Pangan 	Pemandu
7	Senin 27 Maret 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeliharaan Tanaman Pangan • Pemanenan Tanaman Pangan • RKTL • Evaluasi • Penutupan 	Pemandu Pemandu Panitia Panitia

Tahap Evaluasi

Pada tahap ini, pelatih penyelenggara memberikan evaluasi berupa soal-soal pelatihan yang menyangkut tentang bahan ajar yang diberikan oleh pelatih internal dan eksternal. Setelah itu, pelatih atau pemandu tersebut memberikan berupa *post test* yang dapat mengasah pola pikir masyarakat, sehingga dapat sampai dimana wawasan masyarakat mengenai materi yang berikan oleh pelatih. Fungsi evaluasi yang diadakan menjadi tolak ukur pelatihan tersebut agar kedepannya masyarakat bisa menentukan apa yang terbaik untuk kader dan apa yang harus dilakukan demi kemajuan desa nya.

4. KESIMPULAN

Pelatihan Calon Transmigran (CATRANS) di UPT Padang Tarok SP-1 dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya, serta meningkatkan dan melakukan pemerataan pembangunan di daerah dan juga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Pelatihan dilaksanakan sejak tanggal 21-27 Maret 2019 dengan hasil yang diharapkan masyarakat dapat memiliki kualitas yang baik sehingga masyarakat transmigran dapat membangun daerah kawasannya menjadi lebih sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Suharto, Edi. 2005 *Membangun Masyarakat Membedayakan Rakyat*. Bandung:Refika Aditama
- Fahrudin, Adi. 2012. *Pemberdayaan, Partisipasi dan Penguatan Kapasitas*

- Masyarakat.Bandung Humaniora.
- Najiati, Sri, dkk. 2005 Pemberdayaan Masyarakat Dilahan Gambut. Bogor: Wetlands International.
- Soekanto, Soerjono. 1987 Sosial Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Press.
- Mardikanto, Totok. 2014. CSR (Corporate Social Responsibility) (Tanggung Jawab Sosial Korporasi).Bandung:Alfabeta.
- Hikmat, Harry. 2006. Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: Humaniora.
- Salhudin. 2015. Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Program Transmigrasi Di Unit Permukiman Transmigrans (UPT) Desa Umpanga Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali. Universitas Tadulako.
- Ratminto. 2004. Prospek Kelembagaan Transmigrasi: Demokratisasi Administrasi Program Transmigrasi. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Rohman, Arif. 2018. Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi Di Desa Gunung Putih Dan Desa Tanjung Buka Melalui Revolusi Mental Dalam Mewujudkan Indonesia Bersih Dan Indonesia Mandiri. Universitas Borneo.
- Sugiyono. 2008. Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Pemetaan Masalah Sosial-Pembangunan di Provinsi Riau

Rodi Wahyudi¹ dan Puja Afwanda Mayako²

¹ Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, UIN Suska Riau
Email: rodi.wahyudi@uin-suska.ac.id

² Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau
Email: mayakopuja@gmail.com

Abstrak

Setiap daerah memiliki masalah sosial-pembangunan yang berbeda-beda dan pemerintah daerah dituntut untuk berusaha semaksimal mungkin menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Tujuan artikel ini adalah untuk menjelaskan bagaimana keadaan masalah yang terjadi berkaitan dengan sosial-pembangunan di Provinsi Riau. Data kajian dikumpulkan dengan menggunakan angket sebanyak 1.500 responden yang tersebar di 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Terdapat 10 masalah sosial-pembangunan yang diukur dalam penelitian ini. Data dianalisis dengan uji deskriptif menggunakan SPSS Versi 20. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah sosial-pembangunan yang termasuk dalam kategori tinggi yang dihadapi oleh masyarakat Riau adalah mahalnya harga kebutuhan pokok (mean=3,97), biaya pendidikan mahal (mean=3,94), susah mencari pekerjaan (mean=3,91), pembangunan infrastruktur belum merata (mean=3,85) dan tingginya angka korupsi (mean=3,73). Sedangkan masalah sosial-pembangunan yang termasuk dalam kategori sedang adalah penyelesaian konflik antar suku/agama (mean=2,96), penyelesaian konflik pertanahan (mean=3,23), ketidakadilan penegakan hukum (mean=3,59), banyaknya tempat maksiat (mean=3,60) dan pencegahan kebakaran hutan (mean=3,63). Seluruh pihak dituntut untuk bekerjasama dalam menyelesaikan permasalahan sosial-pembangunan karena setiap rakyat yang tinggal dan menetap di Provinsi Riau menginginkan hidup tenang, bahagia bahkan bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat.

Kata kunci: kebijakan pembangunan, kualitas hidup.

Abstract

Each region has different social-development problems and local governments are required to make every effort to solve the problems that occur in the community. The purpose of this article is to explain how the state of problem that occurs is related to social-development in Riau Province. Study data were collected using a questionnaire of 1,500 respondents spread across 12 regencies/cities in Riau Province. There are 10 social development problems measured in this study. Data were analysed by descriptive test using SPSS Version 20. The result showed that the social-development problem included in the high price of basic needs (mean=3,97), expensive education cost (mean=3,94), hard to find work (mean=3,91), infrastructure development has not been evenly distributed (mean=3,85), and high rates of corruption (mean=3,73). While social-development problems that are included in the medium category are the resolution of conflicts between tribes/religions (mean=2,96), resolution of land conflicts (mean=3,23), law enforcement injustice (mean=3,59), the number of immoral places (mean=3,60), and forest fire prevention (mean=3,63). All parties are demanded to cooperate in solving social development problems because every people who live and settle in Riau Province wants to live in peace, happiness and even not only in the world but also in the hereafter.

Keywords: development policy, quality of life.

1. Pendahuluan

Siapa pun yang diberi amanah sebagai penguasa di dunia ini dituntut untuk mampu memahami apa masalah yang sedang dihadapi oleh rakyatnya, berusaha semaksimal mungkin sesuai kemampuan yang ada untuk menyelesaikan masalah rakyat. Penguasa yang memiliki sifat sayang kepada rakyat pasti tidak akan membiarkan masyarakatnya hidup dalam keadaan kesusahan. Sebaliknya penguasa yang tidak memiliki rasa perhatian kepada rakyat, maka dia tidak akan ada kerisauan melihat masyarakatnya hidup dalam keadaan menderita sekalipun ia hidup dalam kemewahan di istananya.

Indonesia adalah negara kesatuan yang terdiri atas 5 pulau besar dan daerahnya tersebar hingga 34 Provinsi. Untuk mewujudkan kesejahteraan sosial tidak lah mudah bagi Indonesia karna setiap daerah pasti mempunyai masalah sosial-pembangunan yang berbeda-beda. Namun sebelum menyusun program pembangunan yang akan dilakukan sebaiknya setiap pemerintah provinsi telah melakukan pemetaan masalah agar program pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat tempatan. Jangan sampai terjadi, uang APBD sudah habis, proyek sudah selesai tetapi ternyata hanya sekedar menghabiskan anggaran disebabkan manfaat proyek pembangunan tersebut kurang dirasakan oleh masyarakat.

Para ilmuwan telah banyak melakukan kajian berkaitan dengan pelaksanaan program pembangunan masyarakat, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Indah Huruswati (2015) tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Di Desa Tertinggal Melalui Rumah Sosial. Hasil penelitian menyatakan bahwa keberadaan Rumah Sosial, dapat memberi manfaat kepada masyarakat secara langsung. Program Rumah Sosial merupakan cerminan dari tanggung jawab sosial yang tinggi pihak pemerintah terhadap masyarakat di kawasan desa tertinggal. Kunci keberhasilannya adalah sinergi antara pengelola Rumah Sosial. Melalui Rumah Sosial, masyarakat melakukan berbagai kegiatan mulai dari pemetaan masalah sosial hingga pendataan warga desa dan mengelompokkannya ke dalam kategori permasalahan yang sesuai dengan kondisi mereka masing-masing. Setelah itu, mereka membahas berbagai persoalan dan cara mengatasinya. Mereka juga sudah membangun kemitraan dan jejaring kerja untuk kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan warganya. Silvieni Girsang (2015) telah melakukan kajian tentang Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan di Provinsi Riau. Hasil penelitian menyatakan bahwa faktor utama penyebab kemiskinan di Provinsi Riau adalah lambatnya pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan rendah, tingginya angka pengangguran, dan terbatasnya kesempatan kerja.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Iir Piona (2015) di Kabupaten Siak menunjukkan bahwa bahwa penyebab tidak berjalannya strategi yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam mengurangi pengangguran di Kabupaten Siak adalah banyaknya tenaga kerja yang tidak memenuhi syarat dan tidak memiliki keahlian, pencari kerja tidak memenuhi kebutuhan perusahaan, masih rendahnya skill atau kemampuan pencari kerja, kurangnya informasi karena banyak perusahaan yang tidak melapor ke Dinas Tenaga Kerja Siak dan mengambil tenaga kerja dari luar Kabupaten Siak. Strategi yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Siak adalah mengadakan *job fair* dan menyebar informasi lowongan pekerjaan.

Berbeda dengan kajian yang dilakukan oleh Ami dilham dan Umar Maya Putra (2016) tentang Pemetaan Sosial Ekonomi Masyarakat Pematang Siantar (Studi Kasus Masyarakat Siantar). Ami dilham dan Umar Maya Putra telah memetakan potensi dan sumber ekonomi di masyarakat Siantar. Hasil kajian menunjukkan bahwa sumber ekonomi terbesar di Pematang Siantar adalah usaha makanan, minuman dan kerajinan. Usaha ekonomi tersebut dilakukan secara turun temurun, baik khas Pematang Siantar maupun berasal dari Jawa. Aidil, Julham dan Jimmi (2016) pula telah mengkaji tentang Strategi Penyelesaian Masalah Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir di Kepulauan Banda Neira, Kabupaten Maluku Tengah. Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat tiga masalah utama masyarakat Banda Neira, yaitu fasilitas kebersihan, pendapatan masyarakat khususnya nelayan masih rendah dan kurangnya ketersediaan air tawar. Strategi penyelesaian masalah yang dilakukan melalui upaya meningkatkan modal

sosial ekonomi dengan cara memperkuat kelembagaan (kelompok masyarakat dan nelayan) dan kearifan lokal, kelestarian lingkungan dan budaya, serta pemberdayaan masyarakat.

Sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berlangsung 25 September 2015 di New York, Amerika Serikat secara resmi telah menetapkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs sebagai kesepakatan pembangunan global. Sebanyak 193 kepala negara telah hadir, termasuk Wakil Presiden Jusuf Kalla, turut mensahkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 untuk Indonesia. Pembangunan daerah dilaksanakan dengan cara menggerakkan seluruh potensi dan sumber daya yang ada baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Tujuan utama pembangunan daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, peningkatan indeks pembangunan manusia termasuk aspek ketaatan beragama. Pembangunan daerah yang baik didasarkan pada perencanaan yang bertumpu pada penetapan prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan rakyat.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2015-2030 secara resmi menggantikan Tujuan Pembangunan Millennium (MDGs) 2000-2015. SDGs berisi seperangkat tujuan transformatif yang disepakati dan berlaku bagi seluruh bangsa tanpa terkecuali. SDGs berisi 17 Tujuan yaitu:

1. Tanpa kemiskinan
2. Tanpa kelaparan
3. Kehidupan sehat dan sejahtera
4. Pendidikan berkualitas
5. Kesetaraan gender
6. Air bersih dan sanitasi layak
7. Energi Bersih dan Terjangkau
8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi
9. Industri, inovasi dan infrastruktur
10. Berkurangnya kesenjangan
11. Kota dan komunitas berkelanjutan
12. Konsumsi dan Produksi Bertanggungjawab
13. Aksi Terhadap Perubahan Iklim
14. Ekosistem laut
15. Ekosistem darat
16. Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh
17. Kemitraan untuk mencapai tujuan.

Tujuan pembangunan hanya bisa dicapai melalui pembangunan secara menyeluruh dan sinergi antara pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders). Hasil pembangunan pula bukan hanya dinikmati oleh generasi sekarang tetapi juga memikirkan keperluan generasi yang akan datang. Setiap daerah memiliki karakter masyarakat, potensi alam, budaya lokal dan kebutuhan pembangunan yang tidak sama. Begitu juga di Provinsi Riau, terdapat masalah sosial-pembangunan yang berbeda-beda dengan provinsi lain. Tujuan artikel ini adalah untuk menjelaskan apakah masalah yang terjadi berkaitan dengan sosial-pembangunan di Provinsi Riau, sehingga pihak pemerintah Provinsi Riau dapat memastikan apa jenis program pembangunan yang harus diprioritaskan.

2. Metode Penelitian

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Data kajian dikumpulkan dengan menggunakan angket sebanyak 1.500 responden yang tersebar di 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Teknik menentukan jumlah sampel penelitian menggunakan pendapat Tabel Isaac & Michael (1980) bahwa apabila populasi lebih dari 1.000.000 orang, maka jumlah sampel minimum adalah 664 orang. Jumlah penduduk Provinsi Riau sebanyak 6.814.909 (BPS Provinsi Riau, 2019). Terdapat 10 masalah sosial-pembangunan yang diukur dalam penelitian ini yaitu kebutuhan pokok mahal, susah mencari pekerjaan, banyaknya tempat maksiat, tingginya angka korupsi, kembali terjadi pembakaran lahan/hutan, biaya pendidikan mahal, pembangunan infrastruktur belum merata, penyelesaian konflik pertanahan, konflik antar suku/agama dan ketidakadilan dalam penegakan hukum. Setiap item masalah diukur menggunakan skala likert. Data dianalisis dengan uji deskriptif menggunakan SPSS Versi 20. Setelah diperoleh nilai rata-rata (*mean*) peneliti membagi nilai rata-rata tersebut menjadi tiga kategori yaitu 1,0-2,33 termasuk kategori tingkat rendah, 2,34-3,66 termasuk kategori sedang dan 3,67-5,0 termasuk kategori tinggi.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tabel 1 dibawah menunjukkan demografi responden bahwa kebanyakan pekerjaan responden adalah petani (21,8%), jenis kelamin laki-laki sebanyak 943 orang (62,9%) dan perempuan sebanyak 557 orang (37,1%). Mayoritas agama responden adalah Islam (92,3%) berbanding Kristen Katolik yang hanya 44 orang (2,9%) dan Kristen Protestan sebanyak 53 orang (3,5%). Berdasarkan tingkat pendidikan, responden lulusan SLTA sebanyak 614 orang (40,9%), lulusan SLTP sebanyak 333 orang (22,2), lulusan SD/tidak Tamat SD sebanyak 213 orang (14,2%) dan lulusan S1 sebanyak 237 orang (15,8%).

Tabel 1. Demografi Responden

Demografi Responden		Jumlah	Persentase (%)
Pekerjaan	Aparatur Sipil Negara	94	6,3
	Pegawai Swasta	232	15,5
	Petani	327	21,8
	Pedagang	199	13,3
	Buruh	121	8,1
	Nelayan	53	3,5
	Ibu Rumah Tangga	252	16,8
	Pengusaha	62	4,1
	Mahasiswa	143	9,5
	Jenis Kelamin	Laki-Laki	943
Perempuan		557	37,1
Agama	Islam	1384	92,3
	Kristen Katolik	44	2,9
	Kristen Protestan	53	3,5
	Hindu	6	0,4
	Budha	4	0,3
	Kong Hu Cu	9	0,6
	Tingkat Pendidikan	SD/Tidak Tamat SD	213
SLTP		333	22,2
SLTA		614	40,9
DIII (Diploma)		76	5,1
S1		237	15,8
S2		27	1,8
Jumlah		1.500	100,0

Sumber: Data Penelitian, 2019

Table 2 dibawah menunjukkan bahwa masalah sosial-pembangunan yang termasuk dalam kategori tinggi yang dihadapi oleh masyarakat Riau adalah mahalnya harga kebutuhan pokok (mean=3,97), biaya pendidikan mahal (mean=3,94), susah mencari pekerjaan (mean=3,91), pembangunan infrastruktur belum merata (mean=3,85) dan tingginya angka korupsi (mean=3,73). Sedangkan masalah sosial-pembangunan yang termasuk dalam kategori sedang adalah penyelesaian konflik antar suku/agama (mean=2,96), penyelesaian konflik pertanahan (mean=3,23), ketidakadilan penegakan hukum (mean=3,59), banyaknya tempat maksiat (mean=3,60) dan pencegahan kebakaran hutan (mean=3,63). Dari 10 masalah social-pembangunan yang dikaji tidak ada satupun yang termasuk kategori rendah. Lima item termasuk kategori tinggi dan lima item pula masuk kategori sedang.

Tabel 2. Uji Deskriptif Pemetaan Masalah Sosial-Pembangunan di Provinsi Riau

Uji Deskriptif Pemetaan Masalah Sosial-Pembangunan di Provinsi Riau	Mean	Interpretasi
Kebutuhan Pokok Mahal	3,97	Tinggi
Susah Mencari Pekerjaan	3,91	Tinggi
Banyaknya tempat maksiat	3,60	Sedang
Tingginya angka korupsi	3,73	Tinggi
Kembali terjadi pembakaran lahan/hutan	3,63	Sedang
Biaya pendidikan mahal	3,94	Tinggi
Pembangunan infrastruktur belum merata	3,85	Tinggi
Penyelesaian konflik pertanahan	3,23	Sedang
Konflik antar suku/agama	2,96	Sedang
Ketidakadilan dalam penegakan hokum	3,59	Sedang

Sumber: Data Penelitian, 2019

Mahalnya Harga Kebutuhan Pokok

Negara yang baik adalah negara yang mampu menjamin kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Menurut kamus bahasa Indonesia, kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti aman, sentosa, makmur dan selamat (Poerwadarminta,1999; 887) atau dapat diartikan sebagai kata atau ungkapan yang menunjuk kepada keadaan yang baik atau suatu kondisi dimana orang-orang yang terlibat di dalamnya berada dalam keadaan sehat, damai dan makmur. Dalam arti yang lebih luas kesejahteraan adalah terbebasnya seseorang dari jeratan kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga dia memperoleh kehidupan yang aman dan tentram secara lahiriah maupun batiniah.

Pertanyaannya adalah bagaimana mungkin masyarakat Riau termasuk kategori makmur dan sejahtera kalau masih mengeluh dengan mahalnya harga kebutuhan pokok?. Sejak beberapa bulan terakhir harga sawit, karet dan kelapa sangat murah padahal sumber utama masyarakat desa di Riau adalah dari tiga komoditas tersebut. Rendahnya daya beli masyarakat akibat pendapatan berkurang dari sebelumnya. Di sisi lain pula harga sembako naik dengan alasan hari raya, gagal panen di Sumatera Barat, jalan putus dan banyak lagi alasan yang disampaikan oleh pedagang. Keadaan ini diperparah oleh kurangnya kesempatan kerja di sektor lain (di luar pertanian dan perkebunan). Kajian ini mendukung apa yang ditulis oleh Silvieni Girsang (2015) bahwa faktor utama penyebab kemiskinan di Provinsi Riau adalah lambatnya pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan rendah, tingginya angka pengangguran, dan terbatasnya kesempatan kerja.

Kebijakan dan program nyata dari pihak pemerintah Provinsi Riau bersama seluruh pemerintah kabupaten/kota sedang ditunggu oleh masyarakat agar harga kebutuhan pokok dapat diawasi agar para pedagang dan grosir tidak sesuka hati menaikkan harga barang. Begitu pula dengan harga sawit, karet dan kelapa dapat kembali dijual dengan harga normal sehingga daya beli masyarakat kembali meningkat.

Biaya Pendidikan Mahal

Berdasarkan UU No.11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dijelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Salah satu indikator utama kesejahteraan sosial adalah aspek pendidikan. Apabila masyarakat tidak mampu menyekolahkan anak dengan alasan tidak mampu karena mahal biaya sekolah (buku, LKS/Modul, uang SPP, uang pembangunan). Walaupun pihak Dinas Pendidikan sering melakukan himbauan agar jangan ada pungutan di sekolah, namun kenyataannya masih sering diberitakan oleh wartawan tentang adanya sekolah yang melakukan pungutan resmi dan tidak resmi (liar).

Apabila masyarakat Riau mampu menyekolahkan anak-anak mereka sampai perguruan tinggi, maka akan lahir masyarakat maju dan sumber daya manusia unggul. Sebaliknya kalau masih banyak masyarakat yang tidak sekolah, buta huruf, jahil maka akan sangat sulit mendidik masyarakat agar tertib, disiplin, beradab bahkan yang lebih parah lagi hasil pembangunan yang sudah ada bisa dirusak akibat rendahnya pendidikan masyarakat. Cara berfikir masih primitif (kampungan), suka merusak fasilitas umum, perilaku menyimpang yang semua itu disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan.

Lembaga pendidikan yang berkualitas baik sarana maupun tenaga pengajar juga sangat berpengaruh terhadap kualitas anak didik. Kerjasama seluruh pihak dalam mencerdaskan anak bangsa termasuk diantaranya adalah jangan sampai biaya pendidikan mahal sehingga anak bangsa terhalang untuk menuntut ilmu.

Susah Mencari Pekerjaan

Terdapat 2 faktor utama kesulitan mencari pekerjaan. Pertama faktor internal yaitu rendahnya skill, tidak ada keterampilan, kebiasaan suka memilih-milih pekerjaan (harus dalam ruangan ber-AC, gaji besar). Padahal apapun pekerjaan yang dilakukan asalkan tidak bertentangan dengan aturan agama (halal) dan tidak bertentangan dengan pemerintah tidak ada masalah. Terkadang masih ada kelompok penganggur yang merasa hina kalau kerja rendah (takut hina dalam pandangan masyarakat). Padahal dulu Ali *radhiallahu 'anhu* pernah bekerja menyiram kurma di kebun seorang Yahudi dengan upah setiap ember satu biji buah kurma. Kerja halal tidak hina, yang hina adalah menjadi peminta-minta. Faktor kedua adalah faktor eksternal yaitu peluang pekerjaan terbatas dan peminatnya sangat banyak. Biasanya ini adalah peluang pekerjaan di kantor atau perusahaan.

Penulis setuju dengan apa yang ditulis oleh Menurut Iir Piona (2015) bahwa banyaknya tenaga kerja yang tidak memenuhi syarat dan tidak memiliki keahlian, pencari kerja tidak memenuhi kebutuhan perusahaan, masih rendahnya skill atau kemampuan pencari kerja, kurangnya informasi karena banyak perusahaan yang tidak melapor ke Dinas Tenaga Kerja dan mengambil tenaga kerja dari luar.

Pembangunan Infrastruktur Belum Merata

Konsep ideal pembangunan adalah adil dan merata. Yang dibangun bukan hanya di perkotaan tetapi juga di pedesaan. Yang mendapat jatah pembangunan bukan hanya daerah yang dulu menang pilpres/pilkada tetapi seluruh rakyat memiliki hak yang sama untuk mendapat jatah pembangunan. Namun akibat keterbatasan anggaran dan banyaknya wilayah yang harus dibangun maka masih terdapat daerah yang belum ada jalan (kalaupun ada masih berlumpur), menyeberang sungai menggunakan jembatan kayu (terkadang sudah mulai lapuk).

Pembangunan berkelanjutan daerah dilaksanakan dengan cara menggerakkan seluruh potensi dan sumber daya yang ada baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Tujuan utama pembangunan daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, peningkatan indeks pembangunan manusia termasuk aspek ketaatan beragama. Pembangunan daerah yang baik didasarkan pada perencanaan yang bertumpu pada penetapan prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan rakyat.

Pembangunan Daerah merupakan suatu usaha yang sistematis dari berbagai pelaku, baik umum, pemerintah, swasta, maupun kelompok masyarakat lainnya. Usaha ini akan melibatkan aspek fisik, sosial, ekonomi dan aspek lingkungan lainnya sehingga membuka peluang baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keterlibatan multi-elemen ini akan mengurangi ketimpangan pembangunan antara daerah dan sub-daerah serta antara warga masyarakat (pemerataan dan keadilan), memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah dan mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Tingginya Angka Korupsi

Korupsi adalah musuh bersama. Tidak ada darah dan daging yang tumbuh dari sumber yang haram kecuali akan dimakan api neraka. Siapapun pejabat hari ini yang masih suka membawa rezki haram (hasil korupsi) ke rumah dan diberikan kepada anak dan istri serta keluarga mereka sama artinya pejabat tersebut membakar keluarga mereka sendiri.

Ibnu Khaldun (1332-1406 M) menulis dalam kitab *Muqaddimah* bahwa apabila suatu bangsa ingin mencapai kemajuan maka mereka harus memiliki pegawai dengan dua syarat utama yaitu pertama sifat amanah dan kedua profesional. Menurut Rodi Wahyudi (2016) Perbaikan aspek internal individu adalah usaha menanamkan nilai-nilai kebaikan yang bersumber dari ajaran agama dan nilai moral. Apabila seorang pegawai yakin bahwa yang memberi rezki adalah Allah SWT, maka dia tidak mencuri, korupsi dan menerima uang syubhat (perkara yang diragukan) apalagi uang haram. Apabila seorang pegawai pemerintah yakin bahwa Allah SWT maha melihat, maka dia tidak akan berani membuat kwitansi palsu, yang merugikan uang negara. Memang benar pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak melihat, tetapi seorang pejabat yakin bahwa Allah SWT sedang melihat setiap saat dan keadaan apa saja perbuatannya, maka dia tidak akan melanggar nilai-nilai etika dalam bekerja. Sebaliknya jika seorang pegawai tidak ada rasa takut kepada azab Allah SWT, tidak yakin dengan janji-janji Allah SWT bahwa di akhirat nanti setiap amal akan di hisab, setiap orang akan ditanya untuk apa umur dihabiskan, kemana masa muda digunakan, dari mana harta diperoleh

dan kemana dibelanjakan serta adakah ilmu sudah di amalkan atau belum. Jangan heran jika di mananama kantor ditemukan berbagai jenis pelanggaran terhadap nilai etika.

Menurut Syed Hussein Alatas (1981), terdapat beberapa ciri perilaku korupsi yang dilakukan oleh pegawai pemerintah yaitu: a. korupsi biasanya melibatkan lebih dari satu orang. b. umumnya bersifat rahasia, kecuali di tempat yang telah merajalela sehingga kelompok yang berkuasa tidak perlu lagi menyembunyikan perbuatan mereka. c. melibatkan kewajiban dan keuntungan timbal balik. d. pelaku korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum, mereka mampu untuk mempengaruhi keputusan tersebut. e. setiap tindakan korupsi mengandung penipuan. f. setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan. g. perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat. Suatu perbuatan dikatakan perilaku korupsi apabila seorang pegawai menerima pemberian dari seseorang dengan maksud agar pegawai tersebut memberi perhatian istimewa kepada si pemberi, padahal pekerjaan tersebut sudah menjadi kewajiban pegawai. Fenomena lain yang boleh dipandang sebagai korupsi adalah pengangkatan sanak-saudara, teman atau rekan politik dalam institusi pemerintah (nepotisme).

4. Kesimpulan dan Saran

Apabila kita mau belajar dari kesuksesan Negara lain dalam membangun Negara mereka, maka kita harus akui dengan jujur bahwa mereka mengawalinya dengan pemetaan masalah, terdapat data valid mengenai apa sebenarnya yang sedang terjadi di masyarakat, program pembangunan apa yang paling penting dan sangat mendesak untuk segera dibangun. Hasil penelitian ini telah membuktikan bahwa lima masalah sosial-pembangunan yang termasuk dalam kategori tinggi yang dihadapi oleh masyarakat Riau adalah mahalnya harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan mahal, susah mencari pekerjaan, pembangunan infrastruktur belum merata dan tingginya angka korupsi. Setelah diketahui masalah social-pembangunan yang sedang dihadapi oleh masyarakat maka penelitian berikutnya adalah sudahkan program pembangunan yang telah dilaksanakan benar-benar seperti yang diinginkan masyarakat. Kalaulah masalah kehidupan dunia difikirkan dan diurus begitu juga sebaiknya bagi masyarakat melayu Riau yang kuat mengamalkan ajaran agama agar jangan melupakan program pembangunan yang akan membawa masyarakat untuk bisa dapar ridho Allah SWT dan masuk ke dalam surga.

Ucapan Terimakasih*

Penulis sangat berterima kasih atas dukungan dana dari pihak pemerintah Provinsi Riau dan dukungan moral dari Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau agar dosen muda terus bisa berkarya.

Daftar Pustaka

- Aidil M.Firdaus, Julham MS. Pelupessy, dan Jimmi Rp.Tampubolon. (2016).Strategi Penyelesaian Masalah Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir di Kepulauan Banda Neira, Kabupaten Maluku Tengah. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*. Volume 11 Nomor 1.Halaman 55-74.
- Aguswan dan Sulaiman Zuhdi. (2018). Pemetaan Data dan Informasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. *Jurnal Niara*. Volume 11 Nomor 1. Halaman 26-34.

- Ami Dilham dan Umar Maya Putra. (2016). Pemetaan Sosial Ekonomi Masyarakat Pematang Siantar (Studi Kasus Masyarakat Siantar). *Jurnal Human Falah*. Volume 3 Nomor 1. Halaman 75-92.
- Firdaus .(2016). yang berjudul Evaluasi Proyek Pembangunan Sosial Pada Kelompok Masyarakat Kawasan Hutan Mbeling Kab. Mangarai Barat,Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Ilmu Sosial*. Volume 5 Nomor 1. Halaman 13-22.
- Ibnu Khaldun. (2008). Muqaddimah (Terjemahan Masturi Irham, Malik Supar dan Abidun Zuhri). Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Indah Haraswati. (2015). Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Desa Tertinggal Melalui Rumah Sosial. *Jurnal Sosio Konsepsia*.Volume 02 Nomor 02. Halaman 74-90.
- Iir Piona. (2015). Strategi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam Mengurangi Jumlah Pengangguran di Kabupaten Siak. *Jurnal Jom Fisip*. Volume 2 Nomor 1. Halaman 1-12.
- Novita Dewi. (2017). Pengaruh Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau. *Jurnal Jom Fekon*. Volume 4 Nomor 1. Halaman 870-882.
- Rodi Wahyudi. (2016). Hubungan Perilaku Korupsi dengan Ketaatan Beragama di Kota Pekanbaru. *Jurnal Integritas KPK*. Volume 2 Nomor 1, Halaman: 191-214.
- Silvieni Girsang. (2015). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan di Provinsi Riau. *Jurnal Jom Fekon*. Volume 2 Nomor 2. Halaman 1-12
- Syed Hussein Al-Attas. (1981). The sociology of corruption. Diterjemahkan oleh Al Ghozie Usman. Jakarta: LP3ES.
- Teuku Fahmi dan M.Zaimuddin Akbar . (2015). Pemetaan Derah Rawan Konflik Sosial di Kabupaten Tanggamus. *Jurnal Sosiologi*.Volume 17 Nomor 2. Halaman 111-121
- Waluyo Zulfikar .(2017). Dampak Sosial, Ekonomi dan Politik dalam Pembangunan Bandara Udara Kertajati di Kabupaten Majalengka. *Jurnal Caraka Prabhu*. Volume 01 Nomor 1. Halaman 58-77

Optimalisasi Pengelolaan Pembangunan Kawasan Tertinggal dan Kawasan Perbatasan di Provinsi Riau

Rafiah Putri

Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau
Email: rafiahputricantik@gmail.com

Abstrak

Pembangunan Nasional Negara Indonesia yang tujuan umumnya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan pemerataannya di seluruh wilayahnya, sampai dengan saat ini masih banyak timbul masalah. Salah satu masalah yang masih dijumpai adalah belum berkembangnya wilayah perbatasan antar wilayah administrasi dalam Negara Indonesia. Wilayah perbatasan selama ini identik dengan wilayah pedesaan, wilayah pertanian, wilayah miskin, dll. Untuk pengembangannya diperlukan kebijaksanaan yang sesuai secara lokalita, yang disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan hambatan pengembangan di wilayah perbatasan tersebut. Pelaksanaan pembangunan khususnya di wilayah pesisir di provinsi Riau belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama yang berdiam di daerah pedesaan. Terjadinya kesenjangan antara daerah pedesaan dan perkotaan disebabkan karena bias dan distorsi pembangunan yang lebih banyak berpihak kepada ekonomi perkotaan. Akibatnya timbul daerah-daerah tertinggal yang miskin dan terkebelakang. Dalam upaya memacu pembangunan dari sisi aspek ekonomi dan sosial di daerah tertinggal, maka program pembangunan pedesaan harus memprioritaskan tiga aspek utama, yaitu: 1) Peningkatan Ekonomi Rakyat (Mengentaskan Kemiskinan); 2). Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia (Kebodohan); 3). Pembangunan Infrastruktur. Bertujuan untuk mendeskripsikan tentang Upaya Optimalisasi Pengelolaan Pembangunan Kawasan Tertinggal dan Kawasan Perbatasan Di Provinsi Riau. Fakta yang terjadi bahwa wilayah perbatasan masih sangat rawan terhadap berkembangnya penyelundupan baik berupa barang maupun manusia secara illegal. Kemiskinan menjadi salah satu faktor penyebab terjerumusnya warga perbatasan menjadi pelaku maupun sebagai korban. Serta masih banyaknya kawasan yang ada di Provinsi Riau yang tertinggal dengan angka kemiskinan serta permasalahan sosial lain.

Kata Kunci: kemiskinan, wilayah perbatasan, wilayah tertinggal, pembangunan wilayah.

Abstract

The National Development of the State of Indonesia, whose general goal is to realize the people's welfare and equality throughout the region, still presents many problems. One problem that is still encountered is the undeveloped border area between administrative regions within the State of Indonesia. The border region has been synonymous with rural areas, agricultural areas, poor areas, etc. For its development, locally appropriate policies are needed, based on the results of identification of potential and development constraints in the border region. Implementation of development, especially in coastal areas in Riau province has not been able to improve the welfare of the community, especially those living in rural areas. The gap between rural and urban areas is caused by development biases and distortions that favor the urban economy. As a result, poor and disadvantaged areas arise. In an effort to spur development in terms of economic and social aspects in disadvantaged areas, the rural development program must prioritize three main aspects, namely: 1) Improvement of the People's Economy (Reducing Poverty); 2). Improving the Quality of Human Resources (Folly); 3). Infrastructure development. Aims to describe the Efforts to Optimize Management of Development of Underdeveloped Areas and Border Areas in Riau Province. The fact that the border region is still very vulnerable to the development of smuggling in the form of goods and humans illegally. Poverty is one of the factors causing the fall of border residents to become perpetrators and victims. And there are still many areas in Riau Province that are lagging behind with poverty and other social problems.

Keywords: Poverty, Border Areas, Underdeveloped Areas, Regional Development

1. Pendahuluan

Optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki. Dalam beberapa literatur manajemen,

tidak dijelaskan secara tegas. Optimalisasi hanya dapat diwujudkan apabila dalam pewujudannya secara efektif dan efisien. Optimalisasi pembangunan ialah bagaimana upaya terbaik dalam mengusahakan terciptanya pembangunan yang maksimal memperdayakan yang ada sesuai potensi wilayah tersebut baik dari manusia dan alamnya, serta menciptakan pembangunan fisik dan non fisik. Ketimpangan wilayah merupakan suatu aspek yang umum terjadi di setiap negara baik negara miskin, negara berkembang, bahkan negara maju sekalipun memiliki masalah ketimpangan antar wilayah walaupun dengan ukuran yang berbeda-beda.

Menurut *Neo Clasic*, ketimpangan wilayah ini terjadi karena setiap daerah memiliki perbedaan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Karena itu tidak mengherankan apabila ada yang disebut daerah maju dan daerah yang terbelakang (Lukman dan Ghozali, 2013). Daerah yang tidak mengalami kemajuan yang sama disebabkan karena kurangnya sumber-sumber yang dimiliki; adanya kecenderungan pemilik modal (investor) memilih daerah perkotaan atau daerah yang memiliki fasilitas seperti prasarana perhubungan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, perbankan, asuransi juga tenaga terampil. Disamping itu juga adanya ketimpangan redistribusi pembagian pendapatan dari pemerintah pusat atau provinsi kepada daerah seperti provinsi atau kecamatan (Barika, 2012).

Proses pembangunan daerah diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan secara optimal. Setiap daerah atau wilayah pada dasarnya mengalami pertumbuhan ekonomi yang berbedabeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Pertumbuhan ekonomi yang cepat yang tidak diimbangi dengan pemerataan, akan menimbulkan ketimpangan wilayah. Ketimpangan wilayah tersebut terlihat dengan adanya wilayah yang maju dengan wilayah yang terbelakang atau kurang maju. Hal ini dikarenakan tidak memperhatikan apakah pertumbuhan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau perubahan struktur ekonomi (Nurhuda, 2013).

Provinsi Riau merupakan salah satu Provinsi / Daerah yang cukup kaya baik dengan hasil bumi berupa migas dan hasil perkebunan berupa kelapa sawit, nenas, kelapa, karet dan lainnya. Perbedaan kebijakan ekonomi masing-masing daerah akan berdampak pula kepada pertumbuhan ekonomi tiap-tiap daerah. Semenjak diberlakukannya UU No. 32 dan 33 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Hal ini menyebabkan peranan pemerintah daerah sangat dominan dalam menentukan arah dan kebijakan ekonomi di daerahnya masing-masing. Pelaksanaan pembangunan di daerah Riau, khususnya di wilayah pesisir belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama yang berdiam di daerah pedesaan. Terjadinya kesenjangan antara daerah pedesaan dan perkotaan disebabkan karena bias dan distorsi pembangunan yang lebih banyak berpihak kepada ekonomi perkotaan. Akibatnya timbul daerah-daerah tertinggal yang miskin dan terbelakang.

2. Metodologi

Wilayah kajian ini meliputi beberapa kawasan perbatasan dan kawasan tertinggal yang tersebar di Provinsi Riau. Termasuk juga kawasan perbatasan dengan Kabupaten/ Kota yang relatif lebih maju; yang setara; maupun yang baru terbentuk, sehingga kesejahteraan masyarakatnya tidak lebih baik yang dibandingkan. Berikutnya dilakukan analisis dari aspek sektoral dan regional yang berpengaruh terhadap pengembangan kawasan perbatasan. Data-data kajian diperoleh dari berbagai sumber, seperti berbagai

hasil studi tentang perbatasan, makalah seminar, berita online, peraturan dan perundangan tentang perbatasan. Berbagai data dan informasi tersebut dianalisis secara kualitatif, kemudian dilakukan diskusi dan seminar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Penelitian ini merupakan kajian menemukan Strategi Pengembangan Daerah Tertinggal dalam Upaya Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan di Kabupaten di Provinsi Riau. Sasaran yang hendak dicapai adalah memacu pertumbuhan dan percepatan pembangunan di daerah tertinggal dengan sasaran peningkatan taraf hidup masyarakat desa tertinggal. Untuk itu perlu diinventarisir sumberdaya yang berpotensi untuk dikembangkan dari sisi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat tempatan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui pendekatan konsep ekonomi kerakyatan dari berbagai aspek, serta disesuaikan dengan keadaan fisik, ekonomi, dan kebijakan pemerintah.

3. Pembahasan dan Hasil

Menurut Neo Klasik, ketimpangan wilayah ini terjadi karena setiap daerah memiliki perbedaan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu Perubahan penerimaan dan belanja daerah akan langsung mempengaruhi kinerja pembangunan daerah bersangkutan. Menurut Williamson secara umum ada beberapa faktor yang diduga sebagai penyebab terjadinya peningkatan disparitas antar wilayah, (John Friedman, dkk, 1979) adalah (1) Migrasi penduduk yang produktif (usia kerja) dan memiliki keahlian, (2) Investasi cenderung dilakukan di daerah yang telah berkembang, (3) Kebijakan pemerintah, disadari atau tidak cenderung mengakibatkan terkonsentrasinya sarana dan prasarana kegiatan sosial ekonomi di daerah yang telah berkembang – karena adanya kebutuhan yang lebih besar. Menurut Bappenas (2013) pertumbuhan ekonomi Indonesia perlu terus diarahkan dalam mewujudkan pemerataan yang berkeadilan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan dan menikmati hasil pembangunan (*inclusiveness*).

Kawasan Perbatasan

Beberapa permasalahan secara umum dijumpai di daerah perbatasan diantaranya:

1. Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan potensi kawasan perbatasan serta kurang pengawasan
2. Penggunaan PAD tidak sesuai kebutuhan
3. Minimnya penyediaan sarana/prasarana dasar di kawasan perbatasan
4. Kawasan perbatasan senantiasa tertinggal dan terisolir
5. Tingkat kesejahteraan masyarakatnya yang rendah dan aksesibilitas yang kurang.
6. Kegiatan perekonomian lebih cenderung ke di negara malaysia
7. Maraknya penyeludupan narkoba, barang black market dan manusia ilegal
8. Perekonomian sangat lemah bahkan rata-rata penduduk
9. Human trafficking
10. Illegal fishing
11. Masyarakat tersebut sering melakukan emigrasi.
12. Implementasi kebijakan sering mengalami penundaan dan keterlambatan.
13. Pelaksanaan program pembangunan sering terjadi tumpang tindih kebijakan antara instansi yang terkait program pembangunan kawasan perbatasan.

Penyelesaian permasalahan diatas, terutama daerah perbatasan Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis yang dipaparkan tersebut akan bisa dipecahkan dan

masyarakat dapat merasakan keadilan pembangunan yang merata dan pemerintah mampu membuat kesejahteraan masyarakat meningkat apabila:

1. Adanya “*political will*” dari pemerintah itu sendiri, baik Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten serta lembaga sosial masyarakat dan pihak swasta. Karena serangan bagi suatu bangsa tidak lagi dengan perang fisik tetapi serangan narkoba, ada *human trafficking, illegal fishing, illegal logging* yang itu akan dilakukan melalui daerah perbatasan;
2. Mengenali dan mengkaji secara mendalam mengenai potensi wilayah dan *local wisdom* yang ada, sehingga perkembangan dan pengembangan yang dilakukan kedepan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat setempat;
3. Memahami sosial-ekonomi serta sosial-budaya penduduk setempat;
4. Mengidentifikasi ketersediaan sarana dan prasarana untuk kegiatan pelayanan publik bagi masyarakat setempat;
5. Kebijakan pembangunan daerah perbatasan serta perumusan strategi pengembangan yang sesuai dan lokalita serta berkoordinasi dan bersinergi dengan antara pusat dan daerah agar tidak terjadi tumpang tindih program dan pada akhirnya dapat menjadi sebab terhambat dan lambannya pembangunan.
- 6.

Kawasan Tertinggal

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Perencanaan Pusat Statistik Provinsi Riau pada tahun 2018 tingkat kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti mencapai 24,96 persen. Kemiskinan ini tertinggi tingkat provinsi Riau dengan pendapatan perkapita Rp 445.025/bulan pada tahun 2017 menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. Kendala dalam Pembangunan Ekonomi di Pedesaan Pembangunan ekonomi pedesaan terutama di daerah yang terpencil (tertinggal) tidak terlepas dari pembangunan Belum adanya pengembangan dan pemanfaatan potensi kawasan tersebut baik seperti :

1. Minimnya penyediaan sarana/prasarana seperti transportasi, fasilitas umum.
2. Kawasan senantiasa tertinggal dan terisolir jarak satu dan yang lain menempuh waktu yang panjang
3. Tingkat kesejahteraan masyarakatnya yang rendah
4. Pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak dibarangi oleh penyediaan pangan
5. Perekonomian sangat lemah
6. Jaringan internet/ koneksi yang lambat serta terbatas
7. Listrik yang terbatas di wilayah tertentu
8. Penggunaan PAD dan APBN tidak tepat sasaran

Program Pembangunan Daerah Tertinggal sejalan dengan pengembangan ekonomi Indonesia yang bertumpu kepada ekonomi kerakyatan, maka pemerintah kabupaten/kota melakukan pembangunan ekonomi harus berbasis kerakyatan. Maka program pembangunan pedesaan harus memprioritaskan ketiga aspek berikut:

1. Peningkatan Ekonomi Rakyat (Mengentaskan Kemiskinan).
2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia (Pengetasan Kebodohan).
3. Pembangunan Infrastruktur.

Untuk mendukung mengembangkan perekonomian daerah yang berbasis kerakyatan, dibutuhkan dukungan kebijakan dalam bentuk: 1) memberikan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, serta perubahan struktur masyarakat dengan pengembangan perencanaan pembangunan yang komprehensif/partisipatif, demokratis, aspiratif dan transparan; 2)

melakukan restrukturisasi dan redistribusi kepemilikan aset produktif kepada masyarakat pedesaan dengan memakai standar skala ekonomi keluarga sejahtera . 3) melakukan optimalisasi peran dan fungsi seluruh perusahaan agribisnis dan *forestry* (dengan Peraturan Daerah) sebagai investor di pedesaan untuk melakukan reinvestasi melalui kemitraan pola perusahaan patungan bersama pemerintah dan masyarakat pedesaan dalam membangun sistem perekonomian pedesaan; 4) mengembangkan usaha kecil, menengah, koperasi dan usaha mikro lainnya dengan cara peningkatan dan pengembangan keterkaitan dan kemitraan usaha yang saling menguntungkan dan saling membutuhkan; 5) mengembangkan bidang-bidang yang mempunyai keterkaitan dengan pengembangan bidang-bidang lainnya yaitu bidang industri, pertanian dalam arti luas, bidang transportasi, perdagangan, pariwisata serta bidang kelautan yang cukup strategis sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah; 6) meningkatkan upaya pembangunan infrastruktur terutama perhubungan darat, laut dan udara untuk meningkatkan aksesibilitas dan kelancaran lalu lintas orang dan barang; 7) mendorong upaya peningkatan nilai tambah (*value added*) sebagai produk pertanian yang dihasilkan oleh petani di pedesaan melalui sistem agribisnis dan agroindustri yang menekankan pada upaya pengembangan berbagai industri turunan; 8) memberdayakan lembaga dan organisasi ekonomi masyarakat di pedesaan sebagai wadah pengembangan kegiatan usaha produktif dan memberdayakan masyarakat miskin serta mendorong berkembangnya lembaga-lembaga keuangan mikro dalam rangka mendekatkan masyarakat pada akses permodalan guna mengembangkan ekonomi kerakyatan.

4. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Provinsi Riau masih sangat banyak daerah perbatasan dan daerah tertinggal yang pembangunannya masih belum terlaksana secara maksimal, sehingga dengan adanya penelitian secara mendalam tersebut akan ditemukan jalan pemecahan yang konkrit bagi perkembangan wilayah perbatasan dan wilayah tertinggal agar kesejahteraan serta keadilan tanpa terkecuali. Belum optimalnya pembangunan di wilayah tersebut perlunya perhatian dari pemerintah secara khusus untuk dapat meningkatkan pembangunan dan memberantas masalah kemiskinan serta gejala sosial yang timbul di akibatkan oleh kesenjangan pembangunan wilayah satu dan yang lain. Pada kawasan perbatasan masih di jumpai permasalahan seperti *human trafficking*, *illegal fishing* berdasarkan data yang diperoleh dari media *Online* tahun 2018 bulan Januari lalu 23 wanita menjadi korban, illegal logging banyaknya barang black market terutama daerah perbatasan Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis. Maka upaya yang dapat dilakukan ialah :

1. Adanya “political will”
2. Mengenali dan mengkaji secara mendalam mengenai potensi wilayah dan local.
3. Memahami sosial-ekonomi serta sosial-budaya penduduk setempat;
4. Mengidentifikasi ketersediaan sarana dan prasarana
5. Kebijakan pembangunan daerah perbatasan serta perumusan strategi pengembangan yang sesuai dan lokalita serta berkoordinasi dan bersinergi dengan antara pusat .

Untuk mendukung mengembangkan perekonomian daerah tertinggal dibutuhkan kebijakan dalam bentuk:

1. Memberikan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
2. Melakukan restrukturisasi dan redistribusi

3. Melakukan optimalisasi peran dan fungsi seluruh perusahaan agribisnis dan forestry
4. Mengembangkan usaha kecil, menengah, koperasi dan usaha mikro
5. Mengembangkan bidang-bidang yang mempunyai keterkaitan dengan pengembangan yang dimiliki daerah;
6. Meningkatkan upaya pembangunan infrastruktur terutama perhubungan darat, laut dan udara untuk meningkatkan aksesibilitas dan kelancaran lalu lintas orang dan barang;
7. Mendorong upaya peningkatan nilai tambah (*value added*)
8. Memberdayakan lembaga dan organisasi ekonomi masyarakat di pedesaan.

Adanya desentralisasi dan otonomi daerah membantu daerah mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Dimana tujuan desentralisasi salah satunya pemerataan pembangunan dimana daerah lebih paham pada kebutuhan apa yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Melalui dana PAD dan dana lainnya diharapkan sebaiknya pemerintah sendiri lebih bijak membelanjakan anggaran dan menyusun program sesuai kebutuhan daerah tersebut.

Saran

Kebijakan Pembangunan Wilayah Perbatasan Perbatasan merupakan kawasan strategis karena letaknya yang langsung berhadapan dengan wilayah lainnya, tetapi potensi yang sangat besar ini belum dimanfaatkan secara optimal, sehingga wilayah perbatasan tergolong dalam kawasan tertinggal, terisolir dan belum berkembang. Untuk menjadikan kawasan perbatasan sebagai daerah yang tidak lagi tertinggal dari aspek pembangunan, maka perlu dirancang seperangkat kebijakan pembangunan yang komprehensif dan terpadu. Kebijakan pembangunan kawasan perbatasan merupakan bagian integral yang tidak bisa dipisahkan dari kebijakan pembangunan nasional maupun kebijakan pembangunan Kabupaten secara khusus. Dalam konteks pembangunan nasional, ada beberapa kebijakan yang menjadi acuan bagi pelaksanaan pembangunan di kawasan perbatasan, antara lain :

1. Rancangan Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 .
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
3. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).

Implikasi Kebijakan yang perlu dilakukan di Provinsi Riau ialah:

1. Kebijakan dan upaya untuk menanggulangi ketimpangan wilayah di Provinsi Riau ditentukan oleh upaya pemerintah, baik pusat maupun daerah untuk mengurangi ketimpangan wilayah dengan memperlancar mobilitas barang dan faktor produksi antarwilayah, pengembangan pendidikan pada daerah yang relatif terbelakang, dan pengembangan pusat pertumbuhan dengan menganut konsep konsentrasi dan desentralisasi sekaligus yang dapat dilakukan melalui pembangunan pusat-pusat pertumbuhan pada kota-kota skala kecil dan menengah.
2. Pemerintah Provinsi Riau sebaiknya memberikan kontribusi secara penuh terhadap masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Riau yang disertai dengan pengarahan dan pengawasan tanpa mengabaikan hak-hak pemerintah daerah (otonomi daerah) agar tercipta sinkronisasi antar pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota yang pada akhirnya akan meningkatkan kemajuan pembangunan ekonomi pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Riau secara menyeluruh.

Daftar Pustaka

- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional., (2013). Analisis Kesenjangan Antar Wilayah. Jakarta: Bappenas.
- Budianta, A., (2010). Pengembangan wilayah perbatasan sebagai upaya pemerataan pembangunan wilayah di Indonesia. SMARTek.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS., (2010). RPJNM 2010-2014, Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, Jakarta.
- Korten, David C., (1989). Pembangunan Berdimensi Kerakyatan. Yayasan Obor, Jakarta.
- Marisa., (2017). Analisis Ketimpangan Wilayah Berdasarkan PDRB Dan PAD Antara Riau Daratan Dengan Riau Pesisir. JOM Fekon, Vol. 4 No.1 (Februari) 2017.
- Poerwadarminta, W.J.S., (1991). Kamus Bahasa Indonesia. Bina Aksara, Jakarta.
- Raden, Imam Al Hafis., (2018) .Pembangunan Daerah Perbatasan Yang Terabaikan: Kajian Perbatasan Kecamatan Rupan Utara Kabupaten Bengkalis – Selat Malaka. Jurnal Manajemen Dan Kebijakan Publik Vol 3, Nomor 2, Oktober 20.
- Richardson., (2001). Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Regional. terjemahan Paul Sitohang. Penerbit FE-UI, Jakarta.
- Riyadi & Bratakusumah Supriady, Dedy., (2003). Perencanaan Pembangunan Daerah, Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Syahza, Almasdi., (2007). Model Pemberdayaan Masyarakat dalam Upaya Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan Berbasis Agribisnis di Daerah Riau. Penelitian Fundamental DP2M. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
- Syahza, Almasdi., (2008). Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan Melalui Pemberdayaan Koperasi Berbasis Agribisnis di Daerah Riau. Penelitian Fundamental DP2M. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
- Syahza, Almasdi., (2009). Kelapa Sawit, Dampaknya terhadap Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan di Daerah Riau. Penelitian Hibah Kompetensi (tahun Pertama) DP2M. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
- Sulaiman, Andi Amran dkk., (2018). Membangun Lumbung Pangan Di Wilayah Perbatasan Edisi II. Iiard Press, Jakarta.
- Taryono., (2014). Analisis Disparitas Pembangunan Manusia Di Provinsi Riau. Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan Tahun IV No.11, Maret 2014 : 194 -214.
- Wahab, Abdul., (1994). Kebijakan Publik: Konsep dan Realita dalam Konteks Politik Indonesia dalam Z.A. Achmady dkk. Kebijakan Publik dan Pembangunan, IKIP, Malang.

Pelayanan Administrasi Kependudukan Bagi Suku Talang Mamak Pasca Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 di Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu

Wika Difa Kartini¹ dan Muhamad Yazid Fauzi²

¹Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau
Email: wikadifakartini96@gmail.com

²Pascasarjana Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau
Email: myazidfauzi@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini dilatar belakangi oleh putusan uji materi undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan pada Mahkamah Konstitusi (MK) atas gugatan nomor 97/PUU-XIV/2016. Pasca putusan tersebut MK menegaskan bahwa penganut kepercayaan lokal dapat menuliskan kepercayaannya pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan dokumen kependudukan lainnya. Namun pada praktiknya, pelayanan administrasi kependudukan bagi Suku Talang Mamak di Kabupaten Indragiri Hulu banyak ditemukan berbagai persoalan. Di Kecamatan Rengat Barat kolom agama mereka dikosongkan atau disetrip, di Kecamatan Rakit Kulim kolom keagamaan diisi dengan agama Islam. Tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur administrasi kependudukan bagi Suku Talang Mamak dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan ednografi melakukan wawancara mendalam pada beberapa subjek penelitian. Penelitian ini menemukan bahwa pada praktiknya prosedur yang tidak seragam dalam pengurusan administrasi kependudukan bagi Suku Talang Mamak di beberapa kecamatan, adanya diskriminasi pada suku Talang mamak dalam pengurusan administrasi kependudukan, dan ketidaktahuan staff administrasi terkait putusan MK sehingga dapat kekurangan didalam proses administrasi.

Kata Kunci : Putusan Mahkamah Konstitusi, Administrasi Kependudukan, Suku Talang Mamak

Abstract

This paper is motivated by the judicial review of law number 24 of 2013 concerning Population Administration at the Constitutional Court (MK) over claim number 97 / PUU-XIV / 2016. After the verdict, the Court emphasized that local believers could write down their trust on the National Identity Card (KTP), Family Card (KK) and other population documents. However, in practice, population administration services for the Talang Mamak Tribe in Indragiri Hulu Regency are found in various problems. In Rengat Barat Subdistrict their religion column is emptied or described, in Rakit Kulim Subdistrict the religious column is filled with Islam. The purpose of writing this research is to find out how the population administration procedures for the Talang Mamak Tribe and to find out the obstacles faced. This study uses a qualitative approach with an ednographic approach conducting in-depth interviews on several research subjects. This study found that in practice the procedures were not uniform in the administration of population administration for the Talang Mamak tribe in several districts, there was discrimination in the Talang mamak tribe in the administration of population administration, and the administrative staff's ignorance regarding the Constitutional Court's decision so that it could be deficient in the administrative process.

Keywords: Decision of the Constitutional Court, Population Administration, Talang Mamak Tribe.

1. Pendahuluan

Pencatatan administrasi kependudukan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013. Dalam UU tersebut Negara hanya mengakui enam agama yang dapat dicatat secara administrative yaitu; Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu. Padahal, pada kenyataannya terdapat ratusan agama lokal atau aliran kepercayaan di Indonesia. Menurut Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan

Yang Maha Esa dan Tradisi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terdapat 187 kelompok penganut aliran kepercayaan. Sedangkan di Provinsi Riau hanya tercatat satu kelompok aliran kepercayaan.

Pada kabupaten Indragiri Hulu terdapat satu agama lokal “Langkah Lama” yang dianut oleh Komunitas adat Talang Mamak. Suku Talang Mamak menyebut kepercayaan mereka adalah *Langkah Lama*. Kepercayaan ini tidak hanya mengikat hubungan orang Talang Mamak dengan Tuhan namun juga mengikat dengan sistem adat. Orang Talang Mamak yang telah keluar dari *Langkah Lama* dianggap keluar dari sistem adat dan tidak lagi dianggap bagian dari mereka. Pada dimensi kepercayaan mereka meyakini beberapa unsur sebagai berikut; 1) Percaya kepada Allah sebagai penguasa tertinggi. 2) Percaya kepada *Raja Brailse* sebagai penyusun hukum adat. 3) Percaya pada malaikat. 4) Percaya pada nabi. 5) Percaya pada makhluk ghaib. 6) Percaya pada wahyu yang diturunkan pada tokoh adat. Sedangkan pada dimensi praktik (peribadatan) mereka melakukan ritual daur hidup seperti; 1) *angkat bidan*, 2) *menanti hutang*, 3) *basunat*, *gawai*, 4) *naik tambak* dan beberapa ritual lain.

Namun pada praktik pelayanan administrasi kependudukan mereka mengalami permasalahan. Pada tahun 2016 sebagian besar penduduk tidak mempunyai Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan dokumen kependudukan lain. Hal ini disebabkan pemerintah tidak mengakomodir masyarakat Talang Mamak untuk mencatatkan agama sesuai keyakinan di kolom KK atau KTP. Beberapa protes telah dilakukan diantaranya dengan mematahkan KTP ataupun mendatangi langsung pemerintahan di tingkat Kecamatan. Namun hingga akhir 2017 masalah ini belum kunjung selesai. Beberapa masyarakat Talang Mamak berdamai dengan menerima KTP yang diterbitkan namun ada juga yang memilih untuk tidak memiliki dokumen kependudukan. Pada perkembangannya memang walaupun Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan uji materi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013. Namun sampai saat ini kolom agama pada KTP dan KK suku Talang Mamak masih dituliskan dengan agama Islam atau Kristen.

Penelitian ini membahas bagaimana proses pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Indragiri Hulu untuk suku Talang Mamak pasca keputusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 meliputi kecamatan Rakit Kulim, Rengat Barat dan Batang Cenaku. Melalui penelitian ini penulis ingin menyampaikan bahwa terdapat suatu permasalahan pelayanan administrasi kependudukan pada suku Talang Mamak di tiga kecamatan tersebut.

2. Metodologi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis adalah wilayah adat Suku Talang Mamak di Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau secara administrative berada di Kecamatan Rakit Kulim dengan pertimbangan yaitu; Pertama, lokasi ini banyak terdapat pelayanan yang dialami masyarakat Suku Talang Mamak tidak sesuai, baik dari prosedur pelayanan dan partisipasi dari masyarakat Suku Talang Mamak tersebut. Kedua, dilokasi ini masih banyak ditemukan warga suku Talang Mamak yang tidak memiliki identitas resmi seperti KTP. Ketiga, dilokasi ini terdapat banyak tokoh adat seperti patih, batin, dan mangku. Penelitian ini dilakukan sejak September 2018 Maret 2019. Metode yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan etnografi untuk memperoleh data dan menginterpretasi data, di mana ritual gawai sebagai subjek objek utama penelitian. Adapun informan utama adalah batin dan

Mangku sebagai tokoh adat. Selain itu juga beberapa aktor yang terlibat dalam pihak Pemerintahan. Untuk mendapatkan data penulis melakukan observasi deskriptif dan juga wawancara secara mendalam pada informan inti dan informan pendukung. Sehingga akan didapatkan data yang valid.

3. Hasil Penelitian

Proses Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Suku Talang Mamak Di Kabupaten Indragiri Hulu

Dalam prosedur administrasi kependudukan melibatkan proses pelayanan publik bagi masyarakat Suku Talang Mamak di Kabupaten Indragiri Hulu. Jenis pelayanan administrasi kependudukan mengacu pada jumlah data kependudukan Suku Talang Mamak terkhusus berada di Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu yang dapat memberikan data sesuai jumlah domisili tersebut. Berikut penulis tampilkan tabel laporan administrasi kependudukan.

Tabel 1.2

Laporan Administrasi Kependudukan Suku Talang Mamak Di Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu Per Semester Januari - Juli 2019

NO	Desa/Kelurahan	Jumlah KK (Kartu Keluarga)	Jumlah Jiwa	Jenis Pelayanan Administrasi Kependudukan			
				KTP	KK	Akte Kelahiran	Pindah Domisili
1	Talang Tujuh Buah Tangga	376	1945	15	45	16	6
2	Talang Durian Cacar	842	3441	36	68	24	3
3	Talang Sungai Limau	302	1191	27	98	17	-
4	Talang Gedabu	211	632	14	20	14	1
5	Talang Perigi	392	1445	5	24	12	4
6	Talang Selantai	168	387	7	16	10	1
7	Talang Sungai Parit	261	995	22	56	19	12

Sumber: Data Sekunder, diolah Juli 2019

Dari tabel 1.2 dapat diketahui bahwa laporan administrasi kependudukan masyarakat Adat Suku Talang Mamak di Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu yang memiliki 7 Desa/ Kelurahan dengan jumlah penduduk pada Desa Talang Perigi menunjukkan bahwa jumlah 1.445 jiwa yang memiliki 392 jumlah Kartu Keluarga (KK), sedangkan masyarakat Suku Talang Mamak dalam pengurusan administrasi kependudukan persemester dengan pengurusan pengantar (Kartu Tanda Penduduk) KTP 5, pengurusan Kartu Keluarga (KK) 24, Akte Kelahiran 12 dan masyarakat yang pindah domisili 4. Angka 392 adalah angka masyarakat Suku Talang Mamak yang memiliki KK, sedangkan pengurusan administrasi sedikit, berarti masih banyak terdapat masyarakat Talang Mamak yang tidak mengurus KK. Minimnya partisipasi masyarakat Suku Talang Mamak dalam pengurusan administrasi kependudukan dikarenakan salah satu letak wilayah Desa Talang Perigi yang dekat dengan Kantor Kecamatan Rakit Kulim, dengan memiliki jumlah mayoritas masyarakat Suku Talang Mamak yang banyak, tetapi masih banyak masyarakat yang tidak mau berpartisipasi ataupun tidak mengurus administrasi kependudukan.

AMAN (Aliansi Masyarakat Nusantara) Indragiri Hulu mengatahkan bahwa perbandingan 10 orang masyarakat Suku Talang Mamak di Kecamatan Rakit Kulim hanya 4 orang yang memiliki kartu identitas kependudukan seperti KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang bisa dibilang berdamai dengan pihak pemerintahan. Hal ini

dikarenakan mereka enggan mengurus kartu kependudukan serta beberapa orang juga merusak kartu kependudukannya sebagai bentuk kekecewaan. Sedangkan yang 6 orang masyarakat Suku Talang Mamak yang masih menganut kepercayaan tersebut, mereka menganggap tidak peduli dan tidak penting adanya kartu identitas kependudukan tersebut yang disebabkan keyakinan mereka tidak diakui oleh Negara. Desa hanya melakukan tabulasi terhadap data yang masuk dari pengurusan administrasi dari personal masyarakat Suku Talang Mamak.

Kementrian dalam negeri mencatat ketika Undang-undang yuredikal review sama orang adat terjadinya kenaikan jumlah penduduk mencapai 10 orang penganut kepercayaan lokal. Dalam memandang orang adat yang belum berperadapan dan berpendidikan, padahal mereka suda mempunyai kearifan lokal untuk bertahan hidup. Identitas dan personalitas harus dibedakan. Mereka yang dimarjinalkan, kalau memang pada dasarnya pemerintah tidak memfasilitasi seseorang untuk dapat memeluk agama sesuai kepercayaannya. Mereka berpegang teguh kepada kearifan lokal, agama itu adalah personalitas, sedangkan identitas yaitu yang dapat dilihat.

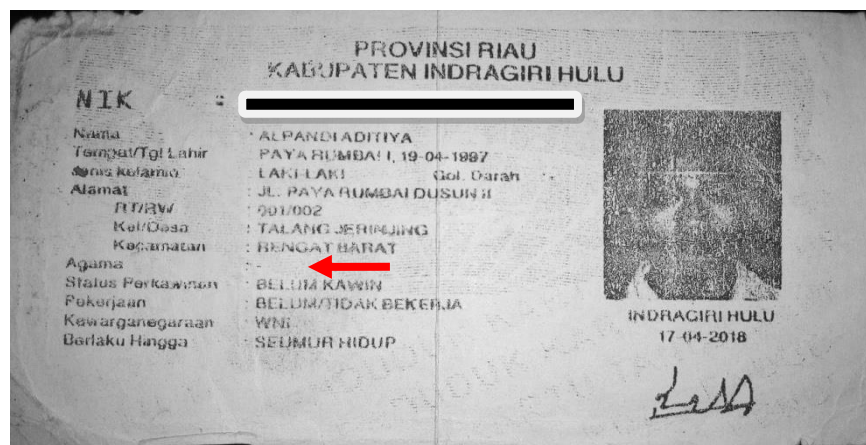
Negara dalam undang-undang menjelaskan kebebasan dalam orang adat yang berperadaban kebebasan untuk memeluk agama sesuai keyakinan yang belum dijamin. Undang-undang itu menjamin kebebasan beragama, sedangkan Undang-undang Kependudukan terdapat diskriminasi terhadap penganut kepercayaan lokal. Pemerintah melakukan diskriminasi terhadap masyarakat adat untuk memeluk keyakinan, walaupun keputusan MK sudah diundangkan, namun pelaksanaan administrasinya belum dilaksanakan di kawasan pelayanan dan belum adanya standar baku dari pemerintah, jadi masyarakat sendiri kebingungan dalam mengurus administrasi kependudukan. UUD 1945 menjamin keberadaan mereka beserta hak dan kewajiban sebagai warga negara. Sekurang-kurangnya UUD 1945 tidak mengenal adanya golongan mayoritas dan minoritas yang dibedakan perlakuan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Konsep Pasal 28 D ayat (4) UUD 1945, dengan tegas dinyatakan bahwa, Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Pada ketentuan tersebut tidak dinyatakan bahwa setiap orang juga berhak atas satu atau dua kewarganegaraan. Masyarakat Suku Talang Mamak yang memiliki KTP hanya 40 %. Dampak dari pemerintah yang melakukan diskriminasi terhadap agama lokal itu menyebabkan mereka tidak bisa masuk dalam pencatatan agama. Sedangkan yang memiliki identitas administrasi kependudukan minim

Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil meliputi seperti Pencatatan Peristiwa Kelahiran, Pencatatan Peristiwa Kematian, Pelayanan Pembuatan Kartu, Tanda Penduduk (KTP), Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga (KK), Pencatatan Lahir mati, Pencatatan Pernikahan, Pencatatan Perceraian, Pengakuan Anak, Pengesahan Anak, Pengangkatan Anak, Perubahan Nama, Perubahan Status Kewarganegaraan, Pembatalan Perkawinan, Pembatalan Perceraian, Serta Peristiwa Penting Lainnya. Dengan demikian, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pencatatan sesuai sistem Administrasi dengan ketentuan Prosedur Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Dalam proses administratif dan pelayanan publik di Kabupaten Indragiri Hulu telah mendapatkan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, karena Suku Talang Mamak telah mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi dan disetujui karena bertolak agar tidak terjadinya diskriminasi dalam penyelenggaraan negara.



Gambar 1. Kartu Tanda Penduduk Masyarakat Suku Talang Mamak Teridentitas Agama Islam

Dari gambar di atas, dapat dilihat ketentuan masyarakat Suku Talang Mamak yang dibuat islam pada kolom agama di Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, sedangkan yang memiliki identitas tersebut sebagai orang yang menganut kepercayaan Suku Talang Mamak, atau yang biasa mereka sebut islam langkah baru dikarenakan masyarakat Suku Talang Mamak masih peduli terhadap kebijakan pemerintah dengan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sedangkan masyarakat yang menolak dalam mengenakan kepercayaanpun masih begitu banyak tidak memiliki identitas pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagaimana yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu.



Gambar 2. Kartu Tanda Penduduk Masyarakat Suku Talang Mamak Teridentitas Non Agama

Dapat dilihat dari gambar diatas, terdapat perbedaan penulisan identitas pada kolom agama antar penduduk Suku Talang Mamak di Kecamatan Rakit Kulim dan Kecamatan Rengat Barat, disebabkan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan uji materi terkait aturan pengosongan kolom agama pada kartu keluarga dan kartu tanda penduduk. Melalui putusan Mahkamah Konstitusi ini, eksistensi

penghayat kepercayaan diakui Negara. Sebenarnya tidak ada kata “pengakuan” dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Tidak ada ketentuan dalam UU yang menyatakan bahwa Negara mengakui enam agama yang ada di Indonesia. Pengakuan enam agama hanya keterangan yang ada pada salah satu ayat. Adanya perubahan sosial di masyarakat setelah eksistensi penghayat kepercayaan yang diakui Negara. Perubahan itu terutama tentang status dan hak sipil warga negara penghayat kepercayaan.

Mengingat bahwa putusan MK berifat final dan mengikat. Pemerintah harus menjalankan putusan tersebut. Komunikasi dengan pimpinan organisasi keagamaan merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah menjalankan perintah MK agar tidak memenuhi kendala teknis dalam implementasinya. Hal ini diatur dalam Pasal 61 ayat (1) dan (2), serta Pasal 64 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam Putusannya Majelis Hakim berpendapat bahwa kata “Agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk penganut aliran kepercayaan.

Terkait putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 ini, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah sebagai tindak lanjut putusan MK tersebut. *Pertama*, dari segi teknis pengaplikasian norma, pemerintah harus melakukan penyesuaian terhadap pendataan penganut aliran kepercayaan, mengingat sebelumnya hanya perlu mendata agama-agama yang diakui oleh negara. Pasca putusan MK tentu harus dilakukan pendataan terhadap aliran-aliran Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pendataan secara komprehensif perlu dilakukan untuk menghindari ketidakjelasan suatu aliran penganut kepercayaan tertentu yang mungkin dapat menimbulkan pertentangan masyarakat dikarenakan dianggap tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD R1 1945.

Kedua, masih terkait teknis pengaplikasian norma, langkah yang perlu dilakukan oleh pemerintah setelah melakukan pendataan ulang yaitu memasukkan data tersebut kedalam *data base*, selanjutnya pemerintah bersosialisasi mengenai hal ini, minimal kepada seluruh instansi dan petugas berkepentingan dalam pengurusan KK dan KTP Elektronik. Selain itu sosialisasi juga berguna untuk memberikan informasi kepada para penganut kepercayaan khususnya Suku talang Mamak yang berada di Kecamatan Rakit Kulim dan keseluruhan pada Kabupaten Indragiri Hulu, yang selama ini data mengenai agamanya masih kosong, atau bagi warga penganut kepercayaan yang ingin mengubah data kolom agamanya yang selama ini diisi dengan data agama yang tidak sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya.

Ketiga, melakukan perubahan UU Administrasi Kependudukan, mengenai data ini pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri telah menyampaikan bahwa pihaknya berencana mengajukan usulan perubahan kedua UU Administrasi Kependudukan dikarenakan langkah ini perlu dilakukan untuk mengakomodasikan putusan MK tersebut. Rencana pemerintah mengubah UU Administrasi Kependudukan sesuai dengan norma dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d diatur bahwa salah satu materi muatan yang diatur dengan Undang-Undang yaitu tindak lanjut atas putusan MK yang dapat dilakukan oleh DPR atau Presiden. Dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b juga ditentukan bahwa jika dipandang urgen (mendadak) usulan perubahan UU dapat dimuat dalam daftar kumulatif terbuka Prolegnas.

Usulan perubahan Undang-Undang memang merupakan pilihan hukum yang

paling ideal untuk menindaklanjuti suatu putusan MK. Namun dalam permasalahan ini yaitu persoalan substansi putusan mengenai akomodasi terhadap pelayanan pada penganut kepercayaan pada kolom agama di KK dan KTP elektronik, menurut penulis tidak terlalu urgen untuk dilakukan dikarenakan secara substansi tidak terlalu banyak yang perlu direvisi dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, khususnya terkait kolom agama/kepercayaan dalam penulisan KK dan KTP elektronik. Pemerintah juga dapat menindaklanjuti putusan MK ini tanpa melakukan perubahan Undang-Undang Administrasi Kependudukan dengan cara melakukan penyesuaian terhadap aturan-aturan terkait administrasi kependudukan yang ada dalam berbagai peraturan pelaksanaan yang ada selama ini dengan memperhatikan kaidah hasil penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap pasal a.

4. Kesimpulan dan Saran

Terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah sebagai penanganan tindak lanjut pasca putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 terkait pengosongan kolom agama bagi penghayat kepercayaan Suku Talang Mamak di Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu dalam identitas administrasi kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik. *Pertama*, pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu terkait Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu melakukan pendataan yang jelas mengenai penganut kepercayaan Suku Talang Mamak di yang ada di Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu. Jika hal itu tidak dilakukan, dikhawatirkan akan terjadinya persoalan baru apabila ada Warga Negara yang mengaku menganut suatu kepercayaan tertentu yang tidak jelas dan tidak sesuai dengan landasan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Kedua, memasukkan data atau pengelola *data base* penganut kepercayaan Suku Talang Mamak yang telah diseleksi dan sesuai dengan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam SIAK, serta dapat melaksanakan sosialisasimengenai pendataan penganut kepercayaan, minimal kepada seluruh instansi dan petugas yang berkepentingan dalam pengurusan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik yang berdomisili di Kabupaten Indragiri Hulu khususnya Kecamatan Rakit Kulim yang masih terdapat berbagai persialan.

Ketiga, Pemerintah daerah dapat mengusulkan perubahan Undang-Undang Administrasi Kependudukan. namun demikian, khusus untuk langkah ini, meskipun tindak lanjut berupa perubahan Undang-Undang sebenarnya dapat merupakan pilihan hukum yang paling ideal untuk dapat menindaklanjuti suatu putusan MK, namun untuk persoalan ini, menurut penulis tidak terlalu urgen dilakukan karena secara substansi tidak terlalu banyak substansi norma yang perlu direvisi dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Tanpa melakukan perubahan Undang-Undang pemerintah sudah dapat menindaklanjuti putusan MK ini dengan cara melakukan penyesuaian terhadap kebijakan pelayanan administrasi kependudukan dan aturan-aturan terkait administrasi kependudukan yang ada dalam berbagai peraturan pelaksanaan yang terdapat selama ini dengan memperhatikan terhadap keputusan MK dalam penafsiran kebijakan tersebut.

Daftar Pustaka

Anwar, Fachrudin Azis. *Pasca-Putusan-MK-2017: Persoalan Penghayat Kepercayaan yang belum usai*. CRCS UGM. <http://crccs.ugm.ac.id/pasca-putusan-MK-2017-persoalan-penghayat-kepercayaan-yang-belum-usai/>

- Chilfford Greetz.170. *The Interpretation Of Culture. New York: Bsic Books*,h. 87-125
- Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017
- Dwiyanto, Agus. 2003. Reformasi Tata Pemerintah dan Otonomi Daerah di Indonesia; Yogyakarta. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, UGM Yogyakarta.
- Emile Durkheim .2015. *the Elementary Froms Of The Religious Life*, Diterjemahkan oleh Inyik Ridwan Muzir. Yogyakarta: IRCiSod, h. 63
- <https://tirto.id/pembakuan-definisi-agama-yang-penuh-pro-dan-kontra-czVV>
- Kementrian Dalam Negeri “*Kumpulan Data Aliran Kepercayaan*”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171107165041-12-254090/kemendagri-kumpulan-data-aliran-kepercayaan/>, diakses 11 November 2017.
- Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2004 standar pelayanan administrasi kependudukan.
- Muawal, Akhmad Hasan. Pembakuan Definisi “Agama” yang Penuh Pro dan Kontra. Tirto. <https://tirto.id/pembakuan-definisi-agama-yang-penuh-pro-dan-kontra-czVV>
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.
- Ratminto dan Atik Septi Winarsih, 2009, Manajemen Pelayanan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Tuhri, Mufdil. Status Penghayat Kepercayaan setelah Keputusan MK. CRCS UGM. <https://crs.ugm.ac.id/status-penghayat-kepercayaan-setelah-keputusan-ml/>

Inovasi Mal Pelayanan Publik dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan Prima Kota Pekanbaru

Evi Zubaidah dan Ema Fitri Lubis

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Abstrak

Mal pelayanan publik kota pekanbaru merupakan bentuk peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan yang terpadu dan terintegrasi antara pelayanan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam satu gedung pelayanan, sehingga masyarakat kota pekanbaru lebih mudah dalam mengakses pelayanan tanpa harus berbolak-balik untuk mengurus pelayanan yang satu ke yang lain. Mal Pelayanan Publik terdiri dari 173 jenis layanan, layanan tersebut termasuk perizinan maupun non-perizinan dari 24 instansi baik pada pemerintah pusat maupun daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara mendalam inovasi layanan Mal pelayanan Publik sebagai wujud pelayanan prima di dinas penanaman modal terpadu satu pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan teori Everett M. Rogers (2003) dalam Suwarno (2008:17), Dalam penerapannya inovasi memiliki atribut yang melekat didalam inovasi tersebut. Atribut inovasi yang dimaksud adalah sebagai berikut *Relative Advantage* (keuntungan relatif), *Compatibility* (kesesuaian), *Complexity* (kerumitan), *Triability* (kemungkinan dicoba), *Observability* (kemudahan diamati), serta mendeskripsikan faktor yang menjadi pendukung atau kekuatan dan penghambat atau kelemahan dalam pelaksanaan inovasi Mal pelayanan publik kota pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan yang dilakukan pada teknik analisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inovasi Mal pelayanan publik dalam pengurusan pelayanan sangat menguntungkan masyarakat namun masih ada ditemui hambatan seperti ketidakfahaman petugas terkait seluruh pelayanan yang ada di MPP sehingga kesulitan dalam menjawab pertanyaan masyarakat yang akan melakukan pelayanan.

Kata Kunci: Inovasi, Pelayanan, Mal Pelayanan Publik

Abstract

Pekanbaru city public service mall is a form of improving the quality of public services in an integrated and integrated manner between central and local government services in one service building, so that the Pekanbaru city community can more easily access services without having to go back and forth to take care of one-to-one services. other. Public Service Malls consist of 173 types of services, these services include licensing and non-licensing from 24 agencies both at central and local governments. The purpose of this research is to describe in depth the Public Service Mall service innovation as a form of excellent service in the one stop integrated investment service (DPMPTSP) of Pekanbaru City. This study uses the theory of Everett M. Rogers (2003) in Suwarno (2008: 17), In its application innovation has inherent attributes in the innovation. The attributes of innovation referred to are as follows Relative Advantage, Compatibility, Complexity, Triability (observability), and describing the factors that support or strengths and obstacles or weaknesses in implementation innovation mall public services Pekanbaru city. The research method used in this study is a qualitative descriptive method with data collection techniques through interviews, observation and documentation. Data collection, data reduction, and drawing conclusions made on data analysis techniques. The results of this study indicate that public service mall innovation in service management is very beneficial to the community, but there are still obstacles encountered such as the incomprehension of officers related to all services in MPP so that it is difficult to answer questions from the public who will perform services.

Keywords: Innovation, Service, Public Service Mall

1. Pendahuluan

Pembangunan di Indonesia, setidaknya memiliki tiga masalah; pertama mengenai birokrasi yang masih gemuk, lamban, dan belum mampu memberikan pelayanan prima pada masyarakat Dan investor. Kedua adalah tentang korupsi, dimana

masih banyak penyelenggara negara yang menyalahgunakan pengelolaan keuangan negara. Ketiga; terkait masalah infrastruktur yang belum memadai, serta kurangnya anggaran negara untuk pembangunan dan pemeliharannya. Berangkat dari tiga kondisi itu maka program percepatan reformasi birokrasi sangatlah diperlukan guna menciptakan birokrasi bersih dari korupsi kolusi dan nepotisme, melayani, serta berkompeten terhadap tugas dan tanggung jawab yang diemban.

Pelayanan publik kini telah menjadi isu sentral dalam pembangunan di Indonesia. Perkembangannya pelayanan publik memang selalu aktual untuk diperbincangkan. Pada dasarnya memang manusia membutuhkan pelayanan, konsep pelayanan akan selalu berada pada kehidupan setiap manusia. Penyelenggaraan pelayanan publik saat ini sesuai dengan paradigma pelayanan publik yang berkembang yakni *New Public Service (NPS)*. Paradigma *New Public Service (NPS)* memandang publik sebagai *citizen* atau warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban publik yang sama. Tidak hanya sebagai *customer* yang dilihat dari kemampuannya membeli atau membayar produk atau jasa. *Citizen* adalah penerima dan pengguna jasa publik yang disediakan pemerintah dan sekaligus juga subyek dari berbagai kewajiban publik seperti mematuhi peraturan perundang-undangan, membayar pajak, membela Negara, dan sebagainya. (Sri Yuliani : Jurnal FISIP UNS Vol. 3)

Dalam Ratmito dan Atik (2012), ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima pelayanan. Kepuasan penerima pelayanan dicapai apabila penerima pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan. Terselenggaranya pelayanan publik yang baik, tergantung dari kondisi birokrasi disuatu negara. Kondisi birokrasi memberikan iklim tersendiri bagi terselenggaranya pelayanan publik yang optimal. Pelayanan publik yang optimal belum tentu dapat direalisasikan di Indonesia. Kondisi pelayanan publik di Indonesia masih sangat rendah. Demikian salah satu kesimpulan Bank dunia yang dilaporkan *World Development Report 2004* dan hasil penelitian *Governance and Desentralization Survey (GDS) 2002*. (Agus Dwiyanto & Bevaola Kusumasari 2003 : No II) Inovasi disektor publik saat ini menjadi sebuah keharusan untuk membuat ketersediaan layanan yang semakin mudah, murah, terjangkau, dan merata (Suwarno, 2008 : 32-33). Di Indonesia, setelah adanya otonomi daerah, perubahan sistem pemerintahan ini juga diiringi tuntutan perubahan kualitas pelayanan yang diharapkan masyarakat. Penyediaan pelayanan publik yang berkualitas merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap penyelenggara. Konsepsi otonomi daerah sebagaimana diatur dalam UU No 32 Tahun 2004 telah memberikan kewenangan dan keleluasan pemerintah daerah untuk dapat menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas. Seiring dengan lahirnya otonomi daerah tersebut diharapkan setiap daerah berani mengambil inisiatif, mampu membuat terobosan baru atau melakukan inovasi untuk memajukan daerahnya (Ratminto, 2010:188).

Keanekaragaman dalam pelayanan publik mendorong untuk terciptanya pelayanan inovatif. Pelayanan inovatif, dapat dikaitkan dengan inovasi pelayanan publik. Dimana inovasi pelayanan publik, merupakan hal yang dapat diwujudkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Inovasi, menurut Rogers adalah "*an innovation is an idea, practice, or object that is perceived* sebuah ide, praktik, atau objek yang dianggap baru oleh individu satu unit adopsi lainnya). (Rogers Everret 2003 : 12)

Inovasi digunakan sebagai tuntutan akuntabilitas, transparansi dan berbagai prinsip *good governance*, yang menggiring organisasi publik yang berkinerja lebih tinggi. (Jasfar Farida 2012 : 23). Salah satu inovasi pelayanan publik yang dilaksanakan

pada saat ini adalah Mal Pelayanan Publik. Mal Pelayanan Publik adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan Swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman.

MPP dirancang oleh KEMEPAN RB sebagai bagian dari perbaikan menyeluruh dan transformasi tata kelola pelayanan publik. Menggabungkan berbagai jenis pelayanan pada satu tempat, penyederhaan dan prosedur serta integrasi pelayanan pada Mal Pelayanan Publik akan memudahkan akses masyarakat dalam mendapat berbagai jenis pelayanan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggara Mal Pelayanan Publik yaitu sebagai berikut :

1. MPP diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
2. Ruang lingkup MPP meliputi seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta.
3. Bergabungnya pelayanan yang diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Swasta berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam nota kesepahaman.

Menteri pendayagunaan aparatur Negara reformasi birokrasi (Menpan RB) meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Pekanbaru pada 6 Maret 2019, yang nantinya MPP tersebut untuk mempermudah masyarakat kota Pekanbaru dalam melakukan beragam jenis urusan perizinan dan administrasi kependudukan, hingga pembayaran berbagai jenis pajak dan transaksi, sehingga dengan hadirnya MPP ini masyarakat kota pekanbaru tidak perlu berpindah-pindah kantor untuk melakukan berbagai urusannya.

MPP Pekanbaru menyediakan 24 layanan instansi pemerintah, lembaga, perbankan dan badan usaha milik negara/daerah antara lain yaitu, DPM-PTSP, PT PLN, Kejaksaan Tinggi Riau, Kejaksaan Negeri Pekanbaru, Ikatan Arsitek Indonesia, BPJS Kesehatan, PT Taspen, Imigrasi, BPJS Ketenagakerjaan, PDAM, Samsat, Bapenda Riau, Polresta Pekanbaru, Ikatan Notaris Indonesia, Ikatan Pejabat Pembuat Akta (IPPA), Badan Pertanahan Nasional, Kanwil DJP Riau, Kemenag Pekanbaru, BNI, BRI, Bank Riau Kepri, Disdukcapil Pekanbaru, BKPSDM Pekanbaru, LPSE Pekanbaru, Bapenda Pekanbaru, PT Pos Indonesia (Persero), dan Bea Cukai.

Dengan adanya Mal Pelayanan Publik, secara umum dapat mempermudah masyarakat khususnya Pekanbaru untuk mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan, kelebihan yang lain juga dirasakan ketika ingin menguruskan beberapa urusan bisa mengefisiensi waktu, biaya dan tenaga karena bisa langsung pergi kesatu tempat yaitu mal pelayanan publik Pekanbaru. Adapun permasalahan yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah untuk melihat inovasi mal pelayanan publik di kota pekanbaru apakah sudah berjalan dengan baik, dan apa saja kelebihan dan kekurangan Mal Pelayanan Publik di kota Pekanbaru terhadap inovasi tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara mendalam inovasi layanan Mal pelayanan Publik sebagai wujud pelayanan prima di dinas penanaman modal terpadu satu pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru.

2. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan yang dilakukan pada teknik analisis data. Adapun yang dilakukan wawancara adalah masyarakat selaku pengguna MPP yang ditemui pada saat melakukan pelayanan. Selanjutnya yang dilakukan wawancara adalah pegawai MPP terkait bagian informasi, dan bagian pelayanan di beberapa tempat pelayanan.

3. Hasil dan Pembahasan

Bagi sektor publik berinovasi merupakan tuntutan akuntabilitas, transparansi dan berbagai prinsip *good governance* yang menggiring organisasi publik untuk berkinerja lebih tinggi (Suwarno, 2008: 26). Hal ini sangat beralasan mengingat tuntutan masyarakat yang semakin kompleks yang juga diimbangi oleh pesatnya kemajuan teknologi dan informasi, memaksa penyelenggara pelayanan publik untuk terus melakukan inovasi dalam rangka menyediakan kebutuhan akan tuntutan masyarakat tersebut. Adapun inovasi yang dilakukan oleh DPMPTSP Kota Pekanbaru adalah Mal Pelayanan Publik, untuk mengetahui inovasi tersebut peneliti menggunakan lima atribut inovasi menurut Rogers yaitu: Rogers (1983) yaitu: Keunggulan Relatif (*relative advantage*), Kesesuaian (*compatibility*), Kerumitan (*complexity*), Kemampuan diuji cobakan (*trialability*), dan Kemampuan diamati (*observability*).

1. *Relative Advantage* (keuntungan relatif)

Keuntungan bagi masyarakat khususnya untuk inovasi MPP di Kota Pekanbaru adalah mudah untuk melakukan pengurusan pelayanan baik pelayanan untuk instansi pemerintah maupun BUMN karena hampir seluruh pelayanan ada di tempat tersebut sehingga untuk mempermudah masyarakat kota Pekanbaru dalam melakukan beragam jenis urusan perizinan dan administrasi kependudukan, hingga pembayaran berbagai jenis pajak dan transaksi, jadi masyarakat kota Pekanbaru tidak perlu berpindah-pindah kantor untuk melakukan berbagai urusannya. Selain itu tempatnya yang strategis membuat masyarakat menjadi nyaman baik dalam hal ruang tunggu maupun fasilitas sangat memadai.

2. *Compatibility* (kesesuaian)

Ditinjau dari segi kesesuaian inovasi MPP bagi masyarakat kota Pekanbaru sudah sesuai dengan kondisi perkembangan teknologi yang maju seperti saat ini, karena dapat memproses layanan menggunakan fasilitas yang modern dengan memanfaatkan teknologi computer yang sudah terkoneksi dengan beberapa layanan sehingga langsung bisa di selesaikan saat itu juga.

3. *Complexity* (kerumitan)

Ditinjau dari aspek kerumitan inovasi MPP dirasa tidak rumit dalam proses pelaksanaannya. atribut inovasi *complexity* atau kerumitan terkait dengan mekanisme, tata cara atau prosedur pelayanan dalam pelaksanaannya tidak terdapat perbedaan dengan layanan di kantor asalnya, Terkait dengan mekanisme, tata cara atau prosedur pada layanan di MPP sudah cukup baik. Dimana mekanisme, tata cara atau prosedur yang ada dibuat memudahkan masyarakat dalam melakukan pelayanan, masyarakat datang disambut oleh satpam lalu diarahkan kebagian mana yang ingin dituju dan diberi nomor antrian. Namun jika bagian satpam ada yang kurang faham maka akan di antarkan untuk ke bagian informasi.

4. *Triability* (kemungkinan dicoba)

Dari segi atribut kemungkinan dicoba berkenaan dengan sosialisasi yang dilakukan oleh DPMPTSP Kota Pekanbaru terkait Mal Pelayanan Publik, adapun sosialisasi yang dilakukan yakni melalui media massa maupun media elektronik seperti : radio, televisi dan media cetak. Sehingga sudah banyak diketahui oleh masyarakat Kota Pekanbaru yang merespon positif dengan adanya MPP tersebut. Hal ini dikarenakan seluruh layanan di MPP Kota Pekanbaru sudah diuji coba sebelum diresmikan oleh.. sehingga masyarakat akan terpuaskan oleh layanan tersebut.

5. *Observability* (kemudahan diamati)

Dalam inovasi MPP Kota Pekanbaru dari segi kemudahan diamati yakni menyangkut dengan adanya kehadiran MPP Kota Pekanbaru dapat dengan mudah dijangkau oleh masyarakat. Sehingga, mampu menghasilkan pelayanan yang terbaik. Mudah diamati dengan prosedur pelayanan yang cukup simple, yakni hanya memerlukan beberapa orang untuk dapat melayani masyarakat. Selain itu, dalam proses pelayanan juga cukup terbuka tanpa adanya deskriminasi yang menyebabkan terjadinya praktek pungli, dan menggunakan nomor antrian yang modern sehingga masyarakat melakukan pelayanan sesuai dengan nomor antrian.

4. Kesimpulan dan Saran

Mal pelayanan publik kota pekanbaru merupakan bentuk peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan yang terpadu dan terintegrasi antara pelayanan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam satu gedung pelayanan, sehingga masyarakat kota pekanbaru lebih mudah dalam mengakses pelayanan tanpa harus berbolak-balik untuk mengurus pelayanan yang satu ke yang lain. Mal Pelayanan Publik terdiri dari 173 jenis layanan, layanan tersebut termasuk perizinan maupun non-perizinan dari 24 instansi baik pada pemerintah pusat maupun daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara mendalam inovasi layanan Mal pelayanan Publik sebagai wujud pelayanan prima di dinas penanaman modal terpadu satu pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru.

Penelitian ini menggunakan teori Everett M. Rogers (2003) dalam Suwarno (2008:17), Dalam penerapannya inovasi memiliki atribut yang melekat didalam inovasi tersebut. Atribut inovasi yang dimaksud adalah sebagai berikut *Relative Advantage* (keuntungan relatif), *Compatibility* (kesesuaian), *Complexity* (kerumitan), *Triability* (kemungkinan dicoba), *Observability* (kemudahan diamati), serta mendeskripsikan faktor yang menjadi pendukung atau kekuatan dan penghambat atau kelemahan dalam pelaksanaan inovasi Mal pelayanan publik kota pekanbaru. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inovasi Mal pelayanan publik dalam pengurusan pelayanan sangat menguntungkan masyarakat namun masih ada ditemui hambatan seperti ketidakfahaman petugas terkait seluruh pelayanan yang ada di MPP sehingga kesulitan dalam menjawab pertanyaan masyarakat yang akan melakukan pelayanan.

Diharapkan dengan adanya MPP Kota Pekanbaru kemudahan pelayanan yang didapatkan masyarakat terealisasi dengan baik. Bagi pemerintah diharapkan untuk terus meninjau keberlangsungan pelaksanaan MPP khususnya di Kota Pekanbaru apabila ada penyimpangan hendaknya segera ditindaklanjuti. Bagi pegawai MPP Kota Pekanbaru diharapkan memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Selain itu, masyarakat juga berperan penting dalam pelaksanaan MPP dan diharapkan taat aturan dan tidak melakukan praktek pungli.

Daftar Pustaka

- Dwiyanto, A., & Kusumasari, B. Optimalisasi Pelayanan Publik: Perspektif David Osborne Dan Ted Gaebler Oleh: Ahmad Zaenal Fanani, Shi., M. Si (Hakim Pa Martapura).
- Kurniawan, Agung. 2005. Transformasi pelayanan publik. Yogyakarta: Pembaharuan
- Ratminto & Atik Septi Winarsih. 2010. Manajemen Pelayanan: Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen's Charter dan Standar Pelayanan Minimal, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sinambela, Lijan P. dkk (2006). Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi. Jakarta: Bumi Aksara
- Suwarno, Yogi. (2008). Inovasi di Sektor Publik. *STIA-LAN, Jakarta*.
- Thenint, Hugo LL & A. 2010. *Mini Study 10 Innovation in The Public Sector*. Manchester. Global Review of Inovation Inteligence and Policy Studies: Inno Gripe
- Winarsih, S. Atik & Ratminto. 2012. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yuliani, S. (2007). Mewujudkan Birokrasi Yang Pro-Citizen. *Jurnal Ilmu Administrasi FISIP UNS*, 3(1).

Governansi Digital dan Hoax

Rino Ardhian N, Teguh Budi S, Daffa Rifqi U, dan Apneta Vionuke D

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Abstrak

Kemajuan teknologi yang semakin pesat mampu membawa masyarakat menuju ke era masyarakat informasi (*information society*). Pada era ini, informasi disebarkan secara luas dan bebas tanpa ada batasan termasuk informasi yang benar maupun yang palsu. Penyebaran informasi palsu (*hoax*) di Indonesia mampu membawa gangguan stabilitas negara sehingga diperlukan sebuah solusi dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Salah satunya melalui governansi digital di era informasi saat ini agar pemerintah mampu menghasilkan informasi yang bersih dari unsur-unsur berita palsu. Governansi digital akan memberikan kebermanfaatannya dalam menyelesaikan permasalahan sosial apabila publik memiliki kompetensi yang otonom dalam memperoleh informasi.

Kata Kunci: *Governansi digital, hoax, informasi, information society*

Abstract

Rapid technological advancements are able to bring people into the era of information society. In this era, information is widely distributed and free without any restrictions including true and false information. Dissemination of false information (hoaxes) in Indonesia can bring disruption to the country's stability so we need a solution from the government to overcome these problems. One of them is through digital governance in the current information age so that the government is able to produce clean information from false news elements. Digital governance will provide benefits in solving social problems if the public has autonomous competence in obtaining information.

Keywords: digital governance, hoaxes, information, information society

1. Pendahuluan

Dunia pada abad ke 21 dikarakteristikan dengan masuknya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) ke dalam seluruh aspek kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun dalam tataran kolektif sebagai masyarakat dimana fenomena tersebut secara langsung maupun tidak langsung mengubah hal-hal fundamental dalam diri manusia, seperti mulai dari bagaimana mereka berkomunikasi, berinteraksi, melakukan mobilisasi, melakukan pekerjaan, dll. Salah satu fenomena menarik yang tercipta, sebagai efek domino dari masuknya IPTEK ke dalam kehidupan manusia pada abad ini adalah lahirnya era masyarakat informasi (*information society*).

Rogers (1991) menyatakan bahwa *information society* adalah sebuah masyarakat yang sebagian besar angkatan kerjanya adalah pekerja di bidang informasi, dan informasi telah menjadi elemen yang dianggap paling penting dalam kehidupan. Secara lebih lanjut Sutarno (2005), mengidentifikasi beberapa ciri dari tipe masyarakat tersebut antara lain; (1) Sumber informasi dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, (2) Tumbuhnya kesadaran tentang pentingnya informasi dalam kehidupan, (3) Terbukanya wawasan masyarakat dalam menggunakan informasi secara tepat guna, (4) Berkembangnya lembaga perpustakaan, dokumentasi, dan informasi secara merata, (5) Pemanfaatan ilmu untuk memajukan kualitas sumber daya manusia, informasi, dan fisik, dan (6) Pengelolaan informasi dengan baik sehingga bisa menjadi komoditi yang bernilai ekonomis. Dari definisi dan beberapa ciri tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam era ini, informasi merupakan elemen penting dalam seluruh aktivitas kehidupan manusia dan jika digunakan dengan efisien, informasi juga bisa menjadi sebuah komoditi yang bernilai ekonomis.

Di era ini, selain terjadi kelahiran masyarakat informasi (*information society*),

perubahan juga dapat dilihat dari kehadiran dan penggunaan *Internet Of Things (IOT)* dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut membawa dampak yang positif sekaligus negatif di dalam kehidupan manusia, tergantung dari bagaimana individu merespons informasi yang diterima. Di satu sisi, dunia menjadi semakin terbuka dan tanpa batas (*borderless*) karena dengan adanya internet semua orang dapat memperoleh informasi dan berkomunikasi tanpa ada batasan ruang dan waktu, informasi sangat mudah diakses dimanapun, kapanpun, dan oleh siapapun. Namun di sisi lain, ketika individu menggunakan informasi secara tidak bertanggung jawab maka akan menimbulkan berbagai macam kerugian di dalam masyarakat seperti perpecahan, jual beli barang dan jasa ilegal, penipuan, pencurian data pribadi, dll.

Indonesia sebagai salah satu negara dengan pengguna internet terbesar di dunia juga tidak terlepas dari fenomena tersebut. Masyarakat Indonesia belakangan ini sedang menghadapi sebuah peristiwa yang jika tidak direspons dengan benar dapat berujung pada hal-hal merugikan, yaitu peristiwa persebaran berita palsu (*hoax*). Menurut Firmansyah (2017) Indonesia merupakan Negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah India dan Amerika yang mengalami permasalahan serius soal penyebaran berita palsu (*Fake News/Hoax*), dimana persebaran berita tersebut banyak dilakukan di media sosial dan diorganisasikan secara rapi oleh *buzzer* yang dipelihara oleh individu, politikus, atau kelompok kepentingan demi mengamankan kepentingan pribadi maupun kelompoknya. Jika peristiwa tersebut terus dibiarkan bukan tidak mungkin akan menyebabkan perpecahan dan penurunan kualitas demokrasi Indonesia oleh karena itu diperlukan berbagai tindakan yang strategis untuk mengatasi hal tersebut salah satunya adalah dengan intervensi kebijakan oleh pemerintah.

Untuk menghadapi masalah tersebut, pemerintah dituntut agar menyesuaikan diri dalam setiap langkah yang diambil dalam penyelesaian masalah. Salah satu cara yang mulai dilakukan oleh pemerintah dunia adalah dengan menerapkan model governansi digital yang merupakan perkembangan dari model *e-government* (OECD, 2019). Dimana dalam model ini pemerintah lebih menitikberatkan pada keikutsertaan masyarakat pada pengumpulan dan pemanfaatan data, beberapa komponen yang penting dalam model ini antara lain: *big data*, *knowledge management*, *cloud computing*, *cyber security*, manajemen informasi, pusat data, layanan pelanggan, jaringan, serta dukungan teknologi *mobile*. Melalui komponen-komponen tersebut diharapkan penyelesaian masalah *hoax* bisa dilakukan dengan lebih efisien.

2. Berita Palsu (Hoax)

Perkembangan IPTEK dan Penggunaan IOT dalam kehidupan telah mendukung terciptanya berbagai perubahan, salah satunya adalah melahirkan media-media baru yang lebih efisien dan mudah diakses oleh masyarakat informasi dalam memperoleh dan menyebarkan informasi. Melalui kehadiran media tersebut telah terjadi pergeseran pola persebaran informasi di dalam masyarakat dimana saat ini persebaran informasi tidak hanya dilakukan oleh situs berita yang sudah dikenal tetapi juga oleh setiap masyarakat yang memiliki akses terhadap media-media baru. Fenomena tersebut di satu sisi menguntungkan karena dengan begitu masyarakat mampu mengeluarkan pendapatnya namun di sisi lain banyak informasi yang disebarkan secara individu atau kelompok cenderung tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau terindikasi merupakan *hoax*.

Hoax sendiri secara sederhana dapat diartikan sebagai informasi yang direkayasa untuk menutupi informasi sebenarnya. Dengan kata lain juga bisa diartikan sebagai

upaya pemutarbalikan fakta menggunakan informasi yang seolah – olah meyakinkan tetapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Hoax juga bisa diartikan sebagai tindakan mengaburkan informasi yang sebenarnya, dengan cara membanjiri suatu media dengan pesan yang salah agar bisa menutupi pesan yang benar. Tujuan dari hoax yang disengaja adalah membuat masyarakat merasa tidak aman, tidak nyaman, dan kebingungan. Dalam kebingungan, masyarakat akan mengambil keputusan yang lemah, tidak meyakinkan, dan bahkan salah. Perkembangan hoax di media baru semula dilakukan untuk sarana perisakan namun perkembangan selanjutnya, para spin doctor politik melihat efektivitas hoax sebagai alat black campaign di pesta demokrasi sehingga terus digunakan untuk mempengaruhi persepsi politik pemilih (Gungum, Justito, & Nunik, 2017). Hal tersebut sesuai dengan temuan Astrini (2017) yang menjelaskan bahwa penyebaran hoax di media baru tidaklah terjadi begitu saja tanpa kepentingan yang melatarbelakanginya. Terdapat beberapa kepentingan dibelakangnya seperti politik kekuasaan, ekonomi (industry dan bisnis hoax), ideologis, sentimen pribadi bahkan iseng semata.

Secara lebih lanjut, Rosmalinda (2017) mengidentifikasi beberapa faktor yang mendukung persebaran hoax di dalam masyarakat diantaranya: (1) Kemudahan bagi masyarakat dalam memiliki alat komunikasi yang modern dan murah, dalam hal ini adalah penggunaan smartphone sebagai media pencarian informasi, (2) Masyarakat mudah terpengaruh oleh isu-isu yang belum jelas tanpa memverifikasi atau mengkonfirmasi kebenaran informasi/berita tersebut, sehingga langsung melakukan tindakan share informasi yang belum jelas kebenarannya dan (3) Kurangnya minat membaca sehingga ada kecenderungan membahas berita tidak berdasarkan data akurat, hanya mengandalkan daya ngat atau sumber yang tidak jelas. Selain itu, jika ditelaah lebih dalam penyebaran hoax yang terjadi di masyarakat belakangan ini juga disebabkan oleh kemunculan era pasca kebenaran atau post-truth dimana dalam era ini penggunaan akal sebagai landasan kebenaran dan fakta sebagai basis pengukuran obyektivitas tidak lagi penting dalam pembentukan opini publik melainkan sensasionalitas dan emosionalitas yang digunakan dalam pembentukan opini tersebut (Haryatmoko, 2018).

Keberadaan hoax menurut Bungin (2017), memiliki ‘masa hidup’ dalam kognitif lebih pendek dari pada konstruksi sosial media massa, namun hoax memiliki daya rusak sporadik yang kuat dan luas di masyarakat dimana semua berita hoax tidak saja merugikan subjek hoax namun juga menyerang dan merusak tatanan etika di masyarakat, bahkan dapat menjadi mesin pembunahan karakter seseorang.

Juditha (2018) menyatakan bahwa dalam menyelesaikan permasalahan hoax terdapat tiga pendekatan penting yang perlu diperhatikan yaitu kelembagaan, teknologi, dan literasi. Pendekatan kelembagaan, dengan terus menggalakan komunitas anti hoax. Dari sisi pendekatan teknologi, dengan aplikasi hoax checker yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk mengecek kebenaran berita yang berindikasi hoax. Pendekatan literasi, dengan gerakan anti berita hoax maupun sosialisasi kepada masyarakat mulai dari sekolah hingga masyarakat umum yang ditingkatkan dan digalakkan, bukan saja oleh pemerintah tetapi juga oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk intitusi – institusi non pemerintah lainnya.

3. Governansi Digital

Dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi pergeseran paradigma pemerintahan dari government to governance yang berdampak secara langsung pada berubahnya sistem administrasi publik di suatu negara, dimana dengan perubahan paradigma ini

keberhasilan suatu negara dalam menyelesaikan masalah-masalah publik serta penyediaan barang dan jasa publik tidak lagi hanya ditentukan oleh pemerintah tetapi juga oleh aktor-aktor lain yaitu masyarakat sipil dan swasta. Pergeseran tersebut disebabkan oleh dinamika di dalam masyarakat yang menyebabkan masalah semakin kompleks dan tidak bisa hanya ditangani oleh Pemerintah seorang diri.

Karena sifatnya yang adaptif maka di era digital saat ini, pemerintah juga harus menyesuaikan diri dalam melakukan pemecahan masalah sehingga masalah-masalah yang bermunculan dapat teratasi dengan tepat. Usaha-usaha pemerintah untuk mengatasi permasalahan masyarakat pada era digital dapat dipahami dalam kerangka digital governance atau governansi digital. Menurut Zamora, Barahona, & Palaco (2016) governansi digital secara sederhana dapat didefinisikan sebagai penggunaan seluruh informasi dan teknologi komunikasi sebagai alat untuk meningkatkan hal-hal substansial dalam pelayanan publik, mempromosikan nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas manajemen publik oleh pemerintah yang tujuan akhirnya adalah peningkatan kualitas hidup warga negara. Selain itu, menurut Floridi (2018) governansi digital adalah sebuah praktik pembentukan dan pengimplementasian kebijakan untuk pembangunan melalui penggunaan informasi yang tersedia dalam infosphere yang terdiri dari informasi online maupun offline. Sebagai contoh, melalui governansi digital pemerintah dapat menentukan, mengontrol proses dan metode yang digunakan oleh seorang data stewards dan data custodian untuk meningkatkan kualitas data, reliabilitas, akses, keamanan, dan ketersediaan pelayanan serta merancang prosedur yang efektif dalam pengambilan keputusan berdasarkan data-data yang tersedia.

Dari kedua definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa governansi digital merupakan pemerintahan yang menggunakan infosphere dan teknologi komunikasi dalam pembentukan dan pengimplementasian kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup warga negara.

Organisation for Economic Co-operation and Development (2019) mengajukan beberapa perubahan yang harus dilakukan pemerintah ketika ingin menerapkan governansi digital, antara lain: Perubahan dari digitisasi proses menjadi digital melalui desain, perubahan dari pemerintah yang berpusat pada informasi menjadi penciptaan sektor publik berbasis data, perubahan dari proses pengolahan data yang tertutup menjadi lebih terbuka, menjadi pemerintah yang terfokus pada ekspektasi warga negara, dari pemerintah sebagai penyedia layanan menjadi pemerintah sebagai wadah untuk kreasi nilai-nilai publik, dari pembuatan kebijakan dan penyampaian layanan yang reaktif menjadi proaktif.

4. Governansi Digital Dan Bahaya Hoax

Terdapat kesamaan antara masalah hoax yang belakangan ini terjadi dengan model governansi digital yaitu sama-sama menggunakan informasi dan data dalam proses pelaksanaannya. Kesamaan tersebut menjadikan model governansi digital dianggap beririsan dengan persebaran hoax yang terjadi di sebuah negara.

Informasi yang bersih dari hoax merupakan salah satu syarat agar pemerintahan di era digital bisa berjalan dengan baik. Menurut Dunleavy et.al. (2006, p. 247), governansi digital akan memberikan kebermanfaatan dalam menyelesaikan permasalahan sosial apabila publik memiliki kompetensi yang otonom dalam memperoleh informasi. Tentu saja kompetensi tersebut tidak didapatkan begitu saja. Negara perlu mendorong publik untuk mendapatkan informasi yang tepat melalui simplifikasi saluran informasi sehingga informasi tersebut mudah dicari dan mudah

didapat.

Prinsip tersebut menunjukkan bahwa keberadaan hoax di era belakangan ini mengancam keberadaan governansi digital terutama dalam kaitannya antara masyarakat dengan pemerintah. Pada konsep semula dijelaskan bahwa Governansi Digital membutuhkan masyarakat yang melek dan mudah memperoleh informasi. Konsep itu ternyata tidaklah mencukupi, karena di era Hoax seperti saat ini masyarakat sangatlah mudah memperoleh informasi tetapi bisa saja informasi yang diberikan tersebut tidak valid dan relevan dengan keadaan sebenarnya. Oleh karena itu peran pemerintah di era Governansi Digital yang sarat dengan berita palsu dan misinformasi sedikit berubah. Pemerintah tidak hanya ditekankan pada kemampuan untuk menghasilkan informasi yang mudah untuk diakses oleh masyarakat, tetapi juga harus mampu menghasilkan informasi yang bersih dari unsur-unsur berita palsu tadi. Selain itu pemerintah juga dituntut mampu untuk meluruskan berita-berita palsu yang bertebaran di Internet melalui jejaring sosial media maupun private messaging. yang dipaparkan di atas. Disarankan ditulis dalam bentuk butir-butir dan bebas dari spekulasi.

Daftar Pustaka

- Astrini, A. (2017). HOAX DAN BANALITAS KEJAHATAN. *Transformasi*, II(32), 200.
- Bungin, B. (2017). Politik Hiperreality dan Communicatioan Jammed. In *Turn Back Hoax Tantangan Literasi Media Digital*. Surabaya: Buku Litera dan Aspikom Korwil Jawa Timur.
- Dunleavy, P., Margetts, H., Tinkler, J., & Bastow, S. (2006). *Digital era governance: IT corporations, the state, and e-government*. Oxford University Press.
- Firmansyah, R. (2017). Web Klarifikasi Berita untuk Meminimalisir Penyebaran Berita Hoax. *Jurnal Informatika*, 4(2), 230–235.
- Floridi, L. (2018). Soft Ethics and the Governance of the Digital. *Philosophy and Technology*, 31(1), 1–8. <https://doi.org/10.1007/s13347-018-0303-9>
- Gumgum, G., Justito, A., & Nunik, M. (2017). Literasi Media: Cerdas Menggunakan Media Sosial Dalam Menanggulangi Berita Palsu (Hoax) Oleh Siswa Sma. *Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 35–40. <https://doi.org/1410-5675>
- Juditha, C. (2018). Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya Hoax Communication Interactivity in Social Media and Anticipation. *Jurnal Pekommas*, 3(1), 31–44. Retrieved from <https://www.neliti.com/publications/261723/hoax-communication-interactivity-in-social-media-and-anticipation-interaksi-komu>
- OECD. (2019). *Strengthening Digital Government*. <https://doi.org/10.1787/9789264307636-en>
- Sutarno. (2005). *Tanggung Jawab Perpustakaan dalam Mengembangkan Masyarakat Informasi*. Jakarta: Panta Rei.
- Zamora, D., Barahona, J. C., & Palaco, I. (2016). Case: Digital Governance Office. *Journal of Business Research*, 69(10), 4484–4488. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.03.013>

Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Teknologi Aplikasi Siskeudes untuk Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa di Kabupaten Kampar)

Amalia Rahmadani Ilham dan Adinda Qori

Pascasarjana Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau
Email: amaliaramadhani27011996@gmail.com

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan dari kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban atas keuangan desa. Pemerintahan desa menjadi fokus perhatian bagi pemerintah pusat dibuktikan dengan semakin tingginya anggaran yang disalurkan kepada pemerintah desa dengan harapan dapat membantu percepatan pembangunan nasional yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia. Anggaran yang begitu besar disalurkan melalui APBN dan APBD serta sumber pendapatan lainnya tidak terkelola dan tidak termanfaatkan dengan baik oleh beberapa desa yang ada di Kabupaten Kampar sehingga anggaran yang diberikan untuk kesejahteraan masyarakat desa menjadi kurang optimal. Ketidakmampuan pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa dengan baik menimbulkan menurunnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Di era digitalisasi ini pemerintah telah banyak melakukan inovasi kebijakan diantaranya dengan menghadirkan aplikasi pengelangan keuangan desa berbasis digital. Pada Paper ini akan dibahas mengenai Aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa sehingga terlaksananya prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan desa. Dari hasil riset yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa dengan melaksanakan pengelolaan keuangan desa menggunakan aplikasi SISKEUDES yaitu sebuah sistem berbasis aplikasi sangat membantu pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan prinsip good governance seperti pengelolaan keuangan desa menjadi lebih efektif dan efisien.

Kata Kunci : Pengelolaan Keuangan Desa, Aplikasi SISKEUDES, Good Governance

Abstract

Village financial management is a overall of the activity which includes planning, implementation, administration, reporting and accountability for village finances. Village government became the focus of attention for the central government evidenced by the higher budget disbursed to the village government with the hope of helping accelerate national development which is the ideals of the nation. Large budgets distributed to the village government through APBN and APBD and other sources of income not managed and not utilized properly by several villages in the Kampar district so that budget provided for the welfare of rural communities is less than optimal. The inability of the village government managing villages finances well lead to decreased public confidence in the village government.in this digitalization the government has done a lot of policy innovations such as village financial management application. In this paper will discuss the application of SISKEUDES to improve the quality of village financial management so that principles are implemented in village financial management. From the results of research that has been done it os obtained that by implementing management using the SISKEUDES application which is an application based system very helpful village government in managing village finances in accordance with the principles of good governance such as village financial management becomes more effective and efficient.

Keyword: Village financial management, SISKEUDES Application, Good Governan

1. Pendahuluan

Dimulai dari Era Reformasi, pemerintah di dorong untuk mempunyai kinerja yang lebih efektif dan efisien. Suatu kenyataan bahwa pemberian kewenangan atas pemerintah pusat kepada pemerintah daerah merupakan langkah awal untuk percepatan pembangunan nasional. Guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah, kini pemerintah pusat mulai memfokuskan perhatiannya kepada pemerintah desa. Selaras dengan

program pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJM Nasional 2015-2019 yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI”. Sesuai dengan undang-undang No 6 Tahun 2014 pasal 72, desa mengelola keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Transfer lainnya berupa Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota dan bantuan keuangan dari APBD Provinsi/Kabupaten/kota. Jika dilihat dalam tabel 1 pemberian dana desa kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau setiap tahun mengalami peningkatan yang cukup besar.

Tabel 1
Alokasi Dana Desa Provinsi Riau Tahun 2017-2019

Kabupaten	Jumlah Desa	2017	2018	2019
Bengkalis	136	97.980.112	116.512.391	131.071.696
Indragiri hilir	198	142.647.516	146.388.836	168.394.003
Indragiri hulu	178	128.238.676	138.806.180	160.181.885
Kampar	242	174.346.964	184.890.565	209.669.588
Kuansing	218	157.056.356	152.877.498	172.266.776
Pelalawan	104	74.925.968	89.441.056	104.309.775
Rokan hilir	159	114.550.278	125.915.910	143.289.390
Rokan hulu	139	100.141.438	119.456.777	139.861.061
Siak	122	87.893.924	96.873.113	111.240.674
Meranti	96	69.162.432	83.526.525	96.400.996

Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id

Hal ini menunjukkan bahwa desa di berikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Begitu besar peran yang diterima oleh desa, tentunya harus disertai dengan tanggungjawab yang besar pula. Dalam mengelola dana publik yang tidak sedikit jumlahnya tersebut harus dikelola dengan pengawasan dan sistem yang baik, sesuai dengan yang disampaikan oleh Hanifah dan Praptoyo (2015), penerimaan desa yang meningkat memerlukan adanya akuntansi dan manajemen keuangan yang baik bagi tiap-tiap desa. Di perlukan adanya suatu transparansi dan akuntabilitas yang merupakan suatu bentuk keterbukaan pemerintah desa agar kinerja pemerintahan desa menjadi lebih baik lagi, karena tata pemerintahan yang baik tentu merupakan dambaan bagi semua kalangan masyarakat. Prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik seperti akuntabilitas, transparansi, dan kualitas kinerja publik harus diterapkan.

Kenyataan yang terjadi terkait pengelolaan keuangan desa, secara prinsip masih banyak desa yang mengalami permasalahan terkait pengelolaan keuangan desa, seperti: Masih banyaknya desa-desa yang mengalami keterlambatan dalam menyampaikan laporan keuangan desa; pemerintah desa yang masih belum memahami bagaimana mengelola keuangan desa dengan baik dalam jumlah besar; laporan keuangan desa yang masih terpisah-pisah dan belum tersusun rapi, krisis kepercayaan masyarakat karena tidak transparan masyarakat tidak diberikan akses untuk mengetahui hal tersebut.

Dengan melihat kasus tersebut dan dengan semakin besarnya dana publik yang harus di kelola pemerintah desa, demi kesejahteraan dan percepatan pembangunan, maka sangat di butuhkan usaha keras untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya dalam mengelola keuangan desa. Pemerintah perlu melakukan sebuah inovasi atau perubahan terkait pengelolaan keuangan desa dari manual menjadi sistem pengelolaan berbasis digital. Selaras dengan pernyataan yang disampaikan oleh Gunawan, 2016 yang mengatakan bahwa dengan melibatkan penggunaan teknologi informasi dalam bidang pemerintahan maka akan

membantu meningkatkan tata kelola keuangan dan memudahkan kinerja organisasi pemerintah. Pemerintah telah melakukan upaya inovasi kebijakan dengan mengeluarkan berupa surat edaran tentang Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa Nomor 143/8350/BPD. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah menandatangani Nota kesepahaman Nomor 900/6271/5J dan MOU-16/K/D4/2015, nota kesepahaman ini merupakan kesepakatan kerjasama antara Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), bentuk kerjasama yang dimaksud telah terbangunnya sistem pengelolaan keuangan desa berbasis aplikasi yang disebut SISKEUDES dan diberlakukan untuk seluruh desa di Indonesia dengan penerapan secara bertahap.

Sebelumnya Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) ini telah diperkenalkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sejak tahun 2015 dengan nama Simda Desa, seiring berjalan waktu SIMDA berubah nama menjadi SISKEUDES fiturnya disesuaikan dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 mengenai Pengelolaan keuangan desa.

Pengembangan aplikasi sistem keuangan desa mengharapkan desa-desa di seluruh Indonesia untuk dapat menerapkan aplikasi guna mencegah kecurangna-kecurangan yang tidak diinginkan. Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa secara substansial tujuan penerapan SISKEUDES adalah untuk menciptakan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Perbedaan yang mendasar antara sistem manual dengan sistem keuangan desa yaitu jika pada sistem manual masih terpisah-pisah dalam pelaporannya, dalam satu transaksi harus membuat berbagai laporan, sangat memerlukan biaya administrasi yang cukup besar, memerlukan waktu yang agak lama dalam pengerjaannya, sedangkan untuk sistem yang baru dapat dilakukan dengan sekali kerja, dalam satu kali entry, maka data akan masuk ke berbagai laporan seperti APBDes, Laporan kekayaan desa dan lain-lain sangat praktis dan terintegrasi.

Hasil penelitian (Indriasari, 2008: Harifan, 2009: Yosefrinaldi, 2013) menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan antara pemanfaatan teknologi infomasi dengan kualitas laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan. Demikian pula penelitian Mahaputra (2014) membuktikan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah, sistem pengendalian intern, dan implementasi standar akuntansi pemerintahan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas informasi pelaporan keuangan SKPD Kabupaten Gianyar.

Namun jika dilihat dari temuan dilapangan, meskipun setelah aplikasi ini di terapkan secara bertahap oleh seluruh desa yang ada di Indonesia mulai tahun 2015, tidak sedikit pemerintah desa melakukan penyelewengan terhadap dana desa. Berdasarkan pantauan ICW (Indonesia Corruption Watch) tentang praktek korupsi penggunaan dana desa yang di tangani sejak tahun 2016 hingga 10 Agustus 2017 ditemukan 110 kasus korupsi anggaran desa dengan total kerugian yang di timbulkan Negara mencapai sekitar 30 miliar.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan pada Desa Simpang Petai, Kecamatan Rumbio Jaya, Kabupaten Kampar yaitu desa yang telah menerapkan aplikasi tersebut pada awal tahun 2016, jika dilihat dari aspek administrasi, dokumen desa sudah tersusun rapi dan sudah tersimpan dalam database SISKEUDES itu sendiri, namun alokasi dana desa masih belum tepat sasaran sehingga anggaran yang disalurkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah belum termanfaatkan dengan baik.

Dari fenomena yang ada maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan teknologi aplikasi SISKEUDES di Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di laksanakan pada desa Simpang Petai, Kecamatan Rumbio jaya, Kabupaten Kampar. Waktu penelitian dilaksanakan pada September hingga waktu yang telah ditentukan. Untuk memperoleh data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian ini, maka data yang diperoleh bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Data sekunder diperoleh dari hasil dokumentasi dan studi kepustakaan. Dalam penelitian ini terdapat 2 jenis informan, dalam penelitian ini yang dijadikan informan kunci adalah Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Sekretaris Inspektorat Kabupaten Kampar, Kepala Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya, Sekretaris Desa Simpang Petai, Bendahara Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya. Sedangkan Informan pendukung adalah masyarakat Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi secara langsung di lokasi penelitian dan melakukan wawancara terstruktur dengan pemerintah desa dan masyarakat. Kemudian melakukan dokumentasi dengan melihat atau menganalisis dokumen yang ada. Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan cara menggunakan metode deskriptif. Analisa deskriptif ini diawali dengan reduksi data, penyajian data, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan. (Sugiyono, 2013).

Hasil dan Pembahasan

Diterapkan pada awal tahun 2016 proses penggunaan aplikasi sistem keuangan Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya sudah dilaksanakan secara terstruktur dan sesuai prosedur. Semua laporan keuangan yang sudah selesai akan melewati proses penginputan kedalam aplikasi sistem keuangan desa. Penginputan dilakukan sekali sesuai dengan transaksi-transaksi yang ada dan akan menghasilkan output berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan perundang-undangan. Dalam proses pelaksanaannya ada 4 tahapan yaitu:

- d) Tahap Perencanaan, pada tahap ini pemerintah desa harus menetapkan RAB (Rancangan Anggaran Biaya), RAB adalah mengalokasikan biaya yang diperlukan untuk pembangunan desa, serta biaya lain yang berhubungan dengan proses keuangan. RAB dibuat oleh Kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- e) Tahap pelaksanaan, tahap implementasi dari anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) meliputi seluruh rangkaian kegiatan pelaksanaan. Dalam tahap ini semua yang menjadi dasar terjadinya proses pengadaan barang dan jasa, penyusunan buku kas dan lain-lain.
- f) Tahap penatausahaan, merupakan proses pencatatan transaksi yang terjadi dalam satu tahun anggaran, kegiatan penatausahaan mempunyai fungsi untuk menatausahakan proses yang telah terjadi dari tahap pelaksanaan dan perencanaan APBDes.
- g) Tahap pelaporan, tahap untuk menyampaikan kegiatan yang telah dilakukan, hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama

periode tertentu.

Setelah semua proses telah dilakukan secara bertahap dan telah diperiksa, selanjutnya yang akan dilakukan adalah proses penginputan ke dalam aplikasi sistem keuangan desa. Laporan-laporan yang akan di input kedalam sistem sebelumnya akan dibuat oleh pegawai desa yang bertugas. Setelah laporan-laporan selesai dibuat selanjutnya akan diberikan kepada kepala desa untuk diperiksa dan mendapatkan persetujuan untuk di input kedalam sistem. Semua data yang akan diinput akan disesuaikan dengan sistem, data yang sudah di input ke dalam sistem sudah tidak bisa di ubah lagi, maka dari itu proses penginputan harus dilakukan dengan baik karena jika terdapat data yang salah atau tidak sesuai akan menjadi hambatan dikemudian hari terhadap proses pelaporan keuangan.

Untuk menganalisis bagaimana pengelolaan keuangan desa setelah menerapkan aplikasi SISKEUDES dapat dilihat dari indikator yang dijelaskan di dalam Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang menyatakan bahwa SISKEUDES ini dihadirkan sebagai alat untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang memenuhi empat azas utama yaitu: tertib dan disiplin anggaran, transparan, partisipatif dan akuntabel, maka dapat disimpulkan bahwa tata kelola keuangan desa dengan menggunakan Aplikasi SISKEUDES di Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar menjadi lebih baik karena telah memenuhi prinsip tata pemerintahan yang baik. Berikut dapat dilihat berdasarkan indikator berikut:

Tertib dan disiplin anggaran

Keuangan desa yang tertib dan disiplin anggaran berarti seluruh anggaran desa harus dilaksanakan secara konsisten, dan dilakukan pencatatan atas penggunaannya yang sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa. Perwujudannya harus tepat waktu, tepat jumlah, taat terhadap hukum dan aturan, sesuai dengan prosedur yang ada (Habib Soleh, 2015). Pengelolaan keuangan di Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar setelah menerapkan aplikasi SISKEUDES dalam pengelolaan keuangan desa sudah lebih tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan desa. Transaksi keuangan yang dilakukan sudah sesuai dengan prosedur akuntansi yang disediakan dari aplikasi SISKEUDES, belanja dan pendapatan desa tersaji dalam satu kesatuan dokumen yang ada, sehingga dokumen anggaran desa lebih tersusun rapi dan lebih terperinci, pengeluaran atau belanja desa disajikan dengan per sumber dana. Pemerintah desa tidak perlu khawatir apabila data-data desa akan hilang, karena semua dokumen tersebut tersimpan pada database aplikasi. Dinas PMD Kabupaten Kampar juga membenarkan bahwa Desa Simpang Petai yang dimaksud sudah menyampaikan laporan keuangan desa dengan baik dan tidak mengalami keterlambatan sejauh ini, terkadang terlebih dahulu sebelum jatuh tempo Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya sudah menyampaikan. Dapat dikatakan bahwa pengelolaan keuangan desa dengan menerapkan SISKEUDES sudah memenuhi azas tertib dan disiplin anggaran dengan baik.

Transparansi

Pengelolaan keuangan desa membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan jujur dan tidak diskriminatif dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap hak pribadi dan golongan ((Habib Soleh, 2015). Dalam kegiatan pengelolaan keuangan desa sedikit sudah membantu dalam memberikan akses kepada masyarakat untuk bisa mengetahui APBDes setiap tahunnya, karena memang diwajibkan untuk menampilkan baliho APBDes di lingkungan desa. Namun,

hanya di depan kantor desa saja, sehingga menurut masyarakat yang di wawancarai menyatakan bahwa masih terbatas akses informasi yang diberikan kepada masyarakat, seharusnya baliho tersebut diletakkan pada tempat yang dirasa dapat diketahui oleh masyarakat luas, pada saat Musrenbangdes aspirasi masyarakat pada saat dilapangan tidak seluruhnya dilaksanakan sehingga muncul kecemburuan sosial di masyarakat, pemerintah desa juga tidak menyediakan layanan untuk informasi seputar perkembangan desa serta keuangan desa, sehingga prinsip transparansi dirasa masih belum optimal. Di samping itu meskipun SISKEUDES sudah di terapkan namun masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui mengenai keuangan desa. Dapat dikatakan bahwa pengelolaan keuangan desa dengan menerapkan SISKEUDES belum memenuhi azas transparansi secara optimal.

Partisipatif

Setiap tindakan yang dilakukan harus diikutsertakan masyarakat desa baik secara langsung maupun tidak langsung atau melalui BPD. Untuk proses perencanaan pada tahap pertama kegiatan pengelolaan keuangan desa, masyarakat memang dilibatkan dengan menyebarkan undangan untuk menghadiri Musyawarah rencana pembangunan desa, seperti pemangku adat, Kadus, dan perwakilan masyarakat lainnya yang dirasa dapat sebagai penyambung aspirasi masyarakat, namun berdasarkan wawancara beberapa masyarakat mengaku bahwa setiap Musrenbangdes dilakukan yang diikut sertakan adalah mereka yang berada dilingkungan dekatnya saja, sehingga semua kebutuhan masyarakat diberbagai tempat tidak tersampaikan dengan baik. Contohnya pembangunan semenisasi hanya untuk menuju rumah Kepala dusun Dusun II Pasir Jambu. Dapat dikatakan bahwa pengelolaan keuangan desa meskipun sudah menerapkan SISKEUDES belum memenuhi azas partisipatif dengan optimal.

Akuntabilitas

Setiap tindakan ataupun kinerja pemerintah dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dan pihak yang memiliki hak untuk meminta keterangan, mulai dari proses perencanaan hingga pertanggung jawaban, baik bertanggung jawab secara administrasi maupun bertanggung jawab secara moral (Habib, Soleh 2015). Kepala Desa dituntut untuk mempertanggung jawabkan dan melaporkan pelaksanaan APBDes secara tertib, kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintahan di atasnya. Pengelolaan keuangan desa yang dimulai dari perencanaan hingga pertanggung jawaban, sudah dilakukan dengan pertanggung jawaban administrasi yang baik, sebelumnya masih terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan desa, namun sekarang dengan sudah adanya sistem berbasis aplikasi sudah memudahkan pemerintah desa dalam menyampaikan laporan keuangan desa. Namun apabila dilihat pada aspek pertanggungjawaban moral, berdasarkan hasil penelitian dilapangan terlihat bahwa masih banyak pembangunan yang belum selesai dilaksanakan.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Hadirnya SISKEUDES di Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar secara substansial membawa perubahan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan beberapa azas pengelolaan keuangan desa

tersebut, aspek Tertib dan Disiplin anggaran sudah terpenuhi dengan baik sehubungan penerapan SISKEUDES. Kemudian dilihat dari aspek Transparansi, meskipun SISKEUDES sudah diterapkan, namun azas transparansi belum secara optimal dapat terpenuhi. Kemudian dilihat dari azas Akuntabel yaitu bertanggungjawab secara administrasi dan moral, dapat di katakan bahwa dengan sudah di terapkannya aplikasi SISKEUDES pertanggungjawaban secara administrasi sudah terpenuhi dengan baik, namun pertanggung jawaban secara moral masih belum terpenuhi dengan optimal. Kemudian apabila dilihat dari aspek Partisipatif, dari hasil penelitian dapat dikatakan belum terpenuhi dengan optimal, karena setelah di terapkan SISKEUDES ini pengelolaan keuangan desa masih belum memberikan akses informasi kepada masyarakat untuk lebih mengetahui mengenai keuangan desa, sehingga meskipun desa telah menggunakan SISKEUDES namun masyarakat masih saja tidak mengetahui bagaimana keuangan desanya.

Kendala terhadap penerapan aplikasi sistem keuangan desa yaitu sering terjadi error saat proses penginputan kendala jaringan dan kesalahan teknis lainnya; kurangnya koordinasi antara pemerintah desa, pendamping desa, PMD Kabupaten dan pihak pengawasan seperti inspektorat; kurangnya sosialisasi penggunaan aplikasi SISKEUDES itu sendiri. Kesiapan dari Sumber Daya Manusia di Desa.

Saran

Diharapkan pemerintah desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya untuk lebih semangat lagi dalam belajar memahami penggunaan aplikasi SISKEUDES; Meningkatkan dan mempertahankan kualitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan desa, sekiranya bagi pegawai yang lainnya juga dituntut untuk memahami proses kegiatan pengelolaan keuangan desa, meskipun pada prinsipnya nanti yang bertugas menginput ke sistem bukan mereka; Dituntut kerjasama yang baik antar intra organisasi; Terbentuk koordinasi antara pemerintah desa, pendamping desa, pihak PMD kabupaten dan inspektorat sehingga penyelenggaraan pemerintahan desa menjadi lebih optimal; Menganggarkan sebagian APBD untuk mengadakan sosialisasi penggunaan aplikasi SISKEUDES setidaknya lebih dari sekali pelaksanaan.

Daftar Pustaka

- Gusti Ayu Trisha Sulina. 2017. Peranan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi Kasus di desa Kaba-kaba, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan). *Jurnal Akuntansi Program S1 Vol 8 No 2*.
- Muhsin Abdullah. 2019. Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Desa (SISKEUDES) Terhadap Kinerja Kepala Desa (Studi Kasus Desa Tokaka, Kecamatan Gane Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan). *Indonesian Journal on Information System Vol 4 No 1*.
- Aziza Novirania. 2018. Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Bogorejo, Kecamatan Gedong, Tataan, Kabupaten Pesawaran. *Skripsi Mahasiswi Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung*.
- Fajar Eko Agung Prakoso, Djoko Suyono. 2018. Implementasi program sistem keuangan desa (SISKEUDES) dalam pengelolaan keuangan desa di desa Slawi Kulon Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal Tahun 2017. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Panca sakti Vol 1 No 1*.
- Jehan M. Mahalika, Herman Karamoy. 2018. Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) pada Organisasi Pemerintahan Desa (Studi Kasus di Desa Suwaan

- Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara). *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern Universitas Sam Ratulangi* 13(4).
- Iman Nurhakim. Ivan Yudianto. 2018. Implementation of Village Fund Management. *Journal of Accounting Auditing and Business Padjajaran University* Vol 1 No 2.
- Yulianti. Dyah N. A Janie. 2019. Village Financial System: How Do the Village Government Officials Understand the System. *International Journal of Human Resources Studies* Vol 9 No 1.